



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEKOLONISASI PERKEBUNAN DI JEMBER
TAHUN 1930an – 1960an**

TESIS

TRI CHANDRA APRIANTO

NPM. 0906655326

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEKOLONISASI PERKEBUNAN DI JEMBER
TAHUN 1930an – 1960an**

TESIS

TRI CHANDRA APRIANTO

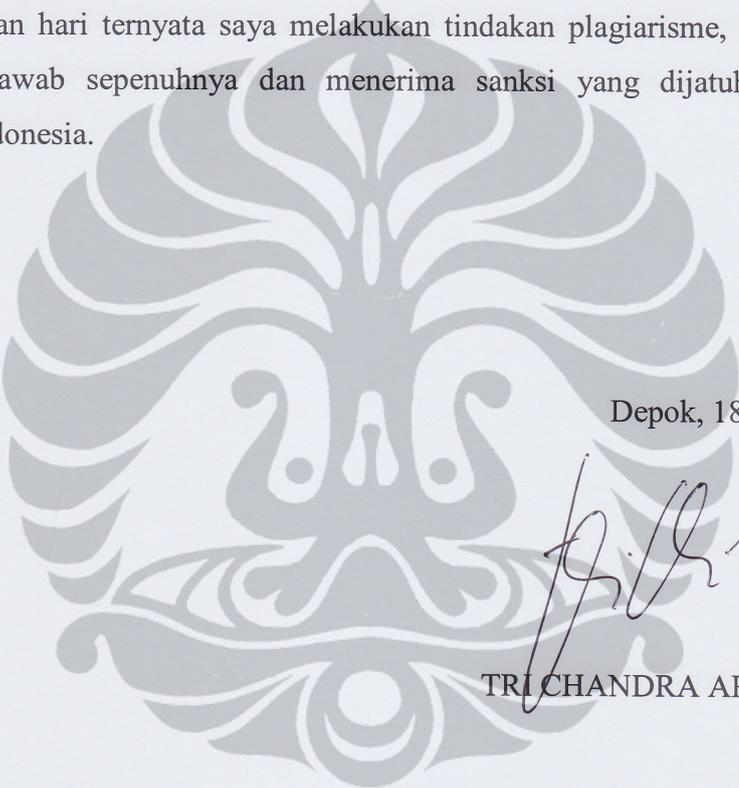
NPM. 0906655326

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.



Depok, 18 Juli 2011


TRICHANDRA APRIANTO

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tri Chandra Aprianto

NPM : 0906655326

Tanda Tangan :



Tanggal : 18 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Tri Chandra Aprianto

NPM : 0906655326

Program Studi : Ilmu Sejarah

Judul : Dekolonisasi Perkebunan Di Jember, Tahun 1930an-1960an.

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian prasyarat diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Priyanto Wibowo

()

Penguji : Prof Dr. Susanto Zuhdi

()

Penguji : Dr. Bondan Kanumoyoso

()

Panitera : Tri Wahyuning M. Irsyam, M.Si

()

Ditetapkan di : Depok

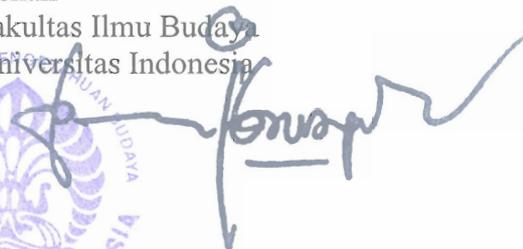
Tanggal : 18 Juli 2011

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta
196510231990031002

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, hanya itu kata yang dapat mewakili ekspresi saya atas selesainya tesis ini. Tesis ini bukan berangkat dari nol. Tesis ini merupakan *rewrite* dari hasil penelitian 2003-2005, yang merupakan program *Indonesia Across Orders, The Reorganisation of Indonesian Society*, kerjasama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan *Nederlands Instituut voor Oorlogdocumentatie* (NIOD) Belanda. Proses *rewrite* ini dikarenakan ditemukan banyak dokumen baru, termasuk foto-foto baru dan hasil wawancara baru. Untuk itu terima kasih pertama-tama saya haturkan untuk kedua lembaga tersebut.

Proses kerja *rewrite* ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Oleh karena itu banyak pihak yang membantu penulisan tesis ini. Melalui beberapa tahap perencanaan, mendiskusikan dengan beberapa dosen: Dr. Priyanto Wibowo yang kemudian bersedia menjadi dosen pembimbing tesis, Prof Susanto Zuhdi, Mona Lohanda M.Phil, Tri Wahyuning Mundaryanti M.Si., Wardiningsih, PhD, Dr. Bondan Kanumoyoso, Dr. Masyhuri dan Sri Ayu Wulansari, M.Si. Diskusi tidak langsung juga terjadi dengan Prof Dr. Maswadi Rauf, Dr. Robert Lawang, Dr Suharto, Dr Saleh A Djamhari dan Dr. Muhammad Iskandar. Diskusi langsung dan tidak langsung dengan mereka mampu memberi pengayaan atas perspektif saya mengenai keilmuan sejarah.

Selain itu saya juga berdiskusi dengan beberapa senior sejarawan dan ilmuwan sosial, seperti Dr. Nawiyanto, Muhammad Fauzi, Dr. Noer Fauzi, Dr. Suraya Afif, dan Muhammad Shohibuddin. Masukan berharga dari mereka sangat menentukan kerja tesis ini selanjutnya. Secara khusus saya haturkan terima kasih saya kepada Dr. Baskara T Wardaya, SJ yang telah “meluruskan” pikiran saya dalam menyusun kerangka tesis ini. Tahap yang juga menyita pikiran adalah membaca ulang dan kompilasi data lama dan baru serta atas masukan dari berbagai dosen dan senior di atas yang kemudian dilanjutkan dengan proses bimbingan. Mereka semua istimewa telah meluangkan waktunya untuk saya.

Selain mereka, saya juga menerima kebaikan dari: Eva Riana, Sri Sesanti Mulyaningrum, Happy Emerald, Setyadi Sulaiman, Amin Rahayu, Yulyanah,

Sugih Biantoro dan Fitri Ratna Irmalasari, Yulyanah, Belajar bersama mereka di kelas sangatlah menggairahkan.

Kepada para *petani dan buruh tani tua* (baik yang mau disebut namanya maupun tidak) yang dengan tulus ikhlas menghadapi pertanyaan-pertanyaan saya yang menyita “jam kerja” di sawah dan ladang. Ternyata, para *petani dan buruh tani tua* ini memiliki kepekaan sosial dan moral perjuangan yang luar biasa (walau itu harus terpendam oleh kekerasan rezim politik Orde Baru); pelajaran yang saya peroleh dari sikap tanggap dalam tidak saja dalam hubungan antar pribadi, tetapi juga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah menantang kepribadian “anak sekolahan” saya. Saya sangat berharap percikan pelajaran itu dapat terlihat dalam tesis ini. Semoga!

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada program Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS) yang telah membantu kelancaran pendidikan selama 12 bulan. Namun, masa studi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan finansial dari Mas Henry Hadi dan Mas Adik Dwi Putranto (Surabaya) dan Mas Bambang Joedopramono (Jakarta). Tentu saja tidak ada kata lain, selain terima kasih untuk mereka. Terima kasih juga kepada keluarga Mas Sudarman dan Mbak Ana Susilowati yang telah mendukung saya menempuh studi lanjutan ini. Dukungan penuh juga datang dari senior di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Jember, tanpa terkecuali.

Secara khusus, kepada Ir. H Bondan Gunawan Sastrosudarmo tidak ada kata yang pantas yang dapat mewakili perasaan saya, selain sungkem *ta'dzim*. Juga untuk Alexander Spinoza dan kawan-kawan komunitas kajian pemikiran dan lakuna guru bangsa, kalian sangat spesial karena telah mendasari tesis saya.

Papa Heru Sujono dan Mama Rudi Windayanti doa dan restu yang tidak putus selalu ananda harapkan. Terakhir kepada Nursi Nurokhani: Kaulah segalanya.

Depok, 2011

Tri Chandra Aprianto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Chandra Aprianto
NPM : 0906655326
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Budaya
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Rights)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dekolonisasi Perkebunan di Jember, Tahun 1930an-1960an

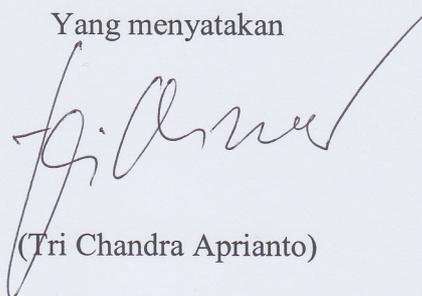
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Tanggal: 18 Juli 2011

Yang menyatakan



(Tri Chandra Aprianto)

Nama : **Tri Chandra Aprianto**
Program Studi : **Ilmu Sejarah**
Judul : **Dekolonisasi Perkebunan di Jember, Tahun 1930an-1960an**

Tesis ini menjelaskan sejarah (*history explanation*) bagaimana dinamika masyarakat perkebunan sepanjang periode 1930an-1960an di wilayah Jember. Jember merupakan salah satu kota tujuan dari penetrasi kapitalisme perkebunan pada era kolonial. Selama rentang waktu tersebut masyarakat perkebunan melintasi dalam tiga zaman kekuasaan, yang didalamnya diwarnai perebutan klaim kuasa atas lahan perkebunan. Perkembangan masyarakat dan hadirnya perkebunan partikelir telah mendorong lahirnya masyarakat baru yakni masyarakat perkebunan. Tesis ini memanfaatkan sumber tulisan dan lisan untuk melihat dinamika sosial masyarakat perkebunan sepanjang periode 1930an-1960an. Sejarah masyarakat perkebunan menjadi fokus uraian tesis ini.

Kata Kunci: masyarakat perkebunan, perkebunan partikelir, lahan perkebunan, indonesianisasi, nasionalisasi, ambilalih, klaim hak atas tanah, Jember.

Name : **Tri Chandra Aprianto**
Study Programme : **Ilmu Sejarah**
Title : **Decolonization of The Plantation at Jember, 1930s-1960s**

This thesis describes the history (*history explanation*) how the dynamics of plantation society throughout the 1930s-1960s period in the Jember area. Jember is one of the destinations of the capitalism penetration the colonial plantation era. During the period the plantation society across the three of order which colored the seizure of land claim power over the estate. Convergence between the society and private plantation estates have raised a new society that is plantation society. This thesis mainly using the written and oral sources to find out the social dynamics of plantation society throughout the period 1930s-1960s. History of the plantation society became the focus of this thesis description.

Keywords: public estates, private estates, plantations, Indonesianization, nationalization, seized, claim land rights, Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	Iii
HALAMAN PENGESAHAN	Iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	V
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Vi
ABSTRAK.....	Vii
DAFTAR ISI.....	Viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumsan Masalah	14
1.3.Tujuan Penelitian	17
1.4.Kerangka Teori	20
1.5.Tinjauan Atas Studi Terdahulu	25
1.6.Metode Penelitian	26
1.7.Sistematika Penulisan	29
2. MASYARAKAT PERKEBUNAN	31
2.1. Usaha Tanaman Perkebunan.....	31
2.2. Hadirnya Masyarakat Perkebunan	38
2.3. Lahirnya Kota Perkebunan	51
2.4. “Komunikasi” dengan Pasar Internasional.....	55
3. MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN MUNDURNYA USAHA PERKEBUNAN.....	61
3.1. Masyarakat Perkebunan Tanpa Tuan Kebun	61
3.2. Perkebunan Menjadi Ranah Perebutan	65
3.3. Masyarakat Perkebunan, Konflik dan Dinamika Politik	76
4. MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN NASIONALISASI.....	93
4.1. Upaya Indonesianisasi.....	93
4.2. Pengambilalihan Sebagai Wujud Kedaulatan.....	96
4.3. Pasca Pengambilalihan.....	108
5. PENUTUP.....	118
DAFTAR PUSTAKA	123
DAFTAR LAMPIRAN	140

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jember sebagai salah satu wilayah tujuan dari praktek penetrasi sistem kapitalisme desenia pertengahan abad ke XIX sampai awal abad XX.¹ Praktek penetrasi tersebut maujud dalam bentuk investasi guna memperbesar budidaya tanaman perkebunan. Hingga akhirnya Jember dikenal sebagai salah satu kota perkebunan Indonesia.² Kehadiran perkebunan partikelir di Jember pada pertengahan abad ke XIX berdasar atas kebijakan ekonomi kolonial *the system of enterprise*.³

Pada awalnya, Jember merupakan satu wilayah kecil yang sepi dan terisolir. Terdapat beberapa etnis yang tinggal di Jember dari awalnya, yakni: Madura, Jawa dan Osing (Banyuwangi).⁴ Pada era kolonial, Jember merupakan salah satu distrik dari *regentschap* Bondowoso. Akan tetapi dalam waktu yang singkat Jember menjadi sebuah kabupaten yang paling pesat perkembangannya dibanding berbagai kabupaten di Karesidenan Besuki (Pancarukan, Bondowoso, dan Banyuwangi). Padahal secara keseluruhan keberadaan Jember terletak di pesisir selatan pantai Jawa, termasuk wilayah pedalaman.

¹ Untuk wilayah Jember dapat dilihat pada lampiran peta No. 1.

² Untuk perkebunan di Jember dapat dilihat pada lampiran peta No. 2.

³ Sistem ini sebagai "kelanjutan" dari sistem tanam paksa yang dianggap membawa kemelaratan masyarakat di sekitar perkebunan. Pemrakarsa sistem baru ini ialah kelompok liberal yang menentang pelaksanaan sistem tanam paksa. Sistem baru ini memungkinkan tumbuhnya perkebunan-perkebunan swasta, karena pemerintah Hindia Belanda memberikan dukungan dan fasilitas yang besar pada pihak swasta. Dengan tujuan dan harapan agar hasil tanaman komoditi ekspor dapat memberikan keuntungan atau devisa pada pemerintah. Untuk lebih detailnya lihat Robert van Niel. *Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya*. dalam Anne Both (ed.). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.

⁴ Komunitas etnis Jawa ini salah satunya terdapat di Balater, Renes, Balung, Basini, Sadeng, Paseban dan Cakru di wilayah Jember bagian selatan. Mengenai nama-nama daerah tersebut dapat dilihat pada Bambang Pramudito. *Kitab Negara Kartagama: Sejarah Tata Pemerintahan Dan Peradilan Kraton Majapahit*. Yogyakarta, Gelombang Pasang, 2006. Sementara komunitas etnis Madura terletak di wilayah bagian utara, sedangkan untuk komunitas Osing terletak di wilayah bagian timur karena merupakan bagian dari Kerajaan Blambangan.

Berbagai etnis tersebut terlibat dalam dialektika budaya yang kemudian melahirkan sintesa budaya baru yang kemudian lebih dikenal dengan istilah pendalungan. Sebuah budaya yang lahir dari interaksi terus menerus atas etnis yang hadir di Jember. Dari hasil dialektika tersebut melahirkan kreasi bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing etnis yang ada di Jember. Begitu juga dengan kesenian yang masing-masing etnis bisa memainkan kesenian dari etnis lain yang rasanya sudah menjadi bagian dari etnis tersebut, bahkan sudah terdapat perpaduan.⁵

Dalam perkembangannya masyarakat dari etnis Madura lebih gencar bermigrasi ke Jember karena faktor alam. Masyarakat dari etnis Madura datang ke Jember guna mencari lahan subur dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Adapun jalur migrasinya datang dari utara lewat Panarukan ke arah selatan melalui Bondowoso menuju Jember. Sehingga wilayah distrik Jember saat itu sudah didominasi oleh komunitas Madura. Gelombang migrasi dari Pulau Madura semakin besar manakala pengusaha perkebunan partikelir membutuhkan perluasan lahan perkebunan. Dengan demikian masyarakat migran dari Pulau Madura di Jember mulai mengundang saudara-saudara mereka dari Pulau Madura untuk terlibat membuka hutan guna lahan perkebunan. Mereka adalah aktor utama yang kemudian membentuk masyarakat perkebunan di Jember. Masyarakat etnis Madura inilah yang kemudian bersama-sama dengan para pengusaha bekerja sama memperluas usaha pembudidayaan tanaman perkebunan, seperti tembakau, tebu, kopi, karet, kakao dan lain-lain.

Demikianlah sejak saat itu Jember menjadi wilayah yang warna dominannya adalah perkebunan partikelir, khususnya budidaya tembakau. Menurut Arifin⁶ terdapat empat perusahaan partikelir yang dengan “berani” melakukan investasi modalnya guna pembudidayaan tembakau. Pertama, *De Landbouw Maatscappij Soekowono* milik Fransen van de Putte. Kedua, *De Landbouw Maatscappij Jelbuk* milik Du Ry van Best Holle dan Geertsma. Ketiga,

⁵ Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Jember. *Geografi Bahasa Jawa di Kabupaten Jember*. Tidak diterbitkan, 1981, hlm 18. Untuk foto kesenian yang hadir di Jember dapat dilihat pada lampiran foto No. 1 dan No. 2.

⁶ Edy Burhan Arifin. “*Emas Hijau*” di *Jember: Asal-usul, Pertumbuhan dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980*. (Tidak diterbitkan), Tesis, UGM, 1989, hlm 56-58.

De Landbouw Maatscappij Soekokerto Ajong milik keluarga Baud. Keempat, *De Landbouw Maatscappij Oud Djember* milik Geogre Birnie. Organisasi dagang *NV Landbouw Maatscappij Oud Djember* (NV. LMOD) yang dirintis oleh George Birnie, Mr. C. Sandenberg Matthiesen dan van Gennep pada 21 Oktober 1859. Organisasi dagang ini awalnya hanya melakukan pembudidayaan tembakau, namun dalam perkembangannya membudidayakan perkebunan aneka tanaman seperti kopi, kakao, karet dan sebagainya.⁷ Upaya yang dilakukan oleh berbagai organisasi dagang di atas kemudian ”merangsang” kaum *ondernemer* lainnya guna menanamkan modalnya di wilayah ini.⁸ Kemudian hadirilah beberapa perkebunan partikelir di Jember, seperti *Besoeki Tabac Maatscappij*, *Djelboek Tabac Maatscappij* dan perusahaan perkebunan partikelir lainnya.

Lambat laun keberadaan perkebunan partikelir tersebut mendorong berlangsungnya transformasi sosial-ekonomi pada masyarakat Jember. Dalam waktu singkat pula Jember yang semula hanya sebagai salah satu *onder distrik* dari Bondowoso, pada tahun 1883 statusnya menjadi kota. Sejak adanya perkebunan arus migrasi ke wilayah ini semakin pesat, tidak saja datang dari Pulau Madura sebagaimana telah disebutkan di atas, tapi juga dari wilayah Jawa Timur bagian barat, wilayah mataraman, termasuk daerah *vorstenlanden*.

Perkembangan masyarakat perkebunan semakin menemukan bentuknya. Sebagian masyarakat yang bekerja di wilayah perkebunan secara langsung, menjadi buruhnya. Sebagian masyarakat lagi yang bekerja hanya paruh waktu pada bulan-bulan tertentu untuk pengelolaan perkebunan tembakau. Begitu juga dengan perkebunan tebu yang membutuhkan tenaga yang besar pada saat pengelolaan tebu hingga menuju pabrik gula. Selain itu terdapat masyarakat perkebunan yang tidak terikat dengan perkebunan, namun mereka mengelola lahannya sendiri dengan tanaman perkebunan seperti tembakau dan tebu. Tanaman tersebut hasilnya tidak saja untuk kebutuhan pasar domestik, tapi juga

⁷ Brosur. *Een Jubileum in de Tabak NV LMOD*. (tidak diterbitkan) 1909.

⁸ *Ondernemer* adalah pengusaha partikelir yang menjalankan usahanya melalui dengan beberapa tahap, mulai menyewa tanah milik penduduk dan mencari tenaga kerja, kemudian memberikan bibit dan peralatannya, dan seterusnya. Mengenai istilah *ondernemer* dapat dilihat pada majalah *De Indische Gids*, Jrg. 16 tahun 1894 hlm. 266-274.

dijual ke pengusaha. Biasanya mereka menjual ke pihak pengusaha perkebunan ini disebut dengan istilah *opkooper*.⁹

Dengan demikian masyarakat perkebunan Jember adalah bukan semata-mata kumpulan dari berbagai etnis awal yang masing-masing membentuk kebudayaan baru yang itu merupakan bentukan dari hadirnya perkebunan, tapi juga masyarakat yang hadir sebagai tenaga kerja di perkebunan. Ikatan sosial antar masyarakatnya pun baru yakni berbentuk hubungan kerja. Karena yang menjadi ukuran kemudian adalah produktifitas kerja dari proses hubungan kerja itu sendiri. Ikatan solidaritas pada masa awal perkebunan yang berkembang berbeda dengan solidaritas asal masing-masing, sementara yang baru belum maujud ikatannya. Mereka hadir ke wilayah baru yang pada level tertentu telah dipisah dari kehidupan sosialnya yang itu menyebabkan krisis baik tingkat individu maupun kelompok. Terlebih lagi untuk perkebunan selain tembakau dan tebu, yang keberadaannya di daerah pegunungan dan terpencil.¹⁰

Sebagaimana disebutkan di atas, banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan para pengusaha bekerja sama dengan masyarakat dari etnis Madura guna mendatangkan saudara mereka. Tentu saja hal itu belum cukup, oleh sebab itu pihak pengusaha memanfaatkan pola hubungan sosial yang berbasis patrimonial. Para pengusaha tersebut memanfaatkan tokoh-tokoh dari etnis Madura yang disegani guna melakukan mobilisasi tenaga kerja dari daerah asal mereka. Dengan demikian terdapat struktur sosial baru yang berbeda dengan daerah asal. Terdapat dua lapisan sosial besar antara pemilik modal dengan masyarakat perkebunan sebagai tenaga kerja. Untuk lapisan pemodal memiliki tingkat kesejahteraan dan jaminan sosial jauh lebih tinggi dari pada lapisan kedua yaitu “bumi putera” yang tanpa kesejahteraan dan jaminan sosial.¹¹ Selain dua lapisan besar tersebut, di tengah-tengahnya terdapat satu kelompok pedagang perantara yang disebut

⁹ *Opkooper* adalah pengusaha yang kerjanya tanpa melalui proses proses pembudidayaan sebagaimana yang dilakukan oleh *ondernemer*. Pengusaha ini hanya melakukan pembelian tanaman perkebunan secara bebas yang ditanam masyarakat. Mereka hanya berbekal menyewa sebidang tanah untuk membuat gudang penyimpanan sebelum dibawa pasar internasional. Lihat pada majalah *De Indische Gids*, Jrg. 16 tahun 1894 hlm. 266-274.

¹⁰ Bandingkan dengan Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, hlm 143.

¹¹ R. Broersma. *Besoeki Een Gewest in Opkomst*. Amsterdam: Scheltema & Holkemas Boekhandel, 1912, hlm 23.

borgen atau dalam istilah masyarakat Madura disebut *bandols*.¹² Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang keturunan Cina yang telah bermukim di daerah distrik Jember. Di mana mereka pada umumnya selain membuka usaha perdagangan, terdapat pula yang mejadi pedagang perantara yang bekerja sama dengan pengusaha Belanda.¹³

Aktifitas masyarakat perkebunan semakin meningkat lagi manakala pemerintah membangun infrastuktur yang lebih memadai guna percepatan industrialisasi pertanian seperti jembatan, jalan dan yang terpenting adalah dibukanya jalur kereta api.¹⁴ Dengan adanya jalur kereta api tersebut maka Jember sebagai wilayah pedalaman mulai terhubung dengan pelabuhan Panarukan.¹⁵ Melalui jalur kereta api berbagai komoditas pertanian seperti tembakau, kakao, kopi, gula (tebu), dan karet diantarkan ke wilayah seberang lautan Amsterdam dan Rotterdam ataupun ke pasar internasional di Eropa lainnya. Sejak tahun 1920 pengiriman gula ke pasar internasional juga melalui rel tersebut. Akan tetapi sebelum dikirim ke berbagai pasar internasional, sebelumnya berbagai barang komoditi perkebunan tersebut disimpan terlebih dulu di gudang di Pelabuhan Panarukan Pada dasarnya rel itu juga merupakan inisiatif dari George Bernie, pemilik NV LMOD. Pembangunan rel yang menghubungkan Pelabuhan Panarukan dengan jalur kereta api Jember-Bondowoso-Panarukan (150 km) dibuka pada tanggal 1 Oktober 1897.¹⁶

Pada tahun 1929 merupakan tahun penting bagi masyarakat perkebunan karena berlangsung krisis kapitalisme global atau yang lebih dikenal dengan

¹² Huub de Jonge. *Juragan en Bandols; Tussenhandelaren op Het Einland Madura*. Nijmegens: Disertasi, 1984, hlm 194. Dengan adanya pedagang perantara itu artinya berlangsung pula sistem kolonialisasi di bidang budaya. Pada titik ini lahir struktur sosial di massa rakyat tani yang itu berperilaku seperti perilaku kolonial. Lihat pada Albert Memmi. *The Colonizer And The Colonized*. Boston: Beacon Press, 1991.

¹³ Lihat ANRI Besoeki 9.20. *Algemeen Verslag van de Residen Besoeki*. 1889.

¹⁴ Bandingkan dengan Kartodirdjo dan Suryo. *Op. cit.* hlm 81.

¹⁵ Pada akhirnya berlangsunglah “perkawinan” antara wilayah pedalaman dengan wilayah seberang lautan, dimana kota pelabuhan sebagai perantaranya, menjadi semakin tak terbantahkan. Persoalan pembagian fungsi pelabuhan dapat dilihat dalam tulisan Leong Sau Heng, *Collecting Centres, Feeder Points and Enterpots in the Malay Peninsula 1000 BC – AD 1400*. Singapore University Press, National University of Singapore, 1990.

¹⁶ Ini merupakan kelanjutan dari proses pembangunan rel kereta api di Jawa Timur. Diawali pembangunan rel Surabaya-Pasuruan yang sebagai penghasil Gula (16 Mei 1878). Selanjutnya diperpanjang dari Pasuruan-Probolinggo tahun 1884, hingga akhirnya mencapai Klakah (1895).

istilah zaman malaise (depresi Besar) di seluruh dunia. Depresi ini menghancurkan ekonomi baik negara industri maupun negara berkembang. Volume perdagangan internasional berkurang drastis. Tentunya krisis ini juga berdampak pada perkebunan di Jember. Untuk perkebunan tembakau Jember masih mampu mengekspor sebanyak 302.900 bal pada tahun 1931. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan hanya mampu mengekspor sebanyak 138.139 bal tembakau. Untuk tahun-tahun berikutnya sudah harus menghentikan pengiriman.¹⁷

Beberapa perkebunan yang harus gulung tikar, seperti Perusahaan Perkebunan Tembakau Besukie di distrik Rawa Tamtu dan Jubung serta Perusahaan Tembakau Kontjir. Sementara lahan-lahannya tidak diurus dan ditelantarkan begitu saja. Lahan-lahan tersebut kemudian digarap oleh masyarakat perkebunan guna pemenuhan kebutuhan subsistensi. Perusahaan Tembakau Sumbersari memilih mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada masyarakat perkebunan. Hal ini dikarenakan pada saat membuka hutan dulu terdapat kesepakatan sistem bagi hasil antara tuan kebun yang memiliki hak *erfpacht* dengan para tenaga kerja. Artinya perusahaan tersebut tidak akan melanjutkan proses budidaya di sektor perkebunan. Aktifitas masyarakat perkebunan pada tahun-tahun ini tidak lagi menggarap tanaman perkebunan, tapi lebih memprioritaskan tanaman pangan. Sementara itu, perkebunan *De Firma Frasen Eaton* di distrik Ambulu mengurangi jumlah produksinya dan membatasi pembelian dari masyarakat.¹⁸

Sejak saat itu aktifitas masyarakat perkebunan dalam proses budidaya tanaman perkebunan ekspor menurun. Budidaya tanaman perkebunan hanya untuk kebutuhan pasar domestik saja. Masyarakat perkebunan sejak saat itu juga semakin menyadari akan tanah sebagai lahan perkebunan yang dulu mereka buka. Sebelumnya hadirnya jaman malaise, perlawanan masyarakat atas perilaku kolonial juga sudah berlangsung di Jember. Perlawanan dari masyarakat perkebunan dengan basis keagamaan hadir di Jember pada tahun 1906.¹⁹ Selain

¹⁷ Arifin. *Loc. cit.* hlm 88.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Laporan Asisten Residen Jember (J. Bosman) Kepada Residen Besuki (E.M. Van den Berg van Heineoord), 11 Juni 1906. hlm 116-119. Mengenai laporan ini dapat

itu perlawanan atas praktek kolonialisme secara organisasi juga berlangsung di Jember. Masyarakat perkebunan juga mulai bergabung dengan organisasi Syarikat Islam (SI).²⁰ Dengan adanya jaman malaise tersebut maka masyarakat perkebunan yang menggarap lahan merasa sebagai tanahnya sendiri dengan aktifitas tanaman pangan dan tanaman perkebunan untuk produksi pasar domestik.

Di saat melakukan aktifitas tersebut, masyarakat perkebunan harus menghadapi klaim kuasa baru, yaitu Fasisme Jepang (1942-1945). Aktifitas masyarakat perkebunan dirubah menjadi aktifitas perang. Lahan perkebunan yang telah ditanami harus diganti menjadi tanaman perang. Tidak segan-segan pemerintahan Fasisme Jepang membongkar hutan dalam rangka mencukupi kebutuhan perang.²¹ Pembongkaran lahan tersebut dilakukan dengan jalan memobilisasi masyarakat perkebunan. Masyarakat perkebunan menerima ajakan karena adanya propaganda Jepang yang menyatakan masyarakat perkebunan bisa menggarap tanahnya sendiri. Guna membongkar perkebunan dan hutan masyarakat perkebunan dimobilisasi disetiap kampung. Pemerintah Fasisme Jepang menggunakan jasa seorang juru bahasa. Masyarakat perkebunan disuruh menebang, menanam palawija dan disuruh membuat rumah di sekitar perkebunan tersebut.²²

Pada saat ini masyarakat perkebunan menghadapi tekanan dalam mengelola tanah mereka. Masyarakat perkebunan tidak lagi bisa leluasa mengerjakan lahannya sesuai dengan apa yang telah dipropagandakan Jepang. Perlawanan dari masyarakat perkebunan terhadap perlakuan Jepang dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk perlawanan dari kalangan pesantren terhadap perilaku Jepang.²³

dilihat pada ANRI. *Penerbit Sumber-sumber Sejarah. Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX*. Jakarta 1981.

²⁰ Oetoesan Hindia, september dan oktober 1919. Mengenai dokumen daftar Sarekat Islam lokal dapat dilihat pada ANRI. *Sarekat Islam Lokal*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.7, 1975, hlm 353.

²¹ Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 327.

²² Wawancara dengan Bapak Atram (panitia pemilu dari PNI), Jember 16 Januari 2002.

²³ Hasan Basari. *KHR As'ad Syamsul Arifin Riwayat Hidup Dan Perjuangan*. Choirul Anam (penyunting). Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994, hlm 39. Selain itu aktifitas perlawanan dari kelompok jaringan bawah tanah juga hadir di Jember seperti: Tan Lieng

Masyarakat perkebunan kembali beraktifitas secara normal pada tanah-tanah yang mereka miliki dengan tanaman pertanian dan tanaman perkebunan manakala Indonesia merdeka (1945). Masyarakat perkebunan semakin merasa bahwa situasi jaman telah berubah bahwa tanah yang mereka garap adalah tanah mereka di bawah pemerintahan yang merdeka. Kendati begitu, masyarakat perkebunan harus mulai menata tanah-tanah mereka yang sudah rusak akibat pendudukan Jepang. Kehidupan sosial mulai berjalan dengan lebih baik dari pada saat sebelumnya. Masyarakat perkebunan juga mulai mendirikan perkampungan dengan berbagai sarana penunjang seperti perumahan, mushola, kuburan dan perangkat desa. Guna pemenuhan kebutuhan subsistensinya masyarakat perkebunan di wilayah tersebut mulai menanam berbagai tanaman pangan seperti singkong dan jagung. Selain itu masyarakat perkebunan ini juga melanjutkan budidaya tanaman perkebunan keras seperti kopi, kakao, kelapa dan durian.²⁴

Apa yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan tersebut mendapat dukungan penuh dari organisasi tani, yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI).²⁵ BTI melaksanakan Kongres Kedua di Jember pada tanggal 29 Desember 1946.²⁶ Dalam kongres tersebut, BTI mendesak pemerintah guna mengambilalih semua tanah milik perusahaan perkebunan partikelir, baik melalui jalan konsesi maupun sewa jangka panjang. Dukungan lain juga hadir dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) melaksanakan konferensi Pesindo se Jawa Timur di Jember.²⁷ Termasuk dukungan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengadakan konferensi besar-besaran PKI Jawa Timur yang dilaksanakan di Jember pada tanggal 8 Februari 1946. Hasil konferensinya adalah mendukung tindakan masyarakat

Djie, Nyoto, Djamaluddin, Lauw King Hoo dan lain-lain. Lihat pada Benedict Anderson. *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988. Lihat juga Soe Hok Gie. *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta: Bentang, 2006, hlm 115-116.

²⁴ Laporan dari Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000.

²⁵ BTI berdiri di Jakarta pada akhir bulan November 1945, yang diawali dengan Kongres Petani Indonesia. Beberapa pendirinya adalah Mohammad Tauchid dan Sardjono. Adapun isu awal yang diangkat oleh BTI dari hasil kongres tersebut adalah perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tani dengan membebaskan mereka dari beban ganda, yaitu imperialisme dan feodalisme. Lihat pada Karl Pelzer. *Loc. cit.* hlm 219.

²⁶ *Ibid*, hlm 44.

²⁷ laporan *Antara* 13 Februari 1946.

perkebunan guna menggarap lahan perkebunan tersebut secara mandiri tanpa adanya campur tangan pihak asing.²⁸

Hancurnya tanaman perkebunan, termasuk bangunan-bangunan, berbagai instalasi dan mesin-mesin pabrik akibat tindakan Fasisme Jepang, menyebabkan tidak mudah bagi masyarakat perkebunan guna mengelolanya kembali. Bersama-sama pihak pemerintah masyarakat perkebunan mulai mengelola budidaya tanaman perkebunan, yaitu tembakau, kopi, kakao, karet dan lain-lain pada lahan perkebunan tersebut dengan sistem *maro*. Sebuah sistem bagi hasil dibagi dua antara pihak masyarakat perkebunan dengan pihak perkebunan. Di samping itu pihak masyarakat perkebunan sendiri masih bisa mengelola tanaman pangan mereka. Sistem ini dianggap sebagai jalan tengah dari masalah kepemilikan lahan perkebunan yang merupakan milik masyarakat.²⁹ Sementara itu dalam rangka melakukan koordinasi atas keberadaan berbagai perusahaan perkebunannya pemerintah mengusahakan adanya badan-badan di sektor perkebunan dan industri perkebunan. Pemerintah mengeluarkan dua peraturan: (i) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1946 tentang Perusahaan Gula (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara yang disingkat BPPGN);³⁰ (ii) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946 tentang Perusahaan Perkebunan (Pusat Perkebunan Negara atau disingkat PPN).³¹ Peraturan tersebut kemudian dilaksanakan pada tahun 1947. Kedua badan sektor perkebunan tersebut berkedudukan di Surakarta. Pembiayaan kedua badan tersebut diluar tanggungan Anggaran Belanja Negara. Masing-masing badan tersebut dipimpin oleh suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari 3 orang, yang seorangnya dari unsur organisasi buruh perkebunan. Merujuk pada dokumen Tugu Pahlawan³² untuk perusahaan Gula dari unsur Serikat Buruh Gula (SBG), sementara untuk PPN unsur buruhnya dari Sarbupri.³³ Dengan adanya unsur

²⁸ Laporan *Antara* yang dimuat tanggal 11, 12 dan 16 Februari 1946.

²⁹ Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 328.

³⁰ Susunan BPPG, kantor pusat di Surakarta. Di setiap Karesidenan dibentuk Kantor Cabang yang berhubungan langsung dengan pabrik gula. *Ibid*, hlm 329.

³¹ Susunan PPN, kantor pusat di Surakarta. Di setiap Propinsi dibentuk Kantor Inspeksi PPN, sedang diberbagai daerah dibentuk Kantor-kantor Ajun Inspeksi yang berhubungan langsung dengan perkebunan-perkebunan. *ibid*.

³² *Ibid*. hlm 328-329.

³³ Organisasi ini didirikan pada 17 Februari 1947. Aktifitas Sarbupri mendapat dukungan luas dari SOBSI dan BTI. Organisasi buruh perkebunan ini menerbitkan *Warta*

buruh (perkebunan maupun industri perkebunan) dalam kegiatan badan-badan tersebut, tentu saja kepentingan masyarakat perkebunan dapat dilaksanakan.

Sayangnya aktifitas yang sudah mulai berjalan tersebut diusik oleh kehadiran pemilik perusahaan perkebunan lama yang berdasar atas perspektif bahwa lahan-lahan tersebut masih berstatus hak *erfpacht*. Aktifitas masyarakat perkebunan di Jember menjadi berhenti kembali berganti menjadi aktifitas perang kolonial tahun 1947-1949.³⁴ Adapun satu wilayah perkebunan yang kemudian menjadi basis perlawanan fisik terletak di perkebunan Sukorejo. Hampir diseluruh lahan perkebunan menjadi tempat gerilya dalam menghadapi kekuatan kolonial.³⁵ Lahan-lahan perkebunan di Jember banyak yang dibumihanguskan akibat perang, begitu juga dengan asset-asset perusahaan yang telah dengan susah payah dibangun kembali oleh masyarakat perkebunan.³⁶

Tahun 1949 menjadi sejarah baru bagi masyarakat perkebunan di Jember. Setelah perundingan di Konferensi Meja Bundar (KMB) upaya untuk mengelola tanah-tanah mereka tidak bisa dilakukan kembali. Berbagai perusahaan perkebunan lama mulai menguasai kembali. Aktifitas di perusahaan perkebunan yang dibentuk oleh PPN dan BPPGN dibekukan. Selanjutnya pemerintah membentuk Panitia Pengembalian Perusahaan Perkebunan Milik Asing yang masih memiliki status tanah hak *erfpacht*. Di Jawa Timur terdapat 264 perusahaan perkebunan yang harus dikembalikan ke pemilik hak *erfpacht*. Sampai dengan tahun 1952 status perkebunan tersebut sebanyak 153 perkebunan yang telah diambil kembali oleh pemilik hak *erfpacht*. Sementara terdapat 40 perkebunan yang baru mendapat ijin sehingga belum bisa diambil, sedangkan 71 perkebunan

Sarbuspri. Lihat pada Iskandar Tedjakusuma. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. Seri Monograph Tedjakusuma Iskandar, The Political Character of The Indonesian Trade Union. Movement, Cornell University, Ithaca, New York, 1958, hlm 29. Lihat juga pada Soegiri DS dan Edi Cahyono. *Gerakan Serikat Buruh, Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hlm 140.

³⁴ Istilah perang kolonial didapatkan dari bukunya Mochammad Tauchid, 1952, *Masalah agraria: sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*, Bagian I dan II, Jakarta: Penerbit Tjakrawala. Sementara untuk perang yang terjadi di wilayah karesidenan Besuki lihat pada Dison Mulyadi. *Agresi Militer Belanda di Bondowoso*. tidak diterbitkan, laporan penelitian UNEJ, 1996.

³⁵ Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000, khususnya bab konflik tanah Sukorejo.

³⁶ Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 330.

sisanya belum mendapat ijin untuk diambil kembali.³⁷ Terdapat beberapa perkebunan di Jember yang langsung diambilalih kembali oleh sejumlah perusahaan perkebunan yang mempunyai kantor direksinya di Belanda, seperti perkebunan yang terletak di Gunung Majang, Glantangan, Kali Bajing, Pasewaran, Mangli, Penataran dan lain sebagainya.³⁸

Namun, tidak serta merta pemilik hak *erfpacht* dapat beraktifitas dengan tenang. Sejak adanya penguasaan kembali oleh perusahaan perkebunan asing tersebut sering kali terjadi konflik dengan masyarakat perkebunan.³⁹ Bahkan Masyarakat perkebunan di Jember mulai mengajukan keberadaan tanahnya ke pemerintah guna menjadi hak milik. Sebagai salah satu contohnya pada tahun 1953 masyarakat perkebunan di Jenggawah mulai dibebani pajak lahan garapan oleh pemerintah. Setiap pemilik lahan mendapat nomor pipil atau petok sebagai legitimasi kepemilikan tanahnya. Selain itu, masyarakat perkebunan sejak saat itu sudah dibebani pembayaran pajak yang dibayar setiap tahun. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat perkebunan di Sukorejo, Ketajek, Curah Wangkal, Curah Nongko dan beberapa daerah lainnya.⁴⁰

Eksistensi masyarakat perkebunan guna menampilkan kekuatannya semakin berani. Buruh perkebunan tiba-tiba sangat berani berhadapan dengan majikan, suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada era kolonial.⁴¹ Tidak itu saja masyarakat perkebunan juga sudah berani melakukan mogok atas perilaku perusahaan perkebunan. Masyarakat perkebunan Jember dalam setiap tanggal 1 Mei juga melakukan peringatan hari buruh sedunia, sebagai upaya menunjukkan kekuatan pada kalangan pengusaha perkebunan. Dukungan terhadap masyarakat perkebunan juga hadir dari organisasi buruh lainnya, yaitu Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII).⁴² Secara nyata SBII hadir di Jember pada tahun 1954. Akan tetapi organisasi buruh ini beranggapan bahwa antara masyarakat perkebunan

³⁷ *Ibid.* hlm 340.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Jacob Vredenbergt, Jakarta, 18 September 2004.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda, 2000.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Jacob Vredenbergt, Jakarta, 18 September 2004.

⁴² Secara nasional SBII dibentuk oleh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). SBII mempunyai prinsip bahwa perjuangan buruh berbeda dengan perjuangan politik. Gerakan buruh semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan, tanpa ada konflik dengan pihak majikan. Unsur harmonisasi menjadi titik tekan dari organisasi SBII. *Suara Partai Masyumi*. No. 6-7, Th. Ke VIII, 1954.

dengan perusahaan adalah 2 (dua) entitas yang berbeda. Keduanya harus memiliki harmonisasi dalam menjalankan tata kelola perkebunan. Oleh sebab itu aksi-aksi dari organisasi buruh ini hanya untuk melakukan peningkatan kesejahteraan buruh, tidak berkaitan dengan penguasaan atas tanah.⁴³ Sementara itu untuk masyarakat perkebunan yang berafiliasi ke Sarbupri ingin mengatur perusahaan perkebunan secara koperasi.⁴⁴

Upaya untuk mewujudkan cita-citanya masyarakat perkebunan semakin aktif dalam memaknai keberadaan perkebunan. Termasuk pada saat terjadinya proses nasionalisasi berbagai perusahaan milik asing yang ada di Indonesia. Di Jember setidaknya terdapat sebanyak 24 perusahaan perkebunan besar milik Belanda terkena Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 tentang nasionalisasi. Sebanyak 60% nilai perdagangan luar negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank-bank, perkapalan dan sektor jasa.⁴⁵ Semua perusahaan yang diambilalih tidak diubah menjadi perusahaan swasta baru, akan tetapi menjadi milik negara. Dalam bidang perekonomian, akibat adanya nasionalisasi pengaruh Belanda atas Indonesia menurun drastis. Akibat adanya proses Nasionalisasi 90% produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah Republik yang sebelumnya di tangan pihak asing.

Masyarakat perkebunan sangat aktif dalam melakukan tindakan aksi diambilalih tersebut. Sebagian kalangan menyatakan aksi tersebut mendapat dukungan penuh dari kalangan elit politik di tingkat nasional dan TNI AD.⁴⁶ Aksi-aksi lapangan masyarakat perkebunan di Jember sangat aktif dan mendapat dukungan dari organisasi tani dan buruh perkebunan. Aksi-aksi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah kantor-kantor administratif perusahaan yang menjadi sasaran. Semua bangunan yang itu merupakan simbol kolonial diambilalih, baik

⁴³ Wawancara dengan KH Mursyid, Jember, 2 Februari 2002.

⁴⁴ Lihat pada Hasil Sidang DPP Pleno Ke III Sarbupri, 1954.

⁴⁵ Rickard Robinson. *The Rise of Capital*. Canberra: Asian Studies Association of Australia, 1986, hlm 72.

⁴⁶ Lihat pada tulisan Audrey Kahin dan George McT Kahin. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1979, hlm 193. Lihat juga pada tulisan Harold Crouch. *Militer dan Politik di Indonesia*. (Th. Sumartana: penterjemah). Jakarta: Sinar Harapan, 1999, hlm 36-37. Lihat juga pada Ulf Sundhaussen. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES, 1986. Serta lihat juga Mochtar Mas'ood. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: PT Gramedia, 1989, hlm 40-42.

itu gedung perkantoran, maupun gudang yang ada di wilayah perkebunan,⁴⁷ selain itu juga berlangsung aksi corat-coret atas berbagai simbol itu, bahkan berlangsung pula pengusiran warga asing dari Jember.⁴⁸ Semua tindakan itu oleh sebagian kalangan dianggap semata-mata hanya sebagai upaya merebut kembali Irian Barat kepangkuan RI. Padahal upaya untuk pengakuan hak atas tanah-tanah yang digarap oleh masyarakat perkebunan merupakan pijakan utamanya. Berbagai tuntutan masyarakat perkebunan Jember ini berhubungan dengan tuntutan untuk melakukan perombakan sistem hukum agraria ke nasional. Tahun 1960 merupakan tonggak baru bagi masyarakat perkebunan karena lahir Undang-undang Pokok Agraria yang bersifat nasional menggantikan Agrarische Wet 1870.

Melihat dinamika masyarakat perkebunan di Jember dalam rangka mendapatkan hak atas tanah yang digambarkan di atas, tulisan ini berupaya untuk menelusuri dan menjelaskan sejarah (*history explanation*)⁴⁹ mengenai peran mereka dalam sejarah perkebunan di Indonesia. Pada satu sisi masyarakat perkebunan memiliki kaitan kerja dengan perkebunan bersifat kolonialistik, namun pada sisi yang lain bekerja untuk merombak menjadi sistem yang nasionalistik. Dua peran tersebut terus berlangsung sepanjang sejarah perkebunan di Jember. Dalam hal keterlibatan masyarakat perkebunan dengan organisasi secara umum mereka bergabung dalam organisasi yang memiliki keterkaitan gagasan dengan mereka, baik itu permasalahan tingkat kesejahteraan yang diangkat oleh SBII, maupun penguasaan atas tanah oleh Sarbupri dan BTI. Dinamika sosial dan peranan masyarakat perkebunan dalam sejarah Jember ini belum banyak mendapat perhatian dalam banyak tulisan mengenai sejarah

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Kudara, Jember, 10 Juni 2004.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Jember, 14 September 2004.

⁴⁹ Eksplanasi sejarah adalah usaha membuat suatu unit peristiwa di masa lampau *intelligible* (dimengerti secara cerdas). Artinya, proses eksplanasi itu berhubungan dengan *hermeneutics* dan *verstehen*, menafsirkan dan mengerti, dalam jangka waktu yang panjang, dan dalam bentuk peristiwa tunggal. Lihat pada Kuntowijoyo. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, hlm 1 dan 10. Proses eksplanasi suatu peristiwa sejarah (bisa jadi) lebih mudah untuk ditampilkan, ketimbang melakukan analisisnya. Lebih dalam, analisis suatu proses sejarah seringkali tampak untuk menuntun dari, ketimbang menuju suatu kompleksitas pemahaman peristiwa sejarah. Pemahaman ini dapat dilihat pada Donald L. Donham. *History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and Antropology*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999, hlm 140. Bandingkan juga dengan Christopher Lloyd. *Explanation in Social History*. New York: Basil Blackwell, 1986.

Jember, khususnya periode 1930-1960. Tulisan ini diharapkan memberi kontribusi dan pemahaman tentang dinamika dan peran serta aktivitas masyarakat perkebunan dalam masyarakat Jember.

Kendati pilihan rentang waktu (*scope temporal*) secara spesifik memotret peristiwa sepanjang periode dekolosasi 1930an-1960an di wilayah perkebunan di Jember, namun di sini dalam penulisanannya tidak ingin terjebak pada persoalan pembatasan secara tegas atas kronologi. Merujuk pada apa yang telah diingatkan oleh Kuntowijoyo mengenai cakupan waktu dalam studi sejarah tidaklah secara langsung menunjuk pada periodisasi peristiwa yang sedang berlangsung, sebab dalam perkembangan sejarah dan kehidupan tiada "permulaan" dan "akhir".⁵⁰ Konsekuensinya tulisan ini perlu bergerak dari belakang dan melompat ke depan guna memperjelas alur suatu proses dan peristiwa sejarah.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas yang menjelaskan mengenai latar belakang masyarakat perkebunan dan peran aktifnya sepanjang periode dekolonisasi. Tampak pula bahwa aktifitas masyarakat perkebunan bukan semata-mata fenomena yang ada di Jember. Terdapat wilayah lain yang dikenal sebagai kota perkebunan seperti di Sumatera Timur. Kendati begitu, masyarakat perkebunan menjadi penting keberadaannya dalam sejarah Jember karena tidak saja berhubungan dengan persoalan penguasaan sumber-sumber agraria tapi juga dalam kehidupan masyarakatnya yang dikenal memiliki sifat yang berhimpitan dengan santri tradisional yang dikenal memiliki sifat paternalistik yang berbeda dengan daerah lainnya. Akan tetapi sepanjang periode dekolonisasi, sifat yang hadir lebih mengarah pada identitas yang berbeda dari sebelumnya. Masyarakat perkebunan mulai mengkonstruksi identitas dan pengalamannya sendiri. Tidak lagi berdasar atas dominasi pemikiran perkebunan yang berwatak kolonialistik. Oleh sebab itu dinamika masyarakat perkebunan sepanjang era dekolonisasi perkebunan di Jember 1930an-1960an ini menjadi topik utama tulisan ini. Terlebih lagi fenomena masyarakat perkebunan dalam sejarah Jember tidak

⁵⁰ Kuntowijoyo. *Social Change in an Agrarian Society: Madura 1850-1940*. Disertasi Ph.D. New York: Columbia University, 1980, hlm 1.

semata-mata sebagai suatu gejala kolektif dan sosial. Maka, proses atau perkembangan masyarakat perkebunan Jember berikut dinamika sosial politik di dalamnya penting dilihat lebih lanjut guna menjelaskan keberadaan masyarakat perkebunan sepanjang era dekolonisasi.

Mengenai istilah dekolonisasi tidak semata-mata mengandung arti gejala sosial-politik, akan tetapi juga kebudayaan. Dekolonisasi adalah menafsirkan ulang atas tafsir kolonialisme. Makna dan simbol masyarakat perkebunan yang dikonstruksi oleh tuan kebun bermakna minor. Misalnya, tempat tinggal masyarakat perkebunan untuk tanaman keras (kopi, kakao dan karet) merupakan *enclave* yang secara murni mencerminkan sifat-sifat praktek kolonialisme.⁵¹ Sementara untuk tanaman tebu dan tembakau walaupun jarak antara perkebunan dan pedesaan tidak terlalu jauh, namun prinsip-prinsip rasialisme dengan diskriminasi berlaku secara ketat, tidak hanya persoalan distribusi fasilitas pelayanan, tapi juga soal gaya hidup.⁵² Sementara gambaran untuk para tuan kebun adalah sebagai sesuatu yang sangat baik dimana masyarakat perkebunan dapat merasa iri melihatnya. Tantangan masyarakat perkebunan adalah bukan semata-mata konfrontasi atas pandangan secara rasional yang dibangun oleh dunia kolonial di atas. Lebih jauh dari itu bahwa untuk menghancurkan dunia kolonial adalah dengan penghapusan zona tersebut.⁵³

Karenanya guna mewujudkan tantangan tersebut keberadaan perkebunan di Jember yang melahirkan kultur masyarakat perkebunan mulai ditafsirkan ulang. Masyarakat perkebunan adalah konstruksi identitas sosial yang merupakan hubungan sosial yang bersifat dominatif dan eksplotatif antara tuan kebun dengan masyarakat pribumi. Pada periode dekolonisasi tersebut terjadi proses upaya mengurangi dominasi pikiran kolonial dilakukan dengan cara negosiasi terus menerus. Walaupun dalam proses negosiasinya membutuhkan tindakan yang sangat keras dengan konflik-konflik fisik, karena secara makna mengandung konflik sebagaimana disebutkan di atas.

Mengenai upaya untuk melakukan konfrontasi tafsiran atas kolonialisme, sepanjang periode dekolonisasi perkebunan di Jember dalam setiap babak

⁵¹ Bandingkan dengan Kartodirdjo dan Suryo. *Op. cit.* hlm 152.

⁵² Lihat lampiran foto no 3.

⁵³ Lihat lampiran foto no 4.

memiliki dinamika masing-masing. Pada tahun 1930-an, masyarakat perkebunan semakin menyadari atas hak kuasa lahan perkebunan. Selanjutnya pada masyarakat perkebunan Jember mulai merespon hadirnya berbagai organisasi gerakan sosial. Kemudian pada tahun 1950an masyarakat perkebunan merespon konstruksi-konstruksi atas pemahaman yang mewarnai periode dekolonisasi. Adapun konstruksi tersebut adalah pemahaman atas indonesianisasi dan nasionalisasi. Berbagai konstruksi yang ada tersebut masyarakat perkebunan memiliki konstruksi sendiri atas berbagai pemahaman di atas yang akan telah dijelaskan sekilas di atas.

Berangkat dari sini tampak pendekatan semata-mata agen maupun struktur sudah tidak memadai dalam menjelaskan kompleksitas persoalan periode sepanjang dekolonisasi (1930an-1960an) dalam rangka tata kelola sumber-sumber agraria. Begitu juga dengan pendekatan yang melihat persoalan dekolonisasi dari bingkai determinisme agen-struktur tersebut atau, dalam konsepsi Giddens,⁵⁴ dualisme agen-struktur. Hal yang sama juga dapat dilihat pada pendekatan yang sudah merupakan sintesa dari kedua pendekatan di atas, yaitu hasil dari interaksi antara *agent* (peristiwa) yang *enabling* dengan struktur sosial yang *constraining*. Ini merupakan inti dari pendekatan strukturalis. Ujung dari pendekatan ini adalah menemukan *causal factor* yang obyektif.⁵⁵ Akan tetapi berbagai pendekatan di atas masih belum memadai, mengingat secara kesejarahan proses dekolonisasi di Indonesia tidak saja semata-mata tindakan *accross order* dari kolonial ke nasional. Lebih jauh dari itu juga berlangsung perebutan makna ekonomi-politik sepanjang periode tersebut. Mengingat hadirnya perusahaan perkebunan di wilayah Jember merupakan bagian dari proses akumulasi kapital. Tentu saja di sana berlangsung proses ideologisasi pada masing-masing level. Begitu juga dengan *agent* yang terlibat terdapat beragam latar belakang pemikiran yang melekat pada masing-masingnya.

Berangkat dari paparan di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan terkait studi tentang dekolonisasi perkebunan di Jember ini. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana bentuk masyarakat perkebunan Jember yang

⁵⁴ Antony Giddens. *Social Theory and Modern Sociology*, Stanford: Stanford University Press, 1987.

⁵⁵ Christopher Lloyd. *The Structures of History*, London: Basil Blackwell, 1993.

kemudian memaknai dekolonisasi perkebunan di Jember pada tahun 1930an-1960an? Dalam kaitan ini, penelusuran tentang siapa, apa, dan bagaimana masyarakat perkebunan di Jember, dan mengapa mereka penting dalam sejarah Indonesia menjadi satu-kesatuan dalam tulisan ini. Berbagai pertanyaan dasar ini dalam rangka menjelaskan latar belakang hadirnya masyarakat perkebunan dan dinamikanya sepanjang periode dekolonisasi.

Selanjutnya pertanyaan penting lainnya adalah, Bagaimana posisi obyektif masyarakat perkebunan sebagai *agency* dalam konteks perebutan penguasaan atas tanah selama periode dekolonisasi? Hal ini sangat penting untuk menjelaskan mengapa masyarakat perkebunan terlibat aktif dalam upaya merombak sistem kolonial ke sistem nasional. Lantas mengapa tanah merupakan sarannya? Tanah merupakan basis argumentasi yang akan dijelaskan mengapa tanah bagi masyarakat perkebunan merupakan basis material yang harus dikuasi.

Pertanyaan lainnya adalah apakah dampak dari proses dekolonisasi baik itu berkenaan dengan proses produksi maupun dengan kehidupan masyarakat perkebunan? Basis pertanyaan ini dapat untuk menjelaskan dinamika internal maupun dinamika politik yang ada dalam masyarakat perkebunan sendiri. Selain itu, nantinya dapat menjelaskan tentang basis ideologi mana yang paling berpengaruh dalam masyarakat perkebunan di Jember.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan sejarah perkebunan dari perspektif masyarakat perkebunan seperti sekilas diuraikan di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut. Permasalahan yang diajukan menjadi petunjuk bagi proses penelusuran lebih jauh mengenai peran dan aktivitas masyarakat perkebunan dalam suatu rentang proses sejarah. Tulisan ini akan melihat semua dimensi kehidupan masyarakat perkebunan dalam rentang periode sejarah baik itu sosial, ekonomi dan politik serta dan bagaimana pasang surutnya dalam setiap babak sejarah. Tulisan ini melintasi beberapa orde politik (Kolonial, Fasisme hingga Republik) yang setiap orde masyarakat perkebunan "menghadapi" permasalahan yang berbeda.

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami dan menempatkan masyarakat perkebunan menjadi salah satu faktor penting dalam

pembentuk sejarah sosial selama kurun waktu 1930-1960. Selama ini berbagai studi sejarah yang ada tentang proses dekolonisasi lebih menggambarkan situasi di level nasional dan potretnya adalah orang-orang besar. Dengan demikian keterlibatan *wong cilik* dalam proses sejarah selalu absen dalam lipatan-lipatan historiografi Indonesia. Sampai saat ini karya historiografi yang berangkat dari perspektif *wong cilik* masih sedikit, walau telah dimulai oleh Kartodirdjo⁵⁶ dan Onghokham.⁵⁷

Begitu juga dengan persoalan ini, manakala menyebut perkebunan selalu pembicaraannya dari sudut tuan kebun atau peranan politik nasional. Posisi masyarakat perkebunan, yaitu buruh perkebunan maupun kalangan petani yang hidup disekitar perkebunan maupun masyarakat luas yang tinggal di area perkebunan, tidak menjadi subyeknya. Padahal setelah membaca berbagai dokumen yang tersedia serta pengalaman tinggal di wilayah perkebunan menunjukkan kalau masyarakat perkebunan pada dasarnya adalah aktor utama bagi keberadaan perkebunan, bahkan perkebunan milik asing sekalipun. Setidaknya studi Pelzer⁵⁸ dan Stoler⁵⁹ bisa menjadi rujukan penulisan tentang masyarakat perkebunan.

Berangkat dari situ, tulisan ini tidak hanya menjelaskan tentang kehidupan masyarakat perkebunan sebagai faktor pengubah dalam sejarah Indonesia, tetapi juga menjelaskan struktur sosial dan dinamika sosial politik yang mempengaruhi perubahan itu sendiri. Adapun yang menjadi fokus wilayahnya adalah Jember, sebagai salah satu kota perkebunan di Indonesia. Sementara itu untuk periodisasi tulisan dimulai pada 1930 dan diakhiri pada tahun 1960.

Pada tahun 1930an, masyarakat perkebunan menjadi objek utama bagi berlangsungnya krisis kapitalisme global. Pada saat krisis melanda keberadaan perkebunan di Indonesia saat itu, pihak pemilik hak *erfpacht* sebagian memilih

⁵⁶ Lihat pada Kartodirdjo, Sartono. *The Peasant's Revolt of Banten in 1888, Its Conditions, Course and Sequel: a Case Study of Social Movements in Indonesia*. The Hague: 'sGravenhage, 1966.

⁵⁷ Lihat pada Onghokham, *Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century*. Ph.D Thesis, Yale University. Ann Arbor, University Microfilm, 1987.

⁵⁸ Lihat pada Karl J Pelzer. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.

⁵⁹ Lihat pada Ann Laura Stoler. *Kapitalisme Dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979*. Yogyakarta: KARSA, 2005.

kembali ke negara asal. Dengan demikian tulisan ini akan menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat perkebunan dalam menghadapi krisis tersebut. Perlawanan dari masyarakat perkebunan yang berbasis keagamaan juga muncul di wilayah ini.⁶⁰ Wilayah perkebunan Jember juga merupakan salah satu wilayah Syarikat Islam di Jawa Timur.⁶¹

Memasuki tahun-tahun 1942-1945, praktis masyarakat perkebunan mendapat tekanan dari mobilisasi dan kontrol yang dilakukan oleh Fasisme Jepang. Semua energi masyarakat perkebunan dikerahkan untuk pengelolaan dan memanfaatkan sumber-sumber agraria demi tanaman perang. Masyarakat perkebunan saat itu mulai menanam di luar tanaman budidaya perkebunan. Semua kebijakan berganti mengarah pada kepentingan perang Asia Timur Raya. Aktifitas pemerintahan Fasisme Jepang tersebut mampu mendorong terjadinya perubahan perilaku kehidupan masyarakat perkebunan. Masyarakat perkebunan mulai menyadari keberadaan tanah-tanah yang dulu berupa hutan guna dijadikan lahan perkebunan dibuka bersama kaum *onderneming*.⁶²

Sementara itu memasuki periode 1945-1950, dinamika masyarakat perkebunan semakin menonjol di semua bidang secara mandiri. Keterlibatan masyarakat perkebunan dalam perebutan tata kelola dengan upaya *reclaiming* dari para pemilik hak *erfpacht*. Periode ini masyarakat perkebunan juga mulai bergabung dalam wadah organisasi masyarakat perkebunan, baik itu organisasi tani maupun organisasi buruh perkebunan. Masyarakat perkebunan mulai memperjuangkan gagasannya dalam rangka tata kelola sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan secara lebih mandiri, tidak lagi bergantung pada kekuatan modal asing.

Selanjutnya, pada periode 1950-1960, dinamika politik nasional mulai terjadi tarik-menarik antar kekuatan politik nasional yang ada. Pemerintah Pusat sendiri mulai menjalankan gagasannya dalam rangka tata kelola sumber-sumber

⁶⁰ Laporan Asisten Residen Jember (J. Bosman) Kepada Residen Besuki (E.M. Van den Berg van Heineoord), 11 Juni 1906. hlm 116-119. Mengenai laporan ini dapat dilihat pada ANRI. *Penerbit Sumber-sumber Sejarah. Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX*. Jakarta 1981.

⁶¹ Oetoesan Hindia, september dan oktober 1919. Mengenai dokumen daftar Sarekat Islam lokal dapat dilihat pada ANRI. *Sarekat Islam Lokal*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.7, 1975, hlm 353.

⁶² Aiko Kurawasa. *Mobilisasi dan Kontrol*. Jakarta: Grasindo, 1993.

agraria di wilayah perkebunan. Pemerintah Indonesia saat itu terikat dengan adanya hasil-hasil KMB yang memberi peluang bagi kembalinya kekuatan modal untuk mengelola perkebunan kembali. Masyarakat perkebunan merespon hasil-hasil KMB, yang melahirkan konflik diberbagai daerah. Situasi konflik tersebut terus berlanjut hingga akhirnya terjadi proses nasionalisasi pada tahun 1957-1958. Sejak saat itu, tata kelola sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan diambilalih oleh pemerintah pusat. Kendati begitu bukan berarti masyarakat perkebunan bisa langsung melanjutkan gagasannya dalam rangka tata kelola sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan secara lebih mandiri. Ternyata sejak saat itu hadir kekuatan politik yang mewarisi kolonialisme yang melanjutkan pengelolaan sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan dengan gaya kolonial. Tuntutan masyarakat perkebunan lebih mengarah pada perebutan hak atas tanah di wilayah perkebunan. Pada tahun 1960 lahir Undang-Undang Pokok Agraria mengenai tata kelola sumber-sumber agraria demi kepentingan masyarakat banyak. Namun dalam UUPA 1960 masih terdapat persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang itu mirip dengan hak *erfpacht*. Demikianlah tulisan ini diakhiri pada tahun ini.

1.4. Kerangka Teori

Tulisan ini pada dasarnya menyatakan pentingnya suatu kajian proses sosial-politik yang harus memperhitungkan kesadaran dan kekuatan masyarakat di tingkat bawah, bukan sebaliknya. Kesadaran dan kekuatan masyarakat itu tidak semata-mata berwujud dalam bentuk ekspresi politik, tapi juga cita-cita ekonomi dan bahkan angan-angan budaya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini adalah titik pijak utama dari bagaimana alur dalam tesis ini dikembangkan.

Walaupun dalam realitas sosial yang terjadi seringkali menunjukkan proses "kekalahan" atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam proses sejarah. Kendati demikian, hal itu tidak serta merta dapat menghapus dan menafikan kehadiran serta bobot kekuatan politik yang telah dilakukan oleh masyarakat. Sebaliknya, kendati mengalami "kemenangan" ataupun "kekalahan" yang dicapai oleh suatu kekuatan masyarakat bawah, itu artinya telah menghapus

kesan bahwa seolah-olah kehadiran masyarakat bawah dalam periode sejarah tertentu, hanya sebagai sesuatu yang disejarahkan begitu saja.

Membaca apa yang telah dipaparkan pada bagian di atas, studi tentang dekolonisasi perkebunan di Jember tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan dan perkembangan ekonomi perkebunan. Di satu sisi, masyarakat perkebunan di Jember hadir sebagai buah dari berkembangnya kapitalisme perkebunan sebagai produk kolonialisme, sementara pada sisi lain fenomena masyarakat perkebunan dalam studi ini sekaligus sebagai respons terhadap proses kolonisasi itu sendiri. Sepanjang periode dekolonisasi perkebunan di Jember merupakan gambaran tentang perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat perkebunan itu sendiri.

Secara konseptual pemahaman tentang dekolonisasi adalah upaya untuk peniadaan dominasi asing dalam pengelolaan perkebunan. Praktek politiknya adalah penggantian orang-orang asing yang mengelola perkebunan dengan kalangan bumi putera. Satu kunci utama dari konsepsi ini adalah *indonesianisasi*.⁶³ Penjabaran konsepsi awal ini masuk dalam ranah akademik dilakukan oleh Jhon Sutter pada akhir tahun 1950-an. Adapun konsepsi tentang istilah tersebut adalah sebuah kesadaran untuk melakukan peningkatan keterlibatan kalangan bumi putera dalam semua sektor kehidupan ekonomi, yang sebelumnya dikuasai oleh asing.⁶⁴ Usaha ini memberi gambaran bahwa kalangan bumi putera harus masuk ke dalam posisi sebagai pengelola dalam perkebunan sebagai pengambil kebijakan. Lebih jauh dari itu juga melakukan upaya nasionalisasi, yaitu mengambilalih semua kegiatan produksi perkebunan yang selama ini dikuasai oleh orang-orang Belanda.

Pada dasarnya uraian tentang dekolonisasi dapat dijelaskan dari perspektif proses dan dinamika kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat perkebunan. Kehadiran perkebunan di Jember pada awal abad XIX merupakan dalam perpektif

⁶³ Thomas J Lindblad. The Importance of Indonesianisasi During The Transition From the 1930s to the 1960s, *Itinerario. Eroupean Journal of Overseas History* 26-3/4. Hlm 52.

⁶⁴ Jhon O Sutter. *Indonesianisasi; A Historical Survey of The Role of Politics in The Institutions of A Changing Economy From Second Worl Ward to The Eve ot The General Election, 1940-1955*. PhD Thesis, Cornell University, Ithaca, NY, 1959, Hlm 2.

Wolf⁶⁵ selalu merusak norma-norma budaya yang telah ada sebelumnya dan menetapkan ketentuan-ketentuannya sendiri. Kehadirannya kadang-kadang dengan cara membujuk, kadang-kadang dengan paksaan. Dengan demikian kehadiran itu selalu berlingkup dalam suasana konflik, setidaknya dengan ketentuan budaya setempat. Karena praktek kolonialisme pada dasarnya adalah suatu tindakan dalam rangka melakukan penundukan masyarakat satu terhadap masyarakat lainnya.⁶⁶ Praktek politiknya adalah melakukan penundukan dengan berbagai cara mulai dari penataan wilayah, penciptaan aturan hukum, membentuk sistem birokrasi baru hingga misi-misi *civilization*.⁶⁷ Dengan demikian makna dekolonisasi sangat penting dilihat dari perspektif proses dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat perkebunan. Dalam hal ini, masyarakat perkebunan adalah salah satu *agency* aktif atas proses rekonstruksi masa lampau di suatu wilayah teritori tertentu yang menjalankan kehidupan dalam batasan struktur tertentu. Dengan perkataan lain, kehadiran masyarakat perkebunan sebagai titik tolak proses dinamika dekolonisasi perkebunan adalah penting. Dalam perspektif Hobsbawm masyarakat merupakan unsur yang selalu ada dalam setiap proses dan peristiwa sejarah manusia. Oleh sebab topik studi tentang dekolonisasi perkebunan ini dengan fokus dinamika sosial masyarakat perkebunan ini merupakan usaha untuk melihat struktur sosial, proses sejarah dan politik yang menentukan kehidupan orang biasa dari bawah.⁶⁸

Studi ini juga dalam kerangka memahami dekolonisasi sebagai ranah perebutan makna antar berbagai aktor yang terlibat dalam ranah perkebunan dengan penekanan dari perspektif masyarakat perkebunan. Oleh sebab itu tulisan ini pada dasarnya menyatakan pentingnya suatu kajian proses sosial-politik yang harus memperhitungkan kesadaran dan kekuatan masyarakat di tingkat bawah, bukan sebaliknya. Kesadaran dan kekuatan masyarakat itu tidak semata-mata berwujud dalam bentuk ekspresi politik, tapi juga cita-cita ekonomi dan bahkan

⁶⁵ Eric Wolf. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: YIIS dan CV. Rajawali, 1983, hlm 186.

⁶⁶ D.K. Fieldhouse. *Colonialism 1870-1945; An Introduction*. The Macmillan Press, 1983, hlm 1.

⁶⁷ *Ibid.* hlm 11-24.

⁶⁸ Eric Hobsbawm. "On History from Below," dalam *On History*. Eric Hobsbawm. London: Abacus, 2002, hlm 268.

angan-angan budaya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini adalah titik pijak utama dari bagaimana alur dalam tesis ini dikembangkan. Walaupun dalam realitas sosial yang terjadi seringkali menunjukkan proses "kekalahan" atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam proses sejarah. Kendati demikian, hal itu tidak serta merta dapat menghapus dan menafikan kehadiran serta bobot kekuatan politik yang telah dilakukan oleh masyarakat. Sebaliknya, kendati mengalami "kemenangan" ataupun "kekalahan" yang dicapai oleh suatu kekuatan masyarakat bawah, itu artinya telah menghapus kesan bahwa seolah-olah kehadiran masyarakat bawah dalam periode sejarah tertentu, hanya sebagai sesuatu yang disejarahkan begitu saja.

Pada titik ini perhatian masyarakat perkebunan sebagai *agency* dalam sejarah menjadi sangat penting. Dialektika masyarakat perkebunan sebagai objek studi di sini tidaklah statis dan mekanis, akan tetapi sangat dinamis. Terlebih lagi dinamika internal kalangan masyarakat perkebunan yang sudah maujud dalam suatu organisasi. Beragam organisasi yang berhubungan dengan masyarakat perkebunan, baik itu buruh maupun petani hadir di Indonesia pada tahun-tahun awal setelah Proklamasi kemerdekaan. Kehadiran organisasi tersebut memperkuat keberadaan masyarakat perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun-tahun tersebut, dinamika berbagai organisasi tersebut mampu menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan yang mendukung praktek dekolonisasi di Indonesia. Pada titik ini sebuah organisasi tidak saja dilihat sebagai wahana pengungkapan (ekspresi)⁶⁹ dari rasa keinginan (aspirasi), tapi sekaligus sebagai wahana pencapaian kepentingan massa rakyat sebagai warga negara dalam konteks hubungan dengan "negara".

Tindakan sosial dalam konsep Weber bukan sekedar perilaku (*behavior*) reflektif yang sama sekali tidak melibatkan proses berpikir dari aktornya.

⁶⁹ Istilah ekspresi rasa keinginan ini biasanya disebut oleh kalangan ilmuwan sosial sebagai gerakan sosial, suatu tindakan sosial atau dalam istilah Touraine disebut sebagai tindakan kolektif untuk melakukan perubahan dalam satu tatanan kehidupan sosial. Lihat pada A. Touraine. *The Return to The Actor*. Minneapolis, 1984. Sementara itu istilah ini muncul di kalangan sosiologawan Amerika pada tahun 1950-an. Eric Hobsbawm seorang sejarawan Inggris yang pertama kali memakai istilah ini. Lihat pada Peter Burke. *Sejarah Dan Teori Sosial*. (Mestika Zed, Penerjemah) Jakarta: Yayasan Obor, 2001, hlm 132-136.

Tindakan ini memiliki makna subyektif yang dilakukan secara sadar guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan ini akan dijalankan oleh aktornya bilamana tindakan tersebut kemudian dianggap memiliki makna subyektif (*subjective meaning*) bagi para aktor yang terlibat. Selain itu tindakan ini akan sangat bergantung pada proses interpretasi dan identifikasi para aktornya atas situasi yang mereka hadapi.⁷⁰

Secara kronologi, proses kolonial ke nasional di wilayah perkebunan dimana masyarakat perkebunan menjadi agen terpenting dalam studi ini, berproses secara dialektis dalam rangka menemukan identitas dirinya dengan berbagai modal yang dimilikinya. Proses dialektika yang berada dalam bingkai determinisme agen-struktur atau menurut konsepsi Giddens disebut sebagai dualisme agen-struktur. Dalam perkataan lain, baik agen maupun struktur masing-masing saling mempengaruhi.⁷¹ Hal yang sama juga dapat dilihat pada pendekatan yang sudah merupakan sintesa dari kedua pendekatan di atas, yaitu hasil dari interaksi antara *agent* (peristiwa) yang *enabling* dengan struktur sosial yang *constraining*. Ini merupakan inti dari pendekatan strukturalis. Ujung dari pendekatan ini adalah menemukan *causal factor* yang obyektif.⁷² Realitas dan nilai baru yang berbeda pada era dekolonisasi menuntut pemahaman yang harus segera direspon oleh kalangan masyarakat perkebunan. Gagasan penguasaan atas tanah yang dimiliki untuk digarap secara mandiri tanpa keterlibatan pihak luar menghadapi tekanan dan realitas baru dari situasi dekolonisasi yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu memaknai dekolonisasi dari sudut masyarakat perkebunan merupakan makna perjuangan tersendiri. Menguasai tanah setelah kebangkrutan perkebunan akibat jaman malaise dimaknai sebagai menggarap tanah milik sendiri secara mandiri. Selanjutnya berupaya mengajukan pengakuan atas penguasaan atas tanah yang dimiliki ke "negara". Pada akhirnya berusaha untuk adanya kebijakan agraria yang sifatnya nasional.

Beragam strategi dilakukan oleh masyarakat perkebunan dalam rangka merebut pemahaman atas makna dekolonisasi pada setiap periode di atas. Tentu

⁷⁰ A. Touraine. *Ibid.*

⁷¹ Antony Giddens. *Social Theory and Modern Sociology*, Stanford: Stanford University Press, 1987.

⁷² Christopher Lloyd. *The Structures of History*, London: Basil Blackwell, 1993.

saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat perkebunan manakala berada pada ranah yang lain tersebut. Keterkaitan konseptual di atas dapat menjelaskan bagaimana proses dekolonisasi perkebunan di Jember dengan kehidupan masyarakat perkebunan sepanjang periode dekolonisasi.

1.5. Tinjauan Atas Studi Terdahulu

Sampai saat ini karya historiografi yang berangkat dari perspektif massa rakyat masih sedikit, walau telah dimulai oleh Kartodirdjo (1966). Secara periodisasi tulisan tentang gerakan massa rakyat pada pra kemerdekaan yang membahas tentang dekolonisasi juga hadir di Indonesia.⁷³ Sementara untuk kurun waktu periode pasca kemerdekaan terdapat beberapa kajian yang membahas soal keberadaan massa rakyat tani,⁷⁴ massa rakyat perkebunan.⁷⁵

Fauzi hanya memaparkan secara kronologis bagaimana gerakan massa rakyat tani dari zaman ke zaman. Secara sekilas kronik gerakan petani dituturkan tanpa ada pendalaman dinamika sosial pada setiap zamannya. Tulisan ini menjadi petunjuk awal bagi memahami perilaku gerakan massa rakyat tani di Indonesia.

Sementara itu Pelzer menyuguhkan gambaran tentang berlangsungnya konflik antara masyarakat perkebunan dengan pihak penguasa perusahaan perkebunan di Sumatera Timur. Pelzer telah menampilkan bagaimana pertarungan dan konflik dalam perebutan penataan sumber-sumber agraria di Sumatera Timur. Tulisan ini hadir memberi warna sejarah konflik, namun belum memberikan gambaran wacana apa yang sedang bertarung, kemudian bagaimana ruang perebutannya, serta bagaimana praktek dominasinya. Kendati begitu tulisan ini

⁷³ S Dingley. *The Peasant Movement in Indonesia*. Berlin: R.L. Prager, 1925. Lihat juga pada Kartodirdjo. *Op. cit.* 1966. Lihat juga Sartono Kartodirdjo. *Protest Movement in Rural Jawa Early Twentieth Centuries*. Singapore: Oxford University Press, 1973. Baca juga Sartono Kartodirdjo. *Ratu adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984. Kemudian lihat juga Onghokham. *Op. cit.* 1987. Dan Onghokham. *Petani Dan Kraton Dalam Politik Tradisional Jawa*. dalam Rais, M Amien (ed). *Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1986.

⁷⁴ Noer Fauzi. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama antara Insist, KPA dengan Pustaka Pelajar, 1999.

⁷⁵ Lihat pada Karl J Pelzer. *Op. cit.* Bandingkan dengan Ann Laura Stoler. *Op. cit.*

telah dapat menuntun guna melihat secara nyata bagaimana konflik tata kelola sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan.

Hal serupa juga dapat dilihat dalam tulisan Stoler yang telah merekonstruksi kekuatan buruh perkebunan di wilayah Sumatera Timur. Apa yang ditulis oleh Stoler ini memberikan gambaran bawah bagaimana kaum buruh perkebunan masuk dalam kerangka kerja sirkuit kapitalisme. Apa yang digambarkan oleh Stoler ini sudah cukup jelas bagaimana menuliskan sejarah dari bawah (*history from below*). Stoler telah merekonstruksi kekuatan kaum buruh perkebunan yang juga memiliki cita-cita politik, keinginan ekonomi dan angan-angan budayanya.

Sementara itu terdapat satu karya historiografi yang secara spesifik membincangkann tentang peristiwa nasionalisasi, yaitu Kanumoyoso.⁷⁶ Tulisan ini menggambarkan betapa pentingnya periode paruh akhir 1950-an di Indonesia. Tulisan ini menyajikan pertarungan wacana yang terjadi di level elit politik dalam melihat persoalan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Tulisan ini hanya merekonstruksi suatu kejadian yang kemudian menariknya pada satu kesimpulan bagaimana praktek nasionalisasi yang dikatakan gagal tersebut. Kendati begitu, tulisan ini telah menjadi petunjuk awal bagi pentingnya merekonstruksi tentang proses nasionalisasi sebagai peristiwa sejarah. Nasionalisasi harus dilihat kembali kesejarahannya, kemudian pertarungan pemahaman atasnya, hingga praktek politiknya dan apa hasil dari pertarungan praktek politik tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Sejarawan dalam praktek kerjanya berhadapan dengan sisa-sisa masa lampau, berupa *remain and record* (ingatan dan catatan). Setidaknya terdapat 2 (dua) sumber yang digunakan guna mendukung proses pengumpulan sumber, tulisan (*document*) dan lisan (*oral*). Sumber tulisan ada 3 (tiga) bahan yang dapat memperkaya rekonstruksi proses kerja penyusunan tesis ini. *Pertama*, studi dokumen berupa kebijakan negara yang berkaitan dengan masalah dekolonisasi dan nasionalisasi. *Setting* sosial-politik pada saat dikeluarkannya berbagai

⁷⁶ Bondan Kanumoyoso. *Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

dokumen tersebut yang sering kali tersembunyi di setiap peraturan dapat diperoleh. Hal ini terkait dengan konteks peristiwa yang melingkupi hadirnya suatu kebijakan. *Kedua*, studi kepustakaan berupa buku-buku, makalah, artikel yang relevan dengan proses kerja penyusunan tesis ini. Ini sekaligus merupakan proses kerja *secondary analysis* guna menganalisis data yang telah disajikan oleh penulis lain yang tujuannya tidak perlu sama. *Ketiga*, membaca koran dan makalah yang dipilih berdasarkan kedekatan dengan masalah. Arti pentingnya pers sering kali memiliki interpretasi lain yang (kadang kala) sangat membantu untuk melakukan interpretasi dan reinterpretasi atas peristiwa sosial.

Sementara untuk sumber lisan, praktek metode *oral history* menjadi alternatif utamanya, yaitu cara memperoleh data dengan mewawancarai aktor sosial (agen) yang hidup pada zamannya. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh ingatan sosial dari massa rakyat bawah mengenai dinamika sosial saat itu, seperti bagaimana perasaan dan pengalaman mereka di masa lampau. Kendati demikian, yang patut dicatat adalah metode ini memiliki persoalan yang sifatnya *inheren*: "subyektifitas" informan dan itu sangat rentan terbangunnya cerita "palsu", termasuk tidak jarang informasi yang diperoleh tidak selalu lengkap dan terkadang juga bertentangan dengan keterangan dari sumber lainnya. Mengenai hal ini Weldon pernah mengingatkan sebagaimana dikutip Weiringa.⁷⁷

"Berapa banyak yang rekaan dan berapa banyak yang pula yang benar? Tidak ada kebenaran objektif tentang ingatan-ingatan kita, karena itu usaha untuk mengatasi perbedaan pun barangkali sia-sia belaka. Memang benar. Tetapi ingatan adalah sesuatu yang tidak menirukan ini hidup kumpulan dari masa di masa lampau. Tetapi ingatan adalah sesuatu yang tidak menentu, yang mengalami pengalaman, yang menyaring yang kasar atau yang lembut menurut cita rasa sesaat, pola zaman, kelompok yang kebetulan seiring jalan: cara kita berbarengan pada kejadian-kejadian tertentu, atau membukakan tangan kita menyambutnya."

Lantas bagaimana menyisiati hal itu? Bagaimana membedakan antara "khayalan" dengan "kebenaran"? Akhirnya bagaimana harus ditafsirkan? Tidak mudah mengurai jawabannya, karena membicarakan massa rakyat di Indonesia

⁷⁷ Saskia Eleonora Weiringa. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya, 1999, hlm 1.

selama ini lebih bermakna pejoratif. Karenanya berbagai teknis wawancara diterapkan baik secara individu, kelompok ataupun dalam bentuk diskusi formal. Keragaman teknik tersebut dianggap penting bukan hanya untuk pemeriksaan ulang (*re-checking*), akan tetapi juga sebagai proses pemeriksaan ulang (*re-checking*). Dengan demikian kesalahan interpretasi atas data dapat dihindari, sekaligus sebagai alat kontrol yang dapat menekan unsur "subyektifitas" ke tingkat paling rendah, keuntungan lainnya keanekaragaman informasi dan sudut pandang. Sementara guna membangun interpretasi ada tiga praktek yang dijalankan. *Pertama*, wilayah massa ada 3 (tiga) kelompok yang diwawancarai: (i) anggota organisasi masyarakat perkebunan dari berbagai golongan; (ii) buruh perkebunan, petani tanaman perkebunan dan mantan pegawai perkebunan; (iii) massa yang terlibat dalam proses ambil alih, ini dilakukan guna menemukan kembali jejak-jejak peristiwa dan bubungan antar substansi, berikut *scope spatial*, dan *scope temporalnya*. *Kedua*, wawancara dengan para pengambil kebijakan (lokal dan nasional). *Ketiga*, wawancara dengan informan yang dianggap *knowledgeable* atas permasalahan.

Adapun sumber tertulis (dokumen) didapatkan di beberapa tempat, khususnya arsip. Sumber tertulis didapatkan di beberapa tempat: (i) di Jakarta: Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan LIPI; (ii) Monumen Pers di Solo; (iii) di Surabaya: Arsip Jawa Timur dan Surabaya Post; (iv) di Jember: Perpustakaan Fakultas Sastra-Universitas Jember, Kantor Arsip Jember dan Perpustakaan Pusat Penelitian Tanaman Perkebunan di Kaliwining, Jember; (v) KITLV di Leiden dan ARA di Den Haag; (vi) selain itu juga dari hasil wawancara (sumber lisan); (vii) foto-foto Jember di masa lampau sebagai representasi visual di masa lampau yang didapat dari Pemerintah Daerah Tingkat II Jember; dan foto-foto juga didapat dari KITLV di Leiden.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran struktur pada penelitian ini, sekaligus dapat diketahui arah penulisan tesis ini sistematika penulisan merupakan petunjuk awal.

Secara garis besar tulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

BAB 1. Pendahuluan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Studi Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2. Membicarakan permasalahan tentang konsepsi dan definisi mengenai masyarakat perkebunan. Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang masyarakat perkebunan tulisan ini diawali dengan gambaran mengenai usaha tanaman perkebunan. Selanjutnya tulisan ini menjelaskan gambaran mengenai hadirnya masyarakat perkebunan. Semakin berkembangnya masyarakat perkebunan disusul dengan lahirnya kota perkebunan.

BAB 3. Ini menjelaskan bagaimana situasi perkebunan dari masa ke masa sepanjang periode dekolonisasi di Indonesia. Pada bab ini menjelaskan keberadaan masyarakat perkebunan dalam ranah perkebunan. Pertama-tama tulisan ini menggambarkan rentang masa dimana masyarakat perkebunan tanpa tuan kebun. Selanjutnya tulisan ini menjelaskan bagaimana perkebunan menjadi ranah perebutan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tata kelola sumber-sumber agraria. Kemudian dilanjutkan dengan tulisan yang menggambarkan bagaimana masyarakat perkebunan dan dinamika populisme politik. Masyarakat perkebunan mulai terlibat dalam proses organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya tulisan ini menghadirkan masyarakat perkebunan yang diwarnai dengan situasi penuh konflik dan dinamika politik.

BAB 4. Tulisan ini merekonstruksi suatu peristiwa dimana masyarakat perkebunan dan nasionalisasi di Indonesia. Pertama-tama tulisan ini menjelaskan terdapatnya upaya Indonesianisasi di wilayah perusahaan perkebunan. Selanjutnya tulisan ini menggambarkan bahwa proses pengambilalihan sebagai wujud dari kedaulatan. Tulisan pada bab ini diakhiri dengan gambaran pasca pengambilalihan.

BAB 5. Tulisan ini merupakan penutup sekaligus menyajikan suatu refleksi dari studi ini tentang masyarakat perkebunan dan keberadaannya dalam pentas sejarah sosial.

Bab 2

MASYARAKAT PERKEBUNAN

2.1. Usaha Tanaman Perkebunan

Usaha pembudidayaan tanaman perkebunan, khususnya tembakau, telah dilakukan oleh masyarakat di wilayah Jember,¹ termasuk Situbondo dan Bondowoso. Praktek budidaya tanaman perkebunan ini merupakan bagian dari tradisi bercocok tanam masyarakat pedesaan, selain tanaman pangan. Usaha pembudidayaan tersebut semakin berkembang pesat dilakukan oleh masyarakat Jember, manakala hadirnya perusahaan perkebunan partikelir milik kolonial,² dengan segala praktek ekonominya dapat dipastikan melibatkan modal besar. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan politik negara kolonial. Dengan demikian, peningkatan kuantitas pembudidayaan tanaman perkebunan di wilayah ini tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan politik kolonial Belanda, terutama dalam kebijakannya mengenai bidang ekonomi terhadap masyarakat jajahan.³

Jember, tentu saja sampai sekarang ini, merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian timur dan pesisir selatan Pulau Jawa. Kota ini berjarak sekitar 200 km dari arah tenggara kota Surabaya. Posisi kota ini terletak pada garis meridian 114-115 derajat bujur timur dan 8-9 derajat bujur lintang selatan.⁴ Sebagian besar daerah ini merupakan dataran subur, mengingat letaknya di tengah-tengah beberapa pegunungan seperti: Argopura, Ijen, Jang dan Raung.

¹ Untuk gambar peta Jember dapat dilihat pada lampiran peta 1.

² Untuk gambar peta perkebunan partikelir dapat dilihat pada lamperan peta 2.

³ Berawal dari kritik kaum liberal yang melihat keuntungan yang melimpah yang diperoleh pemerintah melalui sistem tanam paksa. Mereka menuntut liberalisasi, bahwa urusan wilayah jajahan tidak lagi menjadi monopoli pihak kerajaan dan menteri tanah jajahan. Sejak saat itu lahir kebijakan yang menjamin iklim investasi di bidang perkebunan, berupa Undang-undang Agraria Kolonial (*Agrarische Wet* 1870). UU ini menguatnya keberadaan perusahaan perkebunan dan pertambangan partikelir besar di Jawa dan Sumatera. Lihat pada Robert van Niel. *Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya*. dalam Anne Both (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm 101.

⁴ ANRI Besoeki 2a.5. *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki en Banjoewangi*. 1832.

Temperatur udaranya bervariasi, pada musim kering suhu udara berkisar 30° Celcius, sedangkan pada musim penghujan berkisar 15° Celcius. Berdasarkan iklim dan curah hujan yang berkisar 1500-2000 mm, daerah ini sangat cocok untuk pembudidayaan tanaman perkebunan kualitas ekspor seperti tembakau (khususnya jenis *na-oogst*),⁵ tebu, karet, kopi serta kakao.

Atas dasar kondisi geografi seperti inilah, kemudian kekuatan modal besar partikelir dengan berani menanamkan investasinya untuk melahirkan perusahaan perkebunan di wilayah ini, tentu saja dengan dukungan kebijakan politik pemerintah kolonial. Sejak adanya sistem baru tersebut banyak pengusaha partikelir Belanda yang menanamkan modalnya dengan mengelola tanaman-tanaman komoditi ekspor khususnya tembakau, yang kemudian dalam perkembangannya diikuti oleh tanaman perkebunan seperti kopi, coklat, kakao dan tebu. Dengan munculnya sistem ini, maka berdatangan orang-orang kaya dari Belanda dan Eropa lainnya guna menanamkan modalnya di wilayah Jember dan sekitarnya.

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan daftar perkebunan di wilayah Jember.⁶

Perkebunan di Djatiroto-Tanggul, Jember

No.	Onderneming	Pemilik/ex Pemilik	Alamat/letak kebun	Tanaman
1.	Bandjarberu (Lawang Kedaton)	NV Rubber Cult. Mij. "Amsterdam" Amsterdam.	Halte Djatiroto	Kopi
2.	Djamintoro (Pasirian Lor & Kidul)	NV. Cult Mij "Djamintoro" Bondowoso	± 8 km dari Halte Djatiroto pinggir jalan raya part. Dari Djamintoro singgah di desa Djati Koong ke Djatiroto	Karet dan Kopi
3.	Gerengredjo	NV Itern. Cred & Hsvrg "Rotterdam" Rotterdam	± 200 m dari Halte Petung pinggir djaln raja dari Djember ke Tanggul	Karet dan Kopi

⁵ Jember sangat cocok untuk budidaya tembakau *na-oogst* dikarenakan tanahnya mempunyai bahan induk vulkan dengan susunan intermedier sampai basa, dan umumnya mempunyai kisaran pH 5,0-7,5. Lihat pada H. Safioedin. *Sepintas Tentang Jenis Dan Macam Tanah Dalam Wilayah PTP XXVII Serta Perihal Pemilihan Tanah Untuk Tembakau Besuki*. Jember: Dinas Research PTP XXVII, 1973. Lihat juga I. Hartana. *Budidaya Tembakau Cerutu I Masa Pra Panen*. Jember: Balai Penelitian Perkebunan Bogor sub Balai Penelitian Budidaya Jember, 1978, hlm 22. Lihat juga Soedarmanto Achmad Abdullah, *Budidaya Tembakau*. Jakarta: CV Yasaguna, 1979, hlm 20. Lihat juga pada Ir. Slamet Djojosoediro, *Pertembakauan di Indonesia*. Surabaya: Resmi 1967.

⁶ Untuk daftar perkebunan partikelir yang ada di wilayah Jember dapat dilihat pada Ismet. *Daftar-Tanah Perkebunan-perkebunan di Indonesia (The List of Estate Throughout Indonesia)*. Bandung: Biro Sinar CV, 1970, hlm 188-189 dan 191-193.

4.	Gunung Gambir (Tanah Merah)	NV Rubber Cult. Mij. "Amsterdam" Amsterdam.	± 18 km dari halte Djatiroto pinggir djalan raja Part. Dari Djatiroto ke Djember.	Kopi, Teh dan Karet.
5.	Gondang	NV Ruber Cult. Mij. "Gondang" 's Gravenhage	± 14 dari halte Tanggul pinggir djalan desa Tanggul singgah Desa Manggisian ke Kali Tengah dan terus ke Gondang.	Karet, Kopi dan Teh.
6.	Kali Suko	NV Rubber Cult. Mij. "Amsterdam" Amsterdam.	Tanggul	Karet dan Kopi
7.	Kali Anget (Suko Kulon)	The Sukokulon Rubber Estate Ltd. Djakarta	± 6 Km dari Halte Tanggul pinggir djalan raja dari Klakah ke Djember	Karet
8.	Kali Tengah	Societe de Culture de Caoutchouc "Kali Tengah" Paris	± 10 ½ km dari halte Tanggul pinggir djalan Part. Dari Tanggul atau Sumber Tenggulun ke Kali Tengah	Karet
9.	Karang Anom	NV Rubber Cult. Mij. "Amsterdam" Amsterdam.	± 16 km dari halte Djatiroto pinggir djalan raja Djatiroto/Tanggul ke Djember (sampai Watu-Urip tanah Negara kira-kira 8 km djalan tanah Eigendom Onderneming)	Karet
10.	Klatakan (Petung-redjo)	NV Landb. Mij. Ond. "Djember"	± 6 km dari halte Bangsalsarie dan 5 km dari halte Tanggul	Karet dan Kopi
11.	Manggisian	NG Grevers, Holland	± 3 km dari halte Tanggul, pinggir djalan Part. dari Tanggul, atau Manggisian ke Gondang.	Tembakau
12.	Sumber Aju	The Sumber Aju Rubber Est. Ltd. London	± 14 km dari Halte Tanggul pinggir djalan Desa dari Kandangan melewati Tanggul ke Djatiroto.	Kopi dan Karet
13.	Sumber Tenggulun	Mij. t Expl. v/h Land "Kali Mrawan" Surabaya	± 5 km dari Halte Tanggul djalan Desa dari Tanggul ke Onderneming	Karet dan Kopi
14.	Zoelandia	NV Rubber Cult. Mij. "Amsterdam" Amsterdam.	± 9 km dari Halte Tanggul kesatu djalan keluar atau djalan raja dari Tanggul ke Djember	Karet

Perkebunan Daerah Djember - Utara

No.	Onderneming	Pemilik/Ex. Pemilik	Alamat/letak kebun	Tanaman
1.	Badean (Kedaton)	NV Landb. Mij. "Oud Djember" Deventer.	± 10 km dari Halte Rambipudji	Karet, Kopi dan Tjoklat
2.	Djelbuk	NV. Cult. Mij. "Djelbuk" 's Hage	± 5 km dari Halte Ardjana pinggir djalan raja dari Surabaya melewati Pasuruan/Djember Bondowoso	Tembakau
3.	Djubung	NV. Besuki Tabak Mij. Amsterdam	Kalisat	Tembakau
4.	Durdjo	NV Djember Rubber Cult. en Hdl. Mij. Surabaya	± 11 km dari Stasion Djember pinggir djalan raja dari Djember ke Durdjo	Karet dan Kopi
5.	Gemukmas	Kol. Tabak Imp. Mij. v/h G. Klomp. Surabaya	Djember	Tembakau
6.	Kali Manggis	Tjorah-Mas /	± 20 km dari Stasion Djember	Karet dan

	(Keputren)	Keputren Estate Ltd. London	pinggir djalan desa dari Mentjek ke Ondern.	Kopi
7.	Kali Mrawan	NV. Mij. t. Expl. v/h Land. "Kali Mrawan" Surabaya	± 22 ½ km dari Halte Kalisat pinggir djalan desa dari Djember ke Kalisat	Karet dan Kopi
8.	Modjo (Sumber Djeruk)	NV. Besuki Tabak Mij. Amsterdam	± 1 km dari Halte Kotok pinggir djalan raja dari Djember ke Kalisat	Tembakau
9.	Prajeakan No. 3	Tabak Exp. & Imp. Cie p/a J. Baggen Djember.	Djember	Tembakau
10.	Raijap	NV Landb. Mij. "Oost Java" Rotterdam	± 14 ½ km dari Stasion Djember pinggir djalan desa dari Ondern. "Rayap" melewati Baraten ke Djember.	Kopi
11.	Sentool	NV. Djember Rubber Cultuur & Handel Mij. Surabaya	± 25 km dari Station Djember pinggir djalan raja Djember/Panti dan di "Kedaton"	Karet dan Kopi
12.	Sukasari	Landbouw Mij. "Sukasari" Surabaya	± 1 ½ km dari Halte Sukasari	Tembakau
13.	Sukokerto Adjong	NV Landb. Mij. "Sukokerto-Adjong" Rotterdam	± 2 km dari Halte Kalisat, pinggir djalan raja dari Jember / Kalisat ke Bondowoso	Tembakau
14.	Sumberbulus	Cult. & Handel Mij. Kaliputih	Kalisat	Kopi
15.	Tjorah Mas (Tjorah Wungkal)	Tjorah Mas / Keputren Estates Ltd. Londen	± 25 km dari Halte Kalisat pinggir djalan desa radi Patjengke Pertelon	Karet

Perkebunan Daerah Djember - Selatan

No.	Onderneming	Pemilik/Ex. Pemilik	Alamat/letak kebun	Tanaman
1.	Banda Alit	NV Cult. Mij. Parigi Serang	Tramstation Ambulu sampai dengan Tjorah Nangka	Karet dan Kopi
2.	Bandjarsari (Djelbuk)	NV. Cult. Mij. "Djelbul" 's Gravenhage	± 3 km dari Halte Petung pinggir djalan desa dari Perung ke Onderneming	Karet dan Kopi
3.	Bedjing Sanen (Kali Sanen)	NV Landb. Mij. "Oud Djember" Deventer.	± 33 km dari Stasion Djember pinggir djalan Part. dari Kalisanen melewati Wonodjati / Kawangke Djember	Karet dan Kopi
4.	Besaran Kawang (Dampar & Renes)	NV Landb. Mij. "Oud Djember" Deventer.	± 15 km dari Stasion Djember pinggir djalan raja dari Temuran melewati Pakem ke Djember	Karet dan Kopi
5.	Binatangan (Widodaren)	NV Cult. Mij. "Djember" Parisj	± 24 km dari Halte Rambipudji.	Karet dan Kopi
6.	Glantangan	Mij. t. Erpl. der Ver. Majang Landen Amsterdam	Halte Mangli ± 24 km dari Stasion Djember, pinggir djalan Part. dari desa Temporedjo melewati Ondernm. Kali Sanen	Karet dan Kopi
7.	Gunung Majang	NV Mij. t. Expl. d. Vereenigde. Majanglanden	± 12 km dari Stasion Djember pinggir djalan desa dari Mumbulsarie ke Djember	Karet dan Kopi
8.	Gunung Pasang (Kali Klepuh)	NV Cult. Mij. "Kali Klepu" (Gunung Pasang) Djakarta.	± 19 km dari Stasion Djember pinggir djalan desa dari Mangli ke Djember	Karet dan Kopi

9.	Kali Badjing	NV Vereenigde. Majanglanden, Amsterdam	± 44 km dari Stasiun Djember	Karet dan Kopi
10.	Kalidjampo (Petungroto)	NV. Cult. Mij. "Kalidjampo" Haarlem	± 16 km dari Stasiun Djember	Karet dan Kopi
11.	Kaliwining (Rawatamtu)	Precetuin Besoekisch Proefstation Djember	Djember	Karet dan Kopi
12.	Kotta Blater	NV. Cultuur Ond "Kotta Blater" Rambipudji	± 8 km dari Halte Ambulu pinggir jalan desa dari Ambulu ke Tjorah Nangka, keluar jalan raja dari Djember ke Ambulu / Djenggawah	Karet
13.	Lengkong (Mumbul)	NV Landb. Mij. "Oud Djember" Deventer.	± 12 km dari Stasiun Djember	Karet dan Kopi
14.	Rawa Tamtu	NV. Besuki Tabak Mij. 's Gravenhage	± 5 km dari Halte Rambipudji pinggir jalan raja dari Rambipudji ke Puger.	Tembakau
15.	Renteng	NV Landb. Mij. "Oud Djember" Deventer.	± 9 km dari Rambipudji dan ± 14 km dari Djember	Karet dan Kopi
16.	Silosanen	NV Cult. Mij. "Belirie" Amsterdam	± 31 km dari Halte Kalisat pinggir jalan desa dari Silosanen melewati jalan Part. dari Patje, Silo dan Sempolan ke Kalisat	Karet dan Kopi
17.	Sumber Tengah	NV. Cult. Mij. "Sumber Tengah" Londen	± 12 km dari Sempolan Ijn Kalisat / Banjuwangi ± 16 km dari Kalisat	Karet dan Kopi
18.	Sumber Wadung	NV NI Rubber & Koffie Cult. Mij. Brussel.	± 30 km dari Stasiun Kalisat	Karet
19.	Tugusari	NV. Cult. Mij. "Tugusari" Amsterdam	± 6 km dari Halte Bangsalsari pinggir jalan raja Tanggul ke Rambipudji (4 ½ km)	Karet dan Kopi
20.	Wonodjati	Mij. t. Expl. der Ver. Majang Landen Amsterdam	± 29 km dari Stasiun Djember	Karet dan Kopi
21.	Wonowiri	Mij. t. Expl. der Ver. Majang Landen Amsterdam	± 13 km dari Halte Ambulu dan ± 25 km dari Stasiun Djember, pinggir jalan Part. dari Kotta Blater ke Wonowiri.	Karet dan Kopi

Penetrasi kapitalisme --untuk wilayah pertanian-- di negeri jajahan diawali dari proses kapitalisasi perkebunan, dan itu berbarengan dengan perkembangan ide kapitalisme di Belanda. Pada paruh ke dua abad XIX, di Hindia Belanda kemudian ditandai oleh kecenderungan menuju suatu sistem "*plantation estate company*" yang sangat kapitalistik. Terutama dalam paruh ke dua abad XIX, di wilayah "Indonesia" (khususnya di wilayah Sumatera Utara) kemudian ditandai

oleh kecenderungan menuju suatu sistem “*plantation estate company*” yang sangat kapitalistik. Memang sifat kapitalistik itu ternyata tidak sepenuhnya tercipta justru karena adanya ciri-ciri khusus yang *inherent* dalam sistem “*plantation estate company*”. Diantara berbagai negara yang sebagian besar, corak masyarakatnya dan corak produktifnya tentu berbeda-beda. Secara historis dapat dilacak bahwa sekalipun di sana-sini terjadi perubahan-perubahan sesuai perkembangan jaman, tetapi sistem “*plantation estate economy*” mempunyai citra umum yang dicerminkan oleh sejumlah ciri-ciri yang melekat padanya.⁷

Sampai pertengahan abad XX menurut Gunawan Wiradi terdapat lima dari sebagian ciri-ciri tersebut masih sangat jelas membekas. Ciri-ciri tersebut adalah, *Pertama*, sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditi hasil perkebunan harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional. *Kedua*, perkebunan besar menguasai tanah yang luas; tak terbatas atau tak dibatasi. *Ketiga*, kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja yang tersedia di pasar, karena itu diciptakanlah mekanisme “ekstra pasar” (budak belian; kuli kontrak; transmigrasi; dan sejenisnya), khusus untuk kuli kontrak merupakan kasus yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. *Keempat*, perkebunan besar dikelola dengan cara sangat ketat, dan tercatat dalam sejarah sebagai “cenderung bengis”. Birokrasi semacam ini oleh sementara pakar disebut dengan istilah plantokrasi.⁸ *Kelima*, birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau oleh kontrak sosial, karena pada umumnya perkebunan besar merupakan *enclave* yang terisolasi dari masyarakat (kecuali barangkali perkebunan tembakau dan tebu di Jawa).⁹ Pada saat inilah unsur-unsur

⁷ Lihat antara lain George L Becford. *Persistent Poverty Underdevelopment in Plantation Economies of the Third World*. Oxford University Press. London, Toronto (Sixth Printing), 1979. Kemudian bandingkan dengan Jan C Breman. *Menjinakkan Sang Kuli*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, 1997.

⁸ Sistem perkebunan bercorak kapitalis yang kunci suksesnya terletak pada mobilisasi tenaga kerja wajib dan upahan melalui penggunaan elit desa dalam struktur dan mekanisme birokrasi patrimonial di Jawa, dan pemerasan kuli kontrak di Sumatera Timur. Sistem dengan organisasi kerja otokratis dan otoritarianis, menjadi sarana eksploitasi tenaga kerja. Adapun modusnya adalah pengerahan, pendisiplinan, pengupahan, dan distriminasi etnik. Pemerasan luar biasa telah menghancurkan moral petani, pekerja dan kuli.

⁹ Lihat pada Gunawan Wiradi. *Perkebunan Dalam Wacana Semangat Pembaruan*. Makalah dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusar Kajian Agraria IPB, Bogor, 2000.

dasar dari sistem ekonomi yang timpang antara diri *colonizer* dengan *colonize*, mendapatkan bentuknya secara nyata.

Demikianlah wajah perkebunan tercermin dalam struktur sosial baru yang hadir kemudian. Sejak kehadiran orang-orang Eropa memiliki status sosial sebagai pemilik modal sekaligus pengambil kebijakan dan pengelola utama dari perkebunan. Sementara masyarakat perkebunan sebatas menjadi salah satu faktor dalam proses produksi perkebunan yang dieksploitasi tenaga kerjanya guna penanaman, pemuliaan dan panen, termasuk pengolahan bahan mentah di gudang-gudang. Dengan demikian masyarakat perkebunan keberadaan status sosialnya berada pada lapisan bawah.

Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh para ahli ekonomi kolonial masa silam, bahwa ekonomi koloniallah yang mampu menghubungkan penduduk Jember dengan ekonomi dunia. Dampak hadirnya perusahaan perkebunan di daerah Jember ialah masyarakat mulai tersedot dalam sirkuit kapitalisme perkebunan. Selanjutnya masyarakat lebih terlihat aktif dengan peredaran mata uang. Bahkan secara teori pertumbuhan jumlah pendapatan masyarakat Jember menjadi meningkat. Sebelum kedatangan para pengusaha perkebunan partikelir, penduduk hanya memperoleh penghasilan dari penjualan hasil bumi tanaman pangan seperti padi, jagung dan palawija. Keadaan seperti ini berubah manakala perusahaan perkebunan mengenalkan sistem perekonomian yang baru, sehingga sebagian besar penduduk Jember memperoleh tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dari pada sebelumnya. Pada titik ini telah berlangsung pergeseran ukuran kemakmuran pada masyarakat perkebunan, karena ukuran kemakmuran yang diberlakukan pada sirkuit ekonomi ini adalah uang.

Para petani memperoleh uang dari hasil penjualan tembakau yang saat itu harga jualnya berkisar f 22 perseribu pohon. Dengan demikian petani yang menggarap lahan seluas 1 bau akan memperoleh uang sebesar f 256.¹⁰ Bagi petani yang memiliki sawah masih dapat memperoleh uang sewa dari perusahaan setiap bau sekitar f 5 per musim tanam. Selain itu, petani juga memperoleh tambahan dari penjualan hasil hutan, seperti kayu, bambu, agel dan rotan, karena perusahaan

¹⁰ R. Broersma. *Besoeki een Gewest in Opkomst*. Amsterdam: Scheltema & Holkemas Boekhandel, 1912.

perkebunan sangat membutuhkan bahan tersebut guna kepentingan pembuatan gudang, pembungkus tembakau dan sujen tembakau. Manakala terdapat waktu senggang, penduduk setempat bisa bekerja pada perusahaan perkebunan dengan upah berkisar *f* 15 sampai dengan *f* 20. Bahkan penduduk juga bisa menyewakan gerobak sapinya untuk transportasi dari perkebunan ke gudang, atau hingga pengiriman ke tempat pengumpul sebelum diangkut ke pelabuhan. Setiap gerobak sapi mampu mengangkut delapan pak tembakau dengan ongkos sebesar *f* 12,80.¹¹

Pada akhirnya terdapat pendapat yang menyatakan bahwa di Jember pada jayanya perusahaan perkebunan tercipta situasi yang harmonis dan bercorak simbiosis mutualistik yang saling menguntungkan bagi pihak *ondernemer* (termasuk kalangan *opkoper*), sekaligus juga memberi keuntungan pada penduduk Jember.¹² Beroperasinya berbagai perusahaan perkebunan partikelir para era kolonialisme di Jember telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk pembangunan ekonomi.¹³ Pada level yang lain berlangsung pula kehidupan sosial yang kemudian lebih ditentukan pada hubungan status ekonomi. Sementara kehidupan masyarakat saat itu tidak jauh dari kemiskinan.

2.2. Hadirnya Masyarakat Perkebunan

Secara geografi dinamika masyarakat di Pulau Jawa bagian timur terletak di pantai utara. Wilayah pantai ini sangat strategis, karena letaknya dikelilingi kota-kota pantai di utara Pulau Jawa dan Selatan Pulau Madura. Wilayah ini menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan, tidak saja bagi masyarakat Jawa maupun Madura, tapi juga dari Bugis dan Makasar.¹⁴ Selain itu, wilayah ini menjadi penghubung dari proses migrasi bagi masyarakat Madura ke wilayah pedalaman atau Pulau Jawa bagian timur yang terletak di selatan, yaitu Jember.

Sebagaimana diungkapkan di atas, masyarakat Jember merupakan kumpulan dari beragam etnis, yang prosesnya melalui migrasi. Pada awalnya

¹¹ Kort Overzicht en Bedrijf der Onderneming “*Oud Djember*”, Deventer, 1909.

¹² Seperti kesimpulan Arifin, Edy Burhan. “*Emas hijau di Jember: Asal-usul, Pertumbuhan Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980*. (Tidak diterbitkan), Tesis, UGM. 1989.

¹³ JAC Mackie. *Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern*. Jilid II, Djakarta: PT Pembangunan, 1957, hlm 163.

¹⁴ Masyhuri. *Menyisir Pantai Utara*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara – Perwakilan KITLV, 1995, hlm 22.

proses migrasi orang-orang dari Pulau Madura tersebut masih bersifat coba-coba. Para migran dari Pulau Madura tersebut datang melalui Pelabuhan Penarukan¹⁵ yang secara geografi “berseberangan” dengan daerah Sumenep (Madura). Proses selanjutnya melalui Besuki dan Bondowoso, hingga akhirnya tiba di wilayah Jember. Sementara wilayah yang ditempati oleh para migran dari Pulau Madura saat itu terletak di Maesan (sekarang bagian dari Bondowoso), Jelbuk dan Arjasa¹⁶ serta Jember sendiri. Pada saat itu Jember dan ketiga tempat tersebut masih merupakan bagian *onder distrik* Bondowoso. Hingga tahun 1789, Jember sebagai *onder distrik* memiliki jumlah penduduk berkisar 8.000 jiwa. Artinya pada masa itu Jember masih merupakan daerah berpopulasi rendah (*unpopulated*) dan masih merupakan wilayah pedalaman¹⁷ dengan basis usahanya adalah pertanian subsistensi.

Dalam perkembangan selanjutnya, secara administratif Jember menjadi salah satu distrik afdeling Bondowoso, yang pada tahun 1845 memiliki 36 desa dengan jumlah penduduk sebesar 9.237 jiwa. Jumlah tersebut ini belum termasuk Puger (yang sekarang menjadi salah satu kecamatan di Jember), karena menurut dokumen *Collectie Nederburgh* sebagaimana dirujuk Arifin¹⁸ pada tahun 1803, Puger termasuk wilayah Blambangan yang diperintah oleh Bupati Tumenggung Suradiwikrama dengan jumlah penduduk 4.810 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan manakala Puger juga menjadi salah satu distrik di afdeling Bondowoso pada tahun 1845 dengan jumlah penduduk 9.924 jiwa. Pada tahun 1866 jumlah penduduk semakin meningkat tajam karena adanya gelombang migrasi para pendatang dari berbagai daerah ke Jember.

Hingga akhir tahun 1870-an, orang dari Pulau Madura merupakan jumlah terbesar dengan 44.041 jiwa yang banyak tinggal di Jember bagian utara seperti:

¹⁵ Soal Pelabuhan Panarukan dijelaskan sekilas pada sub-bab “Komunikasi” dengan Pasar Internasional di bawah.

¹⁶ Ketiga nama tempat tersebut letaknya di Jember bagian utara.

¹⁷ Merujuk pada keterangan Residen Besuki pada awal 1800-an, masyarakat Madura belum tertarik bermigrasi ke Jember. Selain alasan transportasinya sangat sulit, Jember wilayahnya masih berupa hutan, juga tanahnya yang *moeras* (berawa). ANRI Besoeki 8.4. *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki*. 1886.

¹⁸ Edi Burhan Arifin. *Loc. cit.* hlm 21-24.

Jelbuk, Arjasa, Kalisat, Sukokerto, Mayang dan Jember sendiri.¹⁹ Proses migrasi dari masyarakat Madura ke Jember ini dikarenakan faktor kesuburan alam. Pulau Madura pada saat itu merupakan wilayah yang tandus. Selain itu penduduk Jember saat itu juga hadir dari komunitas masyarakat Jawa yang sebagian besar berasal dari daerah Jawa Timur bagian barat seperti dari Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, dan Kediri, di samping dari daerah *vorstenlanden*. Jumlah penduduk Jember dari komunitas orang Jawa ini berjumlah 23.822 jiwa yang sebagian besar bermukim di Jember bagian selatan, yaitu Ambulu, Puger, Wuluhan, Tanggul dan Rambipuji.²⁰ Kebanyakan penduduk Jember yang berasal dari Suku Jawa ini melakukan migrasi saat berakhirnya Perang Jawa (1825-1830). Selanjutnya penduduk Jember juga berasal dari keturunan orang Osing, merupakan suku lokal yang mayoritas tinggal di Banyuwangi. Pada saat itu orang Osing ini tinggal di Jember sebanyak 1.580 jiwa. Selain itu terdapat pula penduduk Jember yang hadir dari bangsa lain sebesar 7.080 jiwa, seperti dari orang-orang keturunan Tionghoa, Arab dan Belanda.²¹

Pertemuan budaya antar suku bangsa di Jember yang disusul dengan dialektika budaya melahirkan sintesa budaya baru, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah pendalungan. Sebuah budaya yang lahir dari interaksi terus menerus atas etnis yang hadir di Jember. Dalam kreasi kesenian dan bahasanya juga mengalami perpaduan antar berbagai budaya dari berbagai suku bangsa tersebut. Dalam konteks bahasa tidak hanya perpaduan tapi juga melahirkan kreasi bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing etnis yang ada di Jember. Begitu juga dengan kesenian yang masing-masing etnis bisa memainkan kesenian dari etnis lain yang rasanya sudah menjadi bagian dari etnis tersebut, bahkan sudah terdapat perpaduan.²²

Sebagaimana disinggung di atas, dinamika dan pertumbuhan demografi sosial di Jember mengalami percepatan manakala berlangsung proses penetrasi

¹⁹ Nama-nama daerah yang disebutkan sekarang menjadi nama-nama kecamatan di Jember. Berbagai daerah tersebut terletak di Jember bagian utara.

²⁰ Nama-nama daerah yang disebutkan sekarang menjadi nama-nama kecamatan di Jember. Berbagai daerah tersebut terletak di Jember bagian selatan.

²¹ Lihat pada ANRI Besoeki 8.4. *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki*. 1866.

²² Tim Peneliti Fakultas Sastra Universitas Jember. *Geografi Bahasa Jawa di Kabupaten Jember*. (Tidak diterbitkan) Fakultas Sastra Universitas Jember, 1981, hlm 18.

kapitalisme yang maujud dalam bentuk perkebunan partikelir.²³ Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, menurut Arifin²⁴ ada empat investor partikelir perintis yang menanamkan modalnya guna membuka lahan perkebunan di Jember dan yang terbesar adalah LMOD milik George Biernie.²⁵ Seiring kebutuhan pasar internasional, maka pada paruh awal 1920-an banyak pengusaha yang kemudian ikut menanamkan modalnya. Terdapat beberapa perusahaan perkebunan partikelir yang kemudian hadir di Jember, seperti: Maatschappij Goemelar (MG), Maatschappij Soember Djoeruk (MSD), NV Cuultur Maatschappij Zuid Djember (CMZD), NV Besoeki Tabaks Maatschappij (BTM), NV Tabaks Onderneming Soember Baroe (TOSB), NV Tabaks Cultuur Maatschappij Soember Sarie (CMSS), NV Landbouw Soekasari (LS), HG Grevers (Onderneming Magisan).²⁶

Sejak hadirnya perusahaan perkebunan masyarakat Jember mengalami perubahan perilaku ekonomi. Kepemilikan tanah bagi penduduk lokal yang sebelumnya diperuntukan hanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan subsistensi sehari-hari. Akan tetapi dengan hadirnya investasi keberadaan tanah pada akhirnya mendapat beban nilai ekonomis. Penduduk lokal mulai melakukan pembudidayaan tembakau secara bebas guna dijual ke pengusaha.²⁷ Di samping itu penduduk lokal juga mulai menyewakan tanah-tanahnya kepada pihak perkebunan guna pembudidayaan tembakau *na-oogst* selama satu sampai lima tahun. Kalau merujuk pada adat istiadat di Jember, lahan pertanian baik yang berupa tanah tegalan maupun tanah sawah statusnya adalah tanah milik

²³ Menurut Robert Van Niel. *Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya*. Ann Both (ed.). Jakarta: LP3ES, 1988, hlm 109. Pada paruh akhir dasawarsa 1850-an, modal partikelir Belanda sudah semakin gencar mengalir ke Jawa, termasuk ke Jember.

²⁴ Lihat pada Edi Burhan Arifin, *Loc. cit.* hlm 56-58.

²⁵ Para perintis ini nantinya dikenal masyarakat dengan sebutan *toean ladju* atau tuan lama. Berbeda dengan pengusaha yang tidak terlibat dalam proses pembudidayaan, hanya membeli tembakau langsung dari petani dikenal dengan sebutan *toean anjar*, tuan baru. *Ibid.* Patung Goerge Biernie dapat dilihat pada lampiran foto No. 5.

²⁶ Samino. *Beberapa Catatan Tentang Sedjarah Penanaman Tembakau Tjerutu di Indonesia*. dalam *Tembakau*, tahun I, No. ½ Djanuari – Djuni 1962, hlm 10.

²⁷ Sejak saat itu masyarakat Jember menganggap persoalan budidaya tembakau merupakan kegiatan yang bersifat *traditional cash crop* (tanaman yang bersifat tradisi). Seluruh masyarakat Jember terlibat dalam prosesnya dan diselenggarakan setiap tahun. Lihat pada Djasmari Adenan. *Analisa Aspek Produksi Pada Unit Usaha Tani Tingkat Petani*, dalam *Naskah Karya*. No. 7. Sidang Komisi Tehnis Perkebunan ke V Budidaya Tembakau di Sala, 1979, hlm 20.

perorangan.²⁸ Hak atas kepemilikan tersebut biasanya mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat desa. Tanah milik perorangan itu merupakan suatu bentuk penguasaan tanah secara kekal, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Sementara itu, terdapat dua pola cocok tanam yang dikembangkan oleh penduduk pribumi yang bermukim di Jember, yaitu pola sawah dan tegalan. Pola cocok tanam ini sangat bergantung pada keberadaan iklim. Bagi pola tanam sawah membutuhkan irigasi teknis. Pola tanam ini sebagian besar dilakukan di Jember bagian selatan yang mayoritas penduduknya orang Jawa dan Osing. Pada umumnya untuk pola sawah ini pada musim hujan petani menanam padi sedang pada musim kemarau menanam kedelai dan jagung. Sementara untuk pola tanam tegalan yang tidak membutuhkan irigasi teknis polanya pada saat musim hujan menanam padi tadah hujan. Sedangkan pada musim kemarau pola tanam tegalan ini melakukan penanaman jagung atau komak. Biasanya pola tanam lahan tegalan ini dilakukan oleh masyarakat Jember bagian utara yang sebagian besar penduduknya orang Madura. Akan tetapi kedua pola tanam seperti di atas mengalami perubahan sejak masuknya sistem perkebunan tembakau yang digerakkan oleh perusahaan dengan modal besar. Pola tanam lahan sawah berubah menjadi tanam padi setelah panen menanam tembakau kemudian disusul kedelai. Sedangkan untuk pola lahan tegalan tembakau terlebih dulu, kemudian jagung, umbi-umbian dan kacang komak.²⁹

Antusiasme masyarakat perkebunan Jember membudidayakan tanaman tembakau semakin tinggi. Bahkan masyarakat Jember juga mulai tergiur guna menyewakan tanahnya dalam rangka dimanfaatkan oleh investor asing untuk memperluas usaha perkebunannya. Guna memanfaatkan tanah-tanah milik penduduk lokal tersebut, juga dalam rangka memperbesar dan mengembangkan usahanya, maka para pengusaha perkebunan harus mengajukan permohonan kepada pemerintahan negara kolonial untuk mendapatkan hak sewa (*opstal*). Hak sewa tersebut adalah suatu hak untuk memiliki bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain.

²⁸ ANRI Besoeki 8.4. *Algemeen Verslag van de Residentie Besoeki*. 1886.

²⁹ Lihat pada Edi Burhan Arifin. *Op. cit.* hlm 25-26.

Terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan hak *opstal* tersebut diberbagai distrik afdeling Bondowoso. *Pertama*, C.H. Doup dan J.G. Berkholt yang menjadi pengusaha tembakau sejak tahun 1850-an dengan menyewa tanah-tanah penduduk. Untuk memperbesar keuntungannya, pada tahun 1860 pemerintah memberikan hak *opstal* atas tanah luasnya sekitar 30 bau terletak di enam desa di wilayah distrik Bondowoso.³⁰ *Kedua*, Fransen van de Putte yang bekerjasama dengan van Th. AN Lorenty, sejak tahun 1850-an membuka perusahaan tembakau di afdeling Bondowoso. Pada 3 April tahun 1860 berdasarkan *besluit* yang ditandatangani oleh Residen Besuki, Pemerintah menyetujui permintaan hak *opstal* yang mereka ajukan pada tahun 1856 di daerah Penanggungan seluas 60 bau.³¹ *Ketiga*, D.J. Uhlenbeck pengusaha tembakau *na-oogst* di afdeling Bondowoso sejak tahun 1853. Pada 5 Juli 1863 dengan *besluit* pemerintah nomor 46 tertanggal 5 Juli 1863 pengajuan hak *opstal* yang didaftarkan pada tahun 1861 disetujui pemerintah seluas 106 bau. Di atas tanah tersebut selain dijadikan persil tembakau juga untuk gudang pengeringan yang terbuat dari bambu dan bangunan lain untuk kepentingan perkebunan serta rumah tempat tinggal buruhnya.³²

Sejak akhir tahun 1870-an, penduduk lokal yang memiliki kaitan kekerabatan dengan masyarakat di Pulau Madura, semakin gencar mengundang saudaranya untuk terlibat dalam pembudidayaan tembakau. Proses migrasi ini demikian berlangsung secara mudah karena orang Madura memiliki hubungan historis dengan berbagai daerah di wilayah Karesidenan Besuki termasuk Jember. Di samping itu menurut Tjiptoatmodjo³³ interaksi antara masyarakat dari Pulau Madura dengan penduduk lokal di Jember sudah lama dibangun melalui jalur

³⁰ Massive Gouvernements Sekretaris Besoeki, Besluit Pemerintah No. 50, 29 Februari 1860, H.G.S. 52.

³¹ Massive Gouvernements Sekretaris Besoeki, Besluit Pemerintah No. 26, tanggal 3 April 1860, A.N.R.I. bundel 54.

³² Massive Gouvernements Sekretaris Besoeki, Besluit Pemerintah No. 46, tahun 1863, A.N.R.I. bundel 57.

³³ FA Tjiptoatmojo. *Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura*. Yogyakarta: Disertasi UGM, 1983, hlm 302.

komunikasi kota-kota pantai. Selain itu, orang-orang Madura juga terbiasa menanam tembakau, meskipun tembakau rajangan untuk konsumsi domestik.³⁴

Rupanya beban ekonomis yang dilekatkan pada tanah perlahan mulai merubah perilaku penduduk lokal Jember. Penduduk lokal mulai memobilisasi saudara-saudaranya dari Pulau Madura untuk hadir di perusahaan perbunan di Jember. Tindakan ini pada awalnya guna memberi peluang kerja bagi saudaranya di Pulau Madura. Akan tetapi kemudian tindakan tersebut dilakukan secara sadar dalam rangka penduduk lokal menjadi perantara tenaga kerja untuk perusahaan perkebunan. Tindakan tersebut dilakukan oleh penduduk lokal karena adanya iming-iming dari pengusaha perkebunan. Adapun iming-iming itu adalah penduduk lokal yang menjadi perantara kebutuhan tenaga kerja perkebunan apabila dapat memenuhi jumlah tenaga kerja dijadikan mandor. Selain itu perkebunan juga menjanjikan tanah garapan yang cukup luas bagi mandor tersebut. Dengan demikian jabatan mandor merupakan jabatan yang banyak diharapkan oleh penduduk setempat.³⁵ Oleh sebab itu penduduk lokal ini berbondong-bondong menghadirkan orang-orang dari Pulau Madura. Adapun yang dijanjikan adalah penghasilan yang lebih baik ketimbang daerah asal, begitu juga tenaga kerja dari yang dari wilayah mataraman.³⁶

Pihak perusahaan perkebunan tembakau tidak hanya membutuhkan tenaga kerja laki-laki tapi juga perempuan dan anak-anak juga terlibat aktif dalam proses pembudidayaan tembakau. Tenaga kerja perempuan dan anak-anak juga dibutuhkan oleh perusahaan perkebunan tembakau guna dimanfaatkan bekerja di gudang-gudang penyortiran, peragian dan di gudang pengepakan.³⁷ Adapun status tenaga kerja wanita dan anak-anak lebih sebagai tenaga kerja musiman. Tenaga

³⁴ Untuk masalah kebiasaan masyarakat di Madura yang juga menanam tanaman perkebunan tembakau lihat pada, Huub de Jonge. *Pedagang Usahawan Dan Perubahan di Pulau Madura*. Dalam Philip Querles van Uffort (ed). *Kepemimpinan Dan Suplementasi Program*. Jakarta: Gramedia, 1988, hlm 4.

³⁵ Kort Overzicht van Oprichting. *Bestaan en Bedrijf de Onderneming "Oud Djember" ter Gelegenheid van Haar 50 Jaarig Jubileum Samengesteld*. Deventer, 1909, hlm 11. Untuk profil mandor-mandor perkebunan dapat lihat pada lampiran foto No. 6.

³⁶ Lihat Edy Burhan Arifin. *Loc. cit.* hlm 100.

³⁷ Profil tentang buruh perempuan dan anak di perusahaan perkebunan, lihat pada lampiran foto No. 7 dan 8.

kerja jenis ini memperoleh upah dari perusahaan berkisar antara f 0,30 sampai f 0,55 setiap harinya.³⁸

Sementara itu, untuk tenaga kerja laki-laki dibutuhkan guna memabat hutan dan membenahi tanah rawa untuk dijadikan persil tembakau. Bagi tenaga kerja yang membuka hutan dan membenahi tanah rawa guna perkebunan partikelir tidak memperoleh upah. Mereka sebagai para pembuka hutan mendapatkan hak guna menggarap tanah yang telah dibuka tersebut. Oleh karenanya pada saat itu mereka bersaing untuk membuka tanah seluas-luasnya, dengan harapan semakin banyak tanah yang dibuka semakin banyak pula tanah garapannya.³⁹ Keterlibatan penduduk lokal dalam rangka membuka hutan sampai tanah itu bisa menghasilkan, semua kebutuhan hidup dan peralatan yang diperlukan dijamin oleh pihak pengusaha. Pada waktu itu tidak ada perjanjian yang tegas antara pihak perusahaan dengan para migran Madura yang menggarap tanah perkebunan. Akan tetapi pihak penggarap harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan perkebunan, misalnya dalam satu tahun penggarap harus menanam tembakau yang lama penanamannya sekitar tiga sampai empat bulan. Sisa waktunya petani penggarap diberi kebebasan untuk menanam tanaman kebutuhan subsistensinya seperti pada, jagung, ketela, dan kedelai. Dalam menanam tembakau bibit dan peralatan ditanggung oleh perusahaan, setelah panen petani penggarap harus menjual hasil tembakaunya kepada pihak pengusaha dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan perkebunan.⁴⁰

Di samping itu masih banyak tenaga kerja musiman dari Pulau Madura yang bekerja di perkebunan tembakau sebagai buruh harian. Sekelompok masyarakat ini merupakan kumpulan tenaga kerja lepas. Artinya kelompok tenaga kerja musiman ini bekerja dan menetap di daerah Jember selama 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan. Sisa waktunya, sekelompok pekerja musiman ini balik ke tempat asalnya. Kepergian tenaga kerja ini karena di tempat asalnya tidak ada pekerjaan apalagi setelah mereka usai menanam jagung dan ketela di tegalnya. Pada waktu

³⁸ ANRI Besoeki. *Algemeen Verslag van den Residen Besoeki*. 1889.

³⁹ Inilah yang nantinya selalu menjadi pangkal perbedaan pendapat antara pihak perkebunan dan masyarakat perkebunan selama berlangsung konflik pertanahan di Indonesia.

⁴⁰ ANRI Besoeki. *Algemeen Verslag van den Residen Besoeki*. 1871.

hampir panen kelompok tenaga kerja ini *toron* atau pulang ke tempat asalnya dengan membawa uang hasil pekerjaannya.⁴¹ Para pekerja musiman ini pulang dan pergi ke daerah Jember menggunakan sarana transportasi laut melalui pelabuhan Jangkar dan Panarukan.⁴²

Bila dikomparasikan dengan proses yang terjadi di perusahaan perkebunan di Deli Sumatera Timur (sekarang lebih dikenal dengan Sumatera Utara), yang menerapkan sistem kontrak untuk tenaga kerjanya.⁴³ Sistem kontrak itu mengikat para pekerja dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya. Dalam sistem ini pekerja mendapat imbalan upah dari pengusaha, sehingga menciptakan tenaga kerja yang biasa disebut kuli karena hubungannya sangat bersifat kolonialistik dan kapitalis. Sebuah hubungan yang seringkali menyebabkan tindakan sewenang-wenang para pengusaha terhadap para tenaga kerjanya. Kesewenangan itu tidak hanya terbatas dalam penentuan upah yang rendah tetapi sering pula disertai dengan tindakan kekerasan sebagaimana terjadi di Sumatera Utara yang kemudian dikenal dengan istilah *Poenale Sanctie*.

Sementara di Jember menurut tesis Arifin⁴⁴ pola hubungan ketenagakerjaan yang dibangun melahirkan hubungan *paternalistik* antara pengusaha dengan tenaga kerjanya. Hubungan ini dipengaruhi oleh adalah pola hubungan antara bapak-anak. Bapak memiliki kewenangan (*autorithy*) mutlak dan tuntas dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Bapak sebagai kepala rumah tangga mengatur segala kebutuhan hidup anak-anaknya. Model kewenangan ini dapat mengalami perluasan manakala memasuki kehidupan sosial yang lebih luas berupa organisasi kerja seperti perusahaan perkebunan. Pola hubungan bapak-anak yang mengalami perluasan sampai segala urusan itu oleh Weber disebut dengan istilah *patrimonialisme* (kewenangan politik tradisional).⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Kedua daerah tersebut terletak di Kabupaten Situbondo.

⁴³ Thee Kian Wei. *Plantation Agriculture and Export Growth: an Economic History of East Sumatra 1863-1942*. Jakarta: Leknas LIPI, 1977, hlm 34-42. Lihat juga pada Ann Laura Stoler. *Kapitalisme Dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979*. Yogyakarta: KARSA, 2005. dan Karl Pelzer. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.

⁴⁴ Lihat pada Edi Burhan Arifin. *Loc. cit.* hlm 43-44.

⁴⁵ Istilah ini menggambarkan jenis kepemimpinan yang mencukupi kebutuhan pengikutnya, sebagai imbalan dari loyalitas dan pengabdian. Watak paternalisme ini mengacu pada satuan ekonomi produktif, baik pertanian maupun industri, dan merupakan

Dalam hubungan kerja ini, di satu pihak para tenaga kerja menunjukkan loyalitas yang tinggi pada kaum pengusaha perkebunan baik *ondernemer* maupun *opkoper*. Sementara bagi kaum pengusaha *ondernemer* memiliki keharusan melindungi para petani penggarap. George Birnie merupakan salah satu contoh *ondernemer*, sebagai pemilik perusahaan perkebunan besar seolah-olah berfungsi sebagai bapak bagi para tenaga kerjanya. Kepada Birnie inilah para pekerja menyerahkan segala sesuatunya terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan dan keamanan. Dalam prakteknya terdapat banyak perbedaan perlakuan. Tenaga kerja dari Belanda lebih banyak mengisi struktur tinggi di perusahaan perkebunan, berbeda dengan masyarakat pribumi. Tenaga kerja orang Belanda tingkat kesejahteraan dan jaminan sosial jauh lebih tinggi dari pada “bumi putera” yang tanpa kesejahteraan dan jaminan sosial.⁴⁶

Seiring antara peningkatan jumlah penduduk Jember dan lahirnya kebijakan yang mengatur struktur pertanahan di negeri jajahan, para pengusaha mulai mengajukan hak *erfpacht*,⁴⁷ sebuah hak istimewa dari pemerintah kolonial guna pengusaha memperluas cakupan usaha.⁴⁸ Kebijakan ini juga mendorong para pengusaha mulai meninggalkan penduduk setempat guna mendapatkan tenaga kerja. Kali ini para pengusaha perkebunan melakukan proses mobilisasi tenaga kerja sendiri. Secara perlahan namun pasti dan teratur hak masyarakat setempat

cara untuk mengatur hubungan antara pemilik alat produksi dengan buruh. Lima ciri paternalisme: (i) tergantung pada akses ke kekuasaan dan kekuasaan yang berbeda; (ii) pada aras ideologi yang membenarkan subordinasi; (iii) paternalis bisa tunggal, tetapi bawahannya diperlakukan kolektif; (iv) kecenderungannya terlembagakan ketika berada pada wilayah industri modern; (v) hubungan tipikal kabur yang melingkupi semua segi kehidupan bawahan, yang berkaitan dengan orang sebagai keseluruhan daripada dengan satu kegiatan tertentu. Lihat pada Abercrombie (dkk). *Dictionary of Sociology*. London & New York, Penguin Books, 1984.

⁴⁶ R. Broersma. *Loc. cit.* hlm 23.

⁴⁷ Kata *erfpacht* berasal dari kata *erfelijk* yang berarti turun temurun, sedangkan *pacht* berarti sewa, hak sewa turun temurun. Hak ini merupakan hak benda paling luas yang dapat dibebankan atas benda orang lain. Keterangan ini dapat dilihat pada Dadang Juliantara dan Noer Fauzi. *Menyatakan Keadilan Agraria Manual Kursus Intensif Untuk Aktivis Gerakan Pembaruan Agraria*. Bandung: BPKPA, 2000, hlm 195. Hak *erfpacht* juga dapat ditetapkan di atas hak milik bila pemiliknya bersedia melepaskannya. Dalam prakteknya proses pelepasan hak itu seringkali dilakukan secara paksa. Mengenai hal ini dapat dilihat pada Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1992, hlm 39.

⁴⁸ Untuk keluasaan tanah yang didapat dari hak *erfpacht* di wilayah Jember dapat dilihat pada Brosur NV LMOD, *Een Jebileum in de Tabak*. 1909. Lihat juga *Regerings-Almanak* tahun 1879, 1882 dan tahun 1889.

atas tanah mulai tercerabut untuk kepentingan perusahaan perkebunan milik Belanda. Paling tidak dalam jangka pendek, kebijakan politik akan adanya perusahaan perkebunan mampu “menghilangkan” otonomi ekonomi elit pedesaan yang menghidupkan komunalisme. Pada tingkat yang lain, praktek kerjanya melemahkan kemandirian penduduk lokal dalam berusaha. Kendati begitu, elit pedesaan mendapat imbalan hak istimewa berupa imbalan bantuan dan mulai mengenal uang tunai serta akses terhadap lahan-lahan pemerintah.⁴⁹ Setidaknya telah terjadi proses perubahan struktural di Jember menjadi masyarakat perkebunan.

Akibat selanjutnya adalah struktur penguasaan modal pun mulai bergeser dengan tampilnya kelas borjuasi sebagai penopang utama bagi kinerja kapitalisme perusahaan perkebunan ini. Basis modal golongan ini semakin kuat seiring dengan berhasilnya mereka mengkonsentrasikan dan mensentralisasikan modal. Jumlah kapital (mereka) semakin bertambah banyak dan mulai berpikir untuk mengembangkan perluasan usaha ke wilayah tanah jajahan.⁵⁰

Peranan penduduk lokal yang awalnya memobilisasi tenaga kerja sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Telah hadir struktur baru dalam perusahaan perkebunan yang fungsinya mengatur keberadaan masyarakat perkebunan. Adalah *Besoekisch Immigratie Bureau* (BIB), sebuah perkumpulan para pengusaha yang berfungsi menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh berbagai perusahaan perkebunan pada tahun pertama awal tahun 1901. Khusus untuk pembudidayaan tembakau jenis *na-oogst* membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Jumlah mandor untuk LMOD saja dibutuhkan sebanyak 500 orang, buruh harian dan petani penggarap dibutuhkan jumlahnya mencapai ribuan dan tidak tentu.⁵¹

⁴⁹ Lihat pada J C Breman. *Loc. cit.* hlm 16.

⁵⁰ Tentang situasi ini Wertheim melukiskan dengan sangat apiknya: *...the bourgeoisie, which have been able to up considerable capital from the profit derived from the cultural system, now looked for investment in the colony. The cultural system, which reserved almost all economic activities to the state, was considered an impediment to the private enterprise.* WF Wertheim. *Indonesian Society in Transition; a Study of Social Change.* The Hague: van Hoeve, 1959, hlm 57.

⁵¹ Lihat pada R. Broersma. *Loc. cit.* hlm 23.

Menurut Arifin⁵² pada tahun 1901 BIB telah mendatangkan tenaga kerja dari Jawa Tengah ke Jember untuk perkebunan tembakau sebanyak 1.113 orang. Adapun biaya untuk mendatangkan tenaga kerja seluruhnya f. 14.807. Pada tahun 1902 BIB mendatangkan tenaga kerja dari Madura untuk bekerja di perusahaan perkebunan sebanyak 4.000. Tenaga kerja dari Jawa memiliki pengalaman lebih di daerah persawahan basah dari pada tenaga kerja dari Madura yang dominan di daerah tegalan (persawahan kering).

Secara perlahan telah berlangsung proses pembelahan tenaga kerja di masyarakat perkebunan. Praktek kerjanya terdapat proses pemilahan tenaga kerja berdasar atas kesukuan. Tenaga kerja dari Jawa dianggap lebih rajin, berperangai lebih ramah dan tekun, patuh dan penurut kepada majikan dari pada tenaga kerja dari Madura.⁵³ Tenaga kerja dari Madura memiliki perasaan, yang membuka lahan perkebunan adalah nenek moyangnya yang bekerja sama dengan pihak perkebunan pada masa awalnya. Sementara itu tenaga kerja dari Jawa itu hadir sebagai tenaga kerja yang didatangkan oleh pihak perusahaan.

Di samping itu terdapat perbedaan fasilitas yang harus diterima oleh tenaga kerja. Untuk perusahaan perkebunan LMOD tenaga kerja yang berkebangsaan Belanda berjumlah 60 orang dengan fasilitas gaji yang tinggi dan setelah tidak aktif bekerja memperoleh dana pensiun. Sebaliknya tenaga kerja pribumi yang jumlahnya lebih besar: 500 orang mandor, buruh harian dan petani penggarap yang jumlahnya mencapai ribuan orang tidak memperoleh santunan dari perusahaan hanya memperoleh pesangon⁵⁴.

Sejak saat itulah di Jember telah berada dalam ruang yang didominasi oleh kekuatan *onderneming* yang didukung oleh sistem politik kolonial, sebuah sistem yang menuntut pelipatgandaan modal secara terus menerus.⁵⁵ Penguasa saat itu

⁵² Lihat pada Edi Burhan Arifin. *Loc. cit.* hlm 47.

⁵³ Tennekes, J. *Bevolkingspreiding der Residentie Besoeki in 1930* Amsterdam: TKNAG, 1963, hlm 33.

⁵⁴ R. Broersma. *Loc. cit.* hlm 23.

⁵⁵ Lihat pada Tri Chandra Aprianto. *Kota Dan Kapitalisme Perkebunan: Jember Dalam Perubahan Zaman 1900-1970*. Makalah yang dipresentasikan pada *The First International Conference on Urban History*, Surabaya, 2004 b. Tulisan ini dibukukan dalam kumpulan tulisan. Lihat pada Tri Chandra Aprianto. *Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember Dalam Perubahan Zaman 1900-1970*. Dalam Freek Colombijn (dkk) *Kota Lama Kota Baru; Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak dengan NIOD & Jurusan Sejarah UNAIR Surabaya, 2005, hlm 383

sangat berkepentingan mengubah uang mereka menjadi modal. Untuk kemudian dalam sirkuit produksi kapitalis, mereka mendapatkan surplus dalam bentuk uang kembali yang lebih besar dari sebelumnya. Sebagian kecil uang ini diperlukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan bermewah-mewah. Sebagian besar lainnya untuk diubah ke dalam bentuk modal kembali. Pada akhirnya, proses akumulasi ini berlangsung terus menerus.⁵⁶ Pada saat yang lain, hadirnya perusahaan perkebunan partikelir juga melahirkan problem sosial, berupa maraknya penjualan opium. Menurut Rush,⁵⁷ Jember sebagai salah satu kawasan di Karesidenan Besuki merupakan daerah yang tinggi konsumsinya. Para pembeli opium ini adalah para kuli perkebunan, pedagang kecil, pekerja rendahan, atau masyarakat perkebunan setelah panen hasil ladangnya, bahkan hasil dari uang sewa tanah dari pihak perusahaan perkebunan.

Berangkat dari uraian di atas, masyarakat perkebunan di sini adalah bukan semata-mata masyarakat multi-etnis yang membentuk kebudayaan baru sebagai akibat dari konstruksi perkebunan, tapi juga masyarakat sengaja yang dihadirkan sebagai tenaga kerja di perkebunan. Masyarakat perkebunan ini hadir pada ruang yang itu kemudian memisahkan mereka dengan ikatan sosial asalnya yang menyebabkan krisis baik tingkat individu maupun kelompok. Ikatan sosial antar masyarakatnya pun baru yakni berbentuk hubungan kerja, karena yang menjadi ukuran kemudian adalah produktifitas kerja dari proses hubungan kerja itu sendiri. Mengingat masyarakat perkebunan sebagai konstruksi perkebunan yang bercorak kolonial sehingga sangat rentan dengan adanya pemahaman dekolonialisasi.

⁵⁶ Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hukum akumulasi modal. Pemahaman yang demikian menurut Fauzi ini dapat membimbing kita guna mempermudah mengarah pada persoalan bagaimana masuknya kapital besar yang kemudian merusak tatanan ekonomi masyarakat non-kapitalis. Pandangan yang mengutamakan bagaimana bekerjanya modal ini berpayung pada konsep *primitive accumulation*. Ini merupakan awal dari tumbuh kembangnya kapitalisme yang ditandai dengan dua ciri transformasi. Pertama, kekayaan alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis. Kedua, masyarakat perkebunan diubah menjadi buruh upahan. Pada periode kolonial ini ditandai oleh watak brutal dalam bentuk “perampasan” sumber daya agraria. Dalam alur kolonialisme tanah sebagai sumber agraria telah berubah fungsi dari alat produksi guna pemenuhan subsistensi massa rakyat tani telah beralih fungsi menjadi alat produksi bagi organisasi kapitalis. Lihat pada Fauzi, *Loc. cit.* hlm 4-5.

⁵⁷ Lihat pada James R. Rush. *Opium to Jawa: Jawa Dalam Cengkeraman Bandar-bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000, hlm 65.

2.3. Lahirnya kota perkebunan⁵⁸

Pertumbuhan demografi yang dibarengi oleh berkembangnya perusahaan perkebunan partikelir disebaran wilayah Jember lambat laun membentuk sebuah struktur kota baru. Adanya sistem perusahaan partikelir yang menganut sistem secara bebas, sebagai prinsip umum ekonomi yang dianut sejak pertengahan abad XIX, mempunyai arti penting yang besar dalam bidang pembangunan perkotaan. Hal tersebut tidak hanya dalam pengertian meningkatkan perdagangan dan meningkatkan industri pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga mengakibatkan kenaikan cepat pada populasi perkotaan, tetapi juga inisiatif individual yang tidak terkendalikan yang tampak jelas dalam luasnya skala perluasan kota.⁵⁹ Ditambah lagi dengan proses eksperimentasi yang dilakukan oleh Birnie, yang kemudian disusul oleh para pengusaha partikelir lainnya, di Jember merupakan satu bentuk kongkret dari inisiatif “individual” yang mampu membentuk satu struktur kota.

Demikianlah Jember yang awalnya hanya *onder distrik* Bondowoso yang sepi kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten yang paling penting di Karesidenan Besuki. Pada tanggal 9 Januari 1883 keluarlah besluit dari pemerintah tentang ditetapkannya Jember sebagai *regentschap* yang berdiri sendiri lepas dari afdeling Bondowoso. Benarlah kiranya apa yang dikatakan Surjomihardjo⁶⁰ tentang pertumbuhan kota-kota di daerah Indonesia pada umumnya untuk kepentingan kolonial. Antara tahun 1886 hingga tahun 1900 telah berkembang berbagai distrik baru yang menjadi bagian dari Jember. Adapun distrik baru tersebut adalah distrik Rambipuji yang pada masa sebelumnya menjadi satu dengan distrik Jember. Berkembang pula distrik Mayang yang pada awalnya merupakan *onder distrik* dari distrik Soekokerto. Kemudian pada tahun 1913 menurut catatan Arifin⁶¹ distrik Puger dimekarkan menjadi dua distrik, yaitu distrik Puger sendiri dengan distrik Wuluhan.⁶² Berbagai proses pemekaran

⁵⁸ Tulisan ini merujuk tulisan Tri Chandra Aprianto, *Op. cit.* 2005.

⁵⁹ Lihat pada W F Wertheim. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm 133-139.

⁶⁰ Abdurrachaman Surjomihardjo. *Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Jalur Pranata Sosial*. dalam T. Ibrahim Alfian (ed.), *Dari Babad Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987, hlm 258.

⁶¹ Mengacu pada Memorie van Overgave van den Aftredende Resident van Besoeki; J. Ph. Feskavar 12-3-1919, A.A. Bundel 199.

⁶² Nama-nama tempat itu berada di Jember bagian Selatan dan Barat.

wilayah tersebut mengacu pada *besluit* pemerintahan yang tertanggal 13 Januari 1913.

Bersamaan dengan itu mulai tumbuh kembanglah kehidupan perkotaan baru dengan ciri perkebunan. Tentu saja dengan adanya kekuatan kapital besar berlangsung proses “pemaksaan” pembangunan, baik itu sarana infrastruktur perusahaan maupun, prasarana utama kota Jember. “Pemaksaan” tersebut dilakukan dalam rangka mendukung proses kelancaran produksi berbagai perusahaan perkebunan partikelir yang ada di wilayah Jember. Proses pembangunan kantor-kantor perkebunan dan gudang-gudang perkebunan tumbuh mewarnai kota.⁶³

Seiring dengan proses ekspor-import yang begitu besar di wilayah ini pada akhirnya jumlah orang dari negeri Belanda semakin tahun semakin meningkat pula di wilayah ini. Mereka kemudian mulai membentuk pemukiman secara eksklusif yang berpusat di distrik Jember, yang itu terpisah dengan pemukiman penduduk pribumi. Selain itu juga terdapat kompleks kantor pusat beberapa perusahaan perkebunan partikelir dan kantor pusat *Besoeki Proefstation*⁶⁴ serta beberapa kantor pemerintah. Di tempat ini juga didirikan gedung *societeitgebouw* yang merupakan pusat pertemuan orang-orang Belanda di distrik Jember.⁶⁵ Menurut serangkaian hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa informan⁶⁶ menyatakan wilayah pemukiman tersebut berada di jalan protokol kota Jember.⁶⁷ Pemukiman di wilayah ini dihuni oleh orang-orang Belanda yang bekerja di berbagai perusahaan perkebunan partikelir dan yang bekerja di instansi pemerintahan kota. Praktis pada periode ini telah berdiri bangunan dan tata ruang kota yang bercorakkan Belanda. Bangunan itu tidak saja menghiasi distrik Jember, tapi juga memberi warna pada daerah-daerah pinggiran, khususnya kantor-kantor perusahaan perkebunan yang berdiri mentereng bercorak

⁶³ Untuk profil bangunan-bangunan kantor perusahaan perkebunan dapat dilihat pada lampiran foto No. 9, sementara untuk gudang-gudang tembakau dapat dilihat pada lampiran foto No. 10 dan 11.

⁶⁴ Aktifitas dari *Besoekish Proefstation* ini adalah melakukan penelitian guna pengembangan produksi perusahaan perkebunan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Lihat pada Edi Burhan Arifin. *Loc. cit.* hlm 81.

⁶⁵ Brosur. *Bij het 25 Jaarig Jubileum van Het Besoekisch Proefstation*. 1935.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sulton Fajar, Jember, tanggal 25 Mei 2004 dan wawancara dengan Bapak Kusdari, Jember, tanggal 10 Juni 2004.

⁶⁷ Sekarang lebih dikenal dengan nama Jalan Gajah Mada.

eksploitatif berbeda dengan perkampungan para buruh perkebunan dan perkampungan di sekitarnya.

Perbedaan pemukiman tersebut menunjukkan adanya perbedaan status penguasa kolonial dan orang-orang timur asing sebagai kelompok elit, sehingga dengan sendirinya kota itu akan berwajah kolonial. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1930-an, dalam penataan tata ruang kota Jember yang telah menempatkan alun-alun sebagai pusat dari struktur pemukiman urban. Untuk kawasan hunian dikembangkan dua pendekatan yaitu perencanaan formal rumah tunggal dan perbaikan lingkungan fisik kampung kota. Bagian *pertama*, pusat kota pada umumnya didiami oleh para penguasa asing (kolonial) dalam hal ini penguasa perkebunan. Bagian *kedua* pemukiman imigran asing, seperti keturunan Tionghoa dan Arab yang mempunyai gaya bangunan sendiri sesuai dengan arsitektur di tanah kelahirannya. Daerah kedua ini menjadi daerah perantara pemukiman kolonial dan pemukiman migran. Bagian luar atau daerah pinggiran didiami oleh migran Jawa dan Madura atau disebut kota yang bersifat tradisional. Perkembangan tata ruang kota Jember menciptakan suasana kolonial dengan pusat pemerintahan berada di selatan menghadap alun-alun dan bagian barat tempat untuk bangunan masjid kota. Pada bagian timur atau utara terdapat bangunan tangsi militer atau polisi yang dilengkapi dengan bangunan penjara. Sementara bangunan pasar yang menjadi pusat interaksi sosial ekonomi tergeser ke sebelah barat.⁶⁸ Selain itu banyak bangunan rumah milik penduduk di daerah kota Jember yang membangun rumahnya mengacu pada model Eropa.⁶⁹

Kebutuhan lain yang sangat mendesak bagi perusahaan perkebunan partikelir di Jember adalah sarana irigasi. Pada tahun 1902 dibangun sistem irigasi modern di sungai Bondoyudo, sungai terbesar di daerah Jember. Irigasi ini tidak saja bermanfaat untuk kepentingan perusahaan perkebunan, karena mampu mengairi lahan LMOD seluas 15.000 bau. Untuk memperluas cakupan aliran air, pada tahun 1903 ditata lagi sistem irigasi dari sungai ini dengan tanggul-tanggulnya sepanjang 16 Km dan dapat mengairi lahan perusahaan perkebunan

⁶⁸ Lihat pada A. Bagus P Wiryomartono. *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia, Kajian Mengenai Konsep, Struktur dan Elemen Kota Sejak Peradaban Hindu, Budha, Islam Sampai Sekarang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985, hlm 141-144.

⁶⁹ Hal ini dapat dilihat pada DEPDIBUD. *Geografi Budaya Daerah Jawa Timur*. Jakarta, 1988, hlm 51-52.

seluas 42.220 bau. Pembangunan irigasi sungai Bondoyudo sangat bermanfaat bagi pabrik gula yang berada di distrik Jatiroto⁷⁰ yakni *Handels Vereniging Amsterdam* (HVA).

Adanya irigasi tersebut, yang menerima manfaat paling besar adalah pihak perkebunan tembakau di wilayah Jember terutama NV LMOD dan HVA, oleh karenanya dana pembangunan irigasi sungai Bondoyudo dipikul oleh kedua perusahaan itu, sisanya ditanggung oleh Pemerintah. Adapun rincian untuk pembangunan irigasi sungai ini, sebagai berikut: Biaya keseluruhan f. 2.600.000, mendapat bantuan dari pabrik gula HVA sebesar f. 600.000, bantuan NV LMOD sebesar f. 500.000, sedangkan subsidi pemerintah sebesar f. 1.500.000.⁷¹ Pada tahun 1903 juga dibangun sistem irigasi modern di Sungai Bedadung. Pembangunan ini dapat mengairi lahan perkebunan milik LMOD seluas 33.000 bau di daerah Jember. Selain itu juga dibangun sistem irigasi modern di sungai-sungai kecil seperti, Sungai Besini, Sungai Majang, Sungai Renes, Sungai Dampar dan Sungai Kotok.⁷²

Pesatnya pertumbuhan sarana dan prasarana sebuah kota perkebunan berbarengan dengan pertambahan jumlah penduduknya. Untuk distrik Jember jumlah penduduknya pada tahun 1920 mencapai menjadi 40.000 jiwa. Seiring dengan semakin banyak pengusaha membuka lahan perkebunan dengan kebutuhan tenaga kerja yang besar pula maka jumlah penduduk distrik Jember mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selama sepuluh tahun, dari tahun 1920 hingga tahun 1930 jumlah penduduk di Distrik Jember menjadi 144.447 jiwa.

Tabel di bawah ini akan menunjukkan komposisi penduduk di *afdeling* Jember pada tahun 1930.⁷³

No	Distrik	Pribumi	China	Arab	Eropa	Total
1	Jember	139.955	3.357	233	902	144.447
2	Mayang	94.962	512	12	212	95.698

⁷⁰ Distrik Jatiroto terletak di Kabupaten Lumajang.

⁷¹ R. Broersma. *Op. cit.* hlm162.

⁷² Lihat pada Edi Burhan Arifin. *Loc. cit.* hlm 50. Mengenai profil irigasi Sungai Dampar dapat dilihat pada lampiran foto No. 12 dan 13. Sementara untuk Sungai Kotok dapat dilihat pada lampiran foto No. 14 dan 15.

⁷³ *Memorie van Overgave van den Residentie Beoeki.* 1931.

3	Kalisat	131.856	957	81	211	133.105
4	Wuluhan	127.162	1.038	142	283	18.625
5	Rambipuji	131.929	925	81	153	133.088
6	Tanggul	151.042	1.342	120	453	152.957
7	Puger	143.468	1.321	36	334	145.159
Jumlah		920.374	9.452	705	2.548	933.079

Kepadatan penduduk di Jember pada tahun 1890 mencapai 55 per km² meningkat tajam pada tahun 1930 menjadi 278 per km². Pembagian jenis kelamin dari pendatang yang bekerja di Jember pada tahun 1930 untuk laki-laki mencapai 168.1 sedangkan 154.6 (x1000 dari masyarakat). Ini merupakan jumlah tertinggi dalam wilayah karesidenan Besuki. Sementara itu perpindahan penduduk yang masuk ke Jember sampai dengan tahun 1930 sebanyak 323 (x1000) terbanyak dari dalam wilayah Karesidenan Besuki. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya percepatan aliran kapital ke wilayah ini.⁷⁴

2.4. “Komunikasi” dengan Pasar Internasional

Menurut Charles H. Cooley kepentingan kolonial itu terwujud dalam modernisasi di bidang transportasi.⁷⁵ Pendapat Cooley ini sesuai dengan pertumbuhan kota Jember yang berkembang pesat pada akhir abad XIX terutama setelah dibangunnya jalur kereta api yang menuju Jember.⁷⁶ Pada tahun 1897 dibuka jalur kereta api dari Jember ke Surabaya lewat Probolinggo. Pembukaan jalur kereta api jalur ini menambah tensi mobilitas sosial dari kota lain menuju Jember. Pihak perusahaan perkebunan sendiri sebagaimana dikatakan di atas memiliki anggapan yang *pejoratif* atas tenaga kerja dari Madura, mulai memobilisasi tenaga kerja dari etnis Jawa (Bojonegoro, Tuban, Ponorogo, Kediri dan dari daerah *vorstenlanden*). Proses migrasi ini dilakukan melalui jalur rel kereta api sebagai sarana transportasinya.

Adanya modernisasi di bidang transportasi khususnya dibukanya jalur kereta api di wilayah Jember menyebabkan timbulnya mobilitas sosial yang bersifat horisontal secara besar-besaran dari warga Madura, Jawa, Cina, Arab dan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Lihat pada Edi Burhan Arifin. *Loc. cit.* hlm 112-113.

⁷⁶ Untuk jalur kereta api dapat dilihat pada lampiran peta No. 3.

bahkan orang-orang Belanda sendiri.⁷⁷ Adanya mobilitas sosial tersebut dalam waktu yang relatif singkat mendorong terjadinya peningkatan kepadatan jumlah penduduk di wilayah yang awalnya sepi tersebut. Akan tetapi mobilitas sosial tersebut juga awalnya diakibatkan oleh adanya pemenuhan tenaga kerja di berbagai perusahaan perkebunan partikelir. Dengan demikian keberadaan modernisasi transportasi di sini jelas guna memenuhi jalannya sistem kapitalisme di wilayah baru.

Selain untuk transportasi penduduk, rel kereta api juga berfungsi menjadi jalur bagi angkutan komoditas yang diproduksi oleh perusahaan perkebunan seperti tembakau, gula, kopi dan karet. Jalur kereta api juga dimanfaatkan oleh penduduk lokal dalam rangka mengangkut hasil pertanian baik itu tembakau dan beras yang diproduksi petani lokal.⁷⁸ Pihak perusahaan perkebunan sendiri guna mempermudah proses pengangkutan hasil perkebunannya dan mendukung operasionalisasi perusahaan perkebunannya, LMOD pada tahun 1880 sampai tahun 1890 membangun jalan yang menghubungkan kantor pusatnya di Jember dengan perkebunan di Mayang, Wuluhan, Tanggul dan Puger. Semua produksi tersebut dikirim melalui jalur kereta api menuju Pelabuhan Panarukan.

Surplus akibat melimpahnya usaha perkebunan dan berkembangnya Kota Perkebunan di beberapa kota di wilayah belakang segera di respon oleh Pelabuhan Panarukan. Perlahan namun pasti Panarukan kemudian mawujud dalam bentuk Kota Kabupaten. Seperti tuntutan dari gerak sejarah yang terus berkembang, Panarukan kemudian menjadi Pusat Pemerintahan dengan Raden Tumenggung Aryo Soeryo Amijoyo (1858-1872) sebagai Bupati Pertama.⁷⁹

Dengan demikian “perkawinan” antara wilayah *hinterland* dengan wilayah laut dimana kota pelabuhan sebagai perantaranya, menjadi semakin tak terbantahkan. Melalui jalur kereta api berbagai komoditas perkebunan kualitas

⁷⁷ Edi Burhan Arifin. *Loc. cit.* hlm 116.

⁷⁸ Seakan menegaskan apa yang telah dikatakan Charles H. Cooley bahwa adanya percepatan pertumbuhan suatu pemukiman yang sepi atau desa menjadi kota disebabkan oleh adanya pembukaan jalur kereta api. *Ibid.*

⁷⁹ Kalau dilihat susunan berbagai bangunan yang terdapat di wilayah Panarukan hingga saat ini masih bisa disaksikan bangunan-bangunan produk kolonial. Berbagai struktur bangunan kotanya tersebut masih menunjukkan struktur bangunan guna memenuhi kebutuhan bagi hadirnya Kota Pelabuhan. Untuk profil Pelabuhan Panarukan dapat dilihat pada lampiran foto No. 16 dan 17.

eksport, khususnya tembakau, di samping tanaman lainnya seperti kakao, kopi, gula (tebu) dan karet yang dihantarkan ke seberang lautan. Berbagai hasil sumber-sumber daya alam dari Jember kemudian diangkut melintasi Bondowoso, menuju Situbondo dan berakhir di Pelabuhan Panarukan guna selanjutnya dikirim ke Amsterdam dan Rotterdam ataupun ke pasar internasional di Eropa lainnya.⁸⁰

Sejak tahun 1920 pengiriman gula ke pasar internasional juga melalui rel tersebut. Akan tetapi sebelum dikirim ke berbagai pasar internasional, sebelumnya berbagai barang komoditi perkebunan tersebut disimpan terlebih dulu di gudang di Pelabuhan Panarukan.⁸¹ Pada dasarnya rel itu juga merupakan inisiatif dari George Bernie, pemilik NV LMOD. Pembangunan rel yang menghubungkan Pelabuhan Panarukan dengan jalur kereta api Jember-Bondowoso-Panarukan (150 km) dibuka pada tanggal 1 Oktober 1897. Ini merupakan kelanjutan dari proses pembangunan rel kereta api di Jawa Timur. Diawali pembangunan rel Surabaya – Pasuruan yang sebagai penghasil Gula (16 Mei 1878). Selanjutnya diperpanjang dari Pasuruan – Probolinggo tahun 1884, hingga akhirnya mencapai Klakah (1895).

Lintasan utama rel kereta api saat itu terletak di stasiun kereta api daerah Sukowono-Jember. Hal itu bisa dibuktikan dengan jumlahnya lintasan rel kereta api di stasiun ini lebih banyak ketimbang di stasiun daerah lainnya di Jember termasuk stasiun kota. Hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang menghubungkan kota lainnya di utara (Bondowoso dan Panarukan) serta di timur daerah Banyuwangi. Sementara itu lintasan rel kereta api yang ada di wilayah Jember tidak ada yang mengarah ke wilayah pantai selatan, tapi mengarah pada wilayah pantai utara pulau Jawa. Hal itu dikarenakan di wilayah Besuki terdapat pelabuhan besar tempat ekport-import berlangsung di wilayah timur propinsi Jawa Timur.

Keberadaan rel kereta api ini pada dasarnya merupakan penghubung antara Pelabuhan Panarukan dengan daerah *hinterland*-nya, Jember. Jember menjadi wilayah pedalaman yang mengirimkan hasil sumber-sumber agrariannya ke

⁸⁰ Lihat Nawiyanto. *Transportation Development in Besuki 1830-1970s*, (paper) *Conference the Modern Economic History of Indonesia*. Yogyakarta: UGM, 26-28 Juli 1999, hlm. 12.

⁸¹ *Ibid.*

wilayah pelabuhan. Ini merupakan sarana bagi aliran hasil eksploitasi sumber-sumber daya alam perkebunan seperti tembakau, kakao, kopi, tebu (gula) dan lain-lain dari daerah Jember, Bondowoso dan Situbondo. Aliran itu bermuara pada Pelabuhan Panarukan sebagai *feeder points* bagi pelabuhan di Tabanan (Bali) sebagai *collecting center*.⁸² Pada akhirnya semua komoditas perkebunan tersebut dikapalkan ke pasar-pasar internasional melalui pelabuhan di Eropa. Di bawah ini bisa dilihat selintas bagaimana posisi rel kereta api selalu berujung pada kota pelabuhan. Ini artinya, rel kereta api tersebut tidak semata-mata dilintasi oleh angkutan manusia, tapi juga angkutan barang yang siap kirim ke pasar yang lebih luas.⁸³

Sejak saat itulah beberapa daerah Karesidenan Besuki, khususnya Jember berada dalam ruang yang didominasi oleh kekuatan *onderneming* yang didukung oleh sistem politik kolonial, sebuah sistem yang menuntut pelipatgandaan modal secara terus menerus.⁸⁴ Penguasa saat itu sangat berkepentingan mengubah uang mereka menjadi modal. Untuk kemudian dalam sirkuit produksi kapitalis, mereka mendapatkan surplus dalam bentuk uang kembali yang lebih besar dari sebelumnya. Sebagian kecil uang ini diperlukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan bermewah-mewah. Sebagian besar lainnya untuk diubah ke dalam bentuk modal kembali. Pada akhirnya, proses akumulasi ini berlangsung terus menerus. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hukum akumulasi modal.⁸⁵ Pemahaman yang demikian ini dapat membimbing kita guna mempermudah mengarah pada persoalan bagaimana masuknya kapital besar yang kemudian merusak tatanan ekonomi masyarakat non-kapitalis. Pandangan yang mengutamakan bagaimana bekerjanya modal ini berpayung pada konsep *primitive accumulation*.⁸⁶ Ini merupakan awal dari tumbuh kembangnya kapitalisme yang ditandai dengan dua ciri transformasi. *Pertama*, kekayaan alam

⁸² Untuk melihat profil aktifitas di Pelabuhan Tabanan (Bali) dapat dilihat pada lampiran foto No. 18.

⁸³ Untuk melihat profil kegiatan di pasar Eropa dapat dilihat pada lampiran foto No. 19.

⁸⁴ Tri Chandra Aprianto. *Op. cit.* 2005.

⁸⁵ Lihat pada Noer Fauzi, *Loc. cit.* hlm 4-5.

⁸⁶ Akumulasi primitif merupakan transformasi *massive* dari sumberdaya non modal menjadi modal dalam sirkuit produksi kapitalis, di satu pihak; dan transformasi dari petani yang pada gilirannya menuju terbentuknya pekerja atau buruh bebas di pihak lain. *Ibid.*

diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis. *Kedua*, massa rakyat tani diubah menjadi buruh upahan. Pada periode kolonial ini ditandai oleh watak brutal dalam bentuk “perampasan” sumber daya agraria. Dalam alur kolonialisme tanah sebagai sumber agraria telah berubah fungsi dari alat produksi guna pemenuhan subsistensi masyarakat perkebunan telah beralih fungsi menjadi alat produksi bagi organisasi kapitalis. Berbagai proses pembangunan tersebut pada dasarnya merupakan langkah guna memperbesar kapital negara induk.⁸⁷

Bahkan untuk memperbesar nafsu perdagangannya, selain karena menghadapi perubahan struktur ekonomi dunia, yaitu proses persaingan di pasaran dunia yang mulai mengusahakan tanaman yang sama dengan daerah jajahan serta harus menghadapi masalah buruh perkebunan mereka, mulailah para pengusaha perkebunan di Indonesia mengembangkan sistem organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan keberadaan perusahaan perkebunan di wilayah negeri jajahan.

Perkumpulan organisasi di Jawa Timur didirikan pertama kalinya di Kediri pada tahun 1889 dengan nama *Kedrische Landbouw Vereeniging*, menyusul kemudian di Malang pada tahun 1893 dengan nama *Vereeniging van Malangsche Koffieplanters*, yang pada tahun 1904 berubah menjadi *De Malangsche Landbouw Vereeniging* dan di Jember sendiri berdiri pada tahun 1896 dengan nama *Vereeniging van Landbouw en Nijverheid*. Organisasi ini tidak saja menjadi tempat kerja sama antar pengusaha perkebunan, tapi juga membangun kelancaran kebutuhan akan penyuluhan perkebunan di antara balai-balai penelitian dengan

⁸⁷ Pada akhir tahun 1908 NV LMOD memiliki kekayaan berupa; 1 gedung *driedubbele afpaksschuur* model besar, 2 gedung *dubbele afpaksschuur* model besar, 3 gedung *enkele afpaksschuur* termasuk model besar, 80 gedung penimbun tembakau, 60 gedung rumah sebagai tempat tinggal untuk pegawai perkebunan yang berkebangsaan Belanda, 1 *koffiepellerij*, 1 perusahaan transportasi yakni Panarukan Maatscappij, 440 gudang pengeringan tembakau yang apabila disatukan panjangnya sekitar 80.000 voet (kaki). Panjang gudang pengeringan ini apabila diukur panjangnya sama dengan Rotterdam-Scheveningen. Sementara itu besar jumlah kekayaan itu diimbangi dengan luas areal penanaman tembakau yang semakin tahun semakin bertambah. Pada tahun 1908 luas arealnya sebagai berikut: 22.600 bau tanah sawah. Tanah ini berupa tanah sewa, 15.000 bau tanah tegalan, juga merupakan tanah sewa, 16. bau tanah *erpacht*. Tanah ini semula berupa hutan belukar dan sebagian lagi berupa tanah paya (*moeras*) yang kemudian dijadikan persil tembakau, 150 bau tanah hak postal, 60 bau tanah sawah hak *eigendom*. Kort Overzicht en Bedrijf der Onderneming “Oud Djember” ter Gelegenheid van haar 50 jaarig Jubileum Samengesteld, *Deventer*, 1909, hal. 26.

perusahaan perkebunan, khususnya setelah terbentuknya *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) di Jawa pada tanggal 24 Juli 1925 di Jakarta yang didukung empat gabungan perusahaan perkebunan karet, teh, kina, kopi dan coklat. ALS merupakan suatu organisasi kerja sama yang kuat dan besar, malahan dianggap tertinggi (top organisasi) yang mencurahkan perhatiannya atas kepentingan para anggotanya, khususnya di bidang ekonomi, sosial, fiskal, agraria, hukum perburuhan dan penelitian. Salah satu usaha sosial ALS ini adalah *Algemeene Landbouw Pensioen Fondsen* (ALPF), dana pensiunan pertanian umum, untuk jaminan hari tua para staff perusahaan perkebunan yang menjadi anggotanya. Tentunya ini semua untuk kepentingan perusahaan perkebunan kolonial, mengingat keuntungan yang selalu mengarah pada pihak pengusaha.

Memang pada tingkat tertentu kebijakan perusahaan perkebunan dapat mengaitkan masyarakat di pelosok pedesaan dengan pasar internasional. Akan tetapi praktek ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak mendorong lahir kapitalisme pribumi. Banyak sekali tenaga kerja pribumi yang dimobilisasi dalam pemenuhan perusahaan perkebunan, namun itu lebih dikarenakan keterpaksaan sistem pembangunan yang dikembangkan pihak pemerintah, bukan karena pilihan bebas. Negara memonopoli pasaran tanah, untuk menjamin dirinya mendapat otoritas dan legalitas terakhir untuk mengatur. Bertentangan dengan sejumlah teori tentang perkembangan kapitalisme, maka bergabungnya masyarakat pribumi dengan sistem kapitalisme internasional bukan merupakan jaminan bahwa hubungan produksi lokal akan berubah mengikuti cara-cara kapitalis. Karena tidak memiliki usaha dalam skala besar, serta dipaksa menerapkan pola seperti orang menyewa sekalipun bekerja di lahan pertanian sendiri, pada akhirnya masyarakat di pedesaan yang dilingkupi perusahaan perkebunan merupakan masyarakat yang didominasi. Mereka dihubungkan dengan pasar internasional oleh kekuasaan negara, bukan oleh dinamisasi borjuasi pribumi.⁸⁸

⁸⁸ Robert W Hefner. *Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm 71-72.

Bab 3

MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN MUNDURNYA USAHA PERKEBUNAN

3.1. Masyarakat Perkebunan Tanpa Tuan Kebun

Pada akhir tahun 1920 dan awal tahun 1930 merupakan tahun terpenting bagi masyarakat perkebunan Jember. Usaha perkebunan mengalami kemunduran yang hebat akibat krisis kapitalisme global atau zaman malaise (depresi besar). Pada tahun 1931 perusahaan perkebunan tembakau di Jember masih mampu mengekspor sebanyak 302.900 bal tembakau. Kemudian sejak tahun 1932 produksinya mengalami penurunan akibat krisis kapitalisme global (1930), hanya mampu mengekspor sebanyak 138.139 bal tembakau. Tidak itu saja terdapat beberapa perkebunan yang harus gulung tikar, seperti Perkebunan Tembakau Besukie di distrik Rawa Tamtu dan Jubung serta Perkebunan Tembakau Kontjir. Adapun lahan-lahannya tidak diurus dan ditelantarkan. Sementara itu, perkebunan *De Firma Frasen Eaton* di distrik Ambulu melakukan pengurangan atas jumlah produksinya dan membatasi pembelian tembakau dari petani. Berbeda dengan itu, Perkebunan Tembakau Summersari memilih mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada masyarakat perkebunan. Hal ini dikarenakan pada saat membuka hutan dulu terdapat kesepakatan sistem bagi hasil antara tuan kebun yang memiliki hak *erfpacht* dengan para tenaga kerja.¹ Artinya perusahaan tersebut tidak akan melanjutkan proses budidaya di sektor perkebunan. Aktifitas masyarakat perkebunan pada tahun-tahun ini tidak lagi menggarap tanaman perkebunan, tapi lebih memprioritaskan tanaman pangan.

Masyarakat perkebunan semakin menyadari kalau praktek ekonomi kolonial tidak menguntungkan. Pada dasarnya sebelum tahun 1930, di Jember sudah terdapat perlawanan masyarakat perkebunan terhadap praktek ekonomi

¹ Arifin, Edy Burhan. "*Emas hijau*" di Jember: Asal-usul, Pertumbuhan Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980. (Tidak diterbitkan), Tesis, UGM. 1989, hlm 88.

kolonial. Perlawanan pertama dalam bentuk gerakan mistik keagamaan dari Kyai Aminah di Curah Welut, Kaliwining, Rambipuji, Jember.² Ini merupakan gerakan protes atas perilaku kolonial di perkebunan. Perlawanan lainnya hadir dari Syarikat Islam (SI), organisasi ini juga tumbuh dan berkembang di Jember.³ Dalam setiap kesempatan SI Jember ini selalu menyuarakan sikap anti kolonial. Praktis pada tahun-tahun 1930-an keberadaan perkebunan tidak ada tuan kebun.

Sementara itu, masyarakat perkebunan mulai menyadari akan keberadaan tanah yang menjadi lahan perkebunan adalah hutan yang mereka buka. Walaupun Tanpa adanya tuan kebun, namun masyarakat perkebunan masih tetap melanjutkan penanaman tanaman perkebunan guna kebutuhan pasar domestik dan tanaman pangan. Sayangnya aktifitas tersebut mulai bergeser karena kehadiran fasisme Jepang. Energi masyarakat perkebunan tidak lagi difokuskan pada produksi tanaman perkebunan, tapi sudah disedot dalam ekonomi perang. Masuknya kekuatan fasisme Jepang ke wilayah Hindia Belanda dalam rangka melakukan proses eksploitasi sumber-sumber agraria demi kepentingan Perang. Masyarakat perkebunan dipaksa menggunakan pengetahuan dan tehnik pertanian baru, memperluas areal pertanian dan menanam guna mendukung perang seperti jarak, kapas, yute-rosela dan rami.⁴ Ironisnya masyarakat perkebunan masih diharuskan menyerahkan 20% hasil tanaman padinya untuk bekal perang.⁵ Adapun gambaran perkebunan saat itu seperti di bawah ini:

Pada waktu Tentara Djepang menduduki Indonesia, Kantor-kantor perwakilan tersebut termasuk Perusahaan-perusahaan Perkebunan jang diurusnja, dikuasai oleh Kaisha-kaisha Djepang. Pada masa pendudukan Djepang itu banjak sekali perubahan-perubahan jang dilakukan dalam lapangan perkebunan. Banjak diantara kebun-kebun pegunungan jang tanamannja baku

² Laporan Asisten Residen Jember (J. Bosman) Kepada Residen Besuki (E.M. Van den Berg van Heineoord), 11 Juni 1906. hlm 116-119. Mengenai laporan ini dapat dilihat pada ANRI. *Penerbit Sumber-sumber Sejarah. Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX*. Jakarta 1981.

³ Oetoesan Hindia, september dan oktober 1919. Mengenai dokumen daftar Sarekat Islam lokal dapat dilihat pada ANRI. *Sarekat Islam Lokal*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.7, 1975, hlm 353.

⁴ Sukendah. *Pengusahaan Tembakau Cerutu Besuki Na-oogst di Kebun Adjong-Gayasan PT Perkebunan XXVII Jember, Jawa Timur*. Tidak diterbitkan, laporan praktek lapangan kegiatan wajib profesi keahlian Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya IPB, 1987, hlm 5.

⁵ Aiko Kurasawa. *Mobilisasi Dan Kontrol*. Jakarta: Grasindo, 1993, hlm 3-52.

seperti Perkebunan Teh, Karet, Kopi, dan sebagainya ditebang atau dibongkar dan dijadikan tanah ladang, menurut keterangan Pemerintah Djepang, guna menambah hasil bahan makanan. Disamping banjak pula Paberik-paberik Gula, Kopi, Teh, dan dan/atau dirubah mendjadi paberik lain, misalnja Peberik Sendjata, Paberik Tenun, Butanol, dan lain sebagainja. Ada pula paberik-paberik jang dibongkar sama sekali.⁶

Menurut pemberitaan media tanah-tanah milik perusahaan perkebunan terlantar akibat ditinggal oleh para pemiliknya yang berbasis pada hak *opstal* diambil oleh Pemerintah fasisme Jepang. Terdapat beberapa areal lahan yang diambil oleh Pemerintah Fasisme Jepang seperti di Distrik Kalisat 980 ha, Distrik Puger 105 ha, Distrik Jember 317 ha, Distrik Mayang 674 ha dan Distrik Tanggul 788 ha.⁷ Bahkan Pemerintah fasisme Jepang tidak segan-segan memperluas lahan pertanian rakyat dengan jalan membongkar hutan.

Fasisme Jepang juga melaksanakan program Rencana Lima Tahun yang ditangani oleh *Djawa Menka Saibai Kyookai* (Asosiasi Penanaman Kapas di Jawa) membuka ribuan hektar kebun di Karesidenan Besuki yang bibitnya didatangkan dari Sulawesi. Selain itu, sejak tahun 1942 mereka sudah memaksa menanam rami di bawah pembinaan Kantor Pengawasan Rami (*Rami Kanri Zimusyö*), di bekas perkebunan kopi di Jember dan daerah Karesidenan Besuki lainnya ada lahan seluas 30.000 ha.⁸ Tanah-tanah dengan hak *erfpacht* milik NV LMOD di Jenggawah budidaya tembakau berubah menjadi budidaya kapas. Begitu pula tanah *erfpacht* milik NV LMOD verponding No. 414 dengan luas tanah 354,825 hektar di daerah Sukorejo. Pembongkaran perkebunan juga dilakukan di bekas LMOD, sebuah area perkebunan ini dibuka pada tahun 1857 oleh George Birnie yang memiliki 2 area: perkebunan Ketajek I (verponding No. 2712) dengan luas tanah 125,73 hektar dan Perkebunan Ketajek II (verponding No. 2713) yang memiliki keluasan tanah sekitar 352,14 hektar.⁹ Bahkan mereka tidak peduli lahan pertanian milik masyarakat perkebunan baik yang sawah basah

⁶ Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 327.

⁷ Lihat pada *Soeara Asia* pada artikel yang berjudul *Memberantas Penganggoeran*, 17 April 2603 (1943), hlm 4.

⁸ Bisuk Siahaan. *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*. Jakarta: Pustaka Data, 1996, hlm 121-122.

⁹ Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda. 2000.

maupun lahan kering juga diwajibkan ditanami kapas. Situasi yang sama juga terjadi di daerah bekas perkebunan kopi di daerah Curah Wangkal yang memiliki area seluas 4.500 ha.¹⁰

Sementara itu, untuk urusan agraria Pemerintah Fasisme Jepang membentuk Kantor Urusan Tanah Partikelir (KUTP) guna mengambilalih tanah perkebunan partikelir.¹¹ Adanya KUTP ini berbagai tanah perkebunan partikelir tersebut (seolah-olah semuanya) dikuasai dan menjadi hak milik penguasa fasisme Jepang. Namun pembentukan KUTP hanya untuk memudahkan mobilisasi hasil bumi demi kepentingan perang itu sendiri. Masyarakat perkebunan tetap diwajibkan membayar sewa tanah dan kerja rodi. Selain itu pada tahun 1943 fasisme Jepang juga menutup 4 pabrik gula di wilayah karesidenan Besuki, yaitu: Jatiroto dan Semboro (Jember), Prajekan (Bondowoso) dan Asembagus (Situbondo).¹² Begitu juga untuk keluasan tanaman perkebunan gunung seperti karet, kina, kopi, teh dan lain-lain mengalami penurunan.¹³

Menariknya kedatangan fasisme Jepang ke Jember pada awalnya mendapat simpati dari masyarakat perkebunan. Keberadaan Jepang mampu menambah keberanian masyarakat perkebunan guna menggarap tanah-tanah

¹⁰ Wawancara dengan 5 orang petani di Curah Wangkal selama kurun waktu Maret-Juni 2004. Lihat juga Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000 khususnya pada bab konflik petani Curah Wangkal melawan Perhutani.

¹¹ Mochammad Tauchid. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bagian II. Jakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952, hlm 8.

¹² Seluruh Jawa ada 34 pabrik gula yang ditutup tahun 1943, kemudian terdapat 14 pabrik gula menyusul pada tahun 1944. Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 327.

¹³ Sebanyak 264 perkebunan gunung di Jawa Timur yang mengalami hal serupa. Begitu juga untuk keadaan industri perkebunan pabrik gula di Jawa Timur pada tahun 1952 dari 68 pabrik gula, hanya 29 pabrik yang masih bisa dioperasikan, 5 pabrik dibangun kembali sementara 34 pabrik hancur. Untuk detailnya lihat pada Tugu Pahlawan. *Ibid.* hlm 333-335. Selain itu menurut laporan kantor statistik yang dirujuk Tauchid di Jawa Timur terdapat sebanyak 366 *onderneming* dengan keluasan 295.778 ha, itu artinya 27,4 % dari keluasan tanah di Jawa Timur. Rata-rata luas tiap *onderneming* 808 ha dan yang ditanami seluas 229.356 ha, kira-kira 26,4 % dari keluasan tanah yang dimiliki oleh *onderneming*. Rata-rata yang ditanami tiap *onderneming* 627 ha, tiap *onderneming* rata-rata yang ditanami dalam hitungan persen 77,5%. Lihat pada Mochammad Tauchid. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bagian I, Jakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952, hlm 178.

perkebunan dan memanfaatkannya menjadi lahan pertanian¹⁴ padahal tindakan itu dilakukan untuk kepentingan perang. Tentu saja dorongan tersebut mula-mula diterima dengan gembira oleh masyarakat perkebunan setempat, yang sebelumnya merasakan ketidakadilan selama pemerintahan kolonial. Sehingga pada awalnya masyarakat perkebunan dengan “suka rela” mendukung gerakan pembongkaran tanah-tanah perkebunan dan hutan-hutan tersebut.

Akan tetapi bukan berarti tanpa perlawanan atas perilaku fasisme Jepang di wilayah perkebunan tersebut. Bahkan pada akhir pendudukan Jepang, pada tahun 1945 perlawanan terhadap Fasisme Jepang di Jember juga hadir dari kalangan santri. Terlebih lagi, pada saat tentara Fasisme Jepang masih bertahan di wilayah perkebunan Garahan, wilayah perbatasan Jember-Banyuwangi. Ketegangan politik yang terjadi segera dipecahkan oleh peranan Ulama: (i) KH As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), (ii) KH Dhofir, dan (iii) KH Munir (kedua kyai terakhir dari Jember), yang didukung oleh Barisan Pelopor. Akhirnya tentara Jepang yang masih bertahan di wilayah perkebunan tersebut segera dibawa ke Surabaya dengan menggunakan kereta api.¹⁵

3.2. Perkebunan Menjadi Ranah Perebutan

Sepeninggal Jepang, geliat masyarakat perkebunan dalam menggarap dan mengelola lahan bekas perkebunan dengan tanaman pangan semakin massif. Ruang gerak penggarapan lahan perkebunan menjadi semakin longgar menyusul Proklamasi kemerdekaan Indonesia (1945).¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan seorang petani Curah Wangkal, Jember pada tanggal 1 Juni 2004. Bandingkan dengan Jan G. L. Palte. *The Development of Java’s Rural Uplands in Response to Population Growth: an Introduction Essays in Historical Perspective*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, Faculty of Geography, 1984, hlm 27. Lihat juga pada Hefner, *Op. cit.* hlm 115.

¹⁵ Hasan Basari. *KHR As’ad Syamsul Arifin Riwayat Hidup Dan Perjuangan*. Choirul Anam (penyunting). Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994, hlm 39-41.

¹⁶ Ini merupakan satu tanda yang tegas bagi proses dekolonisasi, sekaligus merupakan situasi transisi ketatanegaraan yang sangat menentukan bagi Indonesia ke depan. Ada dua hal yang mendasari penjelasan mengapa istilah transisi ketatanegaraan digunakan. *Pertama*, pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang pertamanya membuat dua keputusan penting: (1) mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden. UUD tersebut bersifat sementara karena masih bercampur dengan sistem hukum kolonial, seperti pada pasal 2 aturan peralihan yang menyatakan, sepanjang badan kekuasaan dan peraturan-peraturan belum diganti dengan yang baru masih tetap berlaku. *Kedua*, hari

Sejak saat itu masyarakat perkebunan di Jember memiliki tanggung jawab dua hal. *Pertama*, masyarakat perkebunan di Jember harus membenahi segala kerusakan akibat pendudukan fasisme Jepang. *Kedua*, masyarakat perkebunan mulai menggarap tanah perkebunan sesuai dengan kebutuhan subsistensi sehari-hari dan tanaman perkebunan guna kebutuhan pasar domestik.¹⁷

Apa yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan Ketajek masyarakat perkebunan mulai mengurus lahan tersebut dengan leluasa. Selain itu mereka juga mulai mendirikan perkampungan dengan berbagai sarana penunjang seperti perumahan, mushola, kuburan dan perangkat desa. Guna pemenuhan kebutuhan subsistensinya masyarakat perkebunan di wilayah tersebut mulai menanam berbagai tanaman pangan seperti singkong dan jagung. Selain itu masyarakat perkebunan ini juga melanjutkan budidaya tanaman perkebunan keras keras seperti kopi, kakao, kelapa dan durian.¹⁸ Hal yang sama juga terjadi di lahan bekas perusahaan perkebunan kopi di Curah Wangkal.¹⁹

Masyarakat perkebunan mulai memikirkan keberadaan asset perkebunan seperti gudang-gudang dan alat-alat industrinya serta penataannya. Upaya masyarakat perkebunan tersebut mendapat dukungan dari berbagai organisasi sosial maupun politik. Bagi masyarakat perkebunan kehadiran Barisan Tani Indonesia (BTI)²⁰ mampu menjadi wadah bagi masyarakat perkebunan Jember. BTI melaksanakan kongres kedua di Jember pada tanggal 29 Desember 1946.²¹

keduanya, PPKI menyetujui pembentukan 12 Kementrian Negara yang salah satunya Kementerian Kemakmuran (Ir. Surachman Tjokroadisurjo), namun struktur organisasinya tidak berbeda jauh dengan *Departement van Economische Zaken* milik Pemerintah Hindia Belanda. Pada bulan-bulan pertama setelah Proklamasi hampir tidak ada pekerjaan yang dilakukan selain melanjutkan pekerjaan rutin yang diwariskan Pemerintah Fasisme Jepang.

¹⁷ Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000.

¹⁸ Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda, 2000, bab konflik petani Ketajek melawan Perusahaan Perkebunan Daerah.

¹⁹ Wawancara dengan seorang petani Curah Wangkal, Jember pada tanggal 1 Juni 2004.

²⁰ BTI berdiri di Jakarta pada akhir bulan November 1945, yang diawali dengan Kongres Petani Indonesia. Beberapa pendirinya adalah Mohammad Tauchid dan Sardjono. Adapun isu awal yang diangkat oleh BTI dari hasil kongres tersebut adalah perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tani dengan membebaskan mereka dari beban ganda, yaitu imperialisme dan feodalisme. Lihat pada Karl Pelzer. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991, hlm 219.

²¹ *Ibid*, hlm 44.

Dalam kongres tersebut, BTI mendesak pemerintah guna mengambilalih semua tanah milik perkebunan partikelir, baik melalui jalan konsesi maupun sewa jangka panjang.²² Setahun kemudian, dalam kongresnya di Blitar pada tanggal 16 Desember 1947, BTI semakin tegas mengajukan resolusi untuk menuntut penghapusan hak konversi dan semua hak istimewa lainnya dari pengusaha asing di tanah Jawa yang padat penduduknya. Aktifitas masyarakat perkebunan di juga mendapat dukungan penuh dari bidang Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pada Pebruari 1946 diadakan satu konferensi Pesindo se Jawa Timur di Jember pada Pebruari 1946, yang dihadiri semua anggota di wilayah Karesidenan Besuki sebanyak 7.900 orang.²³ Kemudian tanggal 8 Februari 1946, juga dilaksanakan konferensi besar-besaran PKI Jawa Timur di Jember.²⁴

Dalam dokumen BTI yang berjudul *Mentjapai Kemakmoeran* diputuskan di Jember tersebut memiliki program 2 tahun memiliki *tagline: Program Oentoek Memboeat Negara Makmoer, Program Oentoek Memboeat Rakjat Kenjang*. Program tersebut tidak saja dalam rangka modernisasi pertanian, tapi juga menyiapkan kader-kader tani untuk masa mendatang. Dalam kursus kadernya BTI juga menyiapkan 8 materi: (i) tata negara; (ii) aliran-aliran politik; (iii) sejarah pergerakan Indonesia; (iv) Ilmu jiwa dan masyarakat; (v) pergerakan kaum tani; (vi) pergerakan kaum buruh; (vii) ekonomi; dan (viii) hak tanah. Khusus mengenai hak atas tanah tersebut terdapat 5 hak yang harus dipelajari oleh kader BTI. Tentu saja ini sangat berhubungan dengan keberadaan perkebunan. Adapun pemahaman atas hak tanah: (i) yasan dan gogolan; (ii) eigendom; (iii) erfpacht; (iv) sewa-menyewa; (v) pajak bumi.²⁵

²² Dalam dokumen BTI yang berjudul *Mentjapai Kemakmoeran* diputuskan di Jember memiliki program 2 tahun dengan *tagline: Program Oentoek Memboeat Negara Makmoer, Program Oentoek Memboeat Rakjat Kenjang*. Adapun program peningkatan kualitas kadernya, adalah (i) tata negara; (ii) aliran-aliran politik; (iii) sejarah pergerakan Indonesia; (iv) Ilmu jiwa dan masyarakat; (v) pergerakan kaum tani; (vi) pergerakan kaum buruh; (vii) ekonomi; dan (viii) hak tanah. Khusus mengenai hak atas tanah tersebut terdapat 5 hak yang harus dipelajari oleh kader BTI. Tentu saja ini sangat berhubungan dengan keberadaan perkebunan. Adapun pemahaman atas hak tanah: (i) yasan dan gogolan; (ii) eigendom; (iii) erfpacht; (iv) sewa-menyewa; (v) pajak bumi. Mengenai hal ini lebih lengkap dapat lihat lampiran dokumen No 1.

²³ laporan *Antara* 13 Februari 1946.

²⁴ laporan *Antara* yang dimuat tanggal 11, 12 dan tanggal 16 Februari 1946.

²⁵ Mengenai hal ini lebih lengkap dapat lihat lampiran dokumen No 1.

Kalau melihat seklumit narasi di atas menunjukkan kecenderungan umum pada negara pasca kolonial. Indonesia juga menghadapi permasalahan yang sangat mendasar, (tentu) salah satunya adalah persoalan perekonomian nasional yang harus segera diatasi. Menurut Thee²⁶ setidaknya terdapat dua hal masalah perekonomian mendasar yang harus dihadapi oleh Indonesia. *Pertama*, tugas merehabilitas perekonomian nasional yang telah mengalami kerusakan besar pasca pendudukan fasisme Jepang dan perang kemerdekaan. *Kedua*, terdapatnya tuntutan guna merombak sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Pada titik ini pula sebenarnya tindakan pengelolaan lahan perkebunan oleh masyarakat perkebunan itu selayaknya juga mendapat apresiasi yang tepat. *Pertama*, tindakan tersebut sepatutnya juga bisa dibaca sebagai upaya mengatasi persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dimana masyarakat perkebunan secara partisipatif terlibat dalam upaya *recovery* penuntasan berbagai masalah ekonomi. *Kedua*, pada tingkat tertentu tindakan masyarakat perkebunan tersebut juga seharusnya dibaca sebagai upaya rehabilitasi atas kerusakan perusahaan perkebunan akibat perang.

Secara perlahan tata kelola di perkebunan mulai berjalan. Hancurnya tanaman perkebunan, termasuk bangunan-bangunan, berbagai instalasi dan mesin-mesin pabrik akibat tindakan Fasisme Jepang, tidak mudah bagi masyarakat perkebunan guna mengololanya kembali. Bersama-sama pihak pemerintah masyarakat perkebunan mulai mengelola budidaya tanaman perkebunan, yaitu tembakau, kopi, karet dan lain-lain pada lahan perkebunan tersebut dengan sistem *maro*. Keuntungan dibagi sama antara masyarakat perkebunan sebagai penggarap dan pihak pemerintah.²⁷ Sistem ini dianggap sebagai jalan tengah dari masalah kepemilikan lahan perkebunan yang merupakan milik masyarakat. Di samping itu masyarakat perkebunan sendiri masih bisa mengelola tanaman pangan.

Sementara itu dalam rangka melakukan koordinasi atas keberadaan berbagai perkebunan pemerintah mengusahakan adanya badan-badan di sektor perkebunan dan industri perkebunan. Pemerintah mengeluarkan dua peraturan: (i)

²⁶ The Kian Wie. *Explorations in Indonesian Economic History*. Jakarta: Penerbit FE UI, 1996, hlm 4.

²⁷ Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 328.

Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1946 tentang Perusahaan Gula (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara yang disingkat BPPGN);²⁸ (ii) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946 tentang Perusahaan Perkebunan (Pusat Perkebunan Negara atau disingkat PPN).²⁹ Peraturan tersebut kemudian dilaksanakan pada tahun 1947. Kedua badan sektor perkebunan tersebut berkedudukan di Surakarta. Pembiayaan kedua badan tersebut diluar tanggungan Anggaran Belanja Negara. Masing-masing badan tersebut dipimpin oleh suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari 3 orang, yang seorangnya dari unsur organisasi buruh perkebunan. Merujuk pada dokumen Tugu Pahlawan³⁰ untuk perusahaan Gula dari unsur Serikat Buruh Gula (SBG), sementara untuk PPN unsur buruhnya dari Sarbupri.³¹ Dengan adanya unsur buruh (perkebunan maupun industri perkebunan) dalam kegiatan badan-badan tersebut, tentu saja kepentingan masyarakat perkebunan dapat dilaksanakan.

Pada level nasional masalah perkebunan juga mulai masuk dalam pembahasan. Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo pada bulan Februari 1946 memprakarsai konferensi ekonomi yang salah satu temanya membahas masalah status dan administrasi perkebunan.³² Begitu juga pada konferensi ekonomi di Solo bulan Mei 1946 yang juga membicarakan perkebunan yang sudah rusak akibat perang, khususnya upaya rehabilitasi atas pabrik gula. Tindak lanjut dari dua konferensi tersebut Menteri Kemakmuran A.K. Gani berinisiatif membentuk Badan Perancang Ekonomi (*Planning Board*), yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi jangka pendek 2-3 tahun dan jangka panjang (Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun). Adapun rencana tersebut

²⁸ Susunan BPPG, kantor pusat di Surakarta. Di setiap Karesidenan dibentuk Kantor Cabang yang berhubungan langsung dengan pabrik gula. *Ibid*, hlm 329.

²⁹ Susunan PPN, kantor pusat di Surakarta. Di setiap Propinsi dibentuk Kantor Inspeksi PPN, sedang diberbagai daerah dibentuk Kantor-kantor Ajun Inspeksi yang berhubungan langsung dengan perkebunan-perkebunan. *ibid*.

³⁰ *Ibid*. hlm 328-329.

³¹ Organisasi ini didirikan pada 17 Februari 1947. Aktifitas Sarbupri mendapat dukungan luas dari SOBSI dan BTI. Organisasi buruh perkebunan ini menerbitkan *Warta Sarbupri*. Lihat pada Iskandar Tedjakusuma. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. Seri Mon edjakusuma Iskandar, *The Political Character of Yhe Indonesian Trade Union. Movement*, Comel University, Ithaca, New York, 1958, hlm 29. Lihat juga pada Soegiri DS dan Edi Cahyono. *Gerakan Serikat Buruh, Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003, hlm 140.

³² Bisuk Siahaan. *Loc. cit.* hlm 138.

adalah: (i) pengambilalihan seluruh bangunan perkebunan dan industri bekas milik pemerintah Belanda; (ii) menasionalisasi seluruh bangunan dan gedung milik asing yang dianggap vital dengan cara pembayaran ganti rugi; (iii) menyita perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi akibat Perang; (iv) mengembalikan perusahaan Belanda kepada yang berhak setelah diadakan perjanjian antara pemerintah RI dengan Belanda; (v) pemerintah membuka kesempatan penanaman modal asing di Indonesia; dan (vi) tanah-tanah partikelir akan dihapus.³³ Begitu juga masalah perkebunan juga masuk dalam *Dasar Pokok dari Rancangan Ekonomi Indonesia* (1947).³⁴

Sayangnya aktifitas masyarakat perkebunan, sekaligus aspirasi yang dilewatkan organisasi serta dukungan pemerintah tersebut mulai berhadapan dengan kehadiran *ondernemer* yang menganggap masih memegang hak *erfpacht*.³⁵ Kedatangannya mendapat dukungan penuh dengan tindakan agresi militer.³⁶ Mereka tidak segan-segan menghancurkan dan membumihanguskan lahan perkebunan, dalam rangka teror terhadap masyarakat perkebunan.³⁷ Politik bumi hangus ini tidak hanya terjadi di wilayah perkebunan, tapi juga menghancurkan pabrik-pabrik gula, gudang-gudang, termasuk hasil bumi yang

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm 138-139. Sementara itu, menurut Kanumoyoso prioritas utamanya bukan lagi ekonomi ekspor sebagaimana masa kolonial, melainkan memacu dan meningkatkan daya beli rakyat sebesar-besarnya. Strategi yang ditempuh untuk mencapai prioritas tersebut dengan mengintensifkan usaha produksi dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan hidup, mempertinggi kecakapan dan kecerdasan rakyat, dan meningkatkan hubungan luar negeri. Lihat pada Bondan Kanumoyoso. *Loc. cit.* hlm 5.

³⁵ Untuk daerah Sukorejo misalnya, masa akhir hak *erfpacht* dari NV LMOD pada 5 Februari 1954. Bahkan ada beberapa perusahaan perkebunan partikelir yang hak *erfpacht*nya berakhir pada tahun 1960-an, seperti di Ketajek, Jenggawah, Curah Nongko, Curah Takir dan lainnya.

³⁶ Dison Mulyadi. *Agresi Militer Belanda di Bondowoso*. tidak diterbitkan, laporan penelitian UNEJ, 1996. Sementara itu menurut keterangan Syamsir pada saat itu keuangan pemerintahan sementara Belanda di Indonesia (NICA) saat itu telah kehabisan dana untuk meneruskan pemerintahan di Indonesia (Wawancara dengan Syamsir Mochammad tanggal 26 april 2005). Di lain pihak NICA tidak dapat pinjaman lagi dari Inggris dan Amerika, karenanya saat agresi yang dituju adalah daerah-daerah yang memiliki kemampuan untuk *quick capital*, yaitu wilayah perkebunan seperti Karesidenan Besuki. Lihat pada M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1998, hlm 338-339. Ini merupakan kritik dari kalangan yang tidak setuju terhadap politik diplomasi.

³⁷ Untuk profil lahan perkebunan yang dibumi hanguskan yang dilakukan oleh agresor Belanda dapat dilihat pada foto No. 20.

masih disimpan.³⁸ Para pegawai perkebunan di Jember dipaksa untuk kembali kerja.³⁹ Segera mereka melakukan perlawanan dengan jalan melakukan pemogokkan secara sistematis.⁴⁰ Bahkan masyarakat perkebunan kemudian sering melakukan pemogokkan dalam rangka melawan kembalinya kekuatan asing di wilayah Jember.⁴¹ Tidak jarang terjadi pertempuran yang hebat antara lasykar yang dibantu masyarakat perkebunan dengan militer Belanda berbagai daerah perusahaan perkebunan seperti di Sukoredjo, Jember, bahkan pertempuran juga terjadi di daerah Pabrik Gula, seperti di Wringin Anom, Situbondo dan Jatiroto, Lumajang.⁴²

Terdapat satu wilayah perkebunan di Sukorejo yang kemudian dijadikan basis pertahanan republik dan menjadi Front Jember Timur. Gudang-gudang yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan tembakau beralih fungsi menjadi tempat menyimpan peralatan militer: senjata, mesiu dan lain-lain milik republik, termasuk menjadi tempat menyimpan alat pemancar penghubung Jember dengan Jakarta. Tampaknya masyarakat perkebunan di Jember betul-betul ingin mempertahankan tanah yang telah digarap dengan situasi yang berbeda dari sebelumnya yang sangat kolonialistik, walapun caranya dengan perang.

Oleh sebab itu masyarakat perkebunan Jember yang tergabung dalam TRIP Jember melakukan kritik terhadap proses diplomasi. Kritik tersebut tertuang dalam bentuk puisi.⁴³

Renville

Kini...// Kau tutup mulut meriam-meriammu // Dengan kain beludru //
Tak ada suara peluru menggema // Tak ada bunyi ledakan lagi // Tenang, sunyi
sekeliling // Damai....?

Tapi...seringai orang-orang // Di belakang laras senjatamu // Di belang
meriam beludru hitam // Seringai iblis // Hauskan darah // Siap sebar
malapetaka // Renville, Renville, janji hampa..!? (Panduman,⁴⁴ Ultimo Desember
1947).

³⁸ Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 320.

³⁹ Laporan harian Kementerian Pertahanan V pada tanggal 30 Desember 1947

⁴⁰ Koleksi Arsip Kementerian Pertahanan. No. Inventaris: 1157. Juga menurut keterangan dari Bapak Ibrahim, Jember, 13 September 2004.

⁴¹ Koleksi Arsip Kementerian Pertahanan. No. Inventaris: 1157.

⁴² Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Jember, 13 September 2004.

⁴³ Panitia Penulisan Sejarah Perjuangan Pelajar/TRIP Besuki, 1998.

⁴⁴ Ini nama suatu desa di daerah kecamatan Arjasa, Jember Bagian Utara.

Bagi para pengusaha partikelir, setelah berhasil menduduki kembali lahan perkebunan segera para pegawai perusahaan perkebunan di Karesidenan Besuki dipaksa untuk kembali kerja.⁴⁵ Adanya tekanan yang begitu hebat dari Belanda ini terjadilah reaksi dari masyarakat perkebunan mulai pemogokkan hingga pengangkutan hasil perkebunan milik asing secara sistematis sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Pada tanggal 13 November 1947 setelah Jember jatuh ketangan Belanda terjadi perampasan bergudang-gudang beras, tembakau, kedelai, gula dan garam oleh Belanda. Tembakau banyak yang diangkut ke Surabaya, penduduk banyak yang mengalami kesulitan hidup. Atas perintah Belanda angkutan kereta api harus berjalan. Para pegawai Djawatan Kereta Api (DKA, penulis) yang semula tidak mau bekerja sama terpengaruh pegawai yang kooperatif, sehingga akhirnya mereka mempertahankan jawatan dan inventarisnya. Namun golongan pemuda mendesak mereka untuk meletakkan jabatan. Akhirnya berdasar keputusan rapat tanggal 2 Oktober 1947 pimpinan DKA RI mengakui kesalahannya dan serentak melepas jabatannya.⁴⁶

Sejak tahun 1947 itulah, lahan perkebunan yang sebagian telah diduduki dan digarap oleh masyarakat perkebunan mulai diupayakan untuk diambil alih kembali oleh para pengusaha perkebunan. Argumentasinya para pengusaha perkebunan partikelir merasa hak *erfpacht* yang belum berakhir. Untuk daerah Sukorejo misalnya, masa akhir hak *erfpacht* dari NV LMOD pada 5 Februari 1954. Bahkan ada beberapa perusahaan perkebunan partikelir yang hak *erfpacht*nya berakhir pada tahun 1960-an, seperti di Ketajek dan Jenggawah.⁴⁷ Atas dasar inilah para pengusaha perkebunan partikelir sangat bersemangat melakukan pengambilalihan kembali lahan yang telah mereka tinggalkan akibat kalah perang. Adanya pengambilalihan kembali oleh pemilik lama, menurut laporan harian Kementerian Pertahanan tanggal 10 Januari 1948 mendapat perlawanan dari kekuatan jaringan *non-cooperation*. Jaringan ini sangat kuat keberadaannya, khususnya di wilayah perkebunan. Mereka sering melakukan

⁴⁵ Menurut laporan harian Kementerian Pertahanan V untuk daerah pendudukan Belanda selama bulan November – Desember 1947, pada tanggal 30 Desember 1947.

⁴⁶ Koleksi Arsip Kementerian Pertahanan. No. Inventaris: 1157. Juga menurut keterangan dari Bapak Ibrahim, Jember, 13 September 2004.

⁴⁷ Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda, 2000.

pemogokkan dalam rangka melawan kembalinya kekuatan asing di wilayah Jember.⁴⁸

Tidak jarang terjadi pertempuran yang hebat antara lasykar yang dibantu masyarakat perkebunan dengan militer Belanda berbagai daerah perusahaan perkebunan seperti di Sukoredjo, Jember, bahkan pertempuran juga terjadi di daerah Pabrik Gula, seperti di Wringin Anom, Situbondo dan Jatiroto, Lumajang.⁴⁹

Perang kolonial bagi masyarakat perkebunan di Sukorejo bermakna tidak sekedar mempertahankan area yang sudah digarap. Bahkan masyarakat perkebunan Sukorejo juga menyediakan sebagian lahannya guna menjadi basis pertahanan republik dan menjadi Front Jember Timur dalam rangka melawan secara fisik aksi militer Belanda. Gudang-gudang seng yang ada di daerah tersebut yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan tembakau beralih fungsi menjadi tempat menyimpan peralatan militer: senjata, mesiu dan lain-lain milik republik, termasuk menjadi tempat menyimpan alat pemancar hubungan daerah Jember dengan Pusat (Jakarta) guna memperlancar komunikasi.⁵⁰ Tampaknya masyarakat perkebunan betul-betul ingin mempertahankan apa yang telah didapatkannya dengan menduduki dan menggarapnya. Melihat gegap gempitanya perlawanan masyarakat perkebunan dalam perang kolonial Tauchid⁵¹ melukiskan tentang apa yang terjadi di Jawa saat itu dengan apiknya:

Rakyat yang memang haus akan tanah, ingin makan kenyang ditambah dengan rasa dendam kepada musuh, menjalankan siasat bumi hangus itu dengan gembira dan penuh semangat, dengan tidak takut dan gentar menentang bahaya sebagai akibat perbuatannya itu. Dibeberapa tempat lagi, untuk kepentingan biaya perang dan perjuangan, beberapa orang pimpinan perang memberikan hutan kepada rakyat dengan memungut uang. Beribu-ribu hektar tanah onderneming dan hutan dijadikan tanah pertanian rakyat untuk menanam bahan makanan dan untuk mendirikan gubug-gubug rumahnya yang sebelumnya

⁴⁸ Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan. No. Inventaris: 1157.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Jember, 13 September 2004.

⁵⁰ Sebagai daerah yang kemudian menjadi basis pertahanan inilah yang nantinya menjadi pemicu konflik antara pihak militer dalam hal ini Kodam Brawijaya dengan masyarakat perkebunan Sukoredjo, Jember, khususnya pada masa berkuasanya rezim politik Orde Baru.

⁵¹ Mohamad Tauchid, bagian II. *Loc. cit.* hlm 11.

itu mereka menumpang dipekarangan orang lain.⁵² Hal ini terus menerus terjadi pada waktu perang kolonial yang kedua sejak Desember 1948, karena siasat bumi hangus juga. Pembumi hangusan berjalan dengan hebatnya, dijalankan oleh Rakyat Tani. Berduyun-duyun orang datang dari desa yang jauh, datang ketempat sarang onderneming untuk “membuka kebun”, sambil turut menunaikan perintah perjuangan, membumihanguskan bangunan-bangunan musuh yang berupa onderneming. sambil berjuang menunaikan kewajiban nasional, mempertahankan kemerdekaan dan melumpuhkan musuh, mendapat tanah untuk tiang penghidupannya.

Bagi rakyat tani, mempertahankan kemerdekaan tidak lain dimaksudkan terutama mempertahankan tiap-tiap jengkat tanah yang menjadi sumber dan tiang penghidupannya. Di daerah-daerah Republik yang tidak diganggu oleh Belanda sebelum perang kolonial pertama dan kedua, onderneming-onderneming modal asing “di-Indonesia-kan”, dikuasai oleh orang-orang Indonesia dengan merek “Milik Republik Indonesia”. Karena ketaatan rakyat kepada Pemerintah dan Negaranya, dengan kepercayaan dan pengharapan, bahwa perkebunan yang dikuasai dengan merk “Milik Republik” itu hasilnya untuk negara dan untuk rakyat, maka bagaimanapun hausnya rakyat akan tanah, tidaklah mau mengambil tanah yang diberi merk “Milik Republik Indonesia” itu begitu saja. Terhadap tanah-tanah onderneming-onderneming ini, rakyat masih menahan nafsunya.

Setelah penyerahan kedaulatan (1949) harapan masyarakat perkebunan dapat segera mengelola tanah tidak kunjung terwujud. Pemerintah melalui peraturan Menteri Kemakmuran tanggal 25 Agustus 1949 telah mengeluarkan Peraturan No. 2/49 tentang pembekuan PPN dan BPPGN. Aturan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Desember 1949. Ada dua pertimbangan pembekuan tersebut: (i) adanya agresi militer Belanda; dan (ii) akibatnya semua asset perkebunan mengalami kehancuran. Dengan demikian pada saat penyerahan kedaulatan perkebunan dilingkupi tiga hal. *Pertama*, perkebunan yang telah diduduki kembali oleh maatschappij atau Kantor Administrasi Asing sebagaimana sebelum perang. *Kedua*, perkebunan yang masih diduduki oleh pemerintah RI yang diurus oleh PPN dan BPPGN yang telah dinyatakan non-aktif tersebut. *Ketiga*, perkebunan

⁵² Untuk masalah mendirikan rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal dan memperbaiki gedung-gedung perkebunan yang dirusak Belanda dapat dilihat pada Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 331.

yang belum diambil oleh pemilik hak *erfpacht*, karena masih diduduki oleh masyarakat perkebunan dan lasykar rakyat.⁵³

Bersamaan dengan itu orang-orang Belanda mulai datang ke Jember lagi. Mereka tidak saja mulai berusaha mengambalalih perusahaan perkebunan, tapi juga berupaya mengembalikan semua sarana dan prasana yang telah dibangun sebelum perang,⁵⁴ termasuk gedung sekolah (sekarang menjadi salah satu gedung pemerintah daerah di Jalan Kartini) yang sudah menjadi Sekolah Rakyat. Akhirnya sekolah tersebut harus dibubarkan dan pindah ke daerah lain, karena tempat itu difungsikan kembali untuk tempat belajar anak-anak pengusaha perusahaan perkebunan Belanda dan para *employe*.⁵⁵

Tentu saja dengan kembalinya kekuatan kolonialisme Belanda ke wilayah Republik baru tersebut, tidak saja berupaya mengambil alih sumber daya ekonomi yang sudah saya singgung di atas, tetapi juga perumahan dan termasuk “kota” yang telah mereka tinggalkan. Pada masa kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia secara otomatis dirasakan adanya proses diskriminasi kembali yang diterima akibat adanya pembagian “kelas” oleh industri perkebunan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan karet, kopi dan kakao adalah berbagai perusahaan tersebut menyediakan perumahan yang jauh dari sederhana (*enclave*) untuk para buruhnya masuk jauh ke dalam perkebunan (kecuali untuk perkebunan tebu di Jawa).⁵⁶ Sementara para pengusaha tinggal di bangunan yang sangat mewah di pintu masuk perusahaan perkebunan, yang dilengkapi berbagai fasilitas yang sangat memadai. Struktur bangunan perusahaan perkebunan tersebut pada akhirnya mampu membentuk sikap perilaku buruh untuk sangat patuh kepada para pengusaha.⁵⁷

⁵³ *Ibid.* hlm 331-332.

⁵⁴ Pemerintah melalui 3 (tiga) Kementrian (Kementrian Dalam Negeri, Pertanian dan Perburuhan) mengumumkan pembetukan Panitia Pengembalian Perusahaan Perkebunan Milik Asing, tanggal 8 Maret 1950 No. 2 H. 50. Sementara itu Menteri Pertanian pada tanggal 1 Agustus 1950 mengeluarkan peraturan No. 31/Um/50 guna mendirikan perwakilan-perwakilan dan Sub-sub Perwakilan Djawatan Perkebunan. Untuk detail kegiatan yang dilakukan kedua aturan tersebut dapat dilihat pada Tugu Pahlawan. *Ibid.* hlm 332-333 dan 340.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Kusdari, Jember, 10 Juni 2004.

⁵⁶ Gunawan Wiradi. *Perkebunan Dalam Wacana Semangat Pembaruan*. Makalah dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusar Kajian Agraria IPB, Bogor, 2000.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Kusdari, Jember, 10 Juni 2004.

Demikianlah pada paruh kedua tahun 1940an masyarakat perkebunan menerima stigma bahwa proses pendudukan dan penggarapan di atas tanah yang berstatus hak *erfpacht* tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan liar.⁵⁸ Di beberapa tempat masyarakat perkebunan mengalami teror dan penembakan. Akibatnya Roda Pemerintahan tidak berjalan normal. Begitu juga dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan mengalami kesulitan melaksanakan tugasnya, karena para pegawainya tidak merasa aman dalam melaksanakan pekerjaan.⁵⁹

3.3. Masyarakat Perkebunan, Konflik dan Dinamika Politik

Kendati pihak *ondernemer* mulai kembali ke Jember, namun masyarakat perkebunan mengerjakan lahannya dengan mandiri. Ini sebagai bentuk perlawanan terhadap perkebunan sistem kolonial yang mau kembali. Masyarakat perkebunan di Jenggawah menganggap yang membuka hutan adalah mereka bersama tuan kebun dengan sistem bagi hasil. Masyarakat perkebunan di Jenggawah sejak saat itu merasa tidak terikat lagi dengan perusahaan perkebunan manapun. Terlebih lagi pada tahun 1953 mereka mulai dibebani pajak lahan garapan oleh pemerintah yang dibayar setiap tahunnya. Setiap pemilik lahan mendapat nomor pipil atau petok sebagai legitimasi kepemilikan tanahnya.⁶⁰

Hal yang sama juga berlangsung di perkebunan Ketajek yang mulai membayar pajak pada tahun yang sama.⁶¹ Sementara untuk perkebunan Sukorejo, pada tahun 1950 masyarakat perkebunannya mengajukan beberapa permohonan kepada Gubernur Jawa Timur, (i) agar hak *erfpacht* di wilayah ini tidak diperpanjang, (ii) lahan yang telah dimanfaatkan itu dibagikan kepada masyarakat dan dijadikan tanah yasan. Pengajuan tersebut diulangi lagi pada tanggal 1 Desember 1954. Namun mengingat di daerah Sukorejo pada awal-awal masa agresi militer Belanda juga dijadikan benteng perlawanan republik, maka atas dasar hal itu pada tahun 1952 pihak Distrik Militer meminta lahan seluas 22.75

⁵⁸ Margo L Lyon. *Bases of Conflict in Rural Java*. Research Monograph No. 3 Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies, 1970, hlm 46. Untuk konflik di daerah lain, seperti di Pasuruan dapat dibandingkan dengan Robert W Hefner, *Op. cit.*

⁵⁹ Koleksi Arsip Kementrian Pertahanan, No. Inventaris: 1157.

⁶⁰ Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda, 2000.

⁶¹ *Ibid.*

hektar guna bangunan Militer Dipo Batalyon AD dengan ganti rugi tanaman sebesar Rp. 2.500/ha. Selanjutnya pada daerah tersebut didirikan bangunan-bangunan militer di daerah ini.⁶²

Terdapat pula beberapa perkebunan yang dapat diambil kembali oleh pemilik hak *erfpacth*. Perkebunan kopi Curah Wangkal pada tahun 1956 mulai digarap kembali oleh pihak LMOD. Selain itu perkebunan Gunung Majang, Glantangan, Kali Bajing, Pasewaran, Mangli, Penataran dan lain sebagainya dikuasai kembali oleh kaum *ondernemer*.⁶³ Pengembalian ini lebih difokuskan pada perkebunan pegunungan, karena perkebunan tanah datar dengan perusahaannya telah lebih dulu. Di wilayah Karesidenan Besuki terdapat 128 perkebunan yang sudah dikembalikan ke pihak asing. Ironisnya pengembalian tersebut tanpa syarat apapun.⁶⁴ Tentu saja ini berbeda dengan persepsi masyarakat perkebunan.

Periode ini, masyarakat perkebunan mulai diperkenalkan dengan tata cara kerja yang baru di perusahaan perkebunan. Adapun tata cara tersebut adalah berupa perjanjian kerja (*collective arbeidsovereenkomst*). Adalah Sarbupri yang tampil mewakili masyarakat perkebunan dalam rangka penandatanganan perjanjian kerja tersebut dengan pihak ALS. Terdapat beberapa unsur yang harus disepakati, yaitu permasalahan upah, jam kerja, waktu istirahat, *gratificatie*, kesehatan dan sebagainya. Dengan demikian pola hubungan kerja antara masyarakat perkebunan dalam hal ini buruh dan majikan dapat diawasi.⁶⁵

Ditambah lagi pada bulan September 1950, *Gouvernement's Landbouw Bedrijven* yang dibentuk berdasar *Indonesische Bedrijven Wet 1927* menyatakan bekas perusahaan perkebunan milik bangsa asing yang kalah dalam perang dunia II dimasukkan ke dalam pengelolaan Pusat Perkebunan Negara, kecuali perusahaan perkebunan partikelir masih bisa melanjutkan usahanya.⁶⁶ Kedua kebijakan di atas mampu menjadi stimulan bagi kembalinya kekuatan *planters* ke

⁶² Untuk profil bangunan militer yang didirikan di daerah perkebunan Sukorejo dapat dilihat pada lampiran foto No. 21 dan 22.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Jacob Vredenbergt, Jakarta, 18 September 2004.

⁶⁴ Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 425-426.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Departemen Pertanian Badan Khusus PNP. *Perkembangan 5 Tahun P.N Perkebunan 1968-1972*. Jakarta. Departemen Pertanian, 1973, hlm 13.

perusahaan perkebunannya. Menurut Tauchid ini merupakan petanda awal bagi timbulnya sengketa tanah antara masyarakat perkebunan dengan pihak *onderneming*.⁶⁷ Apa yang terjadi di perkebunan kopi Curah Wangkal yang sejak tahun 1945 masyarakat perkebunan telah menjalankan aktifitasnya guna memenuhi kebutuhan subsistensinya, namun sejak tahun 1956 diambil kembali oleh pihak LMOD. Begitu juga dengan beberapa perkebunan seperti perkebunan Gunung Majang, Glantangan, Kali Bajing, Pasewaran, Mangli, Penataran dan lain sebagainya dikuasai oleh pihak *ondernemer*.⁶⁸

Sejak adanya penguasaan kembali oleh perusahaan perkebunan asing tersebut sering kali terjadi konflik dengan masyarakat perkebunan. Persepsi masyarakat perkebunan bahwa lahan perkebunan tersebut adalah milik mereka yang berbeda dengan persepsi kolonial. Untuk melakukan perlawanan atas upaya kembalinya modal asing dengan persepsi kolonialnya, masyarakat perkebunan sering melakukan aksi-aksi mogok. Pada tahun 1950-an sering kali terjadi pemogokan besar-besaran yang dilakukan secara serempak di Jember yang diorganisasikan oleh Sarbupri.⁶⁹ Termasuk untuk menunjukkan keberadaannya, pada setiap hari buruh sedunia, 1 Mei masyarakat perkebunan melaksanakan secara besar-besaran setiap tahunnya di alun-alun kota Jember.⁷⁰

Akibat adanya gerakan mogok yang seringkali dilakukan oleh buruh perkebunan, akhirnya pemerintah pusat kemudian mengeluarkan kebijakan UU Darurat No. 16 tahun 1951 tentang pelarangan mogok. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan-bulan awal tahun 1951 mendapat tentangan dari kekuatan organisasi buruh. Semua tuntutan dari kaum buruh perkebunan tersebut dipublikasikan pada banyak media pada tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 1951, mulai dari media: *Suara Rakyat*, *Harian Umum*, *Perdamaian*, *Trompet Masyarakat*, dan *Java Post*.⁷¹

⁶⁷ Moh Tauhid, Bagian II. *Loc. cit.* hlm16.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Jacob Vredenbergt, Jakarta, 18 September 2004.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Jember, 13 September 2004.

⁷⁰ Untuk berbagai kegiatan peringatan Hari Buruh 1 Mei 1953 dapat dilihat pada lampiran foto No. 23, 24, 25, 26 dan 27. Sementara untuk Hari Buruh 1 Mei 1954 dapat dilihat pada lampiran foto No. 28, 29, 30, 31 dan 32.

⁷¹ Secara resmi dalam Sidang DPP Pleno Ke III Sarbupri mengeluarkan Resolusi untuk pencabutan UU tersebut. Upaya untuk dicabutnya UU tersebut terus juga

Upaya untuk memperjuangkan persepsinya, bahwa tanah tersebut milik masyarakat perkebunan terus dilakukan. Pada suatu rapat Rapat Anggota BTI Ranting Wonowiri pada tanggal 13 September 1953, yang dihadiri oleh wakil-wakil Sarbupri dari beberapa ranting di wilayah Jember bagian selatan, seperti dari Wonowiri, Kalisanah dan Kotta Blater. Rapat tersebut telah memutuskan untuk melahirkan resolusi kepada pemerintah yang isinya, mempertahankan tanah-tanah yang telah dikelola oleh masyarakat perkebunan. Resolusi ini disampaikan karena ada niat dari pemerintah untuk mengembalikan tanah-tanah bekas persil karet *onderneming* Kotta Blater, seluas 35 ha kepada pemilik hak *erfpacht*. Padahal persepsi masyarakat perkebunan bahwa yang melakukan adalah mereka pada saat berkuasanya Fasisme Jepang di Jember, dan hingga tahun 1953 tanah tersebut telah dikelola menjadi lahan pertanian dan tempat tinggal.⁷²

Menghadapi tuntutan dari hasil rapat anggota BTI di Wonowiri sikap pemerintah yang lebih tunduk pada pengumuman bersama dari 3 Kementerian (Kementerian Dalam Negeri, Pertanian dan Perburuhan) No. 2 H Th. 1950 tentang pembentukan Panitia Pengembalian Perusahaan Perkebunan Milik Asing, tanggal 8 Maret 1950. Hal itu diperkuat oleh keputusan Menteri Pertanian tanggal 1 Agustus 1950 No. 31/Um/50 guna mendirikan berbagai perwakilan dan sub-perwakilan jawatan perkebunan. Adapun tugasnya adalah “Membantu Pemerintah mengembalikan kekuatan produksi dari hasil export perkebunan seperti keadaan sebelum perang, baik kuantitatif maupun kualitatif”.⁷³

Akibatnya terjadi konflik antara masyarakat perkebunan dengan pihak Perkebunan Kotta Blater di daerah Kalisat (Jember bagian utara) pada bulan Desember 1954. Masyarakat perkebunan melakukan demonstrasi ke perkebunan dengan jumlah massa yang besar. Pasca demonstrasi sebanyak 342 masyarakat perkebunan dari daerah Banpasir, Banjaragung, Gentong dan Gladakputih ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian. Mereka diputus bersalah oleh

diperjuangkan DPP Sarbupri hingga tahun-tahun berikutnya. Lihat Hasil Pleno. Sidang DPP Pleno ke III Sarbupri. 1954, hlm 9.

⁷² Lihat Berita Organisasi Sarbupri. *Tanah Jang Digarap oleh Tani Dipertahankan*. No. 23 Th ke I, Oktober 1953, hlm 162.

⁷³ Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 332.

keputusan pengadilan lokal.⁷⁴ Keputusan pengadilan tersebut mendapat tentangan dari organisasi organisasi masyarakat perkebunan yang berbasis petani, yakni BTI. BTI memiliki anggapan bahwa yang dilakukan oleh massa rakyat tani tersebut tidak salah.⁷⁵ Konflik yang lain terjadi di daerah Curah Damar, Kalisat (Jember bagian Utara), dimana lebih dari seratusan masyarakat perkebunan dituduh telah menggarap tanah perkebunan secara illegal dan liar milik perkebunan partikelir Belanda.⁷⁶ Aksi masyarakat perkebunan tersebut mendapat dukungan penuh dari 3 partai politik PNI, Partai NU dan PKI.⁷⁷ Untuk periode 1950-an dinamika perburuhan di perkebunan Jember, tidak bisa dilepaskan dari Sarbupri.⁷⁸ Di Jember Sarbupri merupakan organisasi masyarakat perkebunan yang memiliki persyaratan struktur organisasi yang rapi hingga di tingkat desa (ranting).⁷⁹

Aksi dari masyarakat perkebunan semakin kreatif karena dilakukan secara perorangan, atau yang dikenal dengan istilah *aksi kombang*. Sarbupri Ranting Wonojati paling banyak melakukan aksi ini secara perseorangan mendatangi administratur setempat dan menanyakan berbagai hal tentang tuntutan Sarburpi. Dimana saja administratur itu berada pasti selalu diampiri oleh buruh-buruh perkebunan, baik itu secara perseorangan maupun berkelompok. Selain itu secara organisatoris juga dilakukan seperti oleh Dewan Pimpinan Ranting (DPR) Wonojati mengirimkan surat tertanggal 31 Mei 1953 guna mendesak administratur agar tuntutan umum yang diajukan DPP Sarburpi dikabulkan. Mereka menuntut para majikan supaya mendesak *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS)⁸⁰ pusat guna masyarakat perkebunan mendapatkan hak kenaikan upah.⁸¹

⁷⁴ Lihat pada *Terompet Masyarakat*, 30 November 1954, hlm 1.

⁷⁵ Lihat pada *Terompet Masyarakat*, 24 Desember 1955, hlm 2.

⁷⁶ Lihat pada *Terompet Masyarakat*, 18 Juni 1957, hlm 2.

⁷⁷ Lihat *Terompet Masyarakat*, 5 Desember 1958, hlm 1.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak, Jacob Vredenbergt, Jakarta, 18 September 2004.

⁷⁹ Berita Organisasi Sarbupri. No. 16 Th-I, Djuli 1953. hlm 63-64.

⁸⁰ Sebuah gabungan perusahaan perkebunan besar di Jawa.

⁸¹ Berita Organisasi Sarbupri, *Setiap hari buruh mendatangi administratur*, No. 13 Djuni 1953, hlm 8-9. Bersamaan dengan itu, pemerintah RI mendirikan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan P4P untuk Pusat. Data statistik secara nasional menunjukkan perselisihan di perkebunan antara tahun 1951-1955 tercatat 11.739 kasus perselisihan, 1.787 kasus disertai pemogokan dengan melibatkan 918.739 buruh. Dalam prosentase sektor perkebunan 31,23%, industri 18,64%. Suri Suroto. Gerakan Buruh Dan Permasalahannya. Dalam *PRISMA*, No. 11, 1985, hlm 31.

Akan tetapi yang harus dicatat, gerakan yang dikembangkan oleh Sarbupri didasarkan atas realitas sosial yang sedang berkembang saat itu. Menurut resolusi Sarbupri yang dikeluarkan pada bulan Juli 1953, melihat angka pengangguran dan setengah pengangguran yang terjadi di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan sangat tinggi dengan beberapa indikasi.⁸² *Pertama*, selalu merosotnya tingkat penghidupan rakyat. *Kedua*, keadaan *ondervoeding* yang permanen, serta timbulnja *hongerodem* dan kelaparan serta kemiskinan. *Ketiga*, selalu berkurangnya daya beli rakyat. *Keempat*, keadaan *onderkonsumsi* (beras) dikalangan rakyat. *Kelima*, banyak tenaga kerja murah. *Keenam*, merajalelanya sistem ijon, wuke, dll. yang mengakibatkan bertambah cepatnya konsentrasi tanah yang jatuh ke tangan tuan tanah. *Ketujuh*, banyaknya pelacuran dan terganggunya ketentraman umum.

Berdasarkan atas berbagai persoalan di atas Sarbupri menawarkan tiga program kerja untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkebunan di Indonesia. *Pertama*, untuk masalah tanah setidaknya ada empat hal yang dituntut: (i) tanah-tanah bekas *onderneming* yang sudah dikerjakan oleh rakyat, (ii) tanah-tanah kehutanan yang sudah dikerjakan oleh rakyat sejak jaman Belanda dan Jepang, (iii) penukaran tanah-tanah kehutanan yang baik untuk pertanian dengan tanah-tanah pertanian kusus, (iv) tanah-tanah persediaan *onderneming* yang tidak dikerjakan. *Kedua*, untuk masalah sewa tanah Sarbupri menuntut uang persewaan tanah kepada *onderneming-onderneming* yang sesuai dengan hasil apabila tanah itu ditanami oleh kaum tani, dan ditambah dengan kerugian-kerugian lainnya. *Ketiga*, untuk masalah pengangguran Sarbupri memiliki tiga tuntutan: (i) tersedianya lapangan pekerjaan baru dan syarat-syarat kerja yang baik untuk menampung para pengangguran, (ii) tersedianya tunjangan

⁸² Menurut data dari kantor penempatan tenaga di Indonesia berhubung kesempatan kerja tidak bertambah tetapi terus berkurang terdapat sekurangnya pada tahun 1952 ada 5 juta orang menganggur, ditambah lagi, akibat penambahan jumlah penduduk yang itu mendorong adanya urbanisasi ke kota untuk mencari kerja, lebih kurang sebanyak 10 juta orang. Sehingga berdasarkan perhitungan ini jumlah pengangguran di Indonesia kala itu berkisar antara 15 juta. Lihat juga pada Berita Organisasi Sarbupri. No. 16 Th-I, Djuli 1953, hlm 53-55.

pengangguran dan setengah pengangur yang layak dan merata., (iii) tersedianya pembagian tanah yang cukup.⁸³

Pada paruh awal tahun 1950-an buruh perkebunan telah lebih berani menuntut peningkatan kesejahteraan yang lebih baik kepada para pengusaha. Sangat mengejutkan, buruh perkebunan (dengan penuh percaya diri dan berani) melakukan dialog dengan pihak majikan di perusahaan perkebunan. Mereka telah berani menatap muka majikan dan berdebat dengan majikan, meskipun dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh majikan.⁸⁴

Dengan adanya berbagai perkembangan dari kaum buruh perkebunan yang begitu hebat, tampaknya respon, terutama dari kalangan majikan perusahaan perkebunan yang sebagian besar (90% itu orang Belanda) adalah secara mental tidak siap,⁸⁵ sebab kalangan majikan belum pernah mengalami adanya “perlawanan” sedemikian rupa dari kalangan buruh perkebunan yang selama ini bekerja dengan mereka. Termasuk perilaku sewenang-wenang dari kalangan majikan biasanya tanpa kritik dan tanpa perlawanan, pada periode ini mengalami perlawanan yang begitu hebat. Hal ini tampak pada ilustrasi di bawah ini.⁸⁶

Orang asing jang menghina buruh

Namanja adalah F.W. Caron, djabatannja sinder kontrak karet Gunung Majang di daerah Djember. F.W. Caron adalah satu dari banjak orang asing jang masih melekatkan badju bau kolonialnja pada badannja, sampai-sampai ia tidak merasa bahwa kata-kata kotor mentjatji maki terhadap seorang buruh anggora Sarbupri dianggapnja “biasa” sadja. F.W. Caron merasa masih sebagai “Belanda kontrak dahulu” diwaktu bangsanja mendjadjah rakjat Indonesia. memang dahulu sebelum tahun 1945, orang-orang sematjam F.W. Caron boleh semau-maunja menghambur-hamburkan kata-kata busuk terhadap “kuli kontrak”. Begitulah sekarang ini dia berbuat lagi seperti Belanda kontrak dulu jang kurang adjar, sekali ini terdapat kawan Pak Mochamad pada tgl. 17 Jan. '53 djam 8.30. sewaktu kawan kita menerima upah lembur hasil tuntutan Sarbupri setempat. Tapi kali ini jang merasa dihina bukannya kawan Pak Mochamad sendiri tapi semua buruh Ranting Gunung Majang. Seketika itu timbul reaksi dari fihak buruh, reaksi sebagai buruh jang tahu harga dirinja dan sebagai bangsa jang merdeka.

⁸³ Lihat pada Berita Organisasi Sarbupri, *Ibid*.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak, Jacob Vredenberg, Jakarta, 18 September 2004.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Warta Sarbupri, Achir Maret 1953 No. I. Tahun ke IV, Penerbit: Sekretariat DPP Sarbupri, Djakarta, hlm 30-31.

Hari itu djuga semua anggota Sarbupri dan pimpinannya mengambil sikap jang tegas menuntut kepada pengusaha supaya tingkah kurang ajar dari F.W. Caron itu dikoreksi, kata-kata kotor jang dikeluarkannya ditjabut kembali. F.W. Caron sendiri meminta maaf kepada Pak Mochamad dan Sarbupri dan berdjajji tidak akan berbuat lagi. Dan hari itu djuga F.W. Caron membuat surat pengakuan penjataan didepan Dewan Pimpinan Ranting. Suatu peladjaran bagi tuan-tuan asing jang berkuasa di kontrak-kontrak.

Kalangan majikan betul-betul kewalahan menghadapi perlawanan dari masyarakat perkebunan pada periode awal tahun 1950-an. Pernah suatu ketika kalangan majikan berusaha untuk melarang buruh gergabung dalam organisasi perburuhan, khususnya Sarbupri. Propaganda dari kalangan majikan kepada buruh-buruh dilakukan sangat gencar. Akibat adanya propaganda tersebut melalui Dewan Pimpinan Ranting Wonojati mengadakan protes sekeras-kerasnya kepada administratur perkebunan Wonojati, terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sinder S. Warel. Menurut kronologis jalan ceritanya S. Warel adalah staf pengusaha yang kebetulan menjadi salah satu sinder perkebunan Wonojati. Tampaknya S. Warel ini tidak saja berfungsi sebagai sinder, ia juga melakukan praktek politik guna menghasut dan membujuk kaum buruh yang ada di bawah kekuasaannya supaya keluar dari Sarbupri dan masuk Perbupri. Akibat dari tindakan dari S. Warel yang sangat provokatif ini menimbulkan kekeruhan dikalangan seluruh kaum buruh di perkebunan Wonojati, tentu saja menurut Dewan Pimpinan Ranting Wonojati ini merupakan gangguan besar baik bagi keamanan kerja maupun keamanan dalam arti yang lebih luas. Dengan alasan ini maka Dewan Pimpinan Ranting Wonojati menuntut administratur Wonojati, supaya S. Warel dipindah ke lain tempat. Tuntutan ini disertai dengan segala konsekuensinya kalau-kalau tuntutan ini tidak akan membawa hasil yang memuaskan.⁸⁷

Melihat itu semua, pihak perkebunan asing mulai merespon gerakan mogok yang dilakukan oleh buruh perkebunan dengan menutup sementara perkebunan mereka. Menurut berita resmi dari Sarbupri terdapat sembilan belas

⁸⁷ Warta Sarbupri, No. 6 tahun ke IV, 15 Djuni 1953, *Kumandang daerah*, hlm 122.

perkebunan yang ditutup oleh kalangan majikan dalam rangka tindakan balasan terhadap perilaku “menyimpang” buruh perkebunannya pada tahun 1953.

1. Gunung Pasang/Kali kepuh pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
2. Sumberpandan pada tanggal 18 September (1 hari)
3. Renteng pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
4. Kalisanen pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
5. Silosanen pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
6. Tugusari pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
7. Sukokulon pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
8. Kaliwining pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
9. Glantangan pada tanggal 18 September (1 hari).
10. Mumbul/Lengkong pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
11. Dampar/Renes pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
12. Sumberwadung pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
13. Zeelandia pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
14. Wonodjati pada tanggal 18 September (1 hari).
15. Wonowiri pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
16. Kotta Blater pada tanggal 18 September (1 hari).
17. Gondang pada tanggal 18 September (1 hari).
18. Kaliduren pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
19. Karang anom pada tanggal 18 September (1 hari).

Alasan yang dipakai untuk menutup atau menghentikan sementara proses produksi di berbagai perusahaan perkebunan di atas menurut kalangan majikan adalah soal *bedrijfstechnisch*, sedang upah dan catu beras selama kebun ditutup tidak dibayar.⁸⁸

Tentu saja tindakan dari kalangan majikan ini mendapat respon yang sangat keras dari Sarbupri cabang Jember. Bagi Dewan Pimpinan Sarbupri Cabang Jember, tindakan para majikan ini adalah:

1. bahwa hal itu melanggar UU Darurat no. 16 pasal 4 ayat 1.
2. bahwa tidak bekerjanya kaum buruh bukanlah kesalahan mereka, tetapi karena dilarang/tidak diperkenankan oleh pengusaha.
3. bahwa karenanya itu, upah dan catu beras (terhitung upah hari minggu) bagi buruh-buruh yang tidak bekerja karena kebun ditutup, harus dibayar/dipenuhi oleh pengusaha sesuai dengan persetujuan Sarbupri/ALS/ZWSS/BEBTO.

⁸⁸ Berita Organisasi Sarbupri. No. 22 th ke-I Oktober 1953. hlm 157.

4. bahwa tindakan tersebut adalah merupakan tindakan pembalasan terhadap buruh² bertentang dengan jaminan dari P4P bahwa pengusaha tidak akan mengadakan tindakan pembalasan.

Tampaknya tuntutan dari Dewan Pimpinan Sarbupri Cabang Jember ini mendapat dukungan penuh dari Serikat Buruh Gula (SBG) Cabang Semboro. Di mana organisasi ini mengeluarkan suatu pernyataan pada tanggal 20 September 1953, yang isinya antara lain memperkuat tuntutan umum Sarbupri dan membenarkan tindakan pemogokan yang dilakukan oleh buruh-buruh perkebunan. Selanjutnya mereka juga didesak P4P segera meninjau keputusan 16 Agustus 1953. Hal senada juga digaungkan oleh Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SBUP) Cabang Jember dengan mengeluarkan pernyataan tertanggal 18 September 1953 yang mendukung gerakan pemogokan dan mendukung tuntutan Sarbupri serta menyatakan *solidariteit*-nya.⁸⁹

Selain melakukan pemogokan, Sarbupri menjadi pelopor dari proses penandatanganan nota kesepahaman antara kaum buruh perkebunan dengan pihak majikan pada tahun-tahun awal tahun 1950-an. Adanya nota kesepahaman tersebut mampu memaksa pihak majikan memperhatikan peningkatan kesejahteraan kaum buruh perkebunan mulai dari pembagian jatah beras hingga pelayanan kesehatan.⁹⁰ Pada tingkat tertentu proses penandatanganan tersebut merupakan “kemenangan” awal bagi kaum buruh perkebunan, karena proses seperti itu sebelumnya belum pernah ada. Lebih mengejutkan ini dilakukan oleh kekuatan organisasi buruh perkebunan sendiri secara mandiri. Sarbupri juga mampu memaksa pihak *Algemeen Landbouw Syndicaat* (ALS) (sebuah gabungan perusahaan perkebunan besar di Jawa) guna menandatangani kesepahaman dalam hal perselisihan perburuhan. Perundingan itu berupa kesepakatan yang tertuang dalam CAO (*Collective Arbeidsovereenkomst* atau *Collective Labour Agreement*).⁹¹ Pernah terjadi proses dimana tuntutan Sarbupri untuk perusahaan perkebunan Wonojati mengalami kekalahan di tingkat P4D. Sarbupri kemudian

⁸⁹ *Ibid.* hlm 168-169.

⁹⁰ Wawancara Bapak Jacob Vredenbergt, Jakarta, 18 September 2004. Bandingkan dengan Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950, hlm 340.

⁹¹ *Ibid.*

melakukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu P4P. Pada akhirnya mereka memenangkan tuntutan.⁹²

Akan tetapi tidak semua organisasi buruh menyetujui aksi mogok yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan. Adalah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII),⁹³ yang hadir di Jember pada tahun 1954. SBII beranggapan proses pemogokan itu merugikan, tidak saja bagi kalangan pengusahanya tapi juga kalangan buruh sendiri.⁹⁴ Adapun yang menerima mandat untuk membangun SBII ini adalah Mursyid, yang kemudian menjadi Ketua SBII Jember. Kehadiran SBII di Jember kemudian dilanjutkan sosialisasi ke kalangan buruh perkebunan di Jember. Mulailah SBII mengorganisasikan kekuatan buruh dan membangun organisasi di setiap perkebunan. Kendati tidak sebesar dan sekuat Sarbupri, namun terdapat beberapa perkebunan yang buruhnya merupakan anggota SBII. Paling tidak terdapat beberapa perkebunan seperti: di Gunung Gambir, Tanah Merah, Karang Anom, Zelandia, Sumber Tenggulun ini untuk wilayah Jember bagian barat. Selanjutnya mendekati wilayah tengah, Tugu Sari, Keputren, Durjo. Kemudian berlanjut ke wilayah selatan di wilayah perkebunan Wonojati, Wonowiri, Glantangan hingga Bandalit. Adapun tujuan dari dibentuknya SBII di Jember ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan buruh perkebunan dan mengurangi tindakan semena-mena yang dilakukan pihak perusahaan. Pendekatan yang dilakukan tanpa melaksanakan tindakan mogok. Buruh mendapat jatah beras tiap hari 2 ons, juga keluarganya. Jadi kalau saat itu harga beras tahun 1955 adalah Rp. 3,5,-, upah buruh perhari adalah Rp. 3,5,-.⁹⁵

Sebagaimana disebutkan di atas, pendekatan SBII Jember tanpa ada pemogokan. Pemogokan masyarakat perkebunan yang diorganisasikan oleh Sarbupri di Jember secara massif terjadi pada tahun 1952. Bagi SBII Jember pemogokan adalah senjata buruh yang terakhir. Pemogokan itu merugikan, tidak

⁹² Wawancara dengan Bapak Jacob Vredenbergt, Jakarta, 18 September 2004.

⁹³ Secara nasional SBII dibentuk oleh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). SBII mempunyai prinsip bahwa perjuangan buruh berbeda dengan perjuangan politik. Gerakan buruh semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan, tanpa ada konflik dengan pihak majikan. Unsur harmonisasi menjadi titik tekan dari organisasi SBII. *Suara Partai Masyumi*. No. 6-7, Th. Ke VIII, 1954.

⁹⁴ Wawancara dengan KH Mursyid mantan Ketua Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) Jember, Jember, Tanggal 2 Februari 2002.

⁹⁵ *Ibid.*

saja kalangan pengusahanya tapi juga kalangan buruhnya. SBII berusaha untuk mencari keuntungan bersama antara buruh dan majikan. Sehingga tidak ada pertentangan antara buruh perkebunan SBII dengan pihak pengusaha.⁹⁶

Sementara jika dibandingkan dengan kekuatan Sarbupri, yang merupakan organisasi rakyat yang memiliki persyaratan struktur organisasi yang rapi. Hal ini tampak secara nyata dalam struktur organisasinya sampai di tingkat yang paling bawah. Di bawah ini merupakan gambaran susunan pengurus di tingkat desa (ranting) yang tersusun secara rapi tahun 1953:⁹⁷

Pengurus DPR Kotta-Blater

Sekretaris Umum I	: Sutjipto
Sekretaris Umum II	: Dawud
Sekretaris Sosek	: Manimin
Sekretaris Organisasi	: Suratmin
Sekretaris Perbendaharaan	: Samidi
Sekretaris Kebudajaan dan Olah raga	: Sampir
Sekretaris Penerangan dan Pendidikan	: Supa'i

Pengurus DPR Aengsono

Sekretaris Umum	: S Martoatmodjo
Sekretaris Sosek I	: Suwarno
Sekretaris Sosek II	: Nj. K. Martoatmodjo
Sekretaris Sosek III	: Machrawi
Sekretaris Perbendaharaan	: Marsidi
Sekretaris Kebudajaan dan Olah raga	: Machrawi
Sekretaris Penerangan dan Pendidikan	: Kaderi

Pengurus DPR Wonowiri

Sekretaris Umum I	: Mohamad
Sekretaris Umum II	: Sudibjo
Sekretaris Organisasi	: Suroso
Sekretaris Sosek I	: Mudji
Sekretaris Sosek II	: Djuri Suparto
Sekretaris Perbendaharaan I	: W. Gunadi
Sekretaris Perbendaharaan II	: Mohamad
Sekretaris Kebudajaan dan Olah raga	: Kastari
Sekretaris Penerangan dan Pendidikan	: Karijun

Bahkan secara tegas Sarbupri menyatakan sikapnya ats penutupan perkebunan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 1953. Untuk perusahaan perkebunan yang sudah tidak digarap lagi oleh pengusahanya maka Sarbupri

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Berita Organisasi Sarbupri. No. 16 Th-I, Djuli 1953. hlm 63-64.

mengeluarkan tiga tuntutan. *Pertama*, bagi perusahaan yang sudah tidak dapat menghasilkan lagi (*renderen*) maka harus dinasionalisasi dan diupayakan oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah (Propinsi atau Kabupaten), atau bahkan diupayakan oleh desa-desa disekitar perusahaan perkebunan. *Kedua*, bagi perusahaan yang tidak menghasilkan lagi karena sudah rusak atau tidak terpelihara, maka perlu mengajak organisasi tani yang progresif disekitar perkebunan atau cabangnya guna mengajukan tuntutan kepada pemerintah supaya tanah tersebut dijadikan tanah desa dan dibagi-bagikan kepada rakyat sekitar perkebunan. *Ketiga*, menuntut dicabutnya hak *erfpacht* pengusaha perkebunan dan tanah tersebut kembali menjadi *domeinverklaring*. Kemudian desa-desa disekitar perkebunan dapat mengajukan kepada pemerintah untuk dijadikan tanah desa dan dapat dibagikan kepada rakyat dengan hak jasan atau *erfelijk individueel bezitsrecht*.⁹⁸

Mengenai konsepsi perkebunan, Sarbupri juga mengajukan skenario yaitu tanah-tanah perkebunan tersebut yang diusahakan oleh desa nantinya dipandang masih memberikan keuntungan. *Pertama*, tiap desa disekitar perkebunan supaya mengadakan rembug desa dan memutuskan, bahwa desa itu bersama-sama dengan desa lainnya disekitar perkebunan akan mengusahakan perkebunan.⁹⁹ *Kedua*, tiap desa yang telah setuju dengan usaha ini supaya mengirimkan wakilnya ke Badan Permusyawaratan, sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan perkebunan. *Ketiga*, Badan Permusyawaratan bertugas memilih: (i) Dewan Pembuat Peraturan Perusahaan Perkebunan, (ii) Desa Pengawas, dan (iii) Dewan Pelaksana atau Direksi. Ketiga Dewan ini dipilih dari anggota-anggota Badan Permusyawaratan dan orang-orang luar yang mempunyai keahlian dalam persoalan ini: (i) Dewan Pelaksana atau Direksi mengangkat pengurus perkebunan dan pegawai-pegawai lainnya yang dibutuhkan, (ii) Perusahaan perkebunan itu harus diusahakan secara *bedrifs-economis* sesuai dengan perusahaan perkebunan lainnya, (iii) Antara

⁹⁸ Warta Sarbupri. Achir Maret 1953 No. I. Tahun ke IV, Penerbit: Sekretariat DPP Sarbupri Jakarta, hlm 10.

⁹⁹ Secara resmi Sarbupri merekomendasi anggotanya untuk kerjasama dengan kalangan petani pada tahun 1954. Lihat Sidang DPP Ke III Sarbupri, 1954 hlm 10-12. Dukungan kerjasama tersebut hadir dari BTI Cabang Jember yang mengirim surat kepada Sidang Pleno Sarbupri. Surat dukungan tersebut dikirim pada tanggal 19 Juli 1954 yang ditandatangani Ketua Sidang Pleno, Suhaimirachman.

Dewan Pelaksana atau Direksi supaya mengadakan perjanjian perburuhan dengan Sarbupri setempat, untuk lebih progresif dari pada persetujuan Sarbupri-ALS, akan tetapi harus dijaga agar perusahaan perkebunan itu jangan sampai menderita kerugian atau ditutup. *Keempat*, modal perusahaan perkebunannya diupayakan dari: (i) mengajukan Kredit Pemerintah atau Kas Desa, (ii) Menjual saham yang rendah sehingga rakyat dapat membelinya. Jika modalnya didapat dari menjual saham, maka perusahaan itu diatur seperti Produksi Koperasi Rakyat. Skenario ini diajukan oleh Sarbupri guna menghindari munculnya kekuatan *anarcho-syndicalism*.¹⁰⁰

Dukungan terhadap masyarakat perkebunan juga hadir dari kalangan partai politik. Adapun partai tersebut adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam bentuk gagasan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.¹⁰¹ Termasuk keseriusan PKI dalam mengajurkan agar semua kadernya melakukan kegiatan nyata untuk membela kepentingan massa rakyat tani, mulai dari menyalurkan pupuk, membantu persemaian serta membantu menyediakan semua perkakas kebutuhan pertanian dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat perkebunan. Serangkaian kegiatan tersebut berupa pembangunan desa, pemberantasan hama serta kursus pemberantasan buta huruf, hingga kursus-kursus kader.¹⁰² Bahkan jauh masuk hingga pelosok-pelosok di area perusahaan perkebunan di Jember, selama periode 1950-an Sarbupri juga melakukan serangkaian pendidikan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Rex Mortimer. *Indonesian Communism Under Soekarno, Ideology And Politics, 1959-1965*. Ithaca and London, Cornell University, 1974, hlm 276. Lihat juga Margo L Lyon. *Bases of Conflict in Rural Java*. Research Monograph No. 3 Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies, 1970, hlm 46.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Soedardi, Jember, tanggal 5 September 2000. Selain itu kader juga diwajibkan untuk terlibat dalam perbaikan saluran irigasi, perbaikan tambak ikan dan penyaluran bibit ikan, termasuk pengeringan daerah rawa-rawa. Tidak itu saja para kader juga harus mendorong lahirnya koperasi-koperasi yang mengutamakan kepentingan massa rakyat di bawah. Pada kader juga harus terlibat aktif dalam pembangunan pedesaan, seperti perbaikan jembatan dan jalan-jalan di pedesaan. Lebih dari itu, dalam rangka memperbesar dan memperluas keanggotaan, para kader juga diharuskan ikut menyiapkan perencanaan pendidikan umum dan pendidikan pemimpin agraria, sehingga nantinya dalam melakukan pembelaan terhadap petani lainnya yang sedang menghadapi pengadilan, termasuk pengaturan kampanye pemberantasan buta huruf dan program-program olah raga serta program kebudayaan. Partai Komunis Indonesia. *Tuntunan Untuk Bekerdja Dikalangan Kaum Tani*. Jakarta. 1955, hlm 44.

perburuhan.¹⁰³ Sarbupri juga melakukan serangkaian pembelaan terhadap nasib masyarakat perkebunan di berbagai perusahaan perkebunan. Semua tindakan itu dilakukan secara serius oleh kekuatan organisasi ini. Bahkan organisasi buruh ini tidak segan-segan menghadirkan orang-orang dari Jakarta guna mendukung gerakan buruh perkebunan dan membantu melakukan negosiasi untuk perjuangan mereka sebagaimana digambarkan di bawah:

....Kemudian mereka (aktifis dari Jakarta) datang ke wilayah perkebunan dan mengganti para pengurus ranting Sarbupri di tingkat daerah. Akibatnya mereka tidak pernah peduli dengan keberadaan majikan. Mereka tidak perlu merasa minder dihadapan kalangan majikan, karena hidup mereka tidak tergantung dengan kalangan majikan. Mereka (bahkan) sering kali sangat agresif dari pada sebelumnya. Tidak jarang mereka melakukan praktek politiknya intimidasi terhadap kalangan pengurus perkebunan.¹⁰⁴

Tindakan tersebut ternyata menjadi kunci naiknya popularitas PKI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Vredenberg, program semacam tersebut, pada tingkat yang lain juga didesain guna menumbuhkan rasa kesadaran kelas bagi para kader partai kiri ini di berbagai pedesaan dalam rangka cita-cita politik mereka.¹⁰⁵ PKI sejak tahun 1953 memiliki program tanah untuk petani.¹⁰⁶ Program tersebut dimulai dengan menekan pemerintah guna melegalisasi tindakan masyarakat perkebunan yang telah menggarap perkebunan asing di Indonesia.¹⁰⁷ PKI kemudian mengajurkan agar semua kadernya melakukan kegiatan nyata untuk membela kepentingan masyarakat secara langsung.¹⁰⁸ Tidak mau kalah jauh masuk hingga pelosok-pelosok di area perkebunan Jember, Sarbupri juga melakukan serangkaian

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Jacob Vredenberg, Jakarta, 18 September 2004. DPP Sarbupri pada 19 Juli 1954 mengeluarkan Resolusi tentang kursus kader. Lihat pada Sidang DPP Pleno Ke III Sarbupri, 1954, hlm 19.

¹⁰⁴ Bapak Jacob Vredenberg, Jakarta, 18 September 2001.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Rex Mortimer. *Indonesian Communism Under Soekarno, Ideology And Politics, 1959-1965*. Ithaca and London, Cornell University, 1974, hlm 276.

¹⁰⁷ Margo L Lyon. *Loc. cit.* hlm 46.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Soedardi, Jember, tanggal 5 September 2000. Bandingkan dengan Partai Komunis Indonesia. *Tuntunan Untuk Bekerdja Dikalangan Kaum Tani*. Jakarta. 1955, hlm 44.

pendidikan dan pembelaan perburuhan.¹⁰⁹ Akibatnya pada Pemilu 1955 di Jember PKI berhasil menduduki urutan ke tiga, setelah Partai NU (14 kursi), PNI (8 kursi), PKI (6 kursi) dan Masyumi (4 kursi).¹¹⁰

Tentu saja gerakan yang dilakukan oleh Sarbupri ini bukan tanpa tantangan. Tantangan itu tidak saja datang dari kalangan kaum pemodal besar asing sebagaimana telah digambarkan di atas. Akan tetapi juga datang dari kekuatan yang merasa dirugikan oleh gerakan Sarbupri. Menurut Warso Soekarto¹¹¹ setidaknya ada tiga kelompok yang secara tegas-tegas bereaksi atas gerakan yang dibangun oleh Sarbupri. *Pertama*, kelompok yang secara sadar menjadi “pengemudi” yang langsung mewakili kaum imperialis di Indonesia. *Kedua*, kaum koruptor dan penjual nama. *Ketiga*, kelompok yang kurang mengerti akan keberadaan pentingnya organisasi. Secara gencar ketiga kekuatan ini tak henti-hentinya bergerak di daerah Jember, Lumajang, Kediri, Bogor, Sumatera Utara dan lain-lain. Secara spesifik Sarbupri Jember menghadapi dan berupaya keras guna mengatasi gerakan yang ingin menghancurkan kekuatan buruh perkebunan yang tergabung dalam Sarbupri yang dipelopori oleh R.S. Atmadja.

Selain itu, periode 1950-an ini bukan saja merupakan gambaran konflik antara massa rakyat (baik itu petani maupun buruh perusahaan perkebunan) dengan pihak perusahaan perkebunan saja. Tidak saja diwarnai dengan proses pendudukan dan penggarapan atas lahan perusahaan perkebunan. Pada tingkat yang lain juga berlangsung tindak kekerasan yang tidak terorganisir seperti berlangsungnya perusakan berbagai asset perusahaan perkebunan. Pembakaran gudang-gudang yang menyimpan tembakau milik perusahaan perkebunan oleh

¹⁰⁹ Program semacam tersebut, pada tingkat yang lain juga didesain guna menumbuhkan rasa kesadaran kelas bagi para kader partai kiri ini di berbagai pedesaan dalam rangka cita-cita politik mereka. Wawancara dengan Bapak Jacob Vredenbergt, Jakarta, 18 September 2004. DPP Sarbupri pada 19 Juli 1954 mengeluarkan Resolusi tentang kursus kader. Lihat pada Sidang DPP Pleno Ke III Sarbupri, 1954, hlm 19.

¹¹⁰ Partai NU tampil menjadi pemenang dalam pemilu 1955 di Jember karena dukungan dari kalangan pesantren. NU sendiri pada dasarnya merupakan organisasi keagamaan dan pendidid. Meskipun memiliki organisasi Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (Pertanu) yang didirikan di Pasuruan pada tanggal 14 Pebruari 1946, akan tetapi aktifitasnya tidak menyentuh kalangan petani. Aktifitas yang spesifik untuk petani lebih sebagai mobilisasi petani pada tahun 1960-an.

¹¹¹ Lihat pada Sidang DPP Pleno Ke III Sarbupri. *Bahan diskusi, Masalah Reaksi*. 1954, hlm 14-15.

massa rakyat merupakan warna lain yang juga mengawal berlangsungnya proses nasionalisasi di Indonesia.

Proses tindak kekerasan semacam itu menurut Ibrahim dilakukan guna, selain memaksa para pengusaha Belanda supaya tidak *kerasan*, tapi juga mengganggu dalam proses produksi.¹¹² Tindakan kekerasan semacam ini sering terjadi selama tahun 1950-1957, baik itu berupa pembakaran gudang maupun perusakan milik perusahaan perkebunan. “Saya rasa pada tahun 1955 pada masa pemilu itu masih sering terjadi perusakan gudang-gudang,” Kata Ibrahim.

Uniknya menurut penuturan Ibrahim sebelum melakukan perusahan atau pembakaran atas gudang, pelaku minta izin terlebih dulu kepada para orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Sebagai orang yang bekerja di BTM, sudah barang tentu Ibrahim pernah menerima perlakuan seperti itu. Apabila tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh pelaku, yang terjadi kemudian adalah proses pembunuhan. Kasus seperti itu terjadi pada diri seorang mandor perusahaan perkebunan di daerah Pakisan milik BTM. Ia melarang aksi perusakan yang akan dilakukan sekelompok massa. Akibat tindakan melarang tersebut mandor tewas dengan luka disekujur tubuhnya. Sementara itu perlakuan yang berbeda akan diterima oleh para pengusaha perkebunan yang kooperatif dengan “oknum” tentara. Biasanya mereka memberikan “upeti” kepada oknum dan “pemimpin” rakyat yang tidak setuju dengan keberadaan mereka. Selain itu, pada periode 1950-an di sekitar wilayah perusahaan perkebunan juga diwarnai dengan tindak kriminal, seperti perampokan. Menurut ingatan informan telah terjadi beberapa kasus perampokan di perusahaan perkebunan di daerah Jelbuk dan Soekowono, Jember.¹¹³

¹¹² Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Jember, 13 september 2004.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Jember, 13 September 2004 dan wawancara dengan Bapak Supani, Jember, 16 September 2004.

BAB 4

MASYARAKAT PERKEBUNAN DAN NASIONALISASI

4.1. Upaya Indonesianisasi

Rentang tahun 1955-1960 merupakan periode yang menentukan dalam konteks tata kelola sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan. Terdapat beberapa gagasan bagaimana mengatur keberadaan perkebunan setelah mengalami kehancuran akibat perang. Struktur ketatanegaraan yang telah berubah juga mengakibatkan perubahan dalam penataan struktur organisasi di wilayah perkebunan sendiri. Upaya penataan ulang atas tata kelola sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan terus dilakukan oleh masyarakat perkebunan. Pada sisi lain pemilik hak *erfpacht* mulai menjalankan fungsi administratifnya kembali di berbagai perkebunan di Jember. Berbagai tuntutan dari masyarakat perkebunan sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya mampu memaksa pihak pemilik hak *erfpacht* berpikir ulang. Pihak pemilik hak *erfpacht* juga mulai memikirkan kehadiran tenaga kerja dari kalangan *bumi putera* guna terlibat secara lebih aktif dalam proses pengelolaan perusahaan perkebunan.¹

Menurut catatan Surabaya Post dalam artikelnya tanggal 4 Februari 1958 yang melakukan wawancara khusus dengan Safiudin, seorang bekas *hoofd-administrateur* NV LMOD menyatakan:

“Pada hakekatnya usaha Indonesianisasi dikalangan LMOD sudah dilakukan sejak Safiudin memegang pimpinan LMOD mulai tahun 1955. Sehingga waktu sebelum diambil alih keadaan pegawai LMOD sudah terdiri dari Indonesia 78% dan Belanda 22%.

Usaha Indonesianisasi ini dilakukan dengan secermatnya dengan *screening* yang kurang selama waktu 2 ½ th sejak tahun 1955. Dari pegawai Indonesia yang ada sekarang adalah 41 orang dari SPMA dari *cultuurschool*. Sehingga waktu diadakan ambil alih-ambil alih dan kemudian pegawai Belandanya sama minta pulang ke negeri Belanda, LMOD tidak mengalami *schokking* yang besar. Tidak seperti perkebunan yang sebelumnya tidak melakukan usaha Indonesianisasi dikalangan pegawainya.

¹ Wawancara Bapak Jacob Vredenburg, Jakarta, 18 September 2004.

Beberapa waktu sebelumnya diambilalihkannya itu dengan jalan Indonesianisasi keadaan situasi pegawai LMOD dengan perincian, untuk tenaga Administratif 5 orang dari Indonesia, 14 orang dari Belanda, sedang untuk Hfd Employe 4 orang dari Indonesia, 12 orang dari Belanda, sementara untuk Employe sebanyak 55 orang dari Indonesia dan 11 orang dari Belanda, dan untuk Ass. Employe 70 orang dari Indonesia sedang dari Belanda tidak ada.”

Begitu juga *NV. Cultuur Maatschappij Djelboek* (CMD) yang memiliki perkebunan yang terletak di daerah Soekokerto Adjong (Jember) juga sudah mulai memasukkan beberapa tenaga kerja dari *bumi putera*.² Hal itu tampak dalam mempunyai struktur organisasi perusahaan perkebunan.

Administratur	: E.M. Nieuwenhuys
Hoofden Employe	: A.H Simon
Ziender Afdeling Adjong	: Neeleman
Ziender Afdeling Lembengan	: R. Soedarso
Ziender Afdeling Suren	: A.H Simon
Afpak-Schuur Employe	: R.M Mulyadi
Asisten Ziender	: M. Thamrin dan R. Rahmadi

Hal yang sama juga berlaku di perusahaan perkebunan BTM Taman Sari, Bunder, Bondowoso yang telah melibatkan beberapa orang *bumi putera* dalam struktur kantor perusahaan sejak penyerahan kedaulatan (1949). Termasuk pada masa sebelum berlangsungnya ambil alih sudah melibatkan beberapa tenaga dari Sekolah Perkebunan Menengah Atas (SPMA) yang dijadikan tenaga Penilik perkebunan BTM di Bondowoso, seperti Endung Soetardjo dari Plindungan Bondowoso, Achmad Soebandi dari Besuki, serta Djoko Pramudito dari Probolinggo.³

Akan tetapi menurut Bapak Sulton Fajar⁴ proses perekrutan yang dilakukan oleh para pemilik hak *erfpacht* dari beberapa kasus di atas memiliki latar belakang politis dalam rangka memecah belah perlawanan dari kekuatan masyarakat perkebunan saat itu. Menurutnya kondisi perusahaan perkebunan partikelir di Jember antara tahun 1950 bahkan hingga pertengahan tahun 1960-an

² Emmanuella Keni Tjandrawati, *Pasang Surut Perusahaan Tembakau Besuki Na-oogst di Jember, Jawa Timur 1957-1972*. Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 1993, hlm 34.

³ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Jember, 14 September 2004.

⁴ Wawancara dengan Bapak Sulton Fajar, Jember, 25 Mei 2004.

posisi politik Sarbupri sangat dominan. Sebagaimana di jelaskan pada bab sebelumnya, pihak perkebunan sangat kewalahan menghadapi perlawanan, mulai dari mogok hingga aksi-aksi protes dari masyarakat perkebunan.

Pada periode 1950 ini, eksistensi diri masyarakat perkebunan, khususnya buruh perkebunan semakin tinggi. Tidak seperti pada masa kolonial, dimana masyarakat perkebunan Jember sangat tunduk dengan hierarki di atasnya. Pola yang dikembangkan oleh tuan kebun adalah paternalistik. Tiba-tiba saja masyarakat perkebunan mendapat energi yang berani menyatakan pendapatnya. Walaupun pendapat itu disampaikan dengan bahasa yang susah untuk dimengerti.⁵ Adanya keberanian tersebut menurut Sulton Fajar harus dicairkan oleh pihak perkebunan dengan jalan melakukan perekrutan orang-orang dari kalangan pribumi yang memiliki pemikiran kontra terhadap pandangan dari Sarbupri.⁶

Atas dasar inilah, mengapa berlangsung proses perekrutan tenaga kerja dari kalangan bumi putera guna mengisi struktur di perusahaan perkebunan. Akan tetapi kalau dilihat prosentasenya proses perekrutan itu tidak sebanding dengan apa yang telah diterima oleh ribuan buruh tani tembakau yang tercatat dan yang tidak tercatat (bekerja hanya pada saat panen atau di gudang) yang bekerja di perusahaan perkebunan. Secara kebanyakan orang *bumi putera* hanya menjadi pekerja kasar, mulai dari menyiapkan lahan, kemudian melakukan pemeliharaan tanaman, lantas membersihkan los pengeringan di lapangan atau pekerjaan lain di gudang seperti menggunting tembakau atau mensortir daun tembakau.⁷

Sebagai kader Masyumi yang dalam praktek politiknya berlawanan dengan PKI, Sulton Fajar direkrut perusahaan perkebunan pada tahun 1956. Ia direkrut guna ikut “meredam” gerakan kaum buruh perkebunan yang tergabung dalam organisasi Sarbupri. Setidaknya ini merupakan langkah perusahaan guna mempertahankan asset dan keberadaannya dengan memanfaatkan kekuatan yang sedang berkonflik saat itu. Sulton Fajar direkrut oleh Van Huisen (Ziender Kepala) di perusahaan perkebunan daerah Wono Jati, Glantangan, Jember. Sejak saat itu Sulton Fajar bekerja pada perusahaan perkebunan di Wonojati tersebut. Sulton Fajar mendapatkan gaji RP. 1.000,- perbulannya.

⁵ Wawancara dengan Bapak Jacob Vredenbregt, Jakarta, 18 September 2004.

⁶ Wawancara dengan Bapak Sulton Fajar, Jember, 25 Mei 2004.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sahid, Jember, 13 Mei 2004.

Dalam perjalanannya, Sulton Fajar bekerja pada perkebunan tersebut hanya bertahan selama tiga bulan. Hal itu dikarenakan ia sering menerima cemoohan dari kawan-kawannya, “*Wah Sulton iku lapo ae melok londo iku*” (Wah Sulton itu mengapa kok ikut Belanda). Cemoohan itu terutama datang dari sahabat karibnya Haji Syech kawan seperjuangannya saat perang kolonial melawan agresi militer Belanda. Mendengar kritikan pedas dari sahabat-sahabatnya maka Sulton Fajat memutuskan keluar dari perusahaan perkebunan, yang kemudian lebih aktif di organisasi politik, Masyumi. Padahal beberapa kawannya seperti Muchith dari Jenggawah dan Hermanu tetap memilih bekerja di perusahaan perkebunan. Uniknyanya kedua kawannya tersebut sering mengambil (mencuri) barang-barang yang ada di dalam perusahaan untuk dibawa pulang. Adapun alasan kedua orang tersebut mumpung kekuatan Belanda mulai hilang di Indonesia. Bagi Muchith dan Hermanu mencuri barang-barang milik perkebunan bukan merupakan tindakan yang melawan hukum. Karena kekayaan perkebunan Jember selama ini diambil oleh pihak Belanda. Jadi dengan santai aja kedua termannya itu melakukan tindakan yang berbahaya, jika sampai ketahuan pihak majikan.⁸

4.2. Pengambilalihan Sebagai Wujud Kedaulatan

Gairah masyarakat perkebunan di Jember guna terlibat lebih aktif dalam tata kelola sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan semakin meningkat. Masyarakat perkebunan dalam setiap kegiatannya baik itu rapat-rapat umum maupun pertemuan kecil selalu menuntut tidak semata-mata perbaikan tingkat kesejahteraan. Tuntutan yang menggarap lahan perkebunan secara mandiri juga dilakukan. Tuntutan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat dengan hadirnya pernyataan Presiden Soekarno tanggal 14 Maret 1957, tentang keadaan darurat perang untuk pengendalian keamanan demi kestabilan jalannya pemerintahan yang kemudian disusul dengan hadirnya UU Keadaan Bahaya tahun 1957. Ada dua alasan dinyatakan negara dalam keadaan perang (*staat van oorlog*) dan negara dalam keadaan darurat perang (*staat van beleg*). *Pertama*, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat

⁸ Wawancara dengan Bapak Sulton Fajar, Jember, 25 Mei 2004.

bencana alam. *Kedua*, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan terjadi perkosaan atas wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.⁹

Diawali dengan mobilisasi massa rakyat besar-besaran dalam bentuk rapat besar di Jakarta. Dalam rapat besar tersebut melahirkan Resolusi yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1957.¹⁰ Adapun isi dari resolusi tersebut adalah:

1. Mendukung sepenuhnya delegasi pemerintah di PBB untuk lebih bersikap tegas dalam perjuangan Irian Barat.
2. Konsolidasi kekuatan dan tenaga ke dalam, untuk menghadapi pengembaian kekuasaan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
3. Pemerintah di desak untuk bertindak tegas jika persetujuan I Forum PBB mengalami kegagalan, melalui jalan:
 - a. Direalisasikan pembatalan KMB
 - b. Nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia
 - c. Semua warga Belanda yang tidak dibutuhkan tenaganya harus diusir dari Indonesia
 - d. Masuknya orang-orang Belanda ke Indonesia harus dihentikan
 - e. Mempercepat pelaksanaan indonesianisasi terhadap perusahaan-perusahaan vital Belanda
 - f. Perusahaan Belanda harus dijadikan Badan Hukum, yang kedudukan seluruhnya di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia
 - g. Dicabutnya ijin-ijin kerja bagi pekerja bebas Belanda di Indonesia, seperti pengacara dan lain-lain
4. Akan dibentuk Brigade Pembangunan Irian barat, guna keperluan perjuangan pembebasan Irian Barat.

⁹ Erman. *Ichtisar Undang-undang Keadaan Bahaja 1957*. Jakarta: Tantular, 1957, hlm 20. Menurut Amin, tugas kewajiban dan wewenang dalam bidang keamanan seluruhnya terletak pada Angkatan Perang. Setiap daerah tugas pemeliharaan dipegang oleh Komando Daerah Militer Tertinggi dan untuk seluruh Indonesia dipegang oleh masing-masing Kepala Staf, baik itu darat, laut maupun udara. Para pejabat ini mendapat wewenang yang sangat luar dan luar biasa, sehingga dalam kenyataannya pejabat tersebut sangat berwenang mengambil setiap tindakan dengan mengatasnamakan kepentingan negara. Lihat pada S.M Amin. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 20.

¹⁰ Ulf Sundhaussen. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES, 1986, hlm 194.

Menurut Sumargo ancaman Soekarno itu akan diwujudkan dalam bentuk berbagai perusahaan perkebunan yang ada di Jawa akan dinasionalisasikan.¹¹ Selain itu tindakan pengambilalihan juga dipicu oleh adanya seruan dari Menteri Penerangan Sudibjo selaku ketua Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat, dengan pengesahan Kabinet, telah memberikan instruksi guna mogok selama dua puluh empat jam terhadap semua perusahaan Belanda. Instruksi tersebut diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI).¹²

Masyarakat perkebunan Jember sangat antusias menyambut pengumuman dari RRI tersebut. Organisasi masyarakat yang ada disekitar perkebunan Jember, seperti Sarbupri, BTI¹³ dan SOBSI mengorganisasikan masyarakat guna melakukan pemogokan total tersebut. Ini dilakukan untuk mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Soekarno dalam rangka tuntutan Belanda harus segera meninggalkan Irian Barat. Pemogokan ini dilakukan selama tiga hari.¹⁴ Sejak saat itu masyarakat perkebunan di Jember terlibat dalam kampanye penyitaan modal milik asing¹⁵ yang masih bercokol di Indonesia.¹⁶

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sumargo, Jember, 1 dan 2 Juni 2004.

¹² Mengenai hal ini diberitakan oleh berbagai media seperti *Indonesia Raya*, *Suluh Indonesia* dan *Pedoman* yang kesemuanya dimuat pada tanggal 2 Desember 1957.

¹³ BTI menyokong sepenuhnya proses nasionalisasi ini dan menuntut pemerintah RI untuk menyita modal Belanda. Ada tiga alasan yang disusun BTI. *Pertama*, Belanda dianggap kepala batu terus berada di Irian Barat. *Kedua*, untuk memperlemah kekuatan ekonomi Belanda, yang itu sebenarnya juga dianggap merampok kekayaan Indonesia. *Ketiga*, menjadikan berbagai perusahaan menjadi perusahaan Negara, asalkan tidak ada pemborosan, korupsi dan pencoleng. Harapannya keuntungan Negara dapat diperoleh, kemudian dapat meringankan beban pajak rakyat, serta dapat memperbaiki taraf hidup petani dan buruh. Lihat pada Laporan Umum DPP BTI kepada Kongres Nasional ke VI BTI. *Untuk Demokrasi, Tanah, Produksi dan Irian Barat*. Jakarta: DPP BTI, Tanggal 23 s/d 29 Juli 1962, hlm 24.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sumargo, Jember, 1 dan 2 Juni 2004. Pada dasarnya apa yang dikatakan oleh Soekarno dan seruan Menteri tersebut hanya merupakan pemantik dari berlangsungnya aksi-aksi ambil alih.

¹⁵ Istilah penyitaan ini merujuk pada resolusi yang diajukan oleh Serikat Buruh Gula (SBG) pada tanggal 30 Juni 1958. ANRI, koleksi Kabinet Presiden RI, No. Inventaris 1545. Serikat buruh ini menolak pengertian seperti Nasionalisasi, Indonesianisasi ataupun istilah Belanda seperti *naasting*. Menurut serikat buruh ini berbagai istilah tersebut dapat mengaburkan makna perjuangan dari kaum buruh itu sendiri.

¹⁶ BTI juga berharap agar perusahaan perkebunan yang menjadi milik Negara, kemudian disusul Pemerintah segera mensahkan tanah-tanah yang dikerjakan petani menjadi milik petani. Laporan Umum DPP BTI, *Loc. cit.* 24-25.

Menurut Kusdari¹⁷ semua warga kota Jember turun ke jalan guna melakukan demonstrasi dan melakukan aksi pengambilalihan atas berbagai asset yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda. Sejak saat itu mulailah terdengar yel-yel di jalan-jalan dan meneriakkan perlawanan terhadap Belanda. Pertama-tama menjadi sasaran untuk diduduki dan diambilalih adalah *societeit gebouw*¹⁸ sebuah gedung yang terletak lebih kurang 1 km ke arah utara dari alun-alun kota Jember. Aksi corat-coret pada gedung sebagai simbol perlawanan terhadap kepemilikan asing di Jember dilakukan.¹⁹ Aksi corat-coret juga dilakukan pada rumah-rumah dinas perusahaan perkebunan.²⁰

Setelah itu mereka berbondong-bondong berjalan menuju kompleks perumahan perusahaan perkebunan milik warga Belanda di sepanjang jalan protokol Jember (sekarang jalan Gajah Mada) dan gedung-gedung yang pernah menjadi tempat aktifitas warga Belanda. Uniknya, menurut Kusdari tidak ada satupun barang-barang milik warga Belanda itu yang berpindah dari tempatnya. Setelah proses aksi pengambilalihan dan pendudukan tersebut semua asset milik Belanda tersebut diserahkan ke pemerintah daerah, dengan harapan dapat menyelesaikan persoalan tersebut.²¹

Proses aksi ambil alih juga terjadi di berbagai lahan perkebunan di Jember,²² termasuk juga diwarnai dengan aksi corat-coret pada tembok-tembok bangunan milik perusahaan perkebunan partikelir. Berbagai coretan tersebut mengingatkan pada coretan beberapa saat paska terjadinya proklamasi kemerdekaan nasional 1945, seperti coretan *milik republik, sudah dikuasai republik* dan coretan lain-lain, yang sifatnya membangkitkan rasa identitas

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kusdari, Jember, 10 Juni 2004.

¹⁸ Sekarang menjadi gedung Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Jember. Lihat pada lampiran foto no 33.

¹⁹ Aksi corat-coret di *societeit gebouw* yang dilakukan masyarakat perkebunan pada saat aksi ambil alih dapat dilihat lampiran foto No. 34.

²⁰ Aksi corat-coret juga dilakukan masyarakat perkebunan untuk rumah dinas perusahaan perkebunan dapat dilihat lampiran foto No. 35.

²¹ Hal senada juga diungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Sumargo, Jember, 1 dan 2 Juni 2004. Begitu juga informasi senada juga didapat dari wawancara dengan Bapak Sahid, Jember, 8 Juni 2004.

²² Untuk aksi di lahan perkebunan dapat dilihat pada lampiran foto No. 36.

nasional. Ada beberapa dinding bangunan milik eks perusahaan perkebunan partikelir di daerah Wono Jati, Pondok Suto dan Kotta Blater banyak coretan.²³

Sementara itu, di perusahaan perkebunan sendiri yang terletak di wilayah pedesaan Jember berlangsung proses “penangkapan” warga Belanda yang bekerja di perusahaan perkebunan, kemudian “*diinternir*” atau “ditawan”. Proses “penangkapan” ini dilaksanakan dengan tanpa kekerasan sama sekali. Apa yang terjadi di perusahaan perkebunan di daerah Kotta Blater, daerah selatan Jember kurang lebih 25 km dari kota, terdapat “penangkapan” dua orang warga Belanda yang bekerja di perusahaan perkebunan tersebut. Mereka “ditangkap” dengan tanpa kekerasan sama sekali, karena yang “menangkap” adalah para karyawan dan buruh pada perusahaan perkebunan itu sendiri yang sudah kenal baik dengan mereka. Setelah itu dua warga Belanda ini dibawa ke kota di serahkan ke Pemerintah Daerah untuk kemudian diperkenankan meninggalkan kota Jember. Begitu juga dengan proses pengambilalihan atas perusahaan perkebunan di wilayah-wilayah pedesaan Jember, yang dalam prosesnya seperti yang terjadi di wilayah kota, proses ini tidak mengganggu sama sekali tempat-tempat atau barang-barang yang ada diperkebunan, seperti meja, kursi dan perabotan lainnya, karena itu nanti ada tim lain yang bekerja. Setelah ditangkapi orang-orang Belanda itu maka dikuasailah perusahaan perkebunan itu oleh putra-putra Indonesia.²⁴

Ada pula yang diawali dengan proses dikumpulkannya seluruh buruh perusahaan perkebunan, seperti yang dilakukan di BTM. Seluruh buruh tersebut dikumpulkan di kantor pusat BTM di Taman Sari, Bondowoso untuk kemudian diberitahu oleh Supangat, yang kemudian menjadi Direktur di BTM, bila terjadi proses penyerahan perusahaan perkebunan dari pemerintah Belanda ke pihak Indonesia.²⁵ Selain itu, Supangat juga menjelaskan hal ini terjadi karena pihak Bangsa Indonesia telah membayar ganti rugi kepada pihak perkebunan. Ini bukan ambil alih langsung karena terdapat proses ganti rugi.²⁶

²³ Wawancara dengan Bapak Sahid, Jember, 8 Juni 2004.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sumargo, Jember, 1 dan 2 Juni 2004.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Jember, 13 September 2004.

²⁶ *Ibid.*

Di BTM setidaknya terdapat tiga keluarga warga Belanda yang harus meninggalkan daerah tersebut. Di Taman sendiri setidaknya ada 4 anggota keluarga dengan satu kepala keluarga, di Taman Sari terdapat 3 orang Belanda serta di Nangkaan juga ada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga dua dengan seorang kepala keluarga. Sedangkan untuk di kantor pusat sendiri terdapat satu kepala keluarga yang memiliki dua orang anak perempuan. Status mereka di wilayah perusahaan perkebunan ini menjadi penilik perkebunan. Namun akibat adanya proses pengambilalihan perusahaan perkebunan, mereka dengan “terpaksa” meninggalkan harta miliknya tersebut.²⁷

Sementara itu bagi pemerintah Belanda tindakan pengambilalihan bukanlah hal yang dipandang sebagai masalah yang paling serius. Dalam keterangannya kepada pers, Duta Besar Belanda untuk Amerika Serikat, Van Royen menyatakan Pemerintah Belanda memandang perlakuan terhadap warga Belanda di Indonesia jauh lebih serius ketimbang masalah penyitaan hak milik Belanda. Dikatakannya bahwa sejak pemerintah Indonesia menutup kantor-kantor konsulat Belanda di Indonesia, tidak ada orang yang dapat dimintai bantuan oleh orang Belanda.²⁸

Anehnya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan tersebut memunculkan tuduhan dari kalangan yang tidak setuju dengan gagasan ambil alih yang menganggap apa yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan sebagai tindakan yang anarkhi. Memang tidak bisa dipungkiri bila terdapat pandangan yang pro dan kontra atas tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan tersebut. Sebenarnya yang terjadi adalah ketidaksiapan elit politik saat itu dalam menangkap proses emansipasi massa rakyat yang diorganisir oleh kekuatan politik yang memiliki orientasi politik nasionalis-kiri

²⁷ *Ibid.* Tindakan “pengusiran” tersebut dipicu oleh maklumat yang “ambisius” dari Menteri Kehakiman, dimana telah mengharuskan warga Belanda untuk meninggalkan Indonesia, kecuali para ahli masih bisa melanjutkan pekerjaannya di Indonesia. Menurut Oey, “pengusiran” warga Belanda tersebut dilakukan tiga tahap. *Pertama*, warga Belanda di Indonesia yang tidak bekerja. *Kedua*, warga Belanda yang tergolong dalam golongan menengah. *Ketiga*, mereka sebagai tenaga ahli yang sukar dicari penggantinya. Setidaknya sebelum “pengusiran” terdapat 50.000-60.000 warga Belanda yang tinggal di Indonesia, namun sampai pertengahan 1959 hanya tersisa sekitar 6.000 orang. Oey Beng To. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, jilid I (1940-1958)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991, hlm 388.

²⁸ Bondan Kanumoyoso. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001, hlm 77.

dalam proses nasionalisasi tersebut. Sebagai kelanjutan dari aksi mogok tersebut, Dewan Menteri pada tanggal 5 Desember dalam rapatnya memutuskan untuk membekukan seluruh transfer keuntungan dari berbagai perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Menurut harian *Indonesia Raya* (6 Desember 1957) berbagai perusahaan yang telah diambil alih kemudian diserahkan pada suatu badan pengawas.

Tindakan pengambilalihan tersebut menurut laporan harian *Surabaya Post* (11 Desember 1957) didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 1063/PTM/1957 tanggal 9 Desember 1957.

Perusahaan-perusahaan perkebunan atau pertanian milik Belanda, termasuk yang dimiliki Belanda bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia atau warga negara Indonesia beserta pabrik-pabriknya, lembaga-lembaga penyelidikan ilmiah di lapangan pertanian, bangunan-bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya, benda-benda bergerak dari perusahaan termasuk keuangannya dan surat-surat berharga dikuasai seluruhnya oleh pemerintah Republik Indonesia.

Di lain pihak (hanya) berdasar Surat Perintah KSAD selaku Penguasa Daerah Angkatan Darat No. SP/PTM/077/1957 tanggal 10 Desember 1957, memerintahkan pengambilalihan atas perusahaan milik Belanda yang ada. Tidak lama setelah Penguasa Militer/Menteri Pertahanan mengumumkan pengambilalihan berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik warga Belanda yang disusul dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 229/UM/1957, tanggal 10 Desember 1957.

Tanggal 10 Desember 1958, pukul 14.00 WIB dilakukan proses pengambilalihan seluruh asset perkebunan dan pabrik milik Belanda di Jawa Timur dipimpin dan diawasi oleh pihak militer selaku penguasa daerah atas nama pemerintah republik. Proses pengambilalihan di Jawa Timur ini secara lahiriah berjalan dengan lancar, berbagai perusahaan perkebunan yang semula milik pengusaha partikelir Belanda kemudian menjadi milik pemerintah Indonesia. Di Jawa timur terdapat 10 kantor direksi Perusahaan, yaitu:

- (1) Fa. Anemaet & Co;
- (2) Handels Vereniging Amsterdam;
- (3) Kooy & Coster van Voorhout;

- (4) Fa. Tiedeman & van Kerchem;
- (5) Cultuurbank;
- (6) Majanglanden;
- (7) Landbouw Maatschappij Oud Djember;
- (8) Landbouw Maatschappij Amsterdam;
- (9) Kedawoeng Kawisredja;
- (10) Besoeki Tabaks Maatschappij.

Kesepuluh perusahaan besar tersebut di atas meliputi 31 pabrik gula, 59 perkebunan pegunungan (*bergcultures*), 13 perkebunan tembakau, 1 pabrik tapioka, 1 biro teknik pembangunan (*tikind*) dan 1 kantor perdagangan Vraag & Aanbond (*vena*). Dua perusahaan yang terakhir tersebut didirikan oleh pihak Belanda guna menunjang dan melayani perusahaan perkebunan milik Belanda dalam bidang jasa seperti pembangunan dan pemeliharaan gudang-gudang (*tikind*) dan mengurus impor dan ekspor juga perdagangan yang lain (*vena*).²⁹

Sementara itu di Jember, pada tanggal 10 Desember 1958 semua pimpinan dan karyawan berbagai perusahaan perkebunan partikelir milik Belanda di Jember dikumpulkan di gedung Bioskop Ambassador (sekarang gedung bioskop Kusuma, Jalan Mangunsarkoro) oleh Pemerintah Daerah Jember atas nama Pemerintah Indonesia. Kemudian diumumkan bahwa berbagai perusahaan perkebunan partikelir tersebut diambil-alih oleh Pemerintah Republik. Akibat adanya pengumuman tersebut semua asset sumber daya perkebunan yang awalnya milik para pengusaha partikelir Belanda harus diadakan serah terima kepada pimpinan perusahaan yang baru yang ditunjuk oleh pemerintah Republik.³⁰

Akan tetapi, tidak semua pimpinan perusahaan perkebunan partikelir Belanda dengan sukarela melaksanakan proses serah terima. Beberapa diantaranya dengan alasan tidak ada perintah dari direksi masing-masing perusahaan perkebunan. Adalah *Landbouw Maatschappij Soekowono* (LMS) merupakan perusahaan perkebunan yang tidak mau melakukan serah terima. Bagi para direksi perusahaan perkebunan yang tidak hadir dalam acara serah terima tersebut kemudian dipanggil ke Surabaya oleh Mayjend Sarbini selaku Komando Daerah Militer Brawidjaya. Setelah pemanggilan tersebut akhirnya mau tidak mau mereka

²⁹ Varia Kebun Negara. *Nomor Istimewa*. 1982, hlm 69-70.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Sumargo, Jember, 1 dan 2 Juni 2004. Juga wawancara dengan Bapak Ibrahim, Jember, 13 September 2004.

menyerahkan segala assetnya kepada pemerintahan RI. Adanya tekanan tersebut, dua hari berikutnya mereka melakukan serah terima kepada pemerintahan RI.

Hal berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan perkebunan Partikelir milik NV. Cultuur Maatschappij Djelboek (CMD), yang memiliki kebun di Soekokerto-Adjong yang melakukan serah terima dengan baik. Bahkan sebelum terjadi proses pengambilalihan telah memberikan kesempatan kepada karyawan dari Indonesia untuk memegang jabatan *ziender* sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Guna mempertegas aturan tentang nasionalisasi, pada tanggal 6 Februari 1959 Pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi (Banas) berdasarkan PP No. 3/1959.³¹ Adapun alasannya adalah guna menjamin koordinasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang telah dinasionalisasikan. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1959 Presiden Soekarno menetapkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan pertanian atau perkebunan tembakau milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Berdasar atas pasal 2 PP ini terdapat sembilan perusahaan perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi di Indonesia, empat diantaranya berada di Jember:

1. Milik NV Landbouw Maatschappij Out Djember perusahaan tembakau dengan sembilan wilayah perkebunannya, yaitu di Adjong, Gambirono, Kertosari, Oost Djember, West Jember kesemuanya ini terletak di daerah Jember. Ditambah Nangkaan yang terletak di Bondowoso.
2. Milik NV Besoeki Tabaks Maatschappij perusahaan perkebunan tembakau yang memiliki tiga tempat perkebunannya, yaitu Modjo di Jember, sedang yang dua berada di Bondowoso, yaitu di Soember Djeroek dan di Tamansari.
3. Milik NV Maatschappij Djelboek perusahaan perkebunan tembakau yang memiliki dua areal di Djelboek dan Soekokerto/Adjong yang keduanya terletak di Jember.

³¹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31. 1959.

4. Milik NV Landbouw Maatschappij Soekowono perusahaan perkebunan tembakau yang memiliki areal perkebunan di daerah Sukowono, Jember.

Kemudian pada tahun itu pula Pemerintah mengeluarkan PP No. 19 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan pertanian atau perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berbagai perusahaan perkebunan atau pertanian milik Belanda di Jember yang terkena nasionalisasi menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959

No	Kantor direksi / kantor administrasi	Pemilik perusahaan	Tempat kedudukan pemilik	Nama perusahaan	jenis	Letak kebun
1	N.V. Handelsve-reeniging "Amsterdam" di Surabaya dan Jakarta.	N.V. Handelsve-reeniging "Amsterdam"	Kerajaan Belanda	1. Semboro	Pabrik Gula	Jember
				2. Gunung Sari	Pabrik Gula	Jember
2	NV Rubber Cultuur Mij. Amsterdam di Jember	NV Rubber Cultuur Mij. Amsterdam	Kerajaan Belanda	1. Gunung Gambir/ lawang kedaten	Teh & kopi	Jember
				2. Tanah merah / karang anom	Kopi	Jember
				3. Zulandia / Kali Suko	Karet	Jember
3	NV Landbouw Mij. Oud Djember di Jember	NV Landbouw Mij. Oud Djember	Kerajaan Belanda	1. Dampar Renes	Karet & kopi	Jember
				2. Kalisanen	Karet, kopi & coklat	Jember
				3. Kedaton Badean	Karet & kopi	Jember
				4. Klatakan/ Petung Rejo	Karet & kopi	Jember
				5. Lengkong / mumbul	Karet & kopi	Jember
				6. Renteng	Karet, kopi & coklat	Jember
		NV Cultuur Mij. Jamintoro	Kerajaan Belanda	Jamintoro	Karet	Jember
		NV. Cultuur Jelbuk	Republik Indonesia	Banjar Sari	Karet, kopi & coklat	Jember
4	NV. Mij tot	NV. Mij tot	Kerajaan	1. Gunung	Kopi &	Jember

	Exploitatie de Verenigde Majanglanden, di Surabaya	Exploitatie de Verenigde Majanglanden	Belanda	2. Majang Glantangan /Kali Bajing 3. Wonodjati 4. Wonowiri	karet Kopi & karet Kopi & karet Kopi & karet	Jember Jember Jember
5	Handel, Industrie- en Landbouw Mij. Tiendeman & van Kerchen (Indonesia) NV. Di Surabaya	Cultuur Onderneming Kotta Blater	Kerajaan Belanda	Kotta BlaterNV.	Sisal	Jember
6	Besuki Tabak Mij. NV. Di Klotok, Kalisat	Landbouw Mij. Oost Java	Kerajaan Belanda	satak	kopi	Jember
7	NV Cultuur Mij. Sidomuljo di Surabaya	NV. Cultuur Mij. Beliri	Kerajaan Belanda	Silo Sanen	Karet & kopi	Jember
8	N.V. Cultur Onderneming Bangsasing di Bandung	N.V. Internationale Crediet & Handels Vereeniging Rotterdam	Kerajaan Belanda	Gorong Rejo	Karet & Coklat	Jember

Semua perusahaan perkebunan milik Belanda yang terkena nasionalisasi kemudian menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Baru (PPN Baru), misalnya PPN Baru ex LMOD guna menyebut salah satu contohnya. Semua perusahaan tersebut berpusat di Jakarta, yaitu PPN Baru Pusat. Dibentuk pula perwakilan-perwakilan PPN Baru pusat di daerah-daerah untuk membantu mengawasi dan mengkoordinir kegiatan PPN Baru di daerah-daerah, yaitu: (1) Medan untuk daerah Sumatra Utara, (2) Bandung untuk daerah Jawa Barat, (3) Semarang untuk daerah Jawa Tengah, dan (4) Surabaya untuk daerah Jawa Timur. PPN Lama mengelola perusahaan pertanian/perkebunan milik asing yang kalah dalam perang Dunia II, sedang PPN Baru mengelola perusahaan pertanian/perkebunan milik partikelir Belanda yang terkena Nasionalisasi. Menurut catatan Departemen Pertanian Khusus Urusan Perusahaan Negara Perkebunan pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan UU Nasionalisasi, sebagai kelanjutan dari pelaksanaan UU tersebut maka pada tahun 1960 diadakan reorganisasi dalam tubuh PPN Baru, yaitu dengan dibentuk prae unit-prae unit yang kemudian menjadi unit-unit

rayon.³² Sementara itu sesudah terlaksananya pengambilalihan perusahaan perkebunan milik Belanda di Indonesia pada awal Desember 1957, maka organisasi perusahaan perkebunan yang tergabung dalam ALS serta gabungan-gabungan perusahaan Belanda lainnya dibubarkan, termasuk semua balai penelitian yang selama ini mendukung keberadaan perusahaan perkebunan Belanda diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Di bawah ini alur perubahan dari perusahaan perkebunan sejak milik partikelir hingga paska pengambilalihan.

Nama Perusahaan perkebunan	A*)	B*)	C*)	D*)
1. Nangkaan	LMOD	PPN (Baru) LMOD PT Nangkaan	PPN PT Nangkaan	
2. Sumber Djeruk	BTM	PPN (Baru) BTM PT Sumber Djeruk	PPN PT Sumber Djeruk	
3. Taman Sari	BTM	PPN (Baru) BTM PT Taman Sari	PPN PT Taman Sari	
4. Modjo	BTM	PPN (Baru) BTM PT Modjo	PPN PT Modjo	
5. Djelbuk	Firma Anemaet & Co	PPN (Baru) Anemaet PT Djelbuk	PPN PT Djelbuk	
6. Soekokerto/Adjong	Firma Anemaet & Co	PPN (Baru) Anemaet PT Soekokerto/Adjong	PPN PT Soekokerto/Adjong	
7. Soekowono	LMS	PPN (Baru) LMS PT Soekowono	PPN PT Soekowono	
8. Bondowoso	Yayasan Perrin	Tidak pernah diambil alih	PPN Djatim IX	PPN Tembakau VI

Keterangan *):

- A. Modal asing (Belanda) sebelum Desember 1957
- B. Keputusan Penguasa Militer / Menteri Pertahanan, tanggal 9 Desember 1957. No. 1063/PMT/1957 dan Menteri Pertanian tanggal 10 Desember 1957 No. 229/UN/57
- C. Perusahaan Perkebunan Negara Djawa Timur Kesatuan IX disingkat P.P.N. Djatim IX. PP No. 173/tahun 1961 tanggal 26 April 1961. Lembaran negara no. 198/tahun 1961.
- D. Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki VI, disingkat PPN Tembakau VI.

³² Departemen Pertanian Badan Khusus PNP. *Perkembangan 5 Tahun P.N Perkebunan 1968-1972*. Jakarta: Departemen Pertanian, 1973, hlm 13.

4.3. Pasca Pengambilalihan

Keterlibatan masyarakat perkebunan dalam aksi pengambilalihan di Jember berjalan lancar. Setidaknya ada tiga alasan mengapa proses tersebut berjalan lancar. *Pertama*, dukungan penuh dari organisasi rakyat, seperti BTI,³³ Sarbupri, SOBSI, SBII dan lain-lain. *Kedua*, secara nasional gagasan tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah RI,³⁴ termasuk kalangan TNI AD. Dukungan dari kalangan TNI AD ini memiliki logika politik-ekonomi tersendiri,³⁵ karena menghindari jatuhnya berbagai perusahaan perkebunan ke tangan komunis. *Ketiga*, sebagian orang Belanda pemegang posisi penting pada perusahaan perkebunan telah ada yang meninggalkan Jember.³⁶ Kedua alasan tersebut pada

³³ Yang menjadi tuntutan bagi kaum tani di bawah BTI bersama kaum buruh dan kaum patriot lainnya adalah perbaikan pengusahaan dengan menempatkan ahli-ahli yang patriotik, cakap dan democrat serta bercita-cita sosialisme, dengan mengikutsertakan kaum buruh dan kaum tani yang bersangkutan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perusahaan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan, untuk memperinggi mutu dan jumlah produksi dengan mempercepat pembentukan dewan-dewan perusahaan yang melibatkan kaum buruh dan kaum tani. Lihat pada Laporan Pleno Umum DPP BTI, *Loc. cit.* hlm 26.

³⁴ Bondan Kanumoyoso. *Loc. cit.*, hlm 75.

³⁵ Akibatnya sejak bulan Desember 1957 lebih dari lima ratus perusahaan perkebunan Belanda di Indonesia, kurang lebih tiga perempatnya berada dalam pengawasan militer. Ironisnya menurut Pelzer hal itu dilakukan berdasarkan atas UU Kolonial yang mengatur keadaan perang yang ditandatangani oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda pada tanggal 13 September 1939. Lihat pada Karl J Pelzer. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991, hlm 208-209. Sementara itu UU yang pertama kali berkaitan dengan masalah kepemilikan harta Belanda dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 1957 dengan diumumkan seperangkat UU yang tercakup didalamnya UU No. 74/1957 mengenai keadaan darurat, dan UU No. 79/1957 mengenai keadaan perang. Kedua produk politik tersebut mengizinkan militer untuk terlibat dalam pengawasan perusahaan perkebunan. Herbert Feith. *Dynamics of Guided Democracy*. dalam *Indonesia*. Ruth McVey (ed.), Yale University Press, 1963, hlm 332.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Jacob Vredembregt, Jakarta, 18 September 2004. Secara konseptual dasar pembangunan perusahaan perkebunan partikelir adalah berlandaskan pada ide kapitalisme, yang prakteknya tidak hanya berkutat pada persoalan teknis perkebunan. Tetapi juga bagaimana mempermudah proses distribusi dari produksi di daerah perkebunan ke wilayah pasar Eropa. Produksi tidak dilakukan untuk memuaskan keperluan dalam negeri, melainkan untuk pasar dunia demi keuntungan yang luar biasa. Sebagai daerah penjualan barang-barang industri Belanda, Indonesia belum begitu berfungsi. Fungsi ekonominya yang terutama ialah sebagai daerah produksi semata-mata, Karena itu *eksport-economie* menjadi corak perekonomian Hindia Belanda. Lihat pada tulisan Herbert Feith & Lance Castle (ed.). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988, hlm 7-8.

satu sisi memang mendukung, akan tetapi pada sisi yang lain keduanya juga merupakan problem pasca pengambilalihan.

Kalangan TNI AD memanfaatkan momentum pengambilalihan guna menempatkan perwiranya dalam badan-badan pemerintah yang berkaitan dengan harta milik Belanda. Pada 2 Juni 1958, KSAD Mayjend A.H. Nasution memanggil para perwira militer dari berbagai daerah guna koordinasi pasca pengambilalihan. Wilayah Jawa Timur diwakili oleh Brigjend (purn) R. Soenjoto pada saat berlangsungnya proses pengambilalihan sebagai Komandan Militer Kota Besar. Selanjutnya R. Soenjoto ditunjuk sebagai perwira militer yang duduk diperkebunan yang telah diambilalih di wilayah Jawa Timur.³⁷ Sedangkan untuk wilayah Jember ditunjuk Kolonel R. Kartidjo selaku penguasa daerah atas Nama Pemerintah,³⁸ melalui Sekretariat Koordinasi Penempatan Daerah (Sekardaha).³⁹ Sekardaha merupakan organisasi di bawah TNI AD guna mengkaryakan anggotanya pada jabatan-jabatan strategis di perusahaan perkebunan yang telah dinasionalisasi.⁴⁰ Menurut mantan Panitia Landreform Jember paling tidak untuk perkebunan wilayah Jember, Banyuwangi, Besuki dan Bondowoso dipimpin oleh seorang Kolonel.⁴¹

Problem pasca pengambilalihan adalah persoalan tata kelola sumber-sumber agraria di wilayah perkebunan. George Birnie tidak saja menanamkan sahamnya hanya untuk seputaran hasil pertanian seperti tembakau, kopi dan coklat, juga memiliki saham terbesar pada pabrik gula di Prajekan, Bondowoso. Selain itu Birnie juga memiliki saham terbesar pada pabrik Panarukan Maatschappij yang bergerak dalam usaha pengangkutan komoditi ekspor ke luar

³⁷ Lihat pada Varia Kebun Negara. *No. Istimewa*, 1982, hlm 70-71. Lihat juga pada Sasaran No 7 Tahun II. 1987, hlm 36.

³⁸ Emmanuella Keni Tjandrawati. *Loc. cit.* hlm 34.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Sumargo, Jember, 1 dan 2 Juni 2004.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Untuk mengamankan berbagai perusahaan perkebunan yang telah dikuasai oleh kalangan militer tersebut maka Koordinator Penerangan Staf harian penguasa militer, Major Harsono, mengumumkan bahwa KSAD Mayjend A.H. Nasution, selaku penguasa Militer atas daerah AD di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya telah mengeluarkan peraturan No. 016 tahun 1957, memutuskan dan menetapkan: peraturan larangan pemindahan hak dan pembebasan hak milik perusahaan dan perseorangan warganegara Belanda tanpa Izin. Lihat pada Surabaya Post, 3 Djanuari 1958, hlm 1.

negeri.⁴² Praktis sebenarnya sejak tahun 1950an awal penataan sumber-sumber agraria belum bisa dilakukan secara efektif oleh pihak pemilik hak *erfpacht*. Pada akhirnya hal ini tidak saja akan menyebabkan kesulitan dalam hal pengurusan awal perusahaan perkebunan setelah proses ambalalih, terlebih lagi banyak modal yang sudah keluar duluan sebelum diambilalih.⁴³

Keluarnya pemilik modal tidak saja menyebabkan larinya kapital ke luar negeri, tetapi juga berdampak pada proses pengambilan uang di Bank, karena yang berhak mengambil adalah administatur Belanda. Pihak militer kembali melakukan penekanan kepada para pemimpin bank guna melayani para pemimpin baru tersebut. Hal ini tidak lepas dari proses pengambilalihan berbagai perusahaan perkebunan partikelir itu pada dasarnya dilakukan dengan begitu cepat. Problem keuangan itu tidak akan terjadi seandainya para pemegang posisi penting di perkebunan ditahan terlebih dahulu untuk kemudian dimintai pertanggungjawabannya sebelum perusahaannya diambil-alih.

Akan tetapi untuk LMOD sejak awal dalam soal keuangan sudah mengadakan perhatian secara khusus supaya sesudah proses nasionalisasi tidak menghadapi kemacetan. Terdapat dua langkah utama yang ditempuh. Langkah *pertama*, diambilnya jalan dengan mendirikan *verkoop* organisasi di Surabaya yang disetujui oleh PPN jatim. *Verkoop* organisasi ini sudah dapat melakukan penjualan kopi keluar negeri yakni ke Eropa. Langkah *kedua*, jalan terus menghubungi Bank yang biasa menjadi saluran keuangan LMOD yakni faktori-faktori namun di samping itu juga mengadakan hubungan dengan Bank Indonesia. Hal yang demikian di pandang perlu untuk *over brugging* bila suatu ketika LMOD menghadapi kemacetan keuangan. Keuangan dari LMOD sepanjang pengetahuan Safiudin sejak memimpinnya dari tahun 1955 tidak pernah ditransfer keuntungan dicapai dipergunakan di dalam negeri. Untuk memperbaiki perkebunannya. Dan hingga kini LMOD tidak pernah menderita kerugian.⁴⁴

Selain itu juga terdapat problem pembenahan administrasi yang ada di perusahaan perkebunan yang baru diambil alih. Dimana secara tiba-tiba ditinggal oleh tenaga administrasinya yang sebelumnya terlibat dalam proses produksi.⁴⁵ Masalah tenaga trampil ini juga menjadi problem utama pada tahun-tahun pertama kepemilikan perusahaan perkebunan oleh pemerintahan RI.

⁴²Brosur. *Een Jubileum in de Tabak N.V. LMOD*. 1909, tidak diterbitkan.

⁴³Lihat pada Sasaran No 7 Tahun II. 1987, hlm 36.

⁴⁴Lihat pada *Surabaya Post*, 4 Pebruari 1958, hlm 2.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Sumargo, Jember, tanggal 1 dan 2 Juni 2004.

Selain itu pasca pengambilalihan terdapat problem lain yaitu soal pemasaran, yang itu sifatnya hubungan luar negeri. Tindakan pengambilalihan menyebabkan hubungan Indonesia dengan Belanda berada pada posisi yang sama-sama tidak menguntungkan. Di Eropa tumbuh integrasi yang mengarah pada satu Eropa bersatu. Di bidang ekonomi dibentuk *Europe Economic Community* (EEC) atau Pasaran Bersama Eropa (PBE) di Roma pada tanggal 25 Maret 1957. Hasil-hasil yang dicapai oleh Montan Union (Kerja sama di bidang baja atau batu bara) menimbulkan keyakinan negara-negara anggota guna memperluas kerja sama dalam bidang ekonomi yang lebih rumit yang akan dimulai dengan penghapusan tarif bea masuk, politik agraria, politik sosial, moneter dan politik ekonomi bersama. Sehingga tercapai tingkat integrasi yang penuh di antara anggota-anggota dalam usaha menuju integrasi Eropa.⁴⁶ Pada titik ini PBE telah mempraktekkan: (1) kebijaksanaan proteksi; (2) perlakuan diskriminatif terhadap ekspor Indonesia dibanding dengan negara-negara Afrika berasosiasi; (3) tarif bea masuk bersama *common external tariff* (CET); (4) memberi bantuan tehnik dan keuangan kepada negara-negara Afrika Berasosiasi.

Salah satu faktor penghalang bagi ekspor tembakau Indonesia pasca pengambilalihan adalah PBE dan CET. Kebijakan ini diterapkan hanya untuk negara anggota dan negara yang berasosiasi, sehingga barang-barang dari luar akan sulit dapat menembus dan bersaing. Hal ini sangat terasa pengaruhnya terhadap rangkaian kebijaksanaan ekspor tembakau Indonesia.⁴⁷ Apalagi tembakau cerutu hanya mempunyai saham kecil dalam pasaran internasional. Walaupun jenis tembakau Deli sangat terkenal sebagai pembalut cerutu dan mahal harganya. Sedangkan untuk tembakau Jawa (*vorstenlanden*) sangat bermutu, khususnya untuk pembungkus dan isi cerutu.

Ditambah lagi, sejak abad XIX cerutu cukup kuat mendapat tempat di pasaran Eropa Barat, khususnya di Belanda (Rotterdam dan Amsterdam). Kedua tempat tersebut merupakan pasar potensial bagi tembakau Indonesia hingga pengambilalihan. Pada dasarnya hingga tahun 1958, hampir 80% dari hasil

⁴⁶ B.N Marbun. *Pasaran Bersama Eropa dan Indonesia Realita dan Perkembangan Ekspor Indonesia ke Pasaran Bersama Eropa*. Jakarta: Erlangga, 1972, hlm 23.

⁴⁷ Moh. Ambijah Hadiwinoto. *Kedudukan Tembakau Indonesia di Pasaran Luar Negeri*. dalam *Tembakau*. Tahun I, No. 4. 1962, hlm 174.

perkebunan di Indonesia mengalir ke Eropa. Dari produksinya dua komoditi yang memiliki nilai terbesar, yaitu tembakau dengan rata-rata penjualan lebih kurang 200 juta *gulden* per tahun, dan teh yang harga jualnya mencapai kurang lebih 65 juta *gulden* per tahun (Warta Niaga dan Perusahaan, 1958). Di bawah ini merupakan tabel harga rata-rata tembakau yang beredar di dua daerah tersebut mulai tahun 1954.

Tembakau berasal dari:	Harga di Rotterdam dan Amsterdam 0,5 Kg (gulden)				
	1954	1955	1956	1957	1958
Ex LMOD	3,15	5,14	5,46	5,80	5,56
Ex BTM	2,87	4,92	5,06	4,44	3,65
Ex LMS	3,53	4,60	5,19	5,44	3,29
Ex CMD	3,30	5,51	5,45	4,90	2,87

(sumber: Bakom PTP XXVII)

Pada tahun 1954 menunjukkan harga yang paling rendah. Hal itu dikarenakan pada tahun itu di perusahaan perkebunan masih berlangsung proses rehabilitasi perkebunan yang rusak akibat perang. Selaian itu pada tahun 1953 areal tanam untuk semua perusahaan perkebunan di wilayah karesidenan Besuki mengalami penyempitan, yakni hanya 94.000 hektar jauh lebih sempit sebelum masa perang, seperti pada tahun 1931 seluas 320.000 hektar. Begitu juga pada tahun 1958 menunjukkan harga mengalami sedikit penurunan dikarenakan berada dalam situasi gonjang-ganjing pengambilalihan.

Padahal kalau melihat areal tanam tembakau oleh perusahaan perkebunan pada tahun 1956-1957 dengan tahun 1957-1958 keluasannya hampir sama. Lihat tabel di bawah ini.

Kebun	Luas areal tanam pertahun (Ha)	
	1956-1957	1957-1958
105	303	333
106	317	473
107	388	498
108	281	291
109	442	318
110	309	318
111	803	826

Tabel di atas merupakan luas areal tanam tahun terakhir kepemilikan perusahaan perkebunan tembakau oleh pihak asing. Kebun (105) untuk daerah Nangkaan (ex LMOD), Kebun Soember Djeroek (106), Kebun Modjo (107), Kebun Tamansari (108) ex BTM, Kebun Djelboek (109), Kebun Soekokerto-Adjong (110) ex CMD, dan Kebun Soekowono (111) ex LMS.⁴⁸

Berangkat dari ketegangan hubungan politik Indonesia dengan Belanda akibat pengambilalihan dan berdasar pada UU No. 86 tahun 1958 dalam rangka peralihan struktur ekonomi kolonial ke struktur nasional, maka pada tahun 1959 pemerintah memindahkan pusat pemasaran tembakau ke Bremen (Jerman).⁴⁹ Sejak saat itu “komunikasi” dagang tembakau Jember berubah ke Bremen, serta tidak lagi ke wilayah Rotterdam dan Amsterdam.

Berawal pada musim rontok tahun 1958, berangkatlah delegasi PPN ke Eropa dipimpin oleh Amin Tjokrosuseno dan Basir Isa dari Jawatan Ekspor, guna melakukan penelitian guna memilih kota yang paling tepat sebagai pusat pemasaran tembakau Indonesia sebagai pengganti Amsterdam dan Rotterdam. Bremen dipilih karena memiliki kriteria yang cocok dengan pemerintah Indonesia. Di sana tidak saja mempunyai industri tembakau yang luas dan banyak memiliki penyaluran tembakau. Di sana juga dekat dengan pelabuhan pembongkaran, agar setiap petugas yang bersangkutan dengan cepat dapat melakukan tugasnya masing-masing misalnya pemeriksaan cara pemuatan dalam kapal, pembongkarannya ke dalam gudang serta pengangkutan bal-bal dari gudang yang diperlukan untuk contoh-contoh. Selain itu di Bremen juga cukup memiliki peralatan dan terdapat badan-badan atau perorangan yang mampu mengorganisir pemasaran tembakau Indonesia. Hal lain yang tidak kalah pentingnya menurut catatan Harian *Merdeka* adalah adanya kemauan untuk bekerja sama dari pihak *Bremer Gruppe* dalam menghadapi segala kesulitan pemasaran, termasuk menghadapi pihak Belanda.⁵⁰

Pada tanggal 13 Februari 1959 berlangsung penandatanganan persetujuan dagang antara Ir. Saksono Prawirohardjo selaku direktur PPN dengan Mr.

⁴⁸ Lihat pada Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. 1976, hlm 2-5.

⁴⁹ Carl Schunemann. *Bursa Tembakau di Bremen Hasil Usaha Bersama Indonesia-Djerman*. Diterbitkan dalam rangka pembukaan *Bremen Tabakborse* 11 Mei 1962, hlm 7.

⁵⁰ Harian *Merdeka*, 25 Pebruari 1959, hlm 2.

Gielessen dari *Bremer Gruppe*. Isi persetujuan tersebut tidak saja mengenai pemindahan pemasaran tembakau Indonesia ke Bremen, di sana juga dinyatakan masing-masing memiliki saham 50%. Selain itu juga termaktub semua tembakau yang dikirim ke pelelangan di Bremen 70% dibiayai terlebih dahulu oleh *Bremer Gruppe*. Adanya persetujuan dagang ini kemudian melahirkan sebuah badan usaha bersama antara Pemerintah Indonesia dengan sekumpulan pedagang tembakau di Bremen yang bernama *Deutsch-Indonesische Tabak Handellschaft* (DIHT). Badan ini mendapatkan hak monopoli untuk memasarkan tembakau hasil produksi PPN.⁵¹

Tampaknya perpindahan tersebut juga melahirkan problem tersendiri, yaitu pihak Belanda melakukan klaim pembeslahan dan akan mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan internasional.⁵² Sementara itu pihak Indonesia sebelumnya telah menyatakan bahwa para pengusaha Belandalah yang pertama kali menyalahi aturan kontrak dengan memblokir pentransferan hasil penjual tembakau ke Indonesia, sebanyak lebih kurang 70 juta *gulden*.⁵³ Tekanan yang dilakukan Pemerintahan Belanda terhadap Indonesia dan *Bremer Gruppe* tidak beralasan, karena Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu pihak *Bremer Gruppe* tidak merampas milik Belanda. Mereka telah melakukan persetujuan dagang mengenai pemasaran tembakau dengan pemilik yang sah, setelah bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan persetujuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan dominasi Belanda dalam perekonomian Indonesia telah berakhir dengan serentetan peristiwa dan aturan di atas.

Kendati demikian, setidaknya terdapat beberapa pemikiran yang berkembang saat itu dalam memandang persoalan nasionalisasi tersebut. Sementara itu sebagian elit politik di Jakarta dalam merespon atas terjadinya proses pengambilalihan tersebut terjadi proses pro-kontra. Bagi yang mengkritisi proses tersebut yang diwakili Sjafruddin Prawiranegara dan Mochammad Hatta menyatakan tindakan tersebut menurutnya tanpa rencana yang matang dan hanya

⁵¹ *Harian Merdeka*, 14 Pebruari 1959, hlm 1-2. Lihat juga pada Oey Beng To, *Loc. cit.* hlm 325.

⁵² *Harian Merdeka*, 25 Pebruari 1959, hlm 2.

⁵³ *Ibid.* hlm 1-2.

merupakan tindakan sentimen belaka atas perilaku Belanda dalam masalah Irian Barat.⁵⁴ Tindakan pengambilalihan tersebut akan mendatangkan akibat yang sangat parah bagi perekonomian Indonesia.⁵⁵ Sementara bagi yang bagi yang mendukung ide tersebut yang diwakili oleh Perdana Menteri Djuanda dengan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh kalangan yang kontra tersebut merupakan hal yang terlalu teoritis dan naif.⁵⁶

Ujung dari tuntutan masyarakat perkebunan Jember ini berlangsungnya proses perombakan sistem hukum agraria dari kolonial ke nasional. Tahun 1960 merupakan tonggak baru bagi masyarakat perkebunan karena lahir Undang-undang Pokok Agraria yang bersifat nasional menggantikan Agrarische Wet 1870. Ini merupakan petanda bagi berakhirnya proses dekolonisasi di Indonesia. Akan tetapi dinamika masyarakat perkebunan tidak berhenti pada tahun tersebut. Pada paruh awal tahun 1960an, dinamika masyarakat perkebunan di Jember merupakan tonggak sejarah penting.

Pada tahun-tahun 1960-an, dinamika masyarakat perkebunan sarat dengan konflik di wilayah lahan pertanian, akibat tidak jalannya *landreform* yang telah diamanatkan oleh UUPA 1960. Upaya penataan struktur kepemilikan tanah yang lebih adil terhambat oleh politisasi dari kepentingan politik. Pada tahun-tahun ini konflik yang melibatkan masyarakat perkebunan Jember lebih mengarah pada tindakan kekerasan. Apa yang terjadi di Semboro, wilayah perkebunan tebu terjadi benturan antara kekuatan politik NU dan PKI saat itu dalam pelaksanaan *landreform*.⁵⁷

⁵⁴ Pada awalnya para tokoh utama di republik ini terdiri dari kaum cendekiawan. Sehingga tak terpisahkan antara pemikiran dan dunia kekuasaan. Akan tetapi semakin teraturnya putaran roda pemerintahan serta terkaitnya dengan kepentingan politik tertentu, sehingga periode ini menjadi petanda bagi lahirnya kekuatan politik yang berdasar atas altruistik golongan. Lihat pada Herbert Feith & Lance Castle (ed). *Loc. cit.* hlm xlii-xlv.

⁵⁵ Hal ini dapat dilihat pada Bondan Kanumoyoso. *Loc. cit.* hlm 78-79. Lihat juga pada Audrey Kahin dan Goerge McT Kahin. *Loc. cit.* hlm 140. Bisa dilihat juga pada Pedoman, 28 Desember 1957.

⁵⁶ Suluh Indonesia, 30 Desember 1957.

⁵⁷ Tri Chandra Aprianto. *Kekerasan Dan Politik Ingatan, Paramiliter Banser Dalam Tragedi 1965-1966 di Jawa Timur*. Dalam Budi Susanto, S.J. (Editor). *Politik Dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino dan Kanisius. 2003, hlm 19-92.

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan di Ketajek misalnya, yang menginginkan kejelasan status hukum dari kepemilikan lahan perkebunan bekas hak *erfpacht* seluas 478 ha pada awalnya mengalami keberhasilan. Akan tetapi dalam proses selanjutnya hak atas tanah itu menjadi hilang manakala kepentingan modal perkebunan lebih dimenangkan. Pada tahun 1964, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 50/KA/64 tentang daftar kebun yang terlantar di Daerah Jawa Timur. Selanjutnya SK Menteri tersebut ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Kantor Inspeksi Agraria Jawa Timur No. 1/Agr/6/XI/122/III tentang status tanah bekas LMOD. Inti keputusan tersebut bahwa lahan bekas LMOD merupakan objek *land reform*. Segera dilakukan redistribusi lahan kepada 803 kepala keluarga.

Penyerahan SK dari pihak pemerintah kepada warga Ketajek dilakukan di Kantor Kecamatan Panti yang dilakukan oleh Bupati KDH Tingkat II Jember, Oetomo. Acara penyerahan tersebut dihadiri oleh pimpinan dari Kecamatan Panti, unsur pimpinan dari Desa Suci yang diwakili cariknya, turut juga Kapolsek Panti dan jajarannya, tidak ketinggalan pula dari Pimpinan Koramil Panti, serta pimpinan dari organisasi tani, khususnya dari PETANI Cabang Jember turut hadir pula. Selanjutnya 803 kepala keluarga tersebut membayar ganti rugi kepada Pemerintah dan Yayasan Dana *land reform* melalui Bank Bumi Daya (BBD) Cabang Jember,⁵⁸ sebesar Rp. 2 untuk setiap satu meter persegi. Proses pembayaran tersebut dilakukan oleh warga Ketajek hingga akhir tahun 1969.

Sebelum diselesaikannya proses pembayaran, pada tahun 1969 Pemerintah Daerah Tingkat II Jember membentuk panitia pelaksana penyerahan Petok D kepada warga dusun Ketajek. Mengingat terdapat 2 (dua) desa, maka juga dibentuk 2 (dua) panitia pelaksanaan penyerahan Petok D tersebut. Untuk desa pertama panitia pelaksanaannya adalah dari unsur Kecamatan Panti, jajaran Polsek yang diwakili Wakapolsek Panti, Kepala Desa didampingi Carik Desa dan tentu saja Kepala Dusun Ketajek yang terletak di desa tersebut. Untuk Dusun Ketajek yang terletak di desa pertama ini warga yang menerima Petok D sebanyak 176 kepala keluarga.

⁵⁸ Sekarang kantor BBD telah berubah menjadi oleh Bank Mandiri cabang Jalan Wijaya Kusuma yang terletak di seberang Pendopo Kabupaten.

Sementara untuk desa yang lainnya juga dibentuk panitia pelaksanaannya sendiri. Adapun panitianya dating dari unsur pimpinan Kecamatan, Wakapolsek Kecamatan Panti, Carik dari desa setempat, serta Kepala Dusun Ketajek yang berada pada desa ini dibantu oleh Ketua RT 31 Dusun Ketajek. Proses penyerahan Petok D dari Pemerintah kepada warga tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Panti. Untuk Dusun Ketajek yang terletak di desa kedua ini yang berhak menerima sebanyak 134 kepala keluarga.

Keberadaan Dusun Ketajek ini semakin menjadi kampung. Bahkan pada periode tahun 1960-an, Ketajek telah memiliki bangunan Masjid tempat ibadah bagi warga, juga terdapat 4 (empat) mushola sarana berkegiatan beribadah harian warga. Juga sudah bertengger lebih dari lima ratusan bangunan rumah yang dihuni oleh warga, tidak ketinggalan pula sudah terdapat tempat makam umum. Sebagian warga hingga saat ini kalau melakukan ziarah ke keluarganya yang telah meninggal dunia masih mengunjungi Dusun Ketajek.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, proses ini merupakan keberhasilan yang didapat oleh masyarakat perkebunan. Akan tetapi adanya tragedi kemanusiaan 1965-1966, menyebabkan stigma komunisme kemudian dilekatkan masyarakat perkebunan Ketajek. Pada akhirnya proses kepemilikan hak atas lahan perkebunan kembali menjadi konflik antara masyarakat perkebunan dengan pihak perkebunan.

BAB 5

KESIMPULAN

Basis dari usaha pembudidayaan tanaman perkebunan di Jember adalah tata kelola atas sumber-sumber agraria. Proses tata kelola tersebut dalam kurun 1930an hingga 1960an merupakan objek tidak saja bagi masyarakat perkebunan dan tuan kebun. Rentang waktu yang panjang tersebut dikenal sebagai rentang waktu dekolonisasi. Mengenai istilah dekolonisasi tidak semata-mata mengandung arti gejala sosial-politik, akan tetapi juga kebudayaan. Arti dari dekolonisasi adalah menafsirkan ulang atas tafsir dan proses kolonialisme yang menimpa masyarakat perkebunan. Makna dan simbol masyarakat perkebunan yang dikonstruksi oleh tuan kebun selalu bermakna minor.

Masyarakat perkebunan di sini adalah bukan semata-mata masyarakat multi-etnis yang membentuk kebudayaan baru sebagai akibat dari konstruksi perkebunan, tapi juga masyarakat sengaja yang dihadirkan sebagai tenaga kerja di perkebunan. Masyarakat perkebunan ini hadir pada ruang yang itu kemudian memisahkan mereka dengan ikatan sosial asalnya yang menyebabkan krisis baik tingkat individu maupun kelompok. Ikatan sosial antar masyarakatnya pun baru yakni berbentuk hubungan kerja, karena yang menjadi ukuran kemudian adalah produktifitas kerja dari proses hubungan kerja itu sendiri. Mengingat masyarakat perkebunan sebagai konstruksi perkebunan yang bercorak kolonial sehingga sangat rentan dengan adanya pemahaman dekolonialisasi.

Membaca apa yang telah dipaparkan pada bagian di atas, studi tentang dekolonisasi perkebunan di Jember tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan dan perkembangan ekonomi perkebunan. Di satu sisi, masyarakat perkebunan di Jember hadir sebagai buah dari berkembangnya kapitalisme perkebunan sebagai produk kolonialisme, sementara pada sisi lain fenomena masyarakat perkebunan dalam studi ini sekaligus sebagai respons terhadap proses kolonisasi itu sendiri. Sepanjang periode dekolonisasi perkebunan di Jember

merupakan gambaran tentang perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat perkebunan itu sendiri.

Situasi dekolonisasi semakin kuat dalam bentuk hadirnya gagasan nasionalisasi di Indonesia. Berdasar atas alur tesis ini ini gagasan nasionalisasi di Indonesia telah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan (1945) yang ditandai dengan tindakan proses pemindahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintahan Kolonial ke Pemerintahan Republik, baik itu dalam bidang politik, administrasi pemerintahan, militer maupun perekonomian. Serentetan peristiwa selama revolusi fisik (1945-1949), pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya aktualisasi proses nasionalisasi di segala bidang di atas. Akan tetapi, sampai pada penyerahan kedaulatan RI (1949) ternyata dominasi oleh kekuatan asing masih terus berlangsung pada berbagai sektor perekonomian di Indonesia, salah satunya terpusat pada industri perkebunan. Dalam pelaksanaannya proses nasionalisasi di Indonesia berlangsung melalui berbagai langkah, baik secara radikal maupun diplomasi sesuai dengan jiwa zamannya. Sejalan dengan perjalanan sejarah politik Indonesia, proses nasionalisasi terus berlangsung hingga akhir tahun 1950-an yang berujung pada pengambilalihan berbagai perusahaan milik Belanda di Indonesia (1957), termasuk perusahaan perkebunan di Jember.

Dalam praktek politiknya, proses pengambilalihan yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan di Jember itu berbaur dengan kekuatan politik lainnya. Tindakan pengambilalihan tersebut melahirkan dinamika politik tersendiri antara yang setuju dengan tindakan tersebut dengan yang mengklaim sebagai tindakan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, bagi yang tidak setuju berkembang asumsi bahwa praktek politik semacam itu memiliki motivasi politik dari kalangan komunis dan nasionalis kiri. Kendati pada dasarnya tidak mudah untuk menilai motivasi dibalik tindakan praktek politik seperti proses pengambilalihan tersebut yang kemudian diikuti oleh legalisasi nasionalisasi secara resmi oleh negara atas berbagai perusahaan perkebunan milik Belanda di Indonesia. Dan asumsi tersebut lebih mengarah pada bias pandangan politik, karena berbaur dengan pertanyaan apakah praktek politik ambil alih benar-benar digunakan untuk menekan pihak kolonial atau menjadi salah satu jalan bagi kekuatan komunis dan nasionalis kiri guna merebut kekuasaan. Mengapa bias

politik, karena secara nyata dalam prakteknya proses pengambilalihan tersebut dilakukan tanpa proses kekerasan dan tidak ada korban, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan citra radikal dalam praktek politik seperti itu.

Proses perkembangan berikutnya tindakan tersebut juga merupakan bagian dari proses perwujudan cita-cita nasional dari situasi yang penuh warna kolonial. Pada lain perspektif tindakan tersebut juga merupakan upaya untuk *me-recovery* masalah perekonomian yang dihadapi oleh negara pasca kolonial, seperti Indonesia. Selain itu, serangkaian praktek politik yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan dari sejak menduduki dan menggarap lahan yang telah ditinggal oleh para pemilik hak *erfpacht* hingga proses nasionalisasi perusahaan perkebunan, hal itu juga dibarengi dengan upaya melahirkan aturan yang menyangkut tentang penguasaan sumber daya agraria. Periode 1950-1960 merupakan periode menentukan bagi proses ini dan itu didukung oleh kekuatan massa rakyat tani. Pada akhirnya dapat mewujudkan suatu UU tentang penguasaan sumber daya agraria yang lebih dikenal dengan UUPA 1960.

Akan tetapi di lain pihak, akibat dari dinamika dan perdebatan pada tingkat elit politik antara yang setuju dengan yang tidak setuju semakin mengarah pada ketidakstabilan politik yang ditandai dengan jatuh banggunya kabinet. Pada akhirnya tidak terimplementasinya program-program pembangunan ekonomi secara maksimal yang dicanangkan sejak Proklamasi kemerdekaan. Ketidakmampuan dalam *me-manage* dinamika politik tersebut merupakan kondisi objektif bagi kekuatan militer untuk memainkan peranannya yang memang sejak awal selalu dalam keadaan siap siaga memanfaatkan momentum. Dalam konteks nasionalisasi yang termanifestasi pada tindakan pengambilalihan perusahaan perkebunan milik Belanda di Indonesia tampak dipelopori oleh kalangan komunis dan nasionalis kiri mendapat dukungan kuat dari kalangan Angkatan Darat, namun dengan logika ekonomi-politiknya sendiri.

Setidaknya terdapat tiga hal mengapa hal itu bisa terjadi, *pertama*, ini merupakan kegagalan kalangan elit nasional menangkap gejala dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan, dimana mereka telah terlibat dalam proses nasionalisasi sejak Proklamasi Kemerdekaan (1945) hingga berlangsungnya proses pengambilalihan itu sendiri. *Kedua*, bisa jadi ini akibat

dari orientasi pembangunan dari kalangan elit yang memang tidak mengarah pada pelibatan masyarakat perkebunan dalam proses pembangunan nasional. *Ketiga*, bahkan ketika proses nasionalisasi yang diimplementasikan dalam bentuk aksi ambil alih pada tahun 1957-1958, persepsi yang berkembang pada elit pemerintah adalah tanah perkebunan dianggap sebagai tanah negara dan menganggap semua perilaku yang menyertai dapat dilanjutkan. Sementara persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat perkebunan sangat berbeda dengan elit yang menginginkan keterlibatan masyarakat perkebunan dalam pengelolaan perkebunan melalui koperasi.

Oleh sebab itu sejak awal upaya pengambilalihan sudah diinisiasi oleh masyarakat perkebunan. Pengalaman berada dalam kuasa perkebunan yang berwatak kolonial kapitalistik yang tiba-tiba dapat ambruk akibat krisis. Pemahaman tersebut yang menuntun masyarakat perkebunan telah menginisiasi proses pengambilalihan, terlebih lagi masyarakat perkebunan dari awal sudah terlibat dalam proses produksi mulai dari pembukaan lahan perkebunan. Selanjutnya proses nasionalisasi merupakan momentum politik saja guna proses pengambilalihan.

Pengelolaan perkebunan secara nasional untuk kemudian berproduksi sudah dicoba sejak tahun 1945. Terdapat beberapa gagasan tentang pengelolaan perkebunan dari pihak pemerintah, termasuk dari kalangan masyarakat perkebunan sendiri. Sayangnya pergolakan politik dan perang menyebabkan pengelolaan perkebunan secara nasional tidak pernah bisa dikerjakan dengan baik. Begitu juga pada saat upaya untuk mengambilalih, segera tidak saja harus menghadapi persoalan produksi tapi keberadaan pasar.

Oleh sebab itu, secara langsung dan nyata dampak dari proses pengambilalihan berbagai perkebunan di Jember belum bisa dirasakan oleh masyarakat perkebunan. Hanya saja secara semangat masyarakat perkebunan guna melibatkan diri dalam proses produksi diperkebunan merupakan hal yang positif. Begitu juga pada periode 1960-an semangat masyarakat perkebunan guna terlibat aktif dalam pengelolaan perkebunan semakin aktif. Sayangnya kekerasan politik dan politik kekerasan yang berlangsung pada tahun 1965-1966 menghentikan semangat tersebut. Hingga akhirnya keuntungan awal berupa semangat tersebut

telah berganti dengan stigmatisasi politik yang mengalienasi masyarakat perkebunan dari perkebunan.*)



DAFTAR PUSTAKA

ARSIP DAN BROSUR

ANRI. *Penerbit Sumber-sumber Sejarah. Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Pada Abad XX*. Jakarta 1981.

ANRI. *Sarekat Islam Lokal*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No.7, 1975.

ANRI. *Memori Sejarah Jabatan Jawa Timur dan Tanah Kerajaan*, Jakarta. 1978

Brosur, *Een jubileum in de tabak N.V. L.M.O.D*, (tidak diterbitkan). 1909.

Brosur, *Bij het 25 jarig jubileum van het Besoekisch Proefstation*. 1935.

Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. *Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950

Keputusan Kementrian Pertahanan No. 1063/PTM/1957: Penguasaan Perusahaan Perkebunan / Pertanian Milik Belanda.

LMOD 1859 – 1905 Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherland.

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6/1959: Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS)

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7/1959: Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31/1959: Nasionalisasi Perusahaan
Pertanian / Perkebunan Milik Belanda.

Partai Komunis Indonesia. *Tuntunan Untuk Bekerja Dikalangan Kaum Tani*.
Jakarta, 1955.

SURAT KABAR

Berita Organisasi SARBUPRI, no. 13 Djuni 1953
no. 16 Th-I, Djuli 1953
no. 22 Th ke-I Oktober 1953
no. 23 Th ke-I, Oktober 1953.

Indonesia Raya, 1957-1958

Harian Merdeka, tanggal 14 Pebruari 1959
25 Pebruari 1959

Pedoman, tanggal 2 Desember 1957
28 Desember 1957

Soeara Asia, tanggal 17 April 2603 (1943)

Suluh Indonesia, 1957-1958

Surabaya Post, tanggal 11 Desember 1957
4 Oktober 1958
16 Oktober 1958

Terompet Masyarakat, tanggal 30 November 1954
24 Desember 1955
18 Juni 1957

5 Desember 1958

Warta SARBRUPRI, no. I tahun ke IV Achir Maret 1953
 no. 6 tahun ke IV 15 Djuni 1953.
 no. 6 tahun ke IV 15 Djuni 1953
 no. 14-15 th. Ke IV Achir Nopember 1953.

MAJALAH

LINK, *Tanah dalam Kapitalisme*, Bulletin Lembaga Informasi Kemasyarakatan.
 No. 3 tahun 1988.

Hadiwinoto, Moh. Ambijah. Kedudukan Tembakau Indonesia di Pasaran Luar
 Negeri, dalam *Tembakau*, Tahun I, No. 4. 1963.

Sasaran tahun No. 7 tahun II. 1987

Varia Kebun Negara, Nomor Istimewa, 1982.

Warta Niaga dan Perusahaan, No. 9 th. 1, 13 Desember 1958

Rochiyat, Pipit. *Am I PKI or Non-PKI*, dalam *Indonesia*. No. 40 (Oktober). 1985

Samino. *Beberapa Catatan Tentang Sedjarah Penanaman Tembakau Tjerutu di
 Indonesia*, dalam *Tembakau*, tahun I, No. ½ Djanuari – Djuni. 1962.

Joewono. *Perkebunan Perlu Ikut Membangun Indonesia Bagian Timur Dengan
 Jiwa Dan Semangat Pengambilalihan 1957*. dalam *Sasaran* No. 24/IV.
 1990.

WAWANCARA

Abah Mohammad Yasir, tanggal 27 April 2001. Ia adalah salah seorang mantan Panitia Landreform Jember.

Bapak Ibrahim tanggal 13 september 2004. Pada Jaman Jepang orang ini menjadi sukarelawan, kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, ia bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Sejak tahun 1949 ia masuk di *onderneming* milik BTM.

Bapak Kusdari tanggal 10 Juni 2004. Pada akhir tahun 1950-an, ia menjadi aktifis Pelajar Islam Indonesia (PII).

Bapak Sahid, tanggal 31 mei dan 8 Juni 2004. Aktifis Pemuda Rakyat Jember.

Bapak Soedardi, tanggal 5 September 2000. Soedardi salah seorang bekas ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) cabang Jember. Organisasi ini yang berafiliasi kepada PNI.

Bapak Sulton Fajar, tanggal 25 Mei 2004. Ia adalah aktifis Masyumi, yang pernah menjadi juru kampanye untuk partai yang sama pada masa pemilu tahun 1955. Pada tahun 1960-an ia menjadi ketua SBII cabang Jember.

Bapak Sumargo, tanggal 1 dan 2 Juni 2004. Pada akhir tahun 1950-an ia menjadi tenaga administrasi perusahaan perkebunan Glantangan, Jember.

Bapak Supani, tanggal 6 September 2004. Mantan pegawai di BTM.

Bapak Syamsir Mochammad, tanggal 10 Maret 2002 dan 26 April 2005. Pada saat lahirnya SAKTI pada awal tahun 1950-an ia menjadi Sekjend pertama kali. Setelah SAKTI melakukan fusi dengan BTI, ia sempat menjadi Sekjend BTI hingga meletusnya tragedy kemanusiaan 1965-1966.

Jacob Vredenberg, tanggal 18 September 2004. Antara tahun 1951-1956, orang ini menjadi Kepala Urusan Penyelesaian Masalah Perburuan yang membawahi 12 perusahaan perkebunan di wilayah Jember dan Blitar.

KH. Mursyid, tanggal 2 Februari 2002. Ia adalah mantan ketua SBII Jember pada tahun 1950-an.

Serta 10 orang petani yang terlibat dalam aksi pengambilalihan perusahaan perkebunan yang tidak mau disebutkan namanya yang ada di Desa Jenggawah, Curah Nongko, Curah Wangkal, Tanggul, Garahan, Balung dan Rambipuji. Wawancara tersebut saya lakukan selama kurun bulan Maret-Juni 2004.

Hasil-hasil wawancara yang dilakukan oleh Lembaga Studi Desa untuk Petani (SD Inpers) Jember, yang selama tahun 2001-2002 memiliki program *oral history* yang bekerja sama dengan Jaringan Kerja Budaya (Jakarta), guna menggali informasi tentang kekerasan politik pada tahun 1965-1966 tidak diterbitkan.

Hasil-hasil wawancara yang dilakukan oleh Lembaga Studi Desa untuk Petani (SD Inpers) Jember, yang selama tahun 2002-2003 memiliki program *oral history* yang bekerja sama dengan Syarikat Indonesia dengan Support dari *The Asia Foundation* untuk menggali masalah kekerasan pada tahun 1950-1965 di pedesaan tidak diterbitkan.

BUKU

Abdullah, Soedarmanto Achmad. *Budidaya Tembakau*. Jakarta: CV Yasaguna. 1979.

- Abdullah, Taufik (ed). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1985.
- Abdurrachman, E.K.A.A. *Encyklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1991.
- Abercrombie, et.al. *Dictionary of Sociology*. London & New York, Penguin Books. 1984.
- Alfian, T. Ibrahim (ed.). *Dari Babad Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1987.
- Amin, S.M. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.
- Anderson, Ben. *Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang Dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan. 1988.
- Aprianto, Tri Chandra. *Kekerasan Dan Politik Ingatan, Paramiliter Banser Dalam Tragedi 1965-1966 di Jawa Timur*. Dalam Budi Susanto, S.J. (Editor), *Politik Dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino dan Kanisius. 2003, hlm 19-92.
- _____. *Kota dan Kapitalisme Perkebunan: Jember Dalam Perubahan Zaman 1900-1970*. Dalam Freek Colombijn (dkk). *Kota Lama Kota Baru; Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak dengan NIOD & Jurusan Sejarah UNAIR Surabaya, 2005.
- Bachriadi, Dianto. *Warisan Kolonial Yang Tidak Diselesaikan: Konflik Dan Pendudukan Tanah di Tapos Dan Badega, Jawa Barat*. Dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (ed.). *Berebut Tanah, Beberapa Kajian Berperspektif Kampus Dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.

- Bachriadi, Dianto dan Lucas, Anton. *Merampas tanah rakyat: kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001.
- Becford, George L. *Persistent Poverty Underdevelopment in Plantation Economies of The Third World*. Oxford University Press. London, Toronto (Sixth Printing), 1979.
- Both, Anne (ed.). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Broersma, R. *Besoeki Een Gewest in Opkomst*. Amsterdam: Scheltema & Holkemas Boekhandel, 1912.
- Breman, Jan C. *Menjinakkan Sang Kuli*. PT. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, Jakarta, 1997.
- Budiman, Arif. *Negara Dan Pembangunan, Studi Tentang Indonesia Dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991.
- Burke, Peter. *Sejarah Dan Teori Sosial*. (Mestika Zed, Penerjemah) Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Crouch, Harold. *Militer Dan Politik di Indonesia*. diterjemahkan oleh Th. Sumartana. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- De Jonge, Huub. *Pedagang Usahawan dan Perubahan di Pulau Madura*. Dalam Philip Querles van Uffort (ed). *Kepemimpinan dan Suplementasi Program*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Departemen Agitasi-propaganda CC PKI. *Kepalsuan Masyumi, Masyumi Menjelang Pemilihan Umum Dengan Pemalsuan Dan Kepalsuan*. Djakarta, 1955.

Departemen Pertanian Badan Khusus PNP. *Perkembangan 5 Tahun PN Perkebunan 1968-1972*. Jakarta, 1973.

DEPDIKBUD. *Geografi Budaya Daerah Jawa Timur*. Jakarta, 1988.

Dingley, S. *The Peasant Movement in Indonesia*. Berlin: R.L. Prager, 1925.

Djojohadikusumo, Sumitro. *Ekonomi pembangunan*. Djakarta: Pembangunan, 1957

Djojosoediro, Ir. Slamet. *Pertembakauan di Indonesia*. Surabaya: RESMI. 1976.

DS, Soegiri dan Edi Cahyono. *Gerakan Serikat Buruh, Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003.

Erman. *Ichdisar Undang-undang Keadaan Bahaja 1957*. Jakarta: Tantular, 1957.

Fauzi, Noer. *Petani Dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama antara Insist, KPA dengan Pustaka Pelajar, cetakan I, 1999.

_____, (Ed.). *Tanah Dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.

Feith, Herbert. *Dynamics of Guided Democracy*, dalam *Indonesia*, Ruth McVey (ed.), Yale University Press. 1963.

Feith, Herbert & Castle, Lance (ed.). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Furnifall, J.S. *Netherlands Indies: A Study of Plural Economy*. Cambridge: University Press, 1984.

- Gautama, Sudargo. *Masalah Agraria: Berikut Peraturan-peraturan Dan Contoh*. Bandung: Alumni, 1973.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Giddens, Antony. *Social Theory And Modern Sociology*, Stanford: Stanford University Press, 1987.
- Glassburnerr, Bruce (ed). *The Economy of Indonesia: Selected Reading*, Ithaca: Cornel University Press, 1971.
- Gordon, Alex. *Indonesian Plantation And The Post-Colonial Mode of Production*. Journal for Contemporary Asia, Vo. 12, No. 2. 1982.
- Hartana, I. *Budidaya Tembakau Cerutu I Masa Pra Panen*. Jember: Balai Penelitian Perkebunan Bogor sub Balai Penelitian Budidaya Jember, 1978.
- Hefner, Robert W. *Geger Tengger, Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Hill, Hal. *Investasi Asing Dan Industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Huizer, Gerit. *Peasant Mobilization And Land Reform in Indonesia*. Institute of Social Studies, The Hague-The Netherlands, 1972.
- Juliantara, Dadang dan Fauzi, Noer. *Menyatakan Keadilan Agraria, Manual Kursus Intensif Untuk Aktivis Gerakan Pembaruan Agraria*. Bandung: BPKPA. 2000

K. D, Thomas dan Panglaykim. *The Effect of Past Policies And President Suharto's Plans for The Future*. Australia: Committee for Economic Development of Australia, 1973.

Kahin, Audrey dan Kahin, George McT. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Kanumoyoso, Bondan. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Karim, Rusli. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Kartodirdjo, Sartono. *The Peasant's Revolt of Banten in 1888, Its Conditions, Course And Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. The Hague: 'sGravenhage, 1966.

_____. *Protest Movement in Rural Jawa Early Twentieth Centuries*. Singapore: Oxford University Press, 1973.

_____. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.

_____. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jilid II, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

_____. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Joko. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.

- Kurasawa, Aiko. *Mobilisasi Dan Kontrol*. Jakarta: Grasindo, 1993.
- Landsberger, Hendry dan Alexandrov, Yu. G. *Pergolakan Petani Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Laporan Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda. *Pengenalan Kasus Rakyat, Sebuah Pendekatan Pelaksanaan Agenda Landreform di Jawa Timur*. (tidak diterbitkan), 2000.
- Lev, Daniel. *The Transition to Guided Democracy: Indonesia Politics, 1957-1959*. Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1966.
- Linblad, J. Thomas (ed.). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Lloyd, Christopher. *The Structures of History*. London: Basil Blacwell, 1993.
- Lyon, Margo L. *Bases of Conflict in Rural Java*. Research Monograph No. 3 Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies, 1970.
- Mackie, J.A.C. *Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern*. Volume II, Djakarta: PT Pembangunan, 1957.
- _____. *Indonesia's Government Estate And Their Master*. Pacific Affairs 34, 1961.
- _____. *Problem of The Indonesian Inflation*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1967.
- _____. *The Changing Political Economy of An Export Industry: The Case of Jember's Tobacco Industry*. In Bulletin of Indonesian Economic Studies. Volume XXI, No. 1 April, 1985, hal 112-139

Malaka, Tan. *Gerpolek*, Surabaya: Jajasan Massa, 1984.

Marbun, B.N. *Pasaran Bersama Eropa Dan Indonesia Realita Dan Perkembangan Ekspor Indonesia ke Pasaran Bersama Eropa*. Jakarta: Erlangga, 1972.

Mas' oed, Mochtar. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.

Mortimer, Rex. *Class, Social Cleavage And Indonesian Communism*. dalam *Indonesia*, No. 8, October, 1969.

_____. *The Indonesian Communist Party And Land Reform 1959-1965*. Monash Papers on Southeast Asia, No. 1, 1972.

_____. *Indonesian Communism Under Soekarno, Ideology And Politics, 1959-1965*. Ithaca and London, Cornell University, 1974.

Mubyarto dkk. *Tanah Dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1992.

Mulyadi, Dison. *Agresi Militer Belanda di Bondowoso*, tidak diterbitkan, laporan penelitian UNEJ, 1996.

Muhaimin, Yahya. *Bisnis Dan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusi di Indonesia, Studi Sosio-Legal Alat Konstitusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Nawiyanto. *Transportasi Development in Besuki 1830-1970s*. (paper) conference the modern economic history of Indonesia, Yogyakarta: UGM, 26-28 Juli 1999.

_____. *Agriculture Development in A Frontier Region of Java: Besuki, 1870-Early 1990s*. Yogyakarta: Galang Press, 2003.

Oey Beng To. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, jilid I (1940-1958)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991.

Onghokham, *Residency of Madiun: Priyayi And Peasant In The Nineteenth Century*. Ph.D Thesis, Yale University. Ann Arbor, University Microfilm, 1987.

_____. *Petani Dan Kraton Dalam Politik Tradisional Jawa*. dalam M Amien Rais (ed). *Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1986.

_____. *Pajak Petani Dan Pemberontakan*. dalam WH Frederik dan Suri Suroto (ed.). *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 1991.

Palte, Jan G. L. *The Development of Java's Rural Uplands in Response to Population Growth: An Introduction Essays in Historical Perspective*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, Faculty of Geography, 1984.

Pelzer, Karl J. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.

Praptodihardjo, Singgih. *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952.

- Safioedin, H. *Sepintas Tentang Jenis Dan Macam Tanah Dalam Wilayah PTP XXVII Serta Perihal Pemilihan Tanah Untuk Tembakau Besuki*. Jember: Dinas Research PTP XXVII, 1973.
- Schunemann, Carl. *Bursa Tembakau di Bremen Hasil Usaha Bersama Indonesia-Djerman*. Diterbitkan dalam rangka pembukaan *Bremer Tabakborse* 11 Mei 1962.
- Simanjuntak, Marsillam. *Pandangan Negara Integralistik*. Cetakan II. Jakarta: Grafiti, 1997.
- Slamet, Ina E. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Bhratara, 1965.
- Soekarno. *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Fraksi PDI-Perjuangan, DPR-RI, 2010.
- Stoler, Ann Laura. *Kapitalisme Dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979*. Yogyakarta: KARSA, 2005.
- Sukendah. *Pengusahaan Tembakau Cerutu Besuki Na-oogst di Kebun Adjong-Gayasan PT Perkebunan XXVII Jember, Jawa Timur*. Tidak diterbitkan, laporan praktek lapangan kegiatan wajib profesi keahlian Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya IPB, 1987.
- Sundhaussen, Ulf. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Suroto, Suri. *Gerakan Buruh Dan Permasalahannya*. PRISMA No. 11, 1985.
- Surjomihardjo, Abdurrachaman. *Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Jalur Pranata Sosial*. dalam T. Ibrahim Alfian (ed.). *Dari Babad Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

- Sutter, John Orval. *Indonesianisasi: Politic in Chancing in Economy, 1940-1955*. Southeast Asia Program Data Paper No. 36. Ithaca, N.Y.: Cornell University, 1959.
- Tauchid, Mochammad. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bagian I, Jakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952.
- _____. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bagian II, Jakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952.
- Tennekes, J. *Bevolkingspreiding der Residentie Besoeki in 1930*. Amsterdam: TKNAG, 1963.
- Thee Kian Wei. *Plantation Agriculture And Export Growth: An Economic History of East Sumatra 1863-1942*. Jakarta: Leknas LIPI, 1977.
- _____. *Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia*. Jakarta: PMB-LIPI, 1996.
- Van Niel, Robert. *Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya*. dalam Anne Both (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Wirjomartono, A. Bagus P. *Seni Bangunan Dan Seni Bina Kota di Indonesia, Kajian Mengenai Konsep, Struktur dan Elemen Kota Sejak Peradaban Hindu, Budha, Islam Sampai Sekarang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Weber, Max. *The City*. New York: The Free Prees, 1958.

Weiringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya, 1999.

Wertheim, W.F. *Elite Perception And The Masses, The Indonesian Case*. Paper No. 36 Universiteit van Amsterdam, 1984.

_____. *Indonesian Society in Transition; a Study of Social Change*. The Hague: van Hoeve, 1959.

_____. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: INSITS Press, 2000.

Wolf, Eric R. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: YIIS dan CV. Rajawali, 1983.

ARTIKEL DAN MAKALAH

Adenan, Djasmari. *Analisa aspek produksi pada unit usaha tani tingkat petani*, dalam *Naskah Karya*, No. 7, Sidang Komisi Tehnis Perkebunan ke V Budidaya Tembakau di Sala. 1979.

Aprianto, Tri Chandra. *Banser Antara Perebutan Dalam Ketidakpastian Dan Kekerasan Politik 1965-1966*, Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi 15. 2003b.

_____, *Warisan Kolonial Yang Belum (Di)Selesai(kan): Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan di Jember*, Paper Workshop on the Economic Side of Decolonization, Yogyakarta. 2004 a.

_____, *Kota Dan Kapitalisme Perkebunan: Jember Dalam Perubahan Zaman 1900-1970*, Makalah yang dipresentasikan pada The First International Conference on Urban History, Surabaya. 2004 b.

Wiradi, Gunawan,

1991 *Masalah tanah dan kebijakan pertanahan dalam perspektif Pancasila: dengan acuan utama masalah transformasi sosial ekonomi pedesaan*, Makalah, *Pembangunan nasional jangka panjang kedua: masalah dan kebijakan dalam perspektif Pancasila*, Jakarta: Team BP 7, 12-14 Maret.

_____,
2000 *Perkebunan dalam wacana semangat pembaruan*, Makalah dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusar Kajian Agraria IPB, Bogor.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Arifin, Edy Burhan. *“Emas hijau” di Jember: Asal-usul, Pertumbuhan Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980*. (Tidak diterbitkan), Tesis, UGM. 1989.

De Jonge, Huub. *Juragan en Bandols; Tussenhandelaren op Het Einland Madura*. Nijmegens: Disertasi, 1984.

Tjandrawati, Emmanuella Keni. *Pasang Surut Perusahaan Tembakau Besuki Na-oogst di Jember, Jawa Timur 1957-1972*. Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 1993.

Tjiptoatmojo, FA. Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura. Yogyakarta:
Disertasi UGM, 1983.



Lampiran Dokumen

BARISAN - TANI - INDONESIA

MENTJAPAI KEMAKMOERAN DENGAN : I MODERNISASI PERTANI

Melaksanakan Rentjana.

PROGRAM 2 tahun Barisan Tani Indonesia ialah program oentok memboeat Negara makmoer. Program oentok memboeat rakjat kenjang.

Program 2 tahun poeoesan Kongres Djember, menentoekan pokok2 rentjana.

Rentjana itoe akan segera dilaksanakan.

Oentok melaksanakan rentjana itoe, dioeoesan dan dioeralkan lebih lengkap, sampai tagian2nja. Sekaj modernisasi pertanian telah selesai dengan rentjananja, jang sekarang kami sadjikan kepada Tjabang2 oentok segenap anggota, oeopaja segera dilaksanakan.

Rentjana itoe dioeoes dengan memperhitoengkan kemoengninan serta kekoetan jang ada. Apa

jang belum dapat dikerdjakan dioeoesan ini, dioeoesa boeat boeolan jang akan datang.

Kita selaloe tahoe membedakan antara pengharapan dengan kemoengninan, antara sembojan dengan laksana. Terlaksanaja program ini memerioekan kesanggopian dan ketjakaan. Sanggoep beloean berarti tjakap. Tetapi tjakap beloean dioeoesa berarti sanggoep.

Semangat jang penoeh akan mendjadi pendorong kepada pengetahuan jang ada oentok boeat. Pengetahoean sadja tidak bisa berboeat apa2 kalaj tidak didorong oleh semangat.

Inilah sebabnja, maka dalam melaksanakan pekerdjaan ini tidak boleh berpisahan antara ahli2 per-

tanian dan organisasi rakjat, jang mereopakan padoean ota k dan s e m a n g a t jang akan mereopakan tenaga dan perboeatan.

Oentok menjlapkan tenaga jang mengardjakan rentjana, kader lebih doeloe displakan dengan didikan sekedar tjokoep.

Rentjana haroes mendjadi laksana.

AN. DEWAN PIMPINAN POESAT
BARISAN TANI INDONESIA:

MOCH. TAUCHID.

Jogjakarta, Maret 1947.

Rentjana jang mengenai Pengardjan, Sosial-Ekonomi (Bank-Loembong-Koperasi) menjoesoel.

PROGRAM DOEA - TAHOEN. Barisan Tani Indonesia

SEKSI MODERNISASI PERTANIAN.

DASAR BEKERDJA.

1. Oentok mendjalankan Program doea tahoen B. T. I. akan di boeat rentjana beberapa kali jang bisa dan masih moengkin dikerdjakan berboeoenj dengan soeasana ekonomi dan politik. Bertrapa soal seperti pemakalan traktor, alat dari loeat negeri dsj, tempaksa beloean dimadjoekan, walaupun selaloe akan mendjadi perhatian dan akan dimadjoekan djika saatnja soedah baik.

2. Rentjana pertama ini kami sandarkan kepada maksoed menjoesoen podoeksi pertanian rakjat menpoerost atoeoran jang terbe oentok kepentingan Negara dengan djalan lambat taoen mengembalikan dan mempertingge tenaga prodoektif Rakjat Tani,

jang sekian lamanja dihantjoerkan oeteh si pendjadjah.

3. Maka dari itoe sjarat oentok bisanja, melaksanakan program doea tahoen ini disampingnja desakan kepada Pemerintah ialah:

a. mendapatkan pertimbangan tjita2 dengan kekoetan kita sendiri dengan mengingat adanya bahan2 dan tenaga dalam masyarakat, teroetama masyarakat Tani.

b. bekerdja bersama2 dengan Pemerintah terdetaama djawatan2 jang berkepetingan, sebagai dasar berhoeboeng dengan koerangnja tenaga ahli, poen oentok memeneohi panggilan perdoeangan sekarang ini, la-

lah Pemerintah dan Rakjat Setoe.

c. dengan berdjalan, artinja samtbl mendjalankan program terseboet menjempoeornakan, memperdalam, mendjadi memperkoet organisasi Tani, teroetama jang ada di desa2, oleh karena inilah jang sebenarnya mendjadi sendi perdoeangan Tani oentok mentjapai maksoed program doea tahoen terseboet.

d. pembentoeakan dan pendidikan kader (kadervorming) hendaknja didjalankan dengan saksmma dan teratoer, oleh karena kader2 inilah jang bisa mendjalamin terlaksanaja program terseboet.

- 1 -

RENTJANA PERTAMA.

Modernisasi Pertanian.

Oentoeok dikerdjakan oleh Barisan Tani.

I. Sebagai akibat desakan kepada Pemerintah oentoeok menetapkan loeas dan djenis tanaman yang sesuai dengan tanah2 yang soedah diselidiki dan dikenal, B. T. I. menjadipkan organisasinya oentoeok toeroet serta dan menjadipkan penanaman djenis2 tanaman terseboet yang memoenjai maksode mendapatkan hasil setinggi2nya boeat tiap2 ha tanah; dengan djalan:

1. B. T. I. dalam taheon 1947 ini moelal beroesaha menjelenggarakan keboen bibit desa (sawah) dan tegal ditjapadesa oentoeok menjedipkan keperloean bibit dan djenis2 tanaman yang soedah ditentoeakan dan pilihan (padi dan polowidjo), seloes koerang lebih 3pCt. dari loeasnya bakoe (pokok) tanah dikedes.
2. Beroesaha mengadatkan keboen bibit di desa yang tjoekeop besar dan meneroet keaschilan pertanian.
3. Berichter soepaja dalam moesim 1947/48 paling sedikit 40 pCt. dari loeasnya sawah soedah ditamsi dengan djenis2 padi yang di tetapkan. Dalam moesim 1948/49 ml. 60pCt.
4. Beroesaha menjedipkan bibit2 yang diboeotekkan oentoeok renjansa terseboet dengan djalan:
 - a. mengatoer agar soepaja anggauta2 B. T. I. menjimpan sendiri bibit2 terseboet.
 - b. membeli dan menjedipkan bibit2 dari djenis2 tanaman terseboet, dimoelal dengan panenan taheon 1947 ini.
5. B. T. I. mengadatkan pertjabaan dikedes2 soepaja anggautajnja bisa mengkoeti dan memiliki faedahnja penggantian djenis2 baroe terseboet, atau faedahnja memakai bibit pilihan (seleksi).
6. B. T. I. bekerdja toesama-sama dengan Djawatan Pertanian beroesaha soepaja tiap2 ranting (desa) memoenjai bebrapa achil bibit (seleksi) yang dapat didikan praktis. Dalam hal ini Djawatan Pertanian memberi pimpinan meneroet keaschilannja.
7. Dalam taheon 1948 beroesaha mengadatkan keboen bibit Kaonderan, yang dipakai sebagai indoekrnja keboen bibit desa oentoeok penjajaran bibit yang moerni, yang diterima dari keboen2 bibit Pemerintah.
8. Oesaha ini seharoesnja diselenggarakan toesama2 dengan Djawatan Pertanian Rakjat di-

masing-masing daerah. Djawatan inilah jg. dapat menentoeakan loeas dan djenis2 tanaman yang tjotjek dengan keadaan tanah dan iklim didaerah2.

9. Oesang oentoeok pembeli bibit2 yang diperloetkan bisa didapat dari Djawatan Pertanian Rakjat, dengan atoeran yang ditetapkan toesama, meneroet keadaan di masing2 daerah.

II. Pemakaian Poepoek.

1. Poepoek natuurfosfaat.

B. T. I. mengandjoerkan kepada anggautajnja tentang pemakaian poepoek natuurfosfaat dari Gombong (Al fosfaat) jg. baik oentoeok tanah mergel di Bodjonegoro, Soerabaya dan dari Tjerebon (Ca-fosfaat) yang baik oentoeok tanah lateriet di Priangan, Djakarta. Sistem pembajaran (pengambilan kredit) diselenggarakan toesama2 dengan Djawatan Pertanian Rakjat dan Bank Rakjat dimasing2 daerah. Perimbangan antara harga poepoek dan biaya pengangkoean dengan kenaikan hasil haroes ditjapal.

2. Poepoek kandang.

Menperloes pemakaian poepoek kandang. B.T.I. diranting2 dibantoe oleh P. B. T. I. beroesaha soepaja poepoek kandang dipelihara (menjimpan dan pemakaian) meneroet petoendjoek dari para achil Djawatan Perchewanan dan Djawatan Pertanian).

3. Poepoek kompos.

B. T. I. di desa2 bekerdja toesama2 dengan Djawatan Pertanian Rakjat mengadatkan pertjabaan2 oentoeok mempergoerakan kompos sebagai poepoek (alah asal dari kotoran2 pekarangan, keboen, djerandi, kotoran pasar, ds.).

4. Poepoek hidjau.

Ojeh karena poepoek boetan pada saat ini tidak ada maka poepoek hidjau menjadi penting sekali. B. T. I. beroesaha soepaja pemakaian poepoek ini diperloes antara anggautajnja. Toesama2 dengan Djawatan Pertanian Rakjat hendaknja diselenggarakan keboen2 bibit2 poepoek hidjau yang tjotjek dengan daerahnja masing2.

III. Pembantasan hama.

B.T.I. toesama2 dengan Djawatan Pertanian Rakjat menjadipkan pembantasan hama dan ge-

njakik, selain dengan djalan2 yang baroe dan modern, djoega dengan djalan apaoen djoega yang pada saat ini dianggap perloe.

1. Tikoes.

Selain dengan djalan yang soedah lazim dipakai (gropjokan dsb.) djoega menjedipkan pembantasan dengan obat bakteritoxin dari prof. Djaoedja, dimana dianggap perloe dan moengkin, berboeong dengan adanya obat.

2. Menanam padi setjara teratoer (culturregeling), oepamanja penanaman padi gadoe soepaja dikerdjakan seljepat moengkin soedah panen padi rendengan, berboeong dengan biologinja tikoes. Satoe sama lain hendaknja dapat pimpinan dari Djawatan Pertanian Rakjat.

2. Soendep dari padi.

Didasarkan kepada biologie dari oelat ini, penanaman padi didaerah2 yang banjir terdapat hama ini (oemoenja sepandjang oetara) soepaja teratoer penanamannja, hendaknja dapat pimpinan dari Djawatan2 jg berkepentingan (Pertanian Rakjat, Pengairan, Balai Penjedidikan).

3. Lain-lain hama dan penjakik. Meneroet keadaan daerah B. T. I. soepaja berboeongan dengan Djaw. Pertanian Rakjat.

IV. Perkakas dan lain-lain.

1. Penanaman padi setjara teratoer (larikan) dan menjingki padi dengan perkakas landak.

2. Lain2 perkakas yang djandjoerkan oleh Djawatan Pertanian, berboeong dengan tjara penanaman, pemeliharaan, penjimpanan gigoedang atau lain2 meneroet keadaan daerah.

V. Penerangan dan lain-lain.

Soepaja oesaha2 terseboet dan lain2 oesaha oentoeok memperbaiki hasil produksi bisa lanjut djalannja soepaja bisa didapatkan penerangan dan perboeongan, dan dimana perloe pimpinan dari Djawatan Pertanian Rakjat atau dari lain2 Djawatan, hendaknja:

1. Tiap2 tjabang B. T. I. (Kabupaten) paling sedikit tiap2 3 soelan sekali mengadatkan permoesjawatan dengan Djawatan Pertanian Rakjat oentoeok mendapat penerangan seljoe-koepnja dan merentjapkan

- pekerjaan yang akan dijalankan. Didalam rapat ini yang diundang semua pengawas Anak Tjabung dan P.B.T.I.
- 2. Tiap2 boelan (kelak bisa tiap 3 bln.) tiap2 Anak Tjab. (Kanderan) dan P.B.T.I. soepaja dioega mengadakan permoesjajaran dengan pegawai Djaw. Pertanian Rakjat. Tiap2 ranting (desa) soepaja mengirimkan beberapa octoesan kerapat ini.
- 3. Dimana dianggap perlu dioega diadakan permoesjajaran dengan pegawai dari Djawatan Pertanian atau lain Djawatan yang diperloakkan; yang dibicarakan ialah pekerjaan2 yang njata dan penerangan2 yang berhoebongan dengan hal2 tersebut.
- 4. Tiap2 Tjabung B. T. I. dengan jalan demikian akan bisa menunjukan dimana dan bagaimana anggautannya (Ranting) dapat penerangan yang teratoer, sedapat moengkin pendidikan yang teratoer (koer-soes).

TJONTO

Penjelenggaraan keboen bibit desa.

- 1. Keboen2 bibit desa yang diawasi oleh B. T. I. dan P. B. T. I. technis dapat pimpinan dari Djaw. Pertanian Rakjat. Keboen bibit ini sebaiknya meroepakan satoe, paling banjak doea blok, loeasnja koerang lebih 3 pCt. dari loea pokok tanah didesa dan moengkin mendjadi kepoenjaannya beberapa orang. Oleh karena keboen bibit itoe dikerdjakan sendiri oleh orang2 yang memoenjai tanah, maka seharoesnja petani yang akan djadikn soekang bibit itoe diselidiki dan dipilih betoe2. Lebih baik dioesahkan djika moengkin mendapatkan tanah yg 100 pCt. dapat diselenggarakan sendiri oleh B.T.I. dan E.B. T.I. agar soepaja tidak berganting kepada orang lain.
- 2. Selama B. T. I. didesa beoem mempoenjai pengalaman, sebaiknya Djaw. Pertanian Rakjat memberi pimpinan technis tentang pemilihan (seleksi ds.) kalau perloe dioega menofong mendapatkan perlengkapannya, seperti alat2 pertanian, raboek, bantak pocpocok hidjau ds., sedang organisasinja, pemeliharaan bibit itoe dipegang oleh P. B.T.I.
- 3. Disampoinja keboen bibit desa, dioesahkan dioega adanja loembeng bibit, boeat pertama kali boleh sederhana dengan menjewa roemah atau goedang, sebaiknya mendjadi satoe organisasi dengan loembeng desa, akan tetapi yang paling sedikit memoeohi gjarat2 oentoe2 menjampun berda menoeoret ke achlan pertanian. Ini berarti boeat pertama kali mentoeokannya tempat loembeng bibit ini B. T. I. hendaknya bersama2 dengan Djaw. Pertanian Rakjat.
- 4. Bibit yang baik (moerni) yang akan ditanam di keboen bibit desa dan yang diterima dari keboen bibit Pemerintah, terlebih doeloe diserahkan digoedang B. T.I. desa dengan setjara dibeli atau piandjam (crediet dari Pemerintah). Kalau soedah sampai waktoenja B. T. I. memberikan bibit itoe kepada keboen bibit desa oentoe2 ditanam.
- 5. Apabila bibit yang ditanam di keboen bibit desa itoe soedah menghasilkan, maka hasil ini yang beroepa bibit diserahkan kepada goedang B.T.I. dengan setjara ditoekar dengan padi atau palawidja oentoe2 makana, sehingga petani yang mempoenjai keboen bibit tidak menangoeng keroejian. Djika moengkin dibeli.
- 6. Bibit digoedang B.T.I. yang asalnya dari keboen bibit desa, disimpan dan di pelihara digoedang dan kemoedian disampikan kepada petani didesa2 oempama dengan setjara dipinjarkan tiap2 kwintal (kelak kembali 1.25 kwintal. Satoe sama lain menoeoret tjara keadaan di daerahnja masing2.
- 7. Soedah barang tentoe Pemerintah tidak akan dapat sekali goes memberi bibit yang moerni keseneoa desa, maka dari itoe boeat pertama kali yang dipentjangan ialah agar B.T.I. desa dapat memiliki djalanja sistem penjelenggaraan bibit yang baik dan pemilihannya. Djika bibit moerni beoem mentjoekepi, bibit2 daerah yang soedah dikenal baik dan tinggi hasilnja bisa diperbanjak.
- 8. Sewaktoe-waktoe bibit yang distarkan dibahroepi oleh Djaw. Pertanian Rakjat.
- 9. Hal tersebut dapat digambar sebagai berikoet: (mengenai bibit padi).



Pendidikan dan pengetahuan kaodem Tani,

1. Oentoek menjoesoen kembali dan memperlocas pendidikan dan pengetahuan kaodem Tani, ada baiknja djika kita mendjau apa jang soedah dikerdjakan dan ditjapai sampai sekarang.
 - a. **Bizaman Belanda pendidikan ini ialah:**
 - a. Pendidikan pemoea Tani pada "Landboubedrijfschool", ada 4 sekolah di Tjandjoengsari (Soemeding), Tegakondo (Soerakarta), Wjrdjilan (Jogjakarta), Wonorejo (Kediri). Lamanja peladjaran 2 taheon. Tiap2 taheon mengelocarkan sedjoemlah 50 a 60 moerid. Makoed soemoela dari sekolah ini soepaja anak2 jang tamat mempraktekkan pengetahoennja diperoesahan pertaniannja masing2. Dalam praktek moeridnja sebagian besar mendjadi pegawai.
 - b. Pendidikan petani pemoea dan toes, sebagian besar tamatan dari sekolah desa (Sekolah Pertama) atau vervolgschool, denkan djalan koersoes desa. Lamanja-peladjaran di Djawa Barat 1 taheon, di Djawa Tengah dan Djawa Timoer 2 taheon. Tiap2 minggoe diberi peladjaran 1 a 2 kali selama 3 a 4 djam. Dalam taheon 1936 djoeulah koersoes desa ada 178, dengan lk. 3.800 peladjar, tiap2 taheon moerid jang tamat lk. 1.800 a 2.000. Jang memberi peladjaran dalam pnyampnja ialah goeroe2 Sek. Pertama jang dapat peladjaran tambahan dalam koersoes2 jang disadkan meneroet keboetoeahnja koersoes Tani desa. Dalam 1936 ada 8 goeroe koersoes, 4 di Djawa Barat, 4 di Djawa Timoer. Lamanja peladjaran 2 taheon, bisanja tiap2 minggoe diberi peladjaran 2 djam. Jang memberi peladjaran ialah Adj. Land. consultant.
 - c. **Klas pertanian pada Sekolah Rakjat.** Makoed pendidikan ini ialah mempengerohi pendidikan Rakjat kedjoeroesan pertanian, dengan menambah Sekolah Rakjat dengan klas 6 (klas Tani). Seleroeh Indonesia taheon 1936 ada 109 Sek. Rakjat jang mempoedjai klas Tani, di Djawa 74, (Djawa Barat 27, Djawa Tengah 11, Djawa Timoer 23, Daerah Jogja-Serakarta 13). Jang memberi peladjaran pada klas ini pada grinsunja ialah moeroe2 tamatan Normalschool jang dapat didikan lagi di Opleidingsbedrijf landbouwoederwizer (Kots Batoe, Tegakondo, Pantjasan) sampai taheon 1937 jang soedah dapat didikan seroena ini ada 148 moeroe. Klas tambahan pada Sekolah Rakjat ini djadi tidak langsoeng mengenai kaodem Tani dengan peroesahaannja didesa.
 - d. **Di Zaman Djapang.** Koersoes2 didesa tjada diperhatikan dan praktis hampir soemoes dihapoeskan. Landboubedrijfschool dihapoeskan atau bergama-sama dengan cultuurschool mendjelma mendjadi No gakkou, ialah sekolah. Tani menengah jang diadakan hampir ditjap2 Syuu (Karesidenan). Makoed sekolah ini ialah oentoek mendapatkan tjokoep pegawai rendah jang akan loeroet ser-ta dalam oesahanja menafikan hasil boemi. Sekolah2 ini sekarang masih kita terima sebagai warisan. Selama ke Djapang mengadakan latihan pertanian di Basaringgoe jang kempoedian dipindahkan ke Bogor, dari pemoea2 asal dari seleroeh Djawa. Banjaknja ± 150 pemoea, lamanja 8 boelan. Latihan ini boleh dianggap sebagai propaganda. Hasil tidak ada.
 2. **Kaodem Tani sampai sekarang meneroet oeralan djatas hannya dapat didikan jang langsoeng dari Landboubedrijfschool dan dari Koersoes desa jg sekarang soedah tidak ada.** Pendidikan ini didasarkan kepada pengambilan moerid, jang pemilihannja individuel, dan jang kelak diharap mengerdjakan didalam berdirinja sendiri segala sesoetoe jang dipeladjarannja. Jg. tamat tiap2 taheon 2.000 moerid, didalam negara jang mempoenjai lk. 9.000.000 keloeraga jang mempoenjai tanah (di Djawa sadja).
 3. **Dasar pendidikan sekarang.** Diatas njata bahwa pendidikan jang dijalankan dzaman Belanda bersifat individuol dan sangat sedikit hasilnja. melihat keboetoeahnja kaodem Tani seleroehnja jang beritoe besar dan loes. Tidak perloe dipersoalkan apa sebabnja. Pada prinsipnja pendidikan kepada kaodem Tani disini haroes dijalankan dengan agak besar-besaran soepaja dapat mempengerohi dengan njata hasil pertanian seleroehnja. Tjita2 sebagai terseboet meminta tenaga ahli dan blaja jang tidak sedikit dan meminta waktoe jang lama. Djika dikerjakan dengan sistim jang dijalankan pada zaman Belanda terseboet. Perimbangan antara tjita2 memberi pendidikan seleroehnja kepada kaodem Tani dengan seleroeh moeridn mendapatkan hasil depesah adanja kekoentan kita sendiri (kekoentan dan adanja tenaga ahli), dan menjoesoekan keinsinan ini den. wazjilan zaman pada saat sekarang (ialah masa perdjoeangan menesakkan Negara) dapat ter-tjapai djika:
 - a. Pendidikan ini tidak didasarkan setjara pengambilan moerid individuol, jang dilegaskan sendiri2 lagi ditengah2 masyarakat, akan tetapi didasarkan kepada masyarakat Desa, jang mempoenjai sesoetoe ikatan jiwa. Didalam praktiknya pendidikan ini hendaknja diberikan kepada anggota2 perserikatan Tani jang ada didalam desa lioe, jang mempoenjai toedjoean jang tertentoe. Peladjaran2 disoesoalkan dengan keboetoeahnja Petani dan desa (batja perserikatan) jang mempoenjai renjisan pekerdjisan jang pasti. Dengan demikian didalam mengerdjakan peladjaran2 jang didapatkan, bekas moerid2 seteroesnja masih dapat pimpinan dan pengawasan dari organisasi dan desa.
 - b. Pada zaman perdjoeangan selurang ini masyarakat memboetoeokkan hasil dari boemi selinggijnja dan pemakalan jg. teratoer. Sjarat oentoek perloesan pendidikan dan permintan hasil sebanjak2nja ini dapat digaboentokan djika pendidikan ini dikerdjakan den tidak beritoe tinggi tentang teorile pengetahoean pertanian, akan tetapi disampingnja lioe penerangan teorile setjara praktis dengan langsoeng dikerdjakan didesa2. dimasing2 peroesahaan pertaniannja moerid masing2, sendiri2 atau ber-sama-sama.
 - c. Dgn djalan demikian dalam hakikatnja beloeulah berarti pendidikan jg diberikan akan tetapi penerangan dan pimpinan berkerja didesa jang teratoer. Akan tetapi, djika disamping ini ada pendidikan kader Tani jang sistematis, diantara mana nanti banjak jang bisa dipakai sebagai ereroe; lioe ini berarti moerid sekarang soedah meletakkan dasar oentoek mengadakan pendidikan kelak jang setjara loes dan praktis. Pendidikan tidak akan diberi kepada Petani individuol, akan tetapi kepada anggota2 perserikatan Tani dalam desa, jang mempoenjai toedjoean pimpinan dan pengawasan jang tentoe.
 4. **Werkprogram B.T.I.**
 - a. Tiap2 Ranting dari B.T.I. dan P. B. T. I. artnja didesa-desa, hendaknja dit-bentoeok soetoe k e r n dari kalangan anggotanja (sesoetoe pilihan, diadi sesoetoe kehormatn) P. T. I. 20 a 30 angwuts. P. B. T. I. 10 a 15 pemoea. Kern ini bergama-sama melonori segala djedjajnja organisasi, agar

- seopaja dapat dikooeti oleh anggota2 seloeroehnja.
- b. Tiap2 boelan (kelak bisa tiap2 3 boelan) tiap2 Anak Tjabaang (Kaonderan) B.T.I. dan P. B. T. I. hendaknya mengadakan permoesjawaratan dengan oetoesan2 dari ranting2 B. T. I. dan P. B. T. I. Dsini dibikin dan direntjanakan werkprogram boeat boelan jang akan datang sedang pegawai2 dari Djawatan2 jang berkepentingan, teroetama pertanian diminta setjara teratoer memberi penerangan dan seteroesnja memberi pimpinan didalam mengerdjakan rentjana. Diperingatkan bahwa permoesjawaratan ini hendaknya hanya dipergoenakan oentoek kepenging B. T. I. sadja, arintja mendjalankan rentjana2 tahoen meroeroet instruksi Poesat dan memberi ideologi organisasi seperloenja dan djalannja organisasi.
 - c. Tiap2 boelan sesoedahnja permoesjawaratan dikaonderan, dimana perloe didesa djoega diadakan permoesjawaratan dengan anggota2nja (anggota2 dari kern

diharoekkan hadir), dimana sebisa-bisa pegawai-pegawai djawatan member; penerangan dan pimpinan. Permoesjawaratan ini hendaknya didjalankan setjara amikal, oempamanja dengan pertemoan malam, pertemoan selapanan dll, djika perloe diadakan sekejar hiboeran jang sederhana.

- d. Permoesjawaratan2 terseboet mempoenjat 2 anaksoed:
 - a. Oentoek mendjalankan rentjana.
 - b. Meletakkan dasar oentoek mengadakan pendidikan pertanian kelak (bahja: tahoen depa2).
 Maka dari itoe Pengoeroes dan Pegawai2 Djawatan dibantoe dengan kader2 selamnja oemperbahkan djalannja rentjana, dipraktok djoega bewust menjelidki kembanginan member; pendidikan jang teratoer. Teroetama oentoek mendjawaab pertanjaan dimana (desa) dan bagaimana dalam tahoen 1948 jad, pendidikan ini dapat diknjelak. Soedah barang tentoe djika dalam tahoen ini

dimana soedah didapatkan dasar2 dan sjarat sjaratnja oentoek mengadakan pendidikan, hendaknya hal ini ditundjoekan kepada Poesat seopaja dapat dioeroes.

- c. Boleh diharap bahwa rentjana terseboet sebagian besar hanya meroepakan rentjana sadja, djika tiada diadakan pendorong jang beoepa:
 1. Kader2 jang berideologie.
 2. Pemoeada2 Tani jg berdjawa.
 3. Rentjana pekerdjaan jg concreet.
 4. Selaloe ada pimpinan dan pengawasan dari Poesat dan Djawatan, dan penghargaan.
 5. Hiboeran seperloenja.
 Sjarat2 ini hendaknya mendjadi perhatian dan meroepakan bahan2 didalam menjoesoen tjara bekerdja. Disamping ini kaderyoering jang teratoer hendaknya diperdjoeangkan dari kalangan mana kemoedian hari haroes bisa d'dapatkan goeroe-goeroe jang dioetoeuhkan oentoek pendidikan didesa2 jang kuni maksoed.

WORKING COMMITTEE
SEKSI PERTANTAN.

KADER TANI - DARI B. T. I.

Pembentoean dan Pendidikannya.

1. Kader ialah mereka, snggautaja2 pilihan dari soetoe organisasi jang mempoenjat dan memegang tegoh soetoe ideologie dan sanggoep memperdjangkan dengan penoeh tanggoeng djawab, keberanian dan keoelatan. Kader ini meroepakan tjadangan pemimpin-pemimpin organisasi dan mendjadi motornja perdjoeangan.
- Kader Tani jang kita boetoehkan ialah mereka jang selain mempoenjat semangat perdjoeangan, djoega asal dan bidoeop dengah-tengah masyarakat Tani, bisa bergoeol dan mengensal rakjat Tani, dan ditjintai oleh teman-temannya.
2. Maka dari itoe mengingat keperluan, kita memboetoehkan adanya kader2 Tani di:
 1. Desa-desa.
 2. Kaonderan (Ketjamatan).
 3. Kaboepaten.
 Adanja kader2 didesa2 ialah sjarat jang oertama, akan tetapi mengingat keadaan didesa sekarang dan keoengan, keinginan ini boeat permoealaan terpaksa dilepaskan oetoe.
- Kader di Ketjamatan atau Kaonderan jang langsoeng menghadapi masyarakat desa jang lebih leas, meroenakan pada saat ini soetoe pendorong

jang paling bawah dan paling penting arintja, oleh karena berhadapan langsoeng dengan segala gerak-geriknya organisasi didesa. Maka dari itoe pembentoean dan pendidikan kader kaonderan ini haroes dapat perhatian jang pertama.

Kader2 di Kaboepaten tidak koerang pentingnja, oleh karena mereka jang dapat koordineren segala sesoetoe, dan sekaja mendjadi penghoebeng dengan Poesat, memimpin dan mengawasawasi gerak-geriknya teman-temannya diketjamatan; arintja djoega mengadakan pilihan dan seleksi dikalangan kader, poen oentoek dapat menghargai dan menempatkan tenaga2 jang kelihatan djasanja.

Oleh karena dari masyarakat di hooe kota Kaboepaten oemoenja boeat permoealaan bisa didapatkan tenaga oentoek memperdjoeangkan tjita2 organisasi, pendidikan kader ini tidak begitoe mendesak seperti keperluan dikaonderan, walaupoen oentoek antjarnja organisasi pendidikan ini haroes diadakan djoega.

3. Kewadajiban jang kita limpahkan kepada poendaknja kader2 ini tidak sedikit; mereka tidak hanya mendjadi pendorong, akan tetapi

teroetama pada saat permoealaan ini mendjadi pelopor dan perintah djalan oentoek menjempoeernakan organisasi, bahkan dibeberapa daerah akan mendjadi pelopor oentoek membangoenkan organisasi dari moela2, dan mendapatkan koentji jang bisa memboekapintoe, memberi dorongan pertama oentoek lantjarnya djalan organisasi. Masyarakat desa pada masa sekarang ini masih didalam keadaan sedemikian, bahwa soetoe rentjana pekerdjaan jang dipandang sepintas laloe seharoesnja langsoeng dikerdjakan, oemoenja masih haroes dipakal ajat oentoek mempersatoeakan tenaga2, memperhoebengkan dan menjoesoen kekoetatan dalam masyarakat. Dengan pendek kata sesela sesoetoe masih mendjadi bahan-bahan dari sjarat oentoek menjoesoen dan memperkoet organisasi (didalam praktek kader2 ini mendjadi pendorong dan penghoebeng antara B. T. I., P. B. T. I. Djawatan2 dan lain2 badan dan meloeri segala pekerdjaan).

4. Dalam keadaan demikian, kader2 kita jang ada di paling bawah (batja; Kaonderan) djika kita menghendaki hasil jang agak memosakan tidak boleh terus djilaporkan sadja akan tetapi ha-

roes selaloe dapat pujian dan bantuan, lahir dan batin, oleh karena vorminjanya kader tidak selesal dengan seluruh latihan, bahkan baroe dimodel. Dengan pemberian instruksi dari Poesat sadja kiranya tidak tjoekoeop; berboeboengan djiwa dengan organisasi dibawah, dimana mereka berdjoesang ditengahnja hendaknja haroes djijapai dan boeat pertama kali mendjadi toedjoesan di dalam kadervorming. Kader dan masyarakat yang ada dibawah haroes saling isi-mengisi, mengadakan latihan teroes-meneroes. Soedah tanjak terdjadi bahwa kader2 disoetoe daerah pada soetoe waktu menganggoer oleh karena tidak mengelakoei apa yang dikerdjakan. Diantarannya disebabkan oleh karena pemimpinnja jg. dibotoetokan soetoe sama jam tidak ada berboeboengan. Maka dari itoe taktis-psychologis pendidikan dan vorming kader2 Kaonderan ini boeat permoealan sepekan djajalakan oleh tenaga2 di daerah masing2 yang pada saat ini djoega mengambil kewadjaan teroes menjoesoen masyarakat Tani fisitoe. Goeroe dengan haroes saling mengerti, kenal mengenali, saling mempertjajai dan menghargai. Artinja pendidikan kader kaonderan dikerdjakan dimasing2 kaboepaten oleh tenaga2 jg. ada disitoe, yang dgn demikian bisa selaloe memperhatikan atas vorming selandjoetnja, artinja menaman tanggoeng djawab bersama atas lantjarnya djalan pembangoenan masyarakat Tani didesa-desa. Soedah barang tentoe djika soetoe daerah bisa djidapatkan tjalon kader2 Kaonderan yang ontwikelingsapellnja lebih tinggi, pendidikan ini dari seloeroeh Karejdenan bisa dipoesatkan di soetoe tempat.

5. Di lihat dari soedoeit teknis, pendidikan kader Tani inpoen sebaiknya diadakan dimasing2 Kaboepaten (Tjabaeng) oleh karena pendidikan selama 3 boelan boeat memperdalam pengetahuan pertanian beloeem berarti dan pelajaran terpaksa haroes ditoejdjoe kan kepada soal2 yang praktis dan bisa langsung dikerdjakan di daerah masing2, sedang matjam pertanian di masing2 daerah ada bertinaen.

Oentoek kepentingan uniformiteit dan ideologie hendaknja nanti (tahoen tiepan) diadakan pendidikan di Poesat, djika dibawah soedah ada keltjahan dasarnya. Kader di Kaboepaten, oleh karena peitnja lebih tinggi, pendidikan bisa dan haroes dipoesatkan dan dipimpin oleh Poesat Organisasi (Jogja).

Kadervorming setjara ini pada permoealan beloeem selesal dan haroes dioelanei dan kedoea kalinja ini seloeroehnja bisa dipoesatkan. Menoeeroet pendapat kami tjara ini praktis memperdalam baroes

dapat hatih yang lebih pjata terhadap terlaksananya program djoega taheen dari B.T.I., teroetama yang mengenal modernisasi pertanian.

Pendidikan tjalon kader Kaonderan djajalakan dalam asrama dengan paking banjak 30 a 40 moerid. Sebaiknja djangan lebih, oleh karena pendidikan ini tidak meeroepakan sekolahan yang hanya mangisi pengetahuan sadja, tetapi mengenai soal mengaji djiwa orang. Goeroe dan moerid haroes saling mengenal dengan hati terboeka.

Walaupun boeat pertama kali tjara mendidik ini beloeem bisa dipersoalkan, kelak hendaknja hal ini dapat perhatian soepoehnja.

8. Pengambilan tjalon2 kader dari Kaonderan ini hendaknja didasarkan kepada sjarat2 seperti dibawah:

- Tamat dari Sekolah Rakjat.
- Oemoer 18 - 25 taheen.
- Berbadan sebat.
- Berhasrat oentoek membela rakjat Tani (ideologi Tani), bisa keltjahan dalam gerakan Pemoeada Tani.
- Beloeem mempoenjai tanggoeng banjak (anaknja) orang mampoe oempamanja) atau sendiri tjoekoeop.
- Ditjimat temanznja.
- Asal dari kalangan rakjat Tani, sedapat moengkin djoega mempoenjai tanah (atau orang toenanja).

Berhoeboeng dengan B. T. I. pada saat permoealan ini beloeem koet keoesanganja, kader2 ini boeat permoealan djangan mengharapkan bantuan oentoek naikahnja. Ini tidak berarti bahwa soal ini teroes diabaikan oleh organisasi. Maka dari itoe prinsipiel kadervorming ini baiknja dipikoel (walaupun sebagian atau menoeeroet ketoesatan) oleh Anak Tjabaeng (Kaonderan) yang berkepentingan, agar soepaja ini merasa dan bisa menadam tanggoeng djawab atas pembentoekan kader dan hidoepnja seteroesnja apa lagi djika ada boektinja jg. njata kelak. Sebaiknja kadernja sendiri poer bisa merasa mempoenjai kewadjaan terhadap organisasinja. Mendjadi mempermoedah djalanja pekerdjaja yang ditangoeng oleh pemimpinnja.

7. Djalanja pendidikan kader Kaonderan dari P. B. T. I. ini djadi seperti berikoet:

- Pendidikan dipoesatkan di Kaboepaten dalam asrama dengan 30 a 40 moerid, ini berarti tiap2 kaonderan mengirim 2 a 3 tjalon kader.
- Lamarja pendidikan 3 boelan.
- Pekadjaran disampingnja tentang ideologie jg. haroes diberikan oleh pemimpin B.T.I. atau badan perdjoesangan lain, djoega petadjaran pertanian yang praktis, mengenai pertanian daerah dan renjaja pekerdjaja-an yang mengenai program 2

taheen B.T.I. Peladjaran haroes praktis, mengadakan banjak ekoeroesi disekelilingnja atau keloear daerah. Diberikan oleh pegawai aktif dari Djawatan Pertanian dan lain2 (perhewanen, pengaliran dis.).

d. Moerid2 membawa sendiri oepamanja keperluan beras dll. yang haroes dipikoel oleh seloeroeh P.B.T.I. dan B.T.I. Anak Tjabaeng (Kaonderan).

e. Soedeah latihan ini selesal kader2 sepelelangnja di Kaonderan sedapat moengkin mengadakan Kernvorming dari kalangan Pemoeada Tani didesa2 (2 a 3 tiap2 desa) yang sewaktu2 mengadakan permoejawaratan oentoek mendjajarkan soetoe pekerdjaja dari rentjana. Mempeladjarj temanznja oentoek bersama2 mengerdjakan segala soetoe tanggoeng di peroesaharnja masing2.

f. Djika moengkin di Kaonderan djoega diadakan latihan, yang agak sederhana dipimpin oleh kader2 terseboet, B.T.I., P.B.T.I. dan Djawatan Pertanian.

Maka dari oerdan djatas dapat njata bahwa, oentoek mendjajarkan segala soetoe haroes ada bekerdja bersama antara B.T.I. dan Djawatan Pertanian teroetama, yang serer-erantnja. Tidak hanya oentoek keperluan latihan diastama sadja, akan tetapi teroetama latihan teroes-meneroes yang disadjaikan didalam praktek. Poen iniatief dari pegawai pertanian masih meeroepakan sjarat yang penting, oleh karena mereka lah jang soedah mengenai seloek beloeeknja rahasia didalam doenia teknik pertanian Rakjat. Sebaiknja pemimpin dari B.T.I., P.B.T.I. tidak boleh lengrh, oleh karena mereka lah jg. memberi djiwa kepada kader2 oentoek meneroeskan latihannja yang berat sampai maksoed organisasinja. Latihan ini hendaknja djidjalkan dalam 2 grombolan, mengingat adanya tenaga yang haroes menjadikaan (B.T.I., P.B.T.I. Daerah), yang dapat bantuan dari beberapa Djawatan (pertanian dll).

8. Latihan oentoek kader Kaboepaten bisa diadakan di Poesat, terpaksa haroes djajalakan soedeah pendidikan kader Kaonderan jang pertama selesal.

Tiap2 Kaboepaten 2 tjalon, mendjadi koerang lebih 130 a 150 moerid.

9. Pengeroes P.B.T.I. di Poesat hendaknja berhoeboeng dengan kadervorming ini selaloe mobil, artinja hendaknja selaloe mengadakan persoonlijk kontak dengan Tjabaeng-tjabaeng, soepaja ada uniformiteit, pimpinan dan pengawasan.

Oentoek kepentingan ini pengeroes haroes soedah penoel dapat nafkah dan keperluan ongkos dijalan.

Ichtiisar rentjana Koersoes Kader Barisan Tani. (1947).

Waktoe		Kader2 di Tjbang (Kaboepaten)		Kader dari Kaboepaten	Tjataan
Boelan	Moesim	Grombolan No. 1	Grombolan No. 2		
Djanoeari					Sebetolnja Koersoes kader2 Kaboepaten baroes didahoeloeakan ini tidak bisa berhoebong mendesahtja waktoe.
Febroeari					
Maret					
April	Moesim panen	Koersoes grombolan pertama dari kader2 dari ketjamatan dipoesatkan di Kaboepaten (3 boelan) 15 April—15 Djoeli.			Koersoes kader2 di tjbang hendaknja taboen 1948 diolangi dan diperdalam
Mai					
Djoeni					
Djoeli	Poesasa				
Agoestoes					
September	Panen gadoe	Latihan Pemoeda2 Tani dari desa2 dipoesatkan di ketjamatan (2 boelan) 15 Sept.—15 Nop.	Koersoes grombolan kedoes dari ketjamatan dipoesatkan di kaboeptaten (3 boelan) 15 Sept.—15 Des.	Koersoes kader dari Kaboepaten seloeroeh Djawa dipoesatkan di Jogjakarta (3 boelan) 1 Okt.—31 Des.	Oentoek keperluan Latihan grombolan No. 2 B.T.I. hendaknja mengoesahkan beres dis. lebih dahoeloe, agar agak ringan biasanja (Latihan dja toehnja moesim patjeklik).
Oktober	Moelai ada hoedjan petani moelai siboe				
Nopember					
Desember					
Djanoeari	Moelai patjeklik.		Latihan Pemoeda2 Tani dari desa2 dipoesatkan di ketjamatan (2 boelan) 1 Djan.—29 Febr.		
Febroeari					
Maret					

Rentjana Pengadjaran pada Koersoes Kader B. T. I.

(KADER KAONDERAN).

1. Tata Negara.
 - a. Soesoeman Pemerintah R. I.
 - b. Pokok Oendang3 B. I.
 - c. Dewan Perwakilan Ra'jat. K. N. I. Poesat. Hak dan kewadajiban Ra'jat terhadap Negara dan artinja kedaulatan ra'jat. Soesoeman Pengeroes Desa; Dewan Desa; Hak dan kewadajiban warga Desa; Dewan Perwakilan Kaboepaten;
2. Aliran3 politik. Oentoek mengenali matjam2 faham politik, diperikan dengan sederhana sakedar bekal oentoek mempejadjar pengetahoean itoe lebih laud'oet.
3. Sedjarah pergerakan Nasional.
4. Ilmoe Djiwa dan Masyarakat.
 - a. Pengetahoean tentang pergaoelan dengan rajat dan adat-istiadat di masing2 desa dan daerah.
 - b. Ilmoe berpikir di moeka kaeom Tani dan tjaranja mendidik dan membimbing kaeom Tani.
5. Pergerakan Kaeom Tani.
 - a. Azas dan toedjoean B. T. I.
 - b. Organisasi B. T. I. dan P. B. T. I.
 - c. Perdoangan B. T. I.
6. Pergerakan Boeroeh.
7. Ekonomi Pertanian.
 - a. Dasar ekonomi oemoem.
 - b. Dasar koperasi, koperasi desa.
 - c. Ilmoe peroesahaan (bedrijfsleer).
 - d. Ekonomi.
8. Hak Tanah.
 - a. Jasan dan gogolan.
 - b. Eigendom.
 - c. Eripacht.
 - d. Sewa-menjewa.
 - e. Padjag boemi.
9. Pemeliharaan Tanaman Oemoem (Aig. Plantenteelt).
 - a. Pemilihan bibit (seleksi).
 - b. Pemeliharaan tanaman dan menjimpan hasil boemi.
10. Ilmoe Pertanian Choeseoe.
 - a. Padi.
 - b. Djagong.
 - c. Ketela rambat.
 - d. Ketela pohon.
 - e. Katjang tanah.
 - f. Kedele.
 - g. Lain2 tanaman. Disoesatkan dengan keadaan dan keboetoehan masing-masing daerah, dan modenisasi.
11. Tanaman Kaeom Pekarangan (Erfcultuur).
 - a. memperbanyak hasil dari pekarangan dan koeom dengan memakai sistim menanamnja.
 - b. boesahan (oculasi dll.).
 - c. model roemah dan pekarangan.
 - d. sakedar tentang makanan sehat (voedingsleer).
12. Tanah dan tjara memperbaiki.
 - a. matjam2nja tanah dan sifatnja.

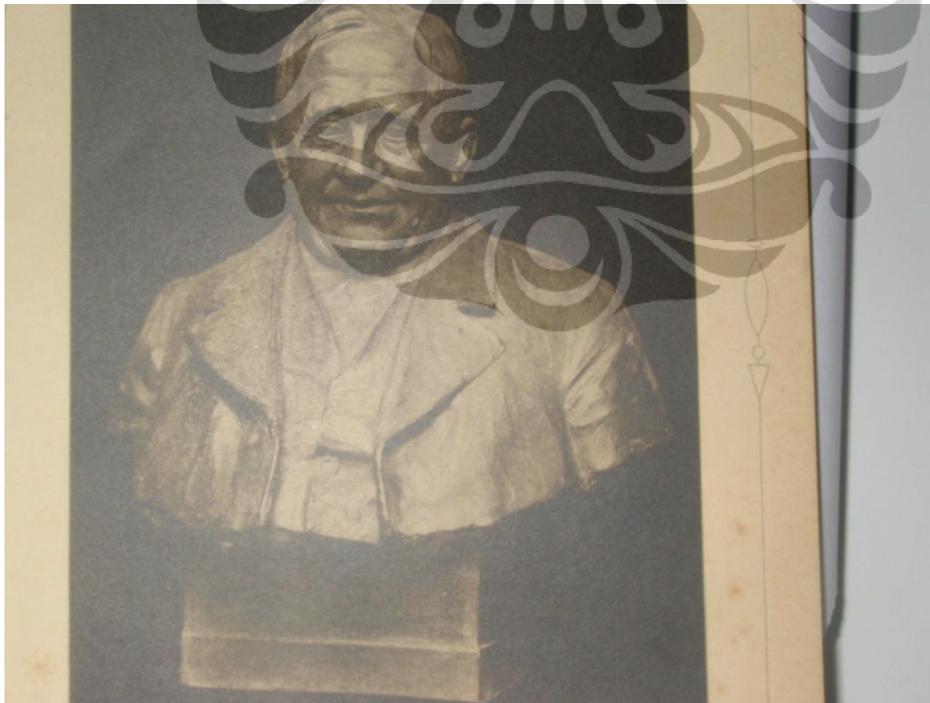
- b. memperbaiki dengan poepok; tjaranja mengerdjakan tanah daru berganti2 tanaman (vruchtwisseling).
- c. terrasseering.
13. Ilmu memoepok.
- poepok hidjau.
 - " kandang
 - " garam (kunstmas).
 - " kompos.
14. Pengairan.
- faedahnya pengairan (hydrologi).
 - sistim pengairan (saluran primer, sekundair, tertiatr).
 - pembagian air di vak2 tertiatr.
 - herbeboasching.
15. Perkakas pertanian.
- matjam2nya perkakas pertanian.
 - perloenja perkakas pertanian.
16. Hama dan penjakit.
- penjakit dan hama jang oemoem didaerah.
 - pembantasannya.
17. Perhewan.
- artinja chewan boeat petani.
- b. stalbouw dan pemeliharaan raboek.
18. Rentjana 2 tahoen B.T.I.
- modernisasi pertanian.
 - statistik pertanian, perloenja dan tjaranja mengoempolkan.
- III. KELASKARAN.
19. Berbaris.
20. Meujanji.
- IV. PRAKTEK.
- Kerdja njata.
- mengerdjakan pertanian tanah asrama atau di sekelilingnja menolong orang2 lain.
 - ekskoersi disekeliling daerah.
 - menganjil oebinan (proefsnitten).
- *
KETERANGAN.
- Peladjaran koersoes kader Kanderan lamanja paling sedikit 3 boelan di asrama, oentoek 30 a 40 pemoda.
 - Waktos oentoek peladjaran No. 1 sampai 8 haroes = 25 pCt. dari seloeroeh latihan.
3. Peladjaran2 pertanian diberikan sejara praktis, oentoek mendapatkan nasal jang njata (dalam atau diluar asrama).
4. Djika terpaksa berhoebong dengan keadaan didaerah, bebawa peladjaran (les) dapat diperpendek atau dihapoeskan, dengan tidak meninggalkan asas, bahwa boekti jang njawa kami toedjoe.
5. Rentjana keueangan biasa2 koersoes akan diberikan menjoesol.
6. Petoendjoe2 tentang boekoe2 oentoek toentoenan mengadjar akan diberikan dengan instruksi dari Badan Pendidikan Pempinan Poesat.
7. Oentoek baiknja pekerdjaan soepaja Tjgbang berhoebong dan bekerdja bersama-sama dengan Djawatan2 jang bersangkoean serta dengan organisasi Rakjat jang sesoeal dengan maksoed toedjoean B.T.I. dan bersedia membantoe terlaksananja program B.T.I.

Pembagian djam peladjaran selama tiga boelan SEKEDAR ANTJER ANTJER.

No.	Nama peladjaran	Berapa kali	Keterangan
1.	Tata Negara	20	a. 6. b. 4. c. 10.
2.	Ajaran2 politik	10	
3.	Sejarah pergerakan Indonesia	8	
4.	Ilmu Djawa dan Masyarakat	24	a. 8. b. 6. c. 10.
5.	Pergerakan kaum Tani	10	a. 2. b. 4. c. 4.
6.	Pergerakan Boeroeh	6	
7.	Ekonomi	16	a. 2. b. 6. c. 3. d. 4.
8.	Hak tanah	10	masing2 2 kali.

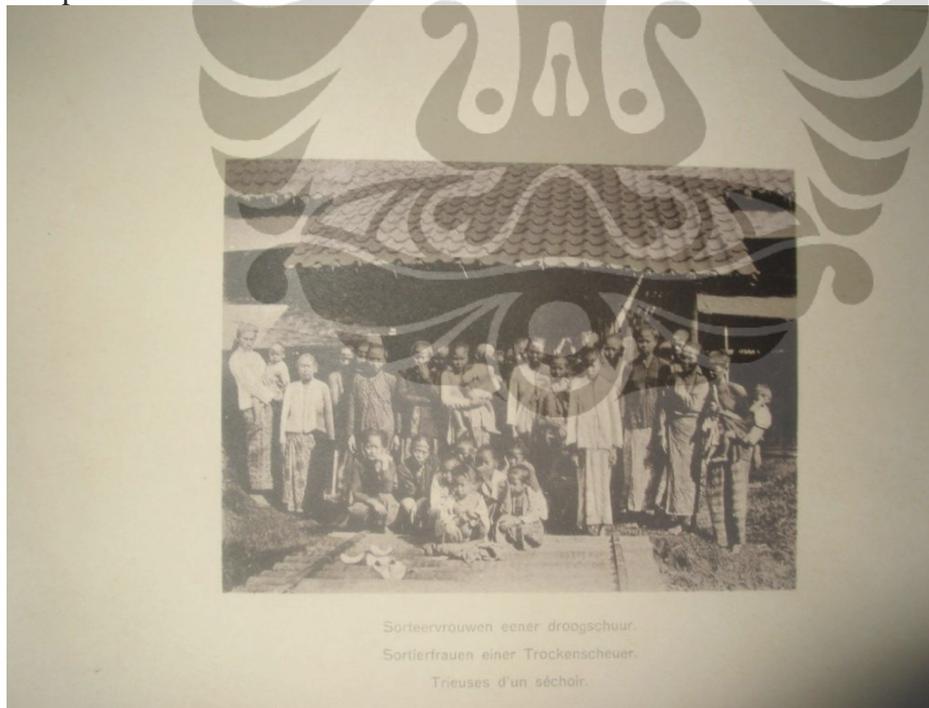
KETERANGAN.

- Tiap2 peladjaran dihoeng 1½ djam atau 1 djam. Boeat praktek 2½ djam.
- Praktek dan ketenteraan (berganti2) moelai pk. 6 sampai 8.30 atau waktos sore sesoedah itoe beristirahat 1 djam, kemoedian moelai peladjaran theorie.
- Diwaktos tidak ada praktek atau ketenteraan, peladjaran di moelai pk. 8 pagi. Satoe hari 5 peladjaran (8-9.30, 10-11.30, 12-13.30, 16-17, 19.30-21.).
- Hari Djoean'at sampai djam 11.30. Hari Sabtoe sampai djam 11.30, kemoedian sesoedah itoe sampai hari Minggoenja berexcursie ke luar kota kedesa2, mengoempolkan bahan2 pengetahuan, atau melihat tempa2 penting bagi keperluan peladjarannya (pertanian, peroesahaan, pabrik).
- Pembagian peladjaran "pertanian" dibagi oleh goeroe2 jang mengadjar jang masing2 mengingat kepentingan peladjarannya, menoeoret keadaan daerah.
- Sedikitnja seminggoe sekali, pada waktos malam diadakan sarnesahan, soal djawab diantara peladjar2, dengaw diberi pokok pembtjaraan dari goeroe atau mentjari sendiri, oentoek beladjar memetjahkan sesoetoe soal. Goeroe baik hadir, tetapi djangan sampai mengoerangi kemandekaan peladjar2 dalam melahirkan pikirannya.
- Tiap2 waktos jang tertentoe diadakan pekerdjaan oentoek oemoem (membersihkan djalan, koeboran, selokan2, membocot lobang tempat sampah boeat kompos dipekarangan orang2 dll.).
- Diwaktos ada rapat desa atau Dewan Perwakilian lainnya (Kaboepaten, Karesidenan) dimungkinkan oentoek koeruet hadir, oentoek praktek peladjaran.
- Oleh karena oemoemnja Tjgbang2 soedah mengadakan latihan2 jang mengenal ideologi, maka tempo 3 boelan dapat di koerangi, dengan mengoetamakan pengetahuan pertanian dsb. Sekalipoen sesoenggoenja 3 boelanpoen be loem mentjoekeopi, tetapi mengingat lekasnja tenaga itoe dibotoehkan oleh Anak Tjgbangnja, boeat semerata dapat dilakoekan seperti diatas, dengan maksoed akan dioelang lagi kelak.
- Petoendjoe2 ini hanja sekedar pedoman belaka, sedang praktiknya dapat disesuaikan dengan keadaan, mengingat ukat2, goeroe dll.

Lampiran Foto No. 1¹Lampiran Foto No. 2²

¹ Foto ini didapat dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Jember.

² Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905 Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherland.

Lampiran Foto No. 3³Lampiran Foto No. 4⁴

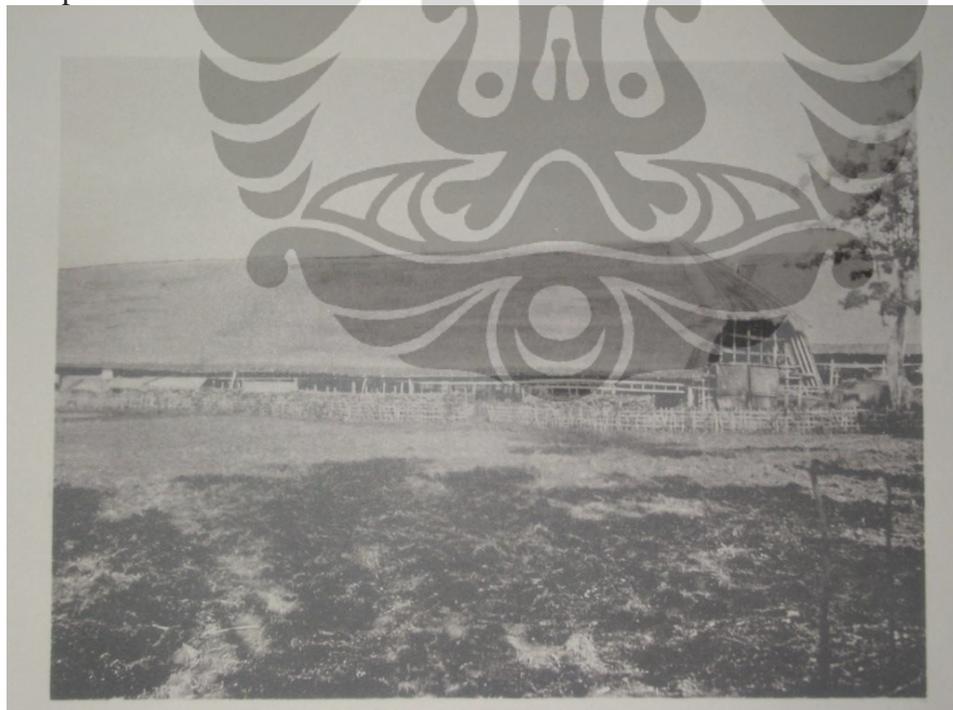
³ Foto ini didapat dari Landbouw LMOD 1859 – 1905 Koninklijk Instituut voor Taal, Land - en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Netherland.

⁴ *Ibid.*

Lampiran Foto No. 5⁵Lampiran Foto No. 6⁶

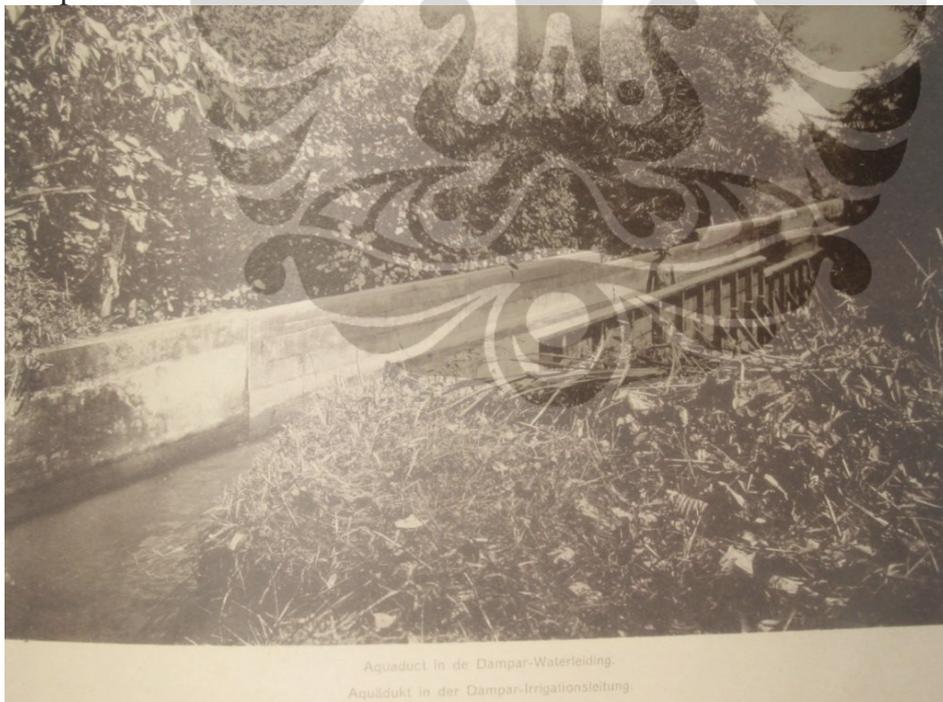
⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

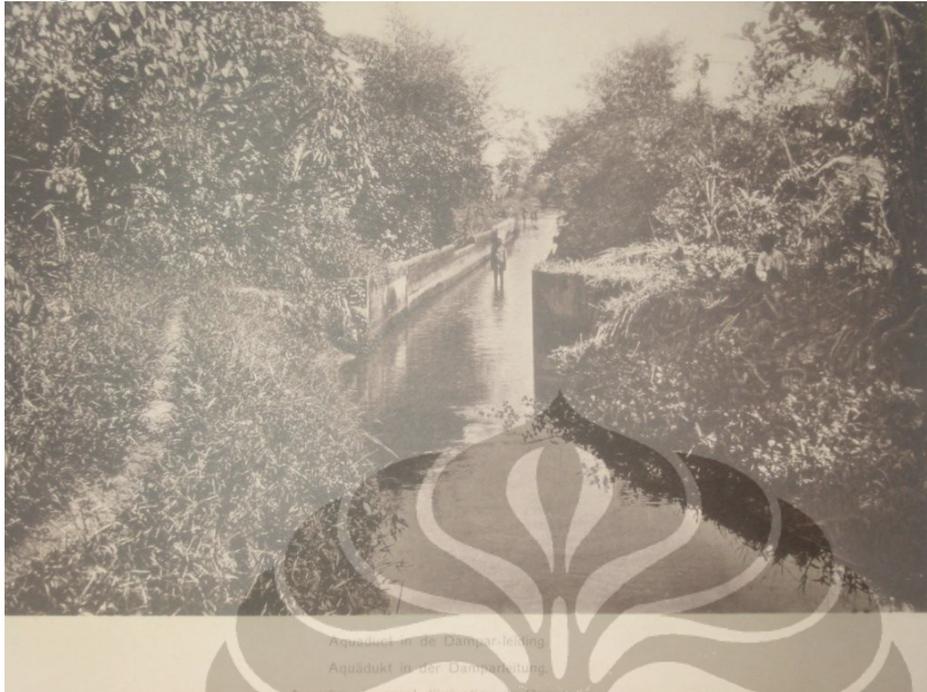
Lampiran Foto No. 7⁷Lampiran Foto No. 8⁸

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Lampiran Foto No. 9⁹Lampiran Foto No. 10¹⁰

⁹ *Ibid*
¹⁰ *Ibid*

Lampiran Foto No. 11¹¹Lampiran Foto No. 12¹²

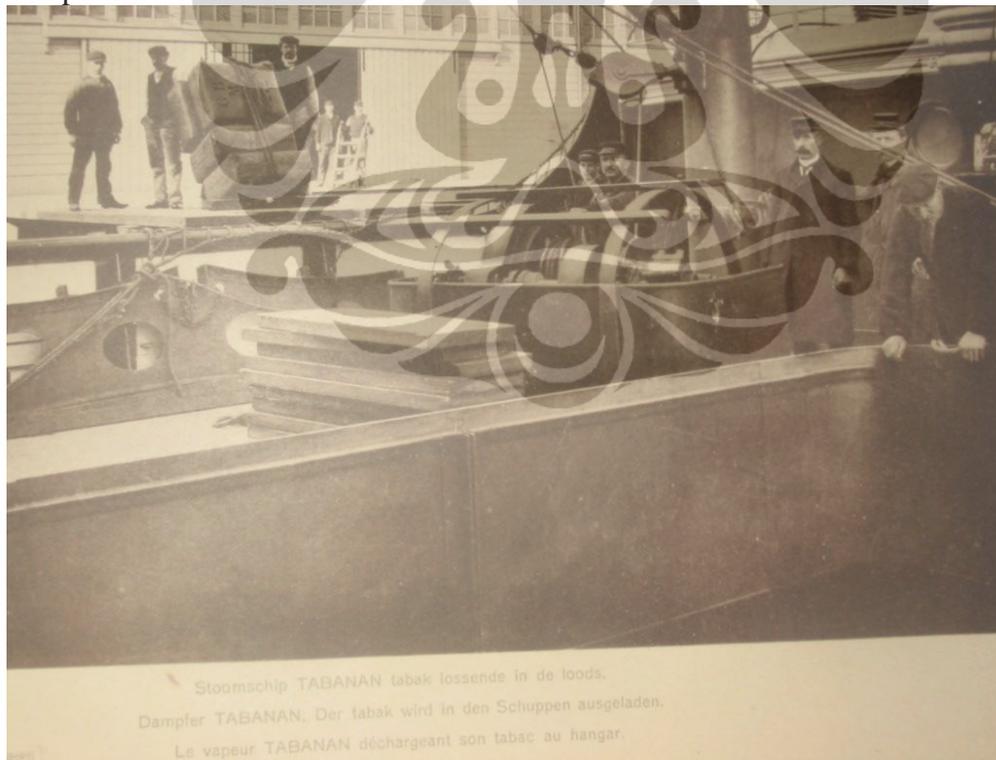
¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Lampiran Foto No. 13¹³Lampiran Foto No. 14¹⁴

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

Lampiran Foto No. 15¹⁵Lampiran Foto No. 16¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Lampiran Foto No. 17¹⁷Lampiran Foto No. 18¹⁸

Sebagai akibat politik bumi-hangus yang dijalankan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan selama agresi Belanda pada tahun 1947 dan 1948-1949, maka banjak kebun-kebun yang rusak dan hilang sifatnya sama sekali sebagai kebun. Pada gambar diatas tampak bekas kebun kopi dan karet yang telah gundul dan berubah menjadi ladang.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Foto diambil dari Laporan Djawata Penerangan Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur. *Prpinsi Jawa Timur*. Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950.

Lampiran Foto No. 19¹⁹Lampiran Foto No. 20²⁰

¹⁹ Foto didapat dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember.

²⁰ *Ibid*

Lampiran Foto No. 21²¹Lampiran Foto No. 22²²

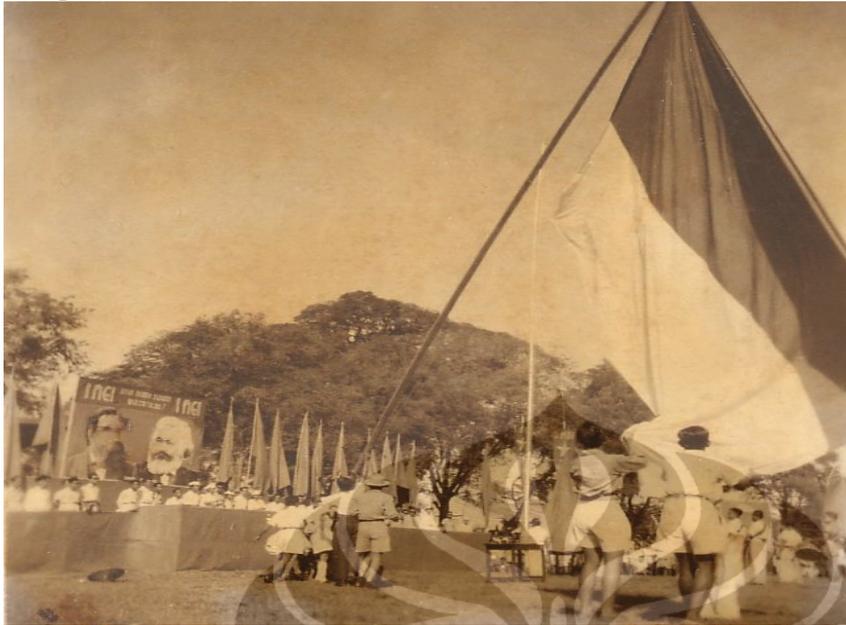
²¹ Foto didapat dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember.

²² *Ibid*

Lampiran Foto No. 23²³Lampiran Foto No. 24²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Lampiran Foto No. 25²⁵Lampiran Foto No. 26²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Lampiran Foto No. 27²⁷Lampiran Foto No. 28²⁸

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Lampiran Foto No. 29²⁹Lampiran Foto No. 30³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

Lampiran Foto No. 31³¹Lampiran Foto No. 32³²

³¹ Foto Koleksi pribadi

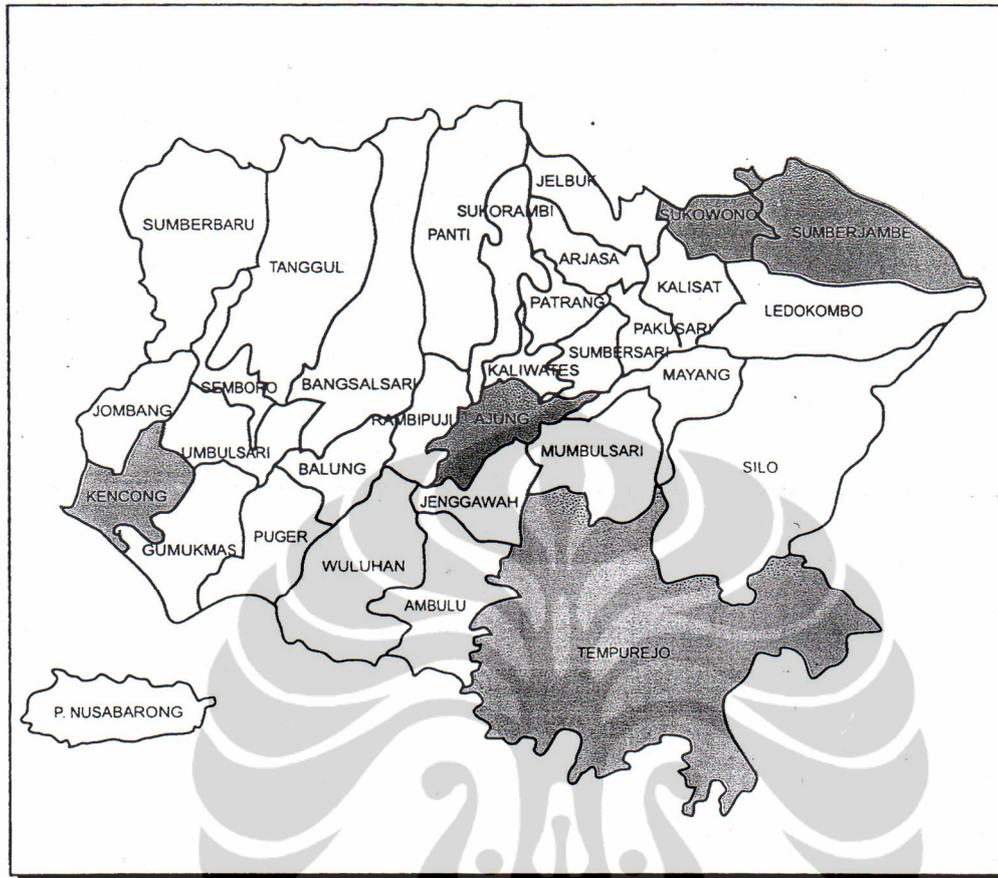
³² Foto didapat dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember.

Lampiran Foto No. 33³³Lampiran Foto No. 34³⁴

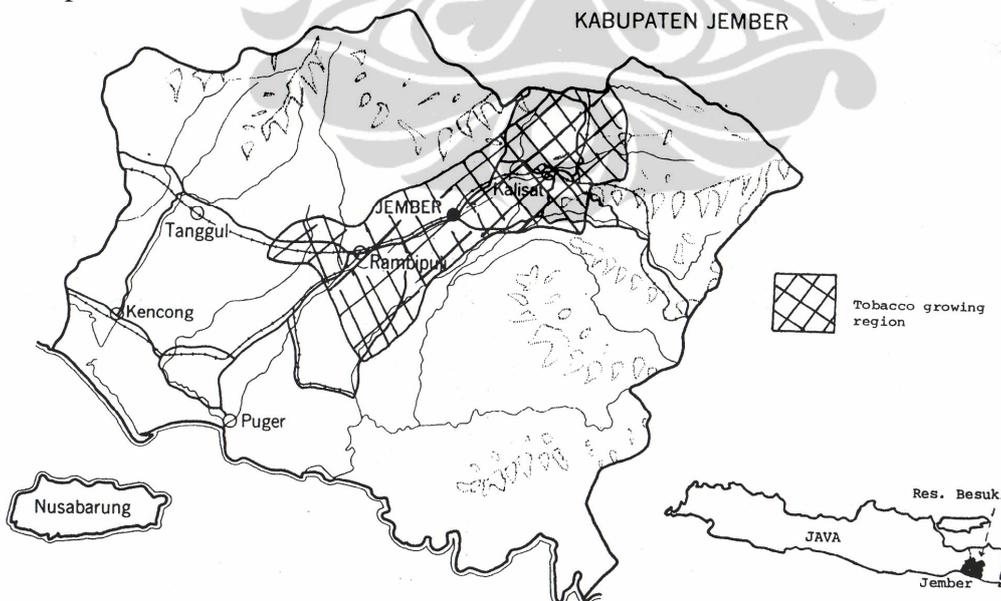
³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Lampiran Peta No. 1



Lampiran Peta No. 2



Lampiran Peta No. 3

